Editor :
Dr. Rudi Hardi. M.Si
Dr. Syukri, S.Sos. M.Si.

SOSIOLOGI KOMUNIKASI

Gagasan Sembilan Tokoh Klasik Hingga Era Digital



Dr. Muhammad Yahya, M.Si | Dr. Ahdan Sinilele, S.Ag, S.Sos, M.Si
Dr Asni Djamereng, M.Si | Dr Maemunah, S.Ag, M.Pd
Dr. I Ketut Yakobus, S.Th. M.Si | Dr Sudirman, S.Pd. M.Si
Dr. Ahmad Al Yakin, S.Ag, M.Pd | Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si
Dr. Silahuddin Genda, S.IP. M.Si

SOSIOLOGI KOMUNIKASI

Gagasan Sembilan Tokoh Klasik Hingga Era Digital



Buku Sosiologi Komunikasi: Gagasan Sembilan Tokoh Klasik Hingga Era Digital menyajikan pembacaan komprehensif dan kritis tentang komunikasi sebagai fondasi ontologis kehidupan sosial. Melalui pemikiran sembilan tokoh kunci—mulai dari Ibnu Khaldun, Émile Durkheim, dan Max Weber, hingga George Herbert Mead, Erving Goffman, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Manuel Castells, dan Shoshana Zuboff—buku ini menelusuri bagaimana komunikasi berperan dalam membentuk solidaritas sosial, identitas, legitimasi kekuasaan, interaksi sehari-hari, ruang publik, hingga mekanisme kontrol sosial modern.

Disusun secara historis, sistematis, dan analitis, buku ini menunjukkan pergeseran besar komunikasi: dari sarana integrasi dan pemaknaan sosial, menuju arsitektur jaringan global, platform digital, datafikasi perilaku, dan algoritma prediktif. Dengan menggabungkan tradisi klasik, mikro-sosiologis, teori kritis, hingga kajian masyarakat digital, buku ini menegaskan bahwa komunikasi selalu menjadi arena pertarungan makna dan kekuasaan. Karya ini ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang ingin memahami tantangan teoretis dan etis sosiologi komunikasi di era masyarakat digital kontemporer.

eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-634-271-523-9
9 786342 715239

SOSIOLOGI KOMUNIKASI

Gagasan Sembilan Tokoh Klasik hingga Era Digital

Penulis :
Dr. Muhammad Yahya, M.Si
Dr. Ahdan Sinilele, S.Ag, S.Sos, M.Si
Dr Asni Djamereng, M.Si
Dr Maemunah, S.Ag, M.Pd
Dr. I Ketut Yakobus, S.Th. M.Si
Dr Sudirman, S.Pd. M.Si
Dr. Ahmad Al Yakin, S.Ag, M.Pd
Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si
Dr. Silahuddin Genda, S.IP. M.Si

Editor :
Dr. Rudi Hardi. M.Si
Dr. Syukri, S.Sos. M.Si.

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

SOSIOLOGI KOMUNIKASI
Gagasan Sembilan Tokoh Klasik hingga Era Digital

Penulis : Dr. Muhammad Yahya, M.Si
Dr. Ahdan Sinilele, S.Ag, S.Sos, M.Si
Dr Asni Djamereng, M.Si
Dr Maemunah, S.Ag, M.Pd
Dr. I Ketut Yakobus, S.Th. M.Si
Dr Sudirman, S.Pd. M.Si
Dr. Ahmad Al Yakin, S.Ag, M.Pd
Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si
Dr. Silahuddin Genda, S.IP. M.Si

Editor : Dr. Rudi Hardi. M.Si
Dr. Syukri, S.Sos. M.Si.

Desain Sampul : Firman Isma'il

Tata Letak : Irma Puspitaningrum

ISBN : 978-634-271-523-9

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2026**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2026

All right reserved
Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "**Sosiologi Komunikasi: Gagasan Sembilan Tokoh Klasik hingga Era Digital**". Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini terbagi menjadi 9 bab yang membahas:

Bab 1 Ibnu Khaldun: Solidaritas Sosial, Narasi, dan Legitimasi Kekuasaan
Bab 2 Émile Durkheim: Simbol, Ritual, dan Kesadaran Kolektif
Bab 3 Max Weber: Makna, Tindakan Sosial dan Otoritas
Bab 4 George Herbert Mead: Interaksi Simbolik dan Pembentukan Diri
Bab 5 Erving Goffman: Dramaturgi, Presentasi Diri, dan Manajemen Kesan
Bab 6 Pierre Bourdieu: Bahasa, Simbol, dan Kekuasaan
Bab 7 Jürgen Habermas: Tindakan Komunikatif dan Ruang Publik
Bab 8 Manuel Castells: Masyarakat Jaringan dan Kekuasaan Informasi
Bab 9 Shoshana Zuboff: Komunikasi, Data, dan Kapitalisme Pengawasan

Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Para Penulis

PENGANTAR EDITOR

Perubahan sosial yang kita alami dewasa ini—ditandai oleh ekspansi media digital, transformasi ruang publik, serta semakin kompleksnya relasi antara komunikasi, kekuasaan, dan teknologi—menuntut pembacaan ulang terhadap fondasi teoretis ilmu sosial, khususnya sosiologi komunikasi.

Komunikasi tidak lagi dapat dipahami semata sebagai proses penyampaian pesan atau fungsi teknis media, melainkan sebagai mekanisme sosial fundamental yang membentuk solidaritas, legitimasi, identitas, dan kontrol sosial. Pada aspek inilah buku *Sosiologi Komunikasi: Gagasan Sembilan Tokoh Klasik Hingga Era Digital* memperoleh signifikansi akademik dan relevansi kontemporer yang kuat.

Buku ini sebagai sebuah upaya kolektif yang matang dan reflektif untuk menempatkan sosiologi komunikasi dalam lintasan sejarah pemikiran sosial yang panjang—dari fondasi klasik hingga kritik mutakhir terhadap masyarakat digital. Buku ini tidak menyajikan teori komunikasi secara ahistoris atau terfragmentasi, tetapi membangun narasi intelektual yang koheren melalui dialog sembilan tokoh kunci: Ibnu Khaldun, Émile Durkheim, Max Weber, George Herbert Mead, Erving Goffman, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Manuel Castells, dan Shoshana Zuboff.

Keputusan membuka pembahasan dengan Ibnu Khaldun menegaskan sikap epistemologis buku ini: bahwa sosiologi komunikasi tidak lahir secara eksklusif dari modernitas Barat, melainkan memiliki akar yang lebih luas dan lintas peradaban. Konsep *'ashabiyyah*, narasi kekuasaan, dan siklus peradaban menunjukkan bahwa sejak awal, kekuasaan dan solidaritas bersifat komunikatif dan simbolik. Dari sini, pembaca diajak memahami bahwa komunikasi selalu menjadi prasyarat bagi keberlangsungan tatanan sosial, bahkan sebelum sosiologi dilembagakan sebagai disiplin ilmiah.

Melalui Durkheim dan Weber, buku ini memperlihatkan bagaimana komunikasi berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial dan legitimasi otoritas dalam masyarakat modern. Simbol,

ritual, bahasa hukum, dan rasionalisasi birokrasi menunjukkan bahwa keteraturan sosial tidak bertumpu pada paksaan semata, melainkan pada keberhasilan komunikasi normatif yang diterima sebagai sah. Pada titik ini, komunikasi tampil sebagai fondasi ontologis masyarakat, bukan sekadar instrumen tambahan.

Dimensi mikro kehidupan sosial mendapat perhatian khusus melalui pemikiran Mead dan Goffman. Keduanya menegaskan bahwa struktur sosial hanya dapat dipahami sejauh ia direproduksi dalam interaksi simbolik sehari-hari. Identitas, peran, dan norma tidak bersifat statis, tetapi dipentaskan, dinegosiasikan, dan distabilkan melalui praktik komunikasi. Pendekatan ini memberikan keseimbangan penting antara analisis struktur dan agensi, serta menunjukkan bahwa perubahan sosial sering kali bermula dari pergeseran makna pada level mikro.

Kritik terhadap komunikasi sebagai arena kekuasaan dikembangkan lebih jauh melalui Bourdieu dan Habermas. Ketegangan produktif antara komunikasi sebagai arena dominasi simbolik (Bourdieu) dan komunikasi sebagai horizon normatif emansipasi (Habermas) disajikan dalam buku ini bukan sebagai pertentangan sederhana, melainkan sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Pembaca diajak memahami bahwa komunikasi publik selalu berada dalam tarikan antara ketimpangan struktural dan tuntutan etis demokrasi deliberatif.

Refleksi buku ini mencapai puncaknya pada pembahasan masyarakat digital melalui Castells dan Zuboff. Komunikasi tidak lagi terikat pada ruang sosial yang stabil, tetapi bergerak dalam jaringan global informasi, platform digital, dan algoritma. Dalam masyarakat jaringan, kekuasaan ditentukan oleh konektivitas dan visibilitas; sementara dalam kapitalisme pengawasan, komunikasi bahkan direduksi menjadi data perilaku dan instrumen kontrol prediktif. Bagian ini menegaskan bahwa sosiologi komunikasi hari ini tidak cukup menganalisis pesan dan media, tetapi harus menelaah arsitektur komunikasi itu sendiri.

Buku ini memiliki kontribusi strategis bagi pengembangan kajian sosiologi komunikasi di Indonesia. Pertama, buku ini memperkaya literatur akademik dengan pendekatan yang teoretis,

historis, dan kritis. Kedua, ia sangat relevan sebagai buku ajar dan referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti ilmu komunikasi, sosiologi, dan ilmu sosial. Ketiga, buku ini membuka ruang refleksi normatif tentang masa depan komunikasi di tengah dominasi data, algoritma, dan logika pasar digital.

Lewat buku ini mengingatkan kita bahwa masa depan masyarakat adalah masa depan komunikasi. Tantangan terbesar sosiologi komunikasi ke depan bukan hanya memahami teknologi baru, tetapi mempertahankan komunikasi sebagai praktik sosial yang bermakna, etis, dan membebaskan. Saya berharap buku ini tidak hanya dibaca sebagai kompilasi pemikiran para tokoh besar, tetapi sebagai undangan intelektual untuk terus mengkritisi dan merumuskan kembali peran komunikasi dalam membangun masyarakat yang adil, reflektif, dan manusiawi

Buku *Sosiologi Komunikasi: Gagasan Sembilan Tokoh Klasik Hingga Era Digital* merupakan karya kolektif yang melibatkan para akademisi dari berbagai latar keilmuan dan pengalaman riset. Setiap bab ditulis oleh penulis yang secara khusus mendalami tokoh dan perspektif teoretis yang dibahas, sehingga memberikan kedalaman analisis sekaligus kekayaan sudut pandang.

Kontribusi penulis dalam buku ini adalah sebagai berikut:

1. Bab 1–Ibnu Khaldun: Solidaritas Sosial, Narasi, dan Legitimasi Kekuasaan
   ditulis oleh Dr. Muhammad Yahya, M.Si, mengelaborasi pemikiran Ibnu Khaldun sebagai fondasi awal sosiologi komunikasi melalui konsep *'ashabiyyah*, narasi kekuasaan, dan siklus peradaban.
2. Bab 2 – Émile Durkheim: Simbol, Ritual, dan Kesadaran Kolektif
   ditulis oleh Dr. Ahdan Sinilele, S.Sos., M.Si, membahas komunikasi sebagai mekanisme integrasi sosial melalui simbol dan ritual kolektif dalam masyarakat modern.
3. Bab 3 – Max Weber: Makna, Tindakan Sosial, dan Otoritas
   ditulis oleh Dr. Asni Djamereng, M.Si, menyoroti peran komunikasi dalam pembentukan makna, legitimasi otoritas, dan rasionalisasi tindakan sosial.

4. Bab 4 – George Herbert Mead: Interaksi Simbolik dan Pembentukan Diri
   ditulis oleh Dr. Maemunah, S.Ag., M.Pd, menguraikan komunikasi sebagai proses konstitutif pembentukan *self*, identitas, dan kehidupan sosial mikro.
5. Bab 5 – Erving Goffman: Dramaturgi, Presentasi Diri, dan Manajemen Kesan
   ditulis oleh Dr. I Ketut Yakobus, S.Th., M.Si, menganalisis komunikasi sebagai pertunjukan sosial dan praktik manajemen kesan dalam interaksi sehari-hari, termasuk relevansinya di era media sosial.
6. Bab 6 – Pierre Bourdieu: Bahasa, Simbol, dan Kekuasaan
   ditulis oleh Dr. Sudirman, M.Si, mengkaji komunikasi sebagai arena dominasi simbolik, distribusi modal linguistik, dan reproduksi ketimpangan sosial.
7. Bab 7 – Jürgen Habermas: Tindakan Komunikatif dan Ruang Publik
   ditulis oleh Dr. Ahmad Al Yakin, S.Ag., M.Pd. yang mengulas dimensi normatif komunikasi, rasionalitas komunikatif, serta relevansi ruang publik bagi demokrasi kontemporer.
8. Bab 8 – Manuel Castells: Masyarakat Jaringan dan Kekuasaan Informasi
   ditulis oleh Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si, membahas transformasi komunikasi dalam masyarakat jaringan, arus informasi global, dan kekuasaan berbasis konektivitas.
9. Bab 9 – Shoshana Zuboff: Komunikasi, Data, dan Kapitalisme Pengawasan
   ditulis oleh Dr. Silahuddin Genda, S.IP. M.Si , menganalisis komunikasi digital dalam rezim kapitalisme pengawasan, datafikasi perilaku, dan implikasi etis serta politiknya.

Kehadiran para penulis dengan latar belakang dan kepakaran yang beragam memperkaya buku ini sebagai ruang dialog intelektual antara teori klasik dan tantangan masyarakat digital. Dengan pendekatan yang analitis dan kritis, setiap bab tidak

hanya merekonstruksi pemikiran tokoh, tetapi juga mengaitkannya secara reflektif dengan problematika komunikasi kontemporer.

Makassar, Januari 2026
Editor:

Dr. Rudi Hardi, M.Si
Dr. Syukri, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
PENGANTAR EDITOR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **ix**
PENDAHULUAN UMUM ..... **xii**
BAB 1 IBNU KHALDUN: SOLIDARITAS SOSIAL, NARASI, DAN LEGITIMASI KEKUASAAN
Oleh : Dr. Muhammad Yahya, M.Si **1**
A. Aspek Historis dan Intelektual Ibnu Khaldun 3
B. Konsep *Ashabiyyah* sebagai Mekanisme Komunikasi Sosial 8
C. Komunikasi, Kekuasaan, dan Stabilitas Peradaban 12
D. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun bagi Sosiologi Komunikasi Modern 19
E. Profil Ibnu Khaldun 25
DAFTAR PUSTAKA 28
BAB 2 ÉMILE DURKHEIM: SIMBOL, RITUAL, DAN KESADARAN KOLEKTIF
Oleh : Dr. Ahdan Sinilele, S.Ag, S.Sos, M.Si **29**
A. Fakta Sosial dan Fungsi Simbol 33
B. Ritual sebagai Proses Komunikasi Sosial 41
C. Integrasi Sosial dan Moral Kolektif 47
D. Kontribusi Durkheim terhadap Sosiologi Komunikasi 52
E. Profil Émile Durkheim 60
DAFTAR PUSTAKA 63
BAB 3 MAX WEBER: MAKNA, TINDAKAN SOSIAL DAN OTORITAS
Oleh : Dr Asni Djamereng, M.Si **64**
A. Tindakan Sosial dan Pemahaman (*Verstehen*) 68
B. Komunikasi sebagai Proses Pemberian Makna 77
C. Legitimasi Otoritas dan Bahasa Kekuasaan 82
D. Weber dan Fondasi Sosiologi Komunikasi Interpretatif 89
E. Profil Intelektual dan Kontribusinya 92
DAFTAR PUSTAKA 95

BAB 4 GEORGE HERBERT MEAD: INTERAKSI SIMBOLIK DAN PEMBENTUKAN DIRI
Oleh : Dr Maemunah, S.Ag, M.Pd 96
A. Bahasa dan Simbol dalam Interaksi Sosial 99
B. Konsep *Self*, *Mind*, dan *Society* 104
C. Komunikasi sebagai Proses Pembentukan Identitas 116
D. Peran Mead dalam Sosiologi Komunikasi Mikro 120
E. Profil Intelektual dan Kontribusinya 125
DAFTAR PUSTAKA 128
BAB 5 ERVING GOFFMAN: DRAMATURGI, PRESENTASI DIRI, DAN MANAJEMEN KESAN
Oleh : Dr. I Ketut Yakobus, S.Th. M.Si 129
A. Interaksi Sosial sebagai Pertunjukan 136
B. *Front Stage*, *Back Stage*, dan Peran Sosial 144
C. Komunikasi Nonverbal dan Kesan Sosial 149
D. Relevansi Goffman di Era Media Sosial 156
E. Profil Intelektual dan Kontribusinya 161
DAFTAR PUSTAKA 163
BAB 6 PIERRE BOURDIEU: BAHASA, SIMBOL, DAN KEKUASAAN
Oleh : Dr Sudirman, S.Pd. M.Si 164
A. Habitus, Modal, dan Arena Sosial 170
B. Kekuasaan Simbolik dalam Bahasa dan Komunikasi 175
C. Dominasi dan Reproduksi Sosial 180
D. Bourdieu dalam Perspektif Sosiologi Komunikasi Kritis 186
E. Profil Intelektual dan Kontribusinya 192
DAFTAR PUSTAKA 194
BAB 7 JÜRGEN HABERMAS: TINDAKAN KOMUNIKATIF DAN RUANG PUBLIK
Oleh : Dr. Ahmad Al Yakin, S.Ag, M.Pd 195
A. Pengantar Pemikiran Jürgen Habermas dalam Sosiologi Komunikasi 195
B. Tindakan Komunikatif dan Rasionalitas Dialogis ... 198

C. Bahasa, Klaim Validitas, dan Etika Komunikasi Publik 201
D. Ruang Publik dan Pembentukan Opini di Masyarakat Jaringan 204
E. Distorsi Komunikasi: Disinformasi, Polarisasi, dan Kolonialisasi Ruang Publik 207
F. Relevansi Teori Habermas bagi Sosiologi Komunikasi Kontemporer 210
G. Profil Intelektual dan Kontribusinya 213
DAFTAR PUSTAKA 216
BAB 8 MANUEL CASTELLS: MASYARAKAT JARINGAN DAN KEKUASAAN INFORMASI
Oleh : Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si 217
A. Logika Jaringan dalam Masyarakat Modern 220
B. Media Digital dan Transformasi Komunikasi 229
C. Kekuasaan dalam Arus Informasi Global 236
D. Castells dan Sosiologi Komunikasi Digital 244
E. Profil Intelektual dan Kontribusinya 246
DAFTAR PUSTAKA 249
BAB 9 SHOSHANA ZUBOFF: KOMUNIKASI, DATA, DAN KAPITALISME PENGAWASAN
Oleh : Dr. Silahuddin Genda, S.IP. M.Si 250
A. Dari Komunikasi ke Data Perilaku 255
B. Logika Kapitalisme Pengawasan 262
C. Kekuasaan dalam Arus Informasi Global 267
D. Algoritma, Prediksi, dan Kontrol Sosial 270
E. Tantangan Etis Sosiologi Komunikasi di Era Digital 272
F. Profil Intelektual dan Kontribusinya 275
DAFTAR PUSTAKA 277
PENUTUP 278
DAFTAR PUSTAKA 291
TENTANG PENULIS 292

PENDAHULUAN UMUM

Sosiologi Komunikasi sebagai Kerangka Memahami Masyarakat

Komunikasi merupakan salah satu dimensi paling mendasar dalam kehidupan sosial. Melalui komunikasi, manusia membangun solidaritas, membentuk identitas, menegakkan kekuasaan, serta memproduksi dan menegosiasikan makna tentang dunia sosialnya. Oleh karena itu, komunikasi tidak dapat dipahami semata sebagai proses teknis penyampaian pesan, melainkan sebagai mekanisme sosial konstitutif yang memungkinkan masyarakat hadir, bertahan, dan berubah. Inilah pijakan utama sosiologi komunikasi sebagai bidang kajian dalam ilmu sosial.

Buku *Sosiologi Komunikasi: Gagasan Sembilan Tokoh Klasik Hingga Era Digital* disusun berangkat dari kesadaran bahwa pemahaman tentang komunikasi selalu berkembang seiring dengan transformasi masyarakat. Sejak masyarakat tradisional yang ditopang oleh solidaritas kelompok, hingga masyarakat modern dan digital yang ditandai oleh rasionalisasi, jaringan global, dan algoritma, komunikasi senantiasa menjadi medan utama tempat relasi sosial diproduksi dan dipertarungkan. Dengan demikian, sosiologi komunikasi tidak hanya berbicara tentang media atau interaksi, tetapi tentang struktur dan dinamika masyarakat itu sendiri.

Pendahuluan ini menegaskan bahwa sosiologi komunikasi memiliki akar teoretis yang kuat dalam tradisi sosiologi klasik. Pemikiran Ibnu Khaldun telah lebih awal menunjukkan bahwa kekuasaan dan peradaban bertumpu pada solidaritas sosial dan narasi legitimasi. Émile Durkheim menegaskan peran simbol dan ritual dalam membangun kesadaran kolektif, sementara Max Weber memperlihatkan bagaimana makna, bahasa, dan komunikasi menjadi dasar legitimasi otoritas dalam masyarakat modern. Pemikiran-pemikiran ini menempatkan komunikasi sebagai elemen sentral dalam keteraturan sosial.

Pada level mikro, sosiologi komunikasi diperkaya oleh pemikiran George Herbert Mead dan Erving Goffman, yang menunjukkan bahwa struktur sosial hanya dapat dipahami sejauh ia direproduksi dalam interaksi simbolik sehari-hari. Identitas, peran, dan norma bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan hasil praktik komunikasi yang berulang, situasional, dan kontekstual. Pendekatan ini menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar refleksi struktur sosial, tetapi juga sumber perubahan sosial.

Perkembangan masyarakat modern dan kontemporer menghadirkan persoalan baru yang semakin kompleks. Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa komunikasi tidak pernah netral, karena selalu terstruktur oleh distribusi modal simbolik yang timpang. Sementara itu, Jürgen Habermas menempatkan komunikasi sebagai dasar normatif kehidupan demokratis melalui konsep tindakan komunikatif dan ruang publik. Ketegangan antara komunikasi sebagai arena dominasi dan komunikasi sebagai sarana emansipasi menjadi salah satu tema sentral dalam sosiologi komunikasi kritis.

Memasuki era digital, komunikasi mengalami transformasi struktural yang mendalam. Manuel Castells menunjukkan bahwa masyarakat kini diorganisasikan oleh jaringan dan arus informasi global, di mana kekuasaan ditentukan oleh konektivitas dan visibilitas. Lebih jauh lagi, Shoshana Zuboff memperlihatkan bahwa komunikasi digital telah direduksi menjadi data perilaku dan dijadikan bahan mentah dalam rezim kapitalisme pengawasan.

Pada aspek ini, komunikasi tidak hanya memproduksi makna, tetapi juga menjadi instrumen prediksi dan kontrol sosial.

Buku ini disusun untuk menghadirkan lintasan intelektual yang utuh tentang sosiologi komunikasi—dari fondasi klasik hingga tantangan masyarakat digital. Setiap bab tidak hanya merekonstruksi pemikiran tokoh yang dibahas, tetapi juga mengaitkannya secara kritis dengan problematika komunikasi kontemporer. Dengan pendekatan ini, pembaca diharapkan tidak sekadar memahami teori, tetapi mampu melihat relevansi dan daya

jelaskan sosiologi komunikasi dalam membaca realitas sosial hari ini.

Pendahuluan umum ini sekaligus menegaskan tujuan utama buku, yaitu memberikan kerangka konseptual dan analitis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk memahami komunikasi sebagai fenomena sosial yang kompleks, historis, dan sarat kekuasaan. Di tengah dominasi teknologi, data, dan algoritma, sosiologi komunikasi dihadapkan pada tantangan besar: bukan hanya menjelaskan perubahan komunikasi, tetapi mempertahankan komunikasi sebagai praktik sosial yang bermakna, etis, dan membebaskan.

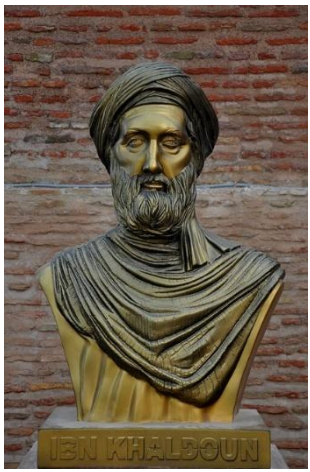
Buku ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik yang memperkaya kajian sosiologi komunikasi di Indonesia, sekaligus membuka ruang dialog kritis antara tradisi klasik dan realitas masyarakat digital. Pendahuluan ini menjadi titik awal bagi pembaca untuk menelusuri bagaimana komunikasi, dalam berbagai bentuk dan konteksnya, selalu menjadi kunci untuk memahami masyarakat.

Editor

BAB 1

IBNU KHALDUN: SOLIDARITAS SOSIAL, NARASI, DAN LEGITIMASI KEKUASAAN

Dr. Muhammad Yahya, M.Si



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Khaldun

Sejarah pemikiran sosial, Ibnu Khaldun menempati posisi istimewa sebagai pemikir yang pertama kali merumuskan masyarakat dan kekuasaan sebagai fenomena sosial yang tunduk pada hukum-hukum tertentu. Melalui karya monumentalnya *Al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep *ashabiyyah* yang hingga kini dipandang sebagai salah satu penjelasan paling tajam mengenai fondasi solidaritas sosial dan keberlangsungan kekuasaan politik. Berbeda dengan pendekatan normatif atau teologis yang dominan pada masanya, Ibnu Khaldun menganalisis kekuasaan secara empiris dan historis, dengan menempatkan

solidaritas sosial sebagai prasyarat utama berdirinya negara dan peradaban (Ibn Khaldun, 1967).

Konsep *ashabiyyah* tidak dapat dipahami secara sempit sebagai ikatan kesukuan atau hubungan darah semata. Ibnu Khaldun memaknainya sebagai energi sosial kolektif yang lahir dari rasa kebersamaan, loyalitas, dan kesediaan berkorban demi kepentingan kelompok. Solidaritas ini dibangun dan dipelihara melalui narasi bersama—kisah asal-usul, kehormatan, kepahlawanan, dan tujuan kolektif—yang dikomunikasikan secara terus-menerus dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, *ashabiyyah* bekerja sebagai mekanisme komunikasi sosial yang menanamkan identitas bersama dan memperkuat kohesi kelompok (Alatas, 2014).

Ibnu Khaldun secara eksplisit menegaskan bahwa kekuasaan tidak mungkin berdiri tanpa *ashabiyyah*. Ia menyatakan bahwa "kekuasaan dan otoritas hanya dapat dicapai dengan adanya solidaritas kelompok" (Ibn Khaldun, 1967, hlm. 289). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekuasaan, sejak awal, bersifat komunikatif dan simbolik.

Kekuatan militer atau kekayaan ekonomi tidak akan efektif tanpa adanya pengakuan sosial yang bersumber dari solidaritas dan kepercayaan kolektif. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan bukanlah hasil paksaan semata, melainkan produk dari keberhasilan elite dalam mengelola makna dan narasi yang diyakini masyarakat.

Narasi memainkan peran sentral dalam proses legitimasi tersebut. Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa penguasa membangun kewibawaannya melalui simbol-simbol, gelar, silsilah, dan ritual yang dikomunikasikan secara publik. Narasi tentang asal-usul mulia, mandat moral, atau misi historis berfungsi untuk menjustifikasi kekuasaan dan menundukkan masyarakat tanpa harus selalu menggunakan kekerasan.

Kerangka ini, legitimasi politik merupakan hasil dari kesesuaian antara narasi kekuasaan dan pengalaman sosial masyarakat. Ketika narasi tersebut diterima sebagai masuk akal dan adil, kekuasaan menjadi stabil; sebaliknya, ketika narasi kehilangan kredibilitas, legitimasi pun runtuh (Ibn Khaldun, 2005).

Ibnu Khaldun juga menaruh perhatian besar pada rapuhnya legitimasi kekuasaan ketika solidaritas sosial mulai melemah. Ia mengamati bahwa dalam fase kemajuan peradaban, elite politik cenderung terjebak dalam kemewahan, gaya hidup berlebihan, dan komunikasi yang berjarak dari rakyat. Pada titik ini, bahasa kekuasaan berubah menjadi simbol kosong yang tidak lagi mencerminkan nilai kolektif. Akibatnya, *ashabiyyah* melemah, kepercayaan publik menurun, dan kekuasaan memasuki fase kemunduran. Dengan kata lain, runtuhnya kekuasaan merupakan konsekuensi dari krisis komunikasi sosial dan krisis narasi legitimasi (Ibn Khaldun, 1967).

Analisis Ibnu Khaldun ini memiliki implikasi besar bagi sosiologi komunikasi. Ia menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar proses pertukaran pesan, melainkan fondasi struktural dari kekuasaan dan keteraturan sosial. Solidaritas sosial dibangun melalui narasi yang diproduksi dan direproduksi secara kolektif, sementara legitimasi kekuasaan bergantung pada kemampuan penguasa menjaga kesinambungan komunikasi simbolik dengan masyarakat. Pada aspek ini, kekuasaan yang bertahan lama adalah kekuasaan yang berhasil menyelaraskan narasi politiknya dengan nilai, pengalaman, dan harapan sosial kelompok pendukungnya.

Pemikiran Ibnu Khaldun juga relevan untuk membaca fenomena politik dan komunikasi kontemporer. Polarisasi sosial, krisis kepercayaan publik, serta runtuhnya legitimasi institusi modern dapat dipahami sebagai bentuk melemahnya *ashabiyyah* dalam masyarakat yang terfragmentasi oleh narasi yang saling bertentangan. Dengan demikian, konsep solidaritas sosial dan legitimasi kekuasaan yang dirumuskan Ibnu Khaldun tidak hanya penting secara historis, tetapi juga menawarkan kerangka analitis yang kuat untuk memahami dinamika komunikasi politik dan kekuasaan di era modern dan digital.

A. Aspek Historis dan Intelektual Ibnu Khaldun

Memahami kedalaman dan orisinalitas pemikiran Ibnu Khaldun, pemikiran tersebut harus ditempatkan secara tepat Pada aspek historis dan intelektual abad ke-14, sebuah periode

yang ditandai oleh krisis multidimensi dalam dunia Islam. Masa hidup Ibnu Khaldun (1332–1406 M) bertepatan dengan fase kemunduran politik pasca-kejayaan Abbasiyah, fragmentasi kekuasaan di Afrika Utara dan Andalusia, serta melemahnya institusi-institusi sosial yang sebelumnya menopang stabilitas peradaban Islam.

Secara politik, dunia Islam saat itu berada dalam kondisi disintegrasi struktural. Kekuasaan terpecah ke dalam berbagai dinasti lokal yang saling bersaing, sering kali melalui intrik, pengkhianatan, dan perebutan legitimasi. Tidak ada otoritas tunggal yang mampu menyatukan wilayah Islam secara stabil. Kondisi ini menjadikan kekuasaan bersifat rapuh dan sangat bergantung pada loyalitas kelompok, bukan pada institusi formal yang mapan. Pada aspek inilah Ibnu Khaldun menyaksikan secara langsung bagaimana negara lahir, berjaya, lalu runtuh dalam rentang waktu yang relatif singkat—sebuah pengalaman historis yang kelak menjadi fondasi analisis sosiologisnya tentang siklus peradaban (Ibn Khaldun, 1967).

Aspek politik abad ke-14 dunia Islam sebagai latar struktural yang membentuk pemikiran Ibnu Khaldun. Disintegrasi struktural kekuasaan—ditandai oleh fragmentasi politik, lemahnya otoritas pusat, dan kompetisi antar-dinasti—bukan sekadar kondisi historis kontingen, melainkan pola sistemik yang berulang dalam sejarah politik Islam pasca-kejayaan awal kekhalifahan. Pada situasi ini, kekuasaan tidak beroperasi melalui institusi yang mapan dan rasional-birokratis, melainkan melalui relasi personal, jaringan kekerabatan, dan solidaritas kelompok**.**

Ketiadaan otoritas tunggal yang stabil menjadikan legitimasi politik bersifat cair dan mudah dipertanyakan. Dinasti-dinasti lokal—baik di Maghrib, Andalusia, maupun wilayah Timur Islam—mempertahankan kekuasaan bukan melalui hukum impersonal atau administrasi terlembaga, tetapi melalui loyalitas kelompok inti**,** patronase, dan kemampuan memobilisasi dukungan militer. Pada aspek ini, intrik, pengkhianatan, dan perebutan legitimasi bukan anomali moral,

melainkan mekanisme struktural dalam sistem politik yang tidak memiliki fondasi institusional kuat.

Pengamatan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun tidak membangun teorinya secara spekulatif atau normatif, melainkan dari observasi empiris langsung terhadap praktik kekuasaan**.** Sebagai pejabat, diplomat, dan saksi hidup pergantian rezim yang cepat, ia mengalami secara konkret bagaimana negara dapat lahir dari solidaritas kelompok kecil, mencapai puncak kejayaan, lalu runtuh ketika solidaritas tersebut melemah. Pengalaman historis inilah yang kemudian direfleksikan secara teoretis dalam konsep 'ashabiyyah'.

Bagi Ibnu Khaldun, kerapuhan kekuasaan bukan terutama disebabkan oleh faktor individual (penguasa buruk atau moralitas elite), tetapi oleh logika struktural kekuasaan itu sendiri. Ketika negara bergantung pada loyalitas personal dan kelompok, bukan pada institusi yang otonom dan berkelanjutan, maka kekuasaan secara inheren bersifat sementara. Negara menjadi kuat selama solidaritas kelompok inti terjaga, tetapi mulai rapuh ketika solidaritas tersebut terkikis oleh kemewahan, konflik internal, dan ketergantungan pada aparatus yang tidak lagi memiliki ikatan emosional dengan penguasa.

Kerangka sosiologis, pengamatan ini mengandung implikasi teoritis yang sangat maju untuk zamannya. Ibnu Khaldun secara implisit membedakan antara kekuasaan berbasis solidaritas sosial dan kekuasaan berbasis institusi formal—sebuah distingsi yang baru akan dikembangkan secara sistematis berabad-abad kemudian dalam teori sosiologi politik modern (misalnya Weber). Negara yang tidak memiliki basis institusional yang mapan akan selalu terjebak dalam siklus naik–turun, karena legitimasi dan stabilitasnya tidak dapat direproduksi secara impersonal lintas generasi.

Siklus peradaban yang dirumuskan Ibnu Khaldun bukanlah metafora filosofis, melainkan generalisasi sosiologis dari pengalaman historis konkret**.** Negara lahir dari solidaritas kelompok yang kuat, berjaya ketika solidaritas itu

dilembagakan, dan runtuh ketika solidaritas melemah dan digantikan oleh kepentingan individual. Siklus ini bersifat struktural dan berulang, bukan kebetulan historis.

Relevansi analisis ini melampaui situasi abad ke-14. Dalam sosiologi komunikasi dan politik kontemporer, kita dapat melihat paralel dengan negara atau organisasi modern yang mengandalkan loyalitas personal, populisme, atau identitas kelompok, tetapi gagal membangun institusi yang kuat dan impersonal. Pada aspek tersebut, legitimasi tetap rapuh dan siklus krisis kekuasaan cenderung berulang—sebuah insight yang menegaskan aktualitas pemikiran Ibnu Khaldun sebagai pelopor sosiologi historis dan politik.

Selain krisis politik, abad ke-14 juga merupakan masa ketegangan intelektual. Tradisi keilmuan Islam yang sebelumnya produktif mulai mengalami stagnasi metodologis. Ilmu-ilmu keagamaan berkembang pesat dalam bentuk komentar dan pengulangan, tetapi relatif miskin inovasi analitis. Penulisan sejarah pun cenderung bersifat naratif-kronikal, menekankan kisah tokoh dan peristiwa tanpa analisis sebab-akibat sosial. Ibnu Khaldun melihat kecenderungan ini sebagai masalah serius, karena sejarah ditulis tanpa kritik sumber, tanpa analisis aspek sosial, dan sering kali tunduk pada kepentingan penguasa (Ibn Khaldun, 2005).

Pada aspek intelektual seperti ini, Ibnu Khaldun tampil sebagai figur yang menyimpang dari arus utama. Ia tidak menolak tradisi keilmuan Islam, tetapi justru mengolahnya secara kritis. Pendidikan klasik yang ia terima—meliputi Al-Qur'an, hadis, fiqh, bahasa Arab, logika, dan filsafat—memberinya basis tekstual yang kuat. Namun, yang membedakan Ibnu Khaldun dari ulama sezamannya adalah kemampuannya mengintegrasikan pengalaman empiris politik dengan refleksi teoritis. Kariernya sebagai birokrat, diplomat, dan penasihat politik menjadikan realitas sosial sebagai "laboratorium hidup" bagi pemikirannya.

Aspek inilah yang melahirkan pendekatan intelektual Ibnu Khaldun yang bersifat historis, empiris, dan kausal. Ia tidak puas dengan penjelasan normatif tentang kekuasaan sebagai kehendak Tuhan semata, tetapi berusaha menjelaskan mengapa kekuasaan dapat bertahan atau runtuh. Dari sinilah muncul gagasan bahwa masyarakat tunduk pada hukum-hukum sosial tertentu, sebagaimana alam tunduk pada hukum alam. Cara pandang ini menandai pergeseran radikal dari sejarah sebagai kisah moral menuju sejarah sebagai ilmu tentang masyarakat.

Lebih jauh, aspek historis fragmentasi kekuasaan membuat Ibnu Khaldun sangat peka terhadap peran solidaritas, komunikasi, dan legitimasi. Ia melihat bahwa negara tidak runtuh pertama-tama karena kekalahan militer, melainkan karena melemahnya kohesi sosial dan rusaknya komunikasi antara elite dan basis sosialnya. Pengalaman ini menjelaskan mengapa dalam *Muqaddimah* ia menempatkan *ashabiyyah* sebagai konsep kunci, serta mengapa ia memberi perhatian besar pada bahasa kekuasaan, simbol politik, dan narasi legitimasi.

Pemikiran Ibnu Khaldun bukanlah hasil spekulasi abstrak, melainkan respons intelektual terhadap krisis historis konkret. Ia menulis dalam situasi ketidakpastian, di mana tatanan lama runtuh dan tatanan baru belum mapan. Kondisi ini memaksanya untuk berpikir melampaui penjelasan teologis dan moralistik, menuju analisis struktural tentang masyarakat, kekuasaan, dan komunikasi sosial.

Perspektif ini, aspek historis dan intelektual Ibnu Khaldun justru menjadi sumber kekuatan teoritisnya. Krisis yang ia hadapi mendorong lahirnya pemikiran yang melampaui zamannya, dan menjadikan *Muqaddimah* sebagai karya lintas disiplin: sejarah, sosiologi, ilmu politik, dan—secara implisit—sosiologi komunikasi. Oleh karena itu, memahami aspek historis Ibnu Khaldun bukan sekadar latar belakang biografis, melainkan kunci untuk memahami mengapa dan bagaimana ia mampu merumuskan dasar-dasar ilmu sosial jauh sebelum sosiologi dilembagakan di Barat.

B. Konsep *Ashabiyyah* sebagai Mekanisme Komunikasi Sosial

Pemikiran Ibnu Khaldun, konsep *ashabiyyah* menempati posisi sentral dalam menjelaskan bagaimana masyarakat terbentuk, bertahan, dan mengalami kemunduran. Secara umum, *ashabiyyah* dipahami sebagai solidaritas sosial atau ikatan kelompok. Namun, pembacaan yang lebih mendalam menunjukkan bahwa *ashabiyyah* tidak sekadar ikatan emosional atau kesamaan asal-usul, melainkan mekanisme sosial-komunikatif yang memungkinkan terbentuknya kohesi, loyalitas, dan legitimasi dalam suatu komunitas.

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekuatan suatu kelompok tidak terletak pada jumlah atau kekayaan semata, melainkan pada kemampuan kelompok tersebut membangun solidaritas yang kuat di antara anggotanya. Solidaritas ini lahir melalui proses komunikasi yang berkelanjutan, di mana nilai, norma, dan tujuan kolektif dikomunikasikan dan diterima sebagai milik bersama (Ibn Khaldun, 1967). Dengan demikian, *ashabiyyah* dapat dipahami sebagai hasil dari produksi makna kolektif yang berlangsung dalam interaksi sosial sehari-hari.

Sebagai mekanisme komunikasi sosial, *ashabiyyah* bekerja melalui narasi bersama tentang identitas kelompok. Narasi asal-usul, sejarah perjuangan, dan klaim kehormatan berfungsi sebagai kerangka simbolik yang menyatukan individu ke dalam kesadaran kolektif. Narasi ini tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi juga dilembagakan melalui simbol, adat, ritual, dan praktik sosial yang berulang. Dalam perspektif ini, *ashabiyyah* merupakan bentuk komunikasi simbolik yang mengikat individu secara moral dan sosial, sehingga mereka bersedia bertindak demi kepentingan kelompok, bahkan dengan mengorbankan kepentingan pribadi (Alatas, 2014).

Ibnu Khaldun juga menunjukkan bahwa *ashabiyyah* memiliki fungsi politik yang krusial. Ia menyatakan bahwa kekuasaan hanya dapat diraih dan dipertahankan oleh kelompok yang memiliki solidaritas paling kuat (Ibn Khaldun, 2005). Pernyataan ini mengandung implikasi komunikatif yang penting: kekuasaan tidak semata-mata dibangun melalui

paksaan, tetapi melalui legitimasi simbolik yang bersumber dari pengakuan kolektif. Legitimasi tersebut tercipta ketika komunikasi antara pemimpin dan kelompok pendukungnya berjalan efektif, konsisten, dan selaras dengan nilai yang diyakini bersama.

Aspek ini, *ashabiyyah* berfungsi sebagai modal komunikasi sosial. Kelompok dengan *ashabiyyah* yang kuat mampu menjaga kesinambungan pesan, memperkuat kepercayaan internal, dan memobilisasi tindakan kolektif. Sebaliknya, melemahnya *ashabiyyah* menandai terjadinya krisis komunikasi sosial, di mana narasi bersama kehilangan kredibilitas, simbol-simbol tidak lagi dihormati, dan hubungan antara elite dan anggota kelompok menjadi renggang. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa fase kemunduran negara dan peradaban selalu diawali oleh melemahnya solidaritas ini (Ibn Khaldun, 1967).

Lebih jauh, *ashabiyyah* juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang halus. Melalui komunikasi simbolik, norma dan nilai kelompok diinternalisasi oleh individu tanpa harus selalu ditegakkan melalui sanksi formal. Kesetiaan, kehormatan, dan rasa malu menjadi perangkat komunikasi moral yang mengatur perilaku anggota kelompok. Dalam perspektif sosiologi komunikasi modern, mekanisme ini sejalan dengan pandangan bahwa komunikasi merupakan sarana utama pembentukan norma sosial dan keteraturan masyarakat (Durkheim, 1912; Bourdieu, 1991).

Konsep *ashabiyyah* tidak hanya relevan untuk menjelaskan masyarakat tradisional, tetapi juga memiliki daya jelaskan yang kuat Pada aspek kontemporer. Polarisasi sosial, politik identitas, dan konflik berbasis kelompok di era modern dapat dibaca sebagai bentuk-bentuk baru dari *ashabiyyah* yang dimediasi oleh teknologi komunikasi dan media digital. Perbedaannya terletak pada medium, bukan pada logika dasarnya. Solidaritas tetap dibangun melalui narasi, simbol, dan komunikasi yang membentuk rasa "kita" versus "mereka".

Oleh karena itu, menempatkan *ashabiyyah* sebagai mekanisme komunikasi sosial memungkinkan kita memahami kontribusi Ibnu Khaldun sebagai perintis awal sosiologi komunikasi. Ia telah menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar pertukaran pesan, melainkan fondasi struktural dari solidaritas, kekuasaan, dan keberlangsungan masyarakat. Dalam kerangka ini, *ashabiyyah* merupakan konsep kunci yang menjembatani analisis sosial klasik dengan kajian komunikasi kontempore

Ibnu Khaldun sebagai Perintis Awal Sosiologi Komunikasi

Penyebutan Ibnu Khaldun sebagai *perintis awal sosiologi komunikasi* tidak dimaksudkan sebagai anakronisme konseptual, melainkan sebagai penempatan epistemologis yang berangkat dari substansi pemikirannya, bukan dari terminologi disipliner modern. Dalam tradisi ilmu sosial, status seorang perintis tidak ditentukan oleh penggunaan istilah "sosiologi" atau "komunikasi", melainkan oleh objek kajian, kerangka analisis, dan logika penjelasan yang digunakannya. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Khaldun memenuhi ketiganya secara konsisten.

Pertama, dari sisi objek kajian, Ibnu Khaldun secara eksplisit menempatkan hubungan antarmanusia, solidaritas kelompok, dan legitimasi kekuasaan sebagai fenomena sosial yang harus dijelaskan secara rasional. Fenomena-fenomena tersebut tidak mungkin dipahami tanpa menempatkan komunikasi sebagai medium utama pembentuknya. Konsep *ashabiyyah* sendiri menunjukkan bahwa kohesi sosial tidak bersumber pada faktor biologis atau geografis semata, melainkan pada proses simbolik dan naratif yang mengikat individu ke dalam kesadaran kolektif. Dengan demikian, komunikasi telah menjadi variabel kunci dalam analisis sosial Ibnu Khaldun, meskipun belum diberi nama sebagai disiplin tersendiri.

Kedua, dari sisi kerangka analisis, Ibnu Khaldun memperlakukan solidaritas sosial sebagai sesuatu yang diproduksi, dipelihara, dan dilemahkan melalui praktik sosial yang berulang. Praktik tersebut mencakup bahasa, simbol

kehormatan, silsilah, ritual, serta narasi kekuasaan—semuanya merupakan bentuk komunikasi sosial. Ketika ia menjelaskan bahwa kekuasaan hanya dapat bertahan selama *ashabiyyah* kuat, dan akan runtuh ketika solidaritas itu melemah, Ibnu Khaldun sesungguhnya sedang menjelaskan mekanisme komunikasi yang gagal mempertahankan legitimasi. Dalam perspektif ini, komunikasi bukan sekadar alat, melainkan struktur laten yang menopang atau meruntuhkan tatanan sosial.

Ketiga, dari sisi logika penjelasan, Ibnu Khaldun telah melampaui historiografi naratif menuju analisis kausal-struktural. Ia tidak berhenti pada pertanyaan *apa yang terjadi*, tetapi menelusuri *mengapa* suatu kelompok berkuasa dan *bagaimana* kekuasaan itu dipertahankan atau runtuh. Jawaban yang ia tawarkan tidak berpusat pada kehendak individual atau takdir ilahi semata, melainkan pada relasi sosial yang dimediasi oleh makna bersama. Di sinilah letak kedekatan pemikiran Ibnu Khaldun dengan sosiologi komunikasi modern, yang memandang masyarakat sebagai hasil dari proses komunikasi yang terlembaga.

Klaim Ibnu Khaldun sebagai perintis sosiologi komunikasi menjadi semakin kuat ketika dibandingkan dengan perkembangan sosiologi barat modern. Konsep-konsep yang kemudian muncul dalam sosiologi dan teori komunikasi—seperti kesadaran kolektif (Durkheim), legitimasi otoritas (Weber), kekuasaan simbolik (Bourdieu), dan tindakan komunikatif (Habermas)—secara substantif telah menemukan bentuk embrioniknya dalam analisis *ashabiyyah*. Perbedaannya terletak pada tingkat abstraksi dan terminologi, bukan pada inti persoalan yang dibahas.

Penyebutan Ibnu Khaldun sebagai perintis awal sosiologi komunikasi merupakan klaim ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara teoretis, bukan glorifikasi historis. Ia adalah pemikir yang sejak awal memahami bahwa masyarakat tidak disatukan oleh struktur formal semata, melainkan oleh komunikasi makna yang membangun solidaritas, legitimasi, dan keteraturan sosial. Aspek ini,

ashabiyyah dapat dipandang sebagai konsep awal yang menjelaskan bagaimana komunikasi bekerja sebagai fondasi struktur sosial—sebuah kontribusi yang menempatkan Ibnu Khaldun secara sah dalam genealogi sosiologi komunikasi.

C. Komunikasi, Kekuasaan, dan Stabilitas Peradaban

Kerangka pemikiran Ibnu Khaldun, kekuasaan dan peradaban tidak pernah dipahami sebagai struktur yang berdiri sendiri atau bersifat otonom dari masyarakat. Kekuasaan, negara, dan peradaban merupakan hasil dari relasi sosial yang terus-menerus dinegosiasikan melalui komunikasi. Pandangan ini menempatkan komunikasi bukan sekadar sebagai alat teknis penyampaian pesan, melainkan sebagai fondasi struktural yang menentukan lahir, bertahan, dan runtuhnya tatanan sosial-politik.

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekuasaan tidak mungkin muncul tanpa adanya solidaritas sosial (*ashabiyyah*). Solidaritas ini bukan fakta biologis atau geografis, melainkan produk sosial yang dibangun melalui narasi bersama, simbol kehormatan, dan bahasa kekuasaan yang diterima secara kolektif. Dengan kata lain, kekuasaan memperoleh daya ikatnya bukan terutama dari kekuatan militer atau dominasi ekonomi, tetapi dari keberhasilan komunikasi dalam membangun pengakuan sosial (Ibn Khaldun, 1967).

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekuasaan tidak mungkin muncul tanpa adanya solidaritas sosial (*ashabiyyah*). Solidaritas ini bukan fakta biologis atau geografis, melainkan produk sosial yang dibangun melalui narasi bersama, simbol kehormatan, dan bahasa kekuasaan yang diterima secara kolektif. Penegasan ini mengandung implikasi penting: *ashabiyyah* bukan kondisi alamiah, melainkan hasil dari proses komunikasi sosial yang terorganisasi dan berulang.

Pada kerangka ini, *ashabiyyah* dapat dipahami sebagai infrastruktur makna yang memungkinkan individu mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suatu "kita". Narasi bersama—tentang asal-usul, perjuangan, dan tujuan kolektif—

berfungsi sebagai mekanisme komunikasi yang menanamkan kesadaran kolektif dan rasa kepemilikan sosial. Narasi tersebut tidak bersifat netral, melainkan sarat nilai dan kepentingan, karena ia sekaligus menentukan siapa yang termasuk dan siapa yang dikecualikan dari komunitas. Dengan demikian, solidaritas sosial adalah hasil dari kerja simbolik yang terus-menerus, bukan sekadar ikatan emosional spontan.

Simbol kehormatan yang disebut Ibnu Khaldun—seperti gelar, silsilah, ritual, dan tanda kebesaran—berfungsi sebagai bahasa kekuasaan yang dilembagakan. Simbol-simbol ini mengomunikasikan hierarki, otoritas, dan legitimasi tanpa harus selalu disertai penjelasan rasional atau paksaan fisik. Ketika simbol tersebut diakui dan dihormati secara luas, kekuasaan memperoleh dasar legitimasi yang stabil. Sebaliknya, ketika simbol kehilangan makna di mata masyarakat, kekuasaan memasuki fase delegitimasi. Perspektif ini, simbol bukan ornamen kekuasaan, melainkan medium komunikasi politik yang menentukan daya tahan peradaban.

Bahasa kekuasaan juga memainkan peran krusial dalam membangun *ashabiyyah*. Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa pada fase awal suatu dinasti, bahasa kekuasaan cenderung sederhana, langsung, dan dekat dengan pengalaman sosial masyarakat. Bahasa ini memperkuat rasa kebersamaan dan mempersempit jarak simbolik antara penguasa dan rakyat. Namun, seiring meningkatnya kemewahan dan diferensiasi sosial, bahasa kekuasaan menjadi semakin formal, eksklusif, dan berjarak. Perubahan ini menandai pergeseran komunikasi dari integratif menjadi dominatif, yang pada akhirnya melemahkan solidaritas sosial.

Bagi Ibnu Khaldun, *ashabiyyah* adalah mekanisme komunikasi yang menopang legitimasi dan stabilitas politik. Kekuasaan bertahan bukan karena kekuatan koersif semata, melainkan karena kemampuannya menjaga kesinambungan makna antara elite dan masyarakat. Ketika komunikasi ini terputus—akibat bahasa kekuasaan yang tidak lagi dipahami

atau simbol yang kehilangan kredibilitas—maka solidaritas sosial melemah dan peradaban memasuki fase kemunduran.

Konsep *ashabiyyah* harus dibaca sebagai konsep kunci yang menjembatani komunikasi, kekuasaan, dan struktur sosial. Ia menunjukkan bahwa sejak abad ke-14, Ibnu Khaldun telah memahami masyarakat sebagai tatanan komunikatif, di mana stabilitas politik dan keberlanjutan peradaban sangat bergantung pada keberhasilan mengelola narasi, simbol, dan bahasa kekuasaan. Perspektif ini tidak hanya memperkuat posisi Ibnu Khaldun sebagai bapak sosiologi, tetapi juga menempatkannya secara sah sebagai perintis awal sosiologi komunikasi.

A*shabiyyah* juga sebagai jembatan antara komunikasi, kekuasaan, dan struktur sosial menunjukkan kedalaman analisis Ibnu Khaldun yang melampaui pembacaan sosiologis konvensional. Dengan menempatkan *ashabiyyah* sebagai inti dinamika sosial, Ibnu Khaldun sesungguhnya sedang merumuskan suatu pandangan bahwa masyarakat tidak disatukan oleh struktur formal atau hukum tertulis semata, melainkan oleh tatanan komunikatif yang memungkinkan makna bersama diproduksi dan dipertahankan. Struktur sosial, dalam pandangan ini, bukan entitas statis, tetapi hasil dari proses komunikasi simbolik yang terus berlangsung.

Sebagai tatanan komunikatif, masyarakat bergantung pada kemampuan elite dan anggota kelompok untuk mengelola narasi kolektif. Narasi tidak sekadar berfungsi sebagai cerita tentang masa lalu, tetapi sebagai kerangka interpretatif yang memberi legitimasi pada relasi kekuasaan di masa kini. Melalui narasi asal-usul, kepahlawanan, atau mandat moral, kekuasaan memperoleh justifikasi simbolik yang membuatnya diterima sebagai sah. Di sinilah *ashabiyyah* bekerja sebagai mekanisme komunikasi yang menghubungkan struktur kekuasaan dengan kesadaran sosial masyarakat.

Simbol dan bahasa kekuasaan menjadi instrumen utama dalam menjaga tatanan komunikatif tersebut. Simbol-simbol kehormatan, ritual politik, dan gaya bahasa elite bukan hanya

ekspresi budaya, melainkan alat pengikat struktur sosial. Ketika simbol-simbol ini konsisten dengan nilai dan pengalaman sosial masyarakat, ia memperkuat kepercayaan dan memperdalam solidaritas. Namun, ketika simbol kehilangan relevansi atau dipersepsi sebagai manipulatif, komunikasi kekuasaan mengalami kegagalan, dan struktur sosial mulai terfragmentasi. Dengan kata lain, stabilitas struktur sosial sangat bergantung pada keberhasilan komunikasi simbolik.

Bagi Ibnu Khaldun, kekuasaan tidak pernah bersifat absolut atau sepenuhnya koersif. Kekuasaan selalu membutuhkan mediasi komunikatif agar dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan. Ketika komunikasi antara penguasa dan masyarakat terjaga, kekuasaan dapat dijalankan dengan biaya sosial yang rendah karena didukung oleh pengakuan dan kepercayaan. Sebaliknya, ketika komunikasi tersebut terputus, kekuasaan harus bergantung pada paksaan, yang justru mempercepat erosi legitimasi dan melemahkan stabilitas peradaban.

Membaca *ashabiyyah* sebagai tatanan komunikatif membuka ruang analisis yang relevan dengan masyarakat modern. Pada aspek negara-bangsa kontemporer, *ashabiyyah* tidak lagi berbasis kekerabatan atau kesukuan, tetapi terwujud dalam bentuk kepercayaan institusional dan identitas nasional yang dibangun melalui komunikasi publik. Media, pendidikan, dan diskursus politik memainkan peran serupa dengan ritual dan simbol tradisional dalam memelihara solidaritas sosial. Ketika saluran-saluran komunikasi ini gagal membangun makna bersama, masyarakat mengalami krisis legitimasi dan polarisasi—fenomena yang secara struktural sejalan dengan analisis Ibnu Khaldun tentang kemunduran peradaban.

Kekuatan konsep *ashabiyyah* terletak pada kemampuannya menjelaskan hubungan dialektis antara komunikasi dan struktur sosial. Ibnu Khaldun telah menunjukkan bahwa stabilitas politik dan keberlanjutan peradaban tidak ditentukan oleh keunggulan material semata, melainkan oleh kemampuan mengelola komunikasi simbolik

yang mengikat masyarakat dalam solidaritas dan makna bersama. Perspektif ini menjadikan pemikirannya bukan hanya relevan secara historis, tetapi juga sangat kontekstual untuk memahami dinamika komunikasi, kekuasaan, dan krisis sosial di era modern dan digital.

Buku *Al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa negara pada fase awal kemunculannya ditopang oleh komunikasi yang relatif egaliter dan dekat dengan pengalaman sosial masyarakat. Bahasa kekuasaan masih sederhana, narasi politik masih berakar pada nilai bersama, dan jarak simbolik antara pemimpin dan rakyat relatif kecil. Kondisi ini memperkuat kepercayaan publik dan menjadikan kekuasaan stabil tanpa harus bergantung pada paksaan berlebihan. Stabilitas peradaban, Pada aspek ini, merupakan hasil dari keselarasan komunikasi antara elite dan basis sosialnya (Ibn Khaldun, 2005).

Namun, seiring berkembangnya peradaban dan meningkatnya kemakmuran, Ibnu Khaldun mengamati terjadinya perubahan mendasar dalam pola komunikasi kekuasaan. Elite politik mulai membangun jarak simbolik melalui kemewahan, formalitas, dan bahasa kekuasaan yang semakin eksklusif. Komunikasi tidak lagi berfungsi sebagai sarana integrasi sosial, melainkan sebagai alat diferensiasi dan dominasi. Pada tahap ini, kekuasaan mulai kehilangan fondasi komunikatifnya, sementara legitimasi digantikan oleh paksaan administratif dan militer.

Ibnu Khaldun menilai bahwa fase inilah yang menandai awal kemunduran peradaban. Ketika komunikasi antara penguasa dan masyarakat kehilangan kredibilitas, *ashabiyyah* melemah, solidaritas sosial terfragmentasi, dan stabilitas politik menjadi rapuh. Negara mungkin masih berdiri secara formal, tetapi secara sosial ia telah kehilangan dukungan moral dan simbolik. Dengan kata lain, runtuhnya peradaban bukan pertama-tama disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan oleh krisis komunikasi internal yang menggerogoti legitimasi kekuasaan dari dalam (Ibn Khaldun, 1967).

Analisis ini menunjukkan bahwa bagi Ibnu Khaldun, stabilitas peradaban adalah fenomena komunikatif. Militer hanya berfungsi efektif ketika didukung oleh kepercayaan sosial; ekonomi hanya menopang kekuasaan ketika dianggap adil; dan institusi administratif hanya berjalan ketika dipersepsi sah oleh masyarakat. Tanpa komunikasi yang mampu menyelaraskan kekuasaan dengan nilai dan pengalaman sosial rakyat, seluruh perangkat kekuasaan tersebut akan kehilangan daya kerjanya.

Pemikiran Ibnu Khaldun ini memiliki resonansi kuat dengan teori sosial modern. Max Weber kemudian merumuskan konsep legitimasi otoritas, sementara Jürgen Habermas menekankan peran komunikasi dalam membangun konsensus dan stabilitas sosial. Namun, keunggulan Ibnu Khaldun terletak pada kemampuannya mengintegrasikan komunikasi, kekuasaan, dan dinamika peradaban dalam satu kerangka historis yang utuh, jauh sebelum konsep-konsep tersebut dilembagakan dalam sosiologi Barat (Alatas, 2014).

Aspek sosiologi komunikasi kontemporer, pemikiran Ibnu Khaldun membantu menjelaskan krisis legitimasi negara modern, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi, serta meningkatnya polarisasi sosial. Fenomena-fenomena tersebut dapat dibaca sebagai bentuk melemahnya komunikasi legitimatif antara kekuasaan dan masyarakat. Dengan demikian, Ibnu Khaldun tidak hanya relevan sebagai pemikir klasik, tetapi juga sebagai rujukan teoretis untuk memahami tantangan komunikasi dan stabilitas peradaban di era modern dan digital.

Pemikiran Ibnu Khaldun memberikan perangkat analitis yang tajam untuk membaca krisis legitimasi negara modern, khususnya Pada aspek menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi dan meningkatnya polarisasi sosial. Dalam kerangka Ibnu Khaldun, fenomena-fenomena tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan kebijakan, kelemahan kepemimpinan, atau tekanan ekonomi global, melainkan sebagai gejala melemahnya komunikasi legitimatif antara kekuasaan dan masyarakat.

Krisis legitimasi, menurut logika Ibnu Khaldun, muncul ketika narasi kekuasaan tidak lagi selaras dengan pengalaman sosial masyarakat. Negara modern mungkin tetap memiliki perangkat hukum, birokrasi, dan aparat koersif yang kuat, tetapi kehilangan daya ikat simbolik yang sebelumnya menopang kepercayaan publik. Ketika bahasa kebijakan terasa teknokratis, elitis, atau terputus dari realitas keseharian warga, komunikasi politik berubah dari sarana integrasi menjadi sumber alienasi. Dalam situasi ini, kekuasaan masih berfungsi secara administratif, tetapi telah kehilangan legitimasi sosialnya.

Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi dapat dibaca sebagai indikasi runtuhnya *ashabiyyah* dalam bentuk modern. Jika dalam masyarakat pra-modern *ashabiyyah* terbangun melalui ikatan kekerabatan dan kesukuan, maka dalam negara modern solidaritas sosial dibangun melalui kepercayaan institusional—kepercayaan pada hukum, pendidikan, media, dan negara sebagai representasi kepentingan bersama. Ketika institusi-institusi ini gagal mengomunikasikan keadilan, keberpihakan, dan konsistensi moral, solidaritas sosial melemah dan digantikan oleh loyalitas sempit berbasis identitas, ideologi, atau afiliasi kelompok.

Polarisasi sosial yang semakin tajam merupakan konsekuensi lanjutan dari krisis komunikasi legitimatif tersebut. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, melemahnya komunikasi antara pusat kekuasaan dan masyarakat menciptakan ruang bagi munculnya narasi tandingan yang bersaing dalam memperebutkan legitimasi. Narasi-narasi ini sering kali bersifat eksklusif dan antagonistik, membangun solidaritas internal kelompok dengan cara mempertajam batas "kita" versus "mereka". Dengan demikian, polarisasi bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan manifestasi dari fragmentasi *ashabiyyah* dalam masyarakat yang kehilangan narasi kolektif bersama.

Analisis ini menegaskan bahwa krisis legitimasi negara modern pada dasarnya adalah krisis komunikasi sosial. Kekuasaan gagal mempertahankan hubungan simbolik yang

kredibel dengan masyarakat, sementara masyarakat kehilangan saluran komunikasi yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan keluhan. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas politik menjadi rapuh, bukan karena ketiadaan kekuatan material, tetapi karena runtuhnya kepercayaan dan makna bersama yang sebelumnya menopang tatanan sosial.

Pemikiran Ibnu Khaldun tetap relevan sebagai lensa kritis untuk memahami dinamika komunikasi, kekuasaan, dan konflik sosial di era kontemporer. Ia membantu kita melihat bahwa solusi atas krisis legitimasi dan polarisasi tidak cukup dicari melalui reformasi struktural semata, tetapi menuntut pemulihan komunikasi legitimatif yang mampu membangun kembali solidaritas sosial dan kepercayaan publik. Perspektif ini menempatkan komunikasi bukan sebagai aspek sekunder dalam politik modern, melainkan sebagai fondasi utama stabilitas peradaban, sebagaimana telah ditegaskan Ibnu Khaldun berabad-abad sebelumnya.

Secara keseluruhan, kontribusi Ibnu Khaldun terletak pada penegasannya bahwa peradaban bertahan bukan karena kekuatan material yang dimilikinya, melainkan karena komunikasi yang berhasil membangun solidaritas, legitimasi, dan keteraturan sosial. Perspektif ini menempatkan komunikasi sebagai inti analisis kekuasaan dan menjadikan Ibnu Khaldun sebagai salah satu perintis awal pemikiran sosiologi komunikasi dalam sejarah ilmu sosial.

D. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun bagi Sosiologi Komunikasi Modern

Pemikiran Ibnu Khaldun menunjukkan relevansi yang kuat dan berkelanjutan bagi sosiologi komunikasi modern karena ia sejak awal menempatkan komunikasi makna kolektif sebagai fondasi utama solidaritas sosial, legitimasi kekuasaan, dan stabilitas peradaban. Meskipun istilah "sosiologi komunikasi" baru dilembagakan pada abad ke-20, substansi analisis Ibnu Khaldun telah lebih dahulu menyentuh inti persoalan yang kini menjadi fokus utama bidang tersebut.

Pertama, relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terletak pada konsepsinya tentang *ashabiyyah* sebagai mekanisme pembentuk kohesi sosial. Dalam sosiologi komunikasi modern, kohesi sosial dipahami sebagai hasil dari proses komunikasi simbolik yang membangun makna bersama, identitas kolektif, dan rasa saling percaya. Ibnu Khaldun telah menunjukkan bahwa solidaritas kelompok tidak lahir secara alamiah, melainkan dibentuk melalui narasi, simbol kehormatan, bahasa kekuasaan, dan ritual sosial yang dikomunikasikan secara berulang. Dengan demikian, *ashabiyyah* dapat dibaca sebagai konsep awal tentang produksi dan reproduksi makna sosial melalui komunikasi (Ibn Khaldun, 1967).

Kedua, pemikiran Ibnu Khaldun relevan dengan kajian komunikasi modern karena ia menempatkan legitimasi kekuasaan sebagai fenomena komunikatif. Dalam pandangannya, kekuasaan hanya dapat bertahan ketika diakui dan dipercaya oleh masyarakat. Pengakuan ini tidak dihasilkan oleh kekuatan militer atau keunggulan ekonomi semata, melainkan oleh kemampuan penguasa membangun komunikasi yang selaras dengan nilai, pengalaman, dan harapan sosial rakyat. Gagasan ini sejalan dengan teori legitimasi Weber dan konsep rasionalitas komunikatif Habermas, yang sama-sama menekankan bahwa stabilitas sosial bergantung pada kualitas komunikasi antara otoritas dan publik (Weber, 1978; Habermas, 1984).

Ketiga, pemikiran Ibnu Khaldun memiliki relevansi langsung dengan analisis krisis komunikasi dan krisis legitimasi dalam masyarakat modern. Ia menunjukkan bahwa kemunduran peradaban selalu diawali oleh melemahnya komunikasi antara elite dan masyarakat. Ketika bahasa kekuasaan menjadi elitis, simbol politik kehilangan makna, dan narasi bersama tidak lagi dipercaya, solidaritas sosial melemah dan kekuasaan memasuki fase delegitimasi. Fenomena ini sangat kontekstual dengan kondisi kontemporer, di mana menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi, maraknya

disinformasi, dan polarisasi sosial mencerminkan kegagalan komunikasi legitimatif dalam masyarakat modern.

Keempat, pemikiran Ibnu Khaldun juga relevan dalam memahami transformasi komunikasi di era digital. Meskipun aspek historisnya berbeda, logika sosial yang ia jelaskan tetap berlaku. Media digital dan media sosial telah menjadi arena utama pembentukan *ashabiyyah* versi modern, di mana solidaritas, identitas, dan loyalitas dibangun melalui narasi digital, simbol visual, dan bahasa politik yang beredar secara cepat dan masif. Polarisasi politik dan politik identitas di ruang digital dapat dipahami sebagai manifestasi baru dari *ashabiyyah* yang dimediasi oleh teknologi komunikasi, bukan sebagai fenomena yang sepenuhnya baru (Alatas, 2014).

Kelima, dari sudut pandang epistemologis, pemikiran Ibnu Khaldun memperkaya sosiologi komunikasi modern dengan perspektif non-Barat dan historis. Ia menunjukkan bahwa analisis komunikasi tidak harus berangkat dari masyarakat industri atau demokrasi modern, tetapi dapat ditelusuri dari pengalaman peradaban pra-modern yang menghadapi persoalan serupa: legitimasi, kepercayaan, konflik, dan kohesi sosial. Pada aspek dekolonialisasi ilmu sosial, Ibnu Khaldun memberikan dasar teoretis yang penting untuk memperluas genealogi sosiologi komunikasi di luar tradisi Barat.

Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun bagi sosiologi komunikasi modern tidak bersifat simbolik atau historis semata, melainkan konseptual dan analitis. Ia telah meletakkan dasar pemahaman bahwa masyarakat adalah tatanan komunikatif, kekuasaan bergantung pada pengelolaan makna, dan stabilitas sosial ditentukan oleh kualitas komunikasi legitimatif. Perspektif ini menjadikan Ibnu Khaldun bukan hanya sebagai bapak sosiologi, tetapi juga sebagai perintis awal sosiologi komunikasi, yang pemikirannya tetap aktual untuk membaca dinamika sosial, politik, dan media di era modern dan digital.

Pemikiran Ibnu Khaldun bagi sosiologi komunikasi modern tidak bersifat simbolik atau historis semata, melainkan konseptual dan analitis. Ia telah meletakkan dasar pemahaman bahwa masyarakat adalah tatanan komunikatif, kekuasaan bergantung pada pengelolaan makna, dan stabilitas sosial ditentukan oleh kualitas komunikasi legitimatif. Pandangan ini menandai pergeseran penting dari pemahaman kekuasaan sebagai dominasi material menuju kekuasaan sebagai relasi makna yang diakui secara sosial.

Keunggulan Ibnu Khaldun terletak pada kemampuannya membaca masyarakat bukan sebagai agregasi individu atau struktur material semata, melainkan sebagai tatanan sosial yang hidup dari proses komunikasi, pengakuan, dan pemaknaan kolektif. Pemikirannya bersifat analitis dan struktural, bukan normatif-teologis.

Gagasan bahwa masyarakat adalah tatanan komunikatif tampak jelas dalam konsep *'ashabiyyah*. Solidaritas sosial, bagi Ibnu Khaldun, tidak bekerja secara otomatis melalui darah, wilayah, atau kekuatan fisik, tetapi melalui narasi bersama, simbol kehormatan, dan pengakuan timbal balik di antara anggota kelompok. *'Ashabiyyah* pada dasarnya adalah modal komunikatif kolektif: kemampuan suatu kelompok untuk membangun kesepahaman, loyalitas, dan kesiapan berkorban melalui bahasa, simbol, dan praktik komunikasi yang berulang. Tanpa komunikasi yang efektif, solidaritas melemah, dan masyarakat kehilangan daya kohesinya.

Kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri sebagai dominasi material. Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa kekuasaan hanya bertahan sejauh ia diakui secara simbolik dan dimaknai sebagai sah. Penguasa yang kuat secara militer tetapi gagal mengelola makna—gagal membangun legitimasi, gagal memelihara kepercayaan, atau gagal mengartikulasikan tujuan kolektif—akan kehilangan dukungan sosial dan pada akhirnya runtuh. Dengan kata lain, kekuasaan bersifat komunikatif sebelum bersifat koersif.

Analisis ini menandai pergeseran epistemologis yang sangat maju untuk zamannya. Ibnu Khaldun tidak memahami stabilitas sosial sebagai hasil keseimbangan kekuatan material semata, melainkan sebagai hasil komunikasi legitimatif—yakni proses di mana kekuasaan dijustifikasi, diterima, dan direproduksi melalui makna bersama. Stabilitas negara bergantung pada kualitas komunikasi antara penguasa dan kelompok sosial inti: sejauh mana perintah dipahami sebagai kewajiban moral, bukan sekadar ancaman kekerasan.

Pemahaman Ibnu Khaldun tentang siklus peradaban memperlihatkan bahwa krisis komunikasi adalah indikator awal krisis sosial. Ketika penguasa tidak lagi mampu berbicara atas nama kepentingan kolektif, ketika bahasa kekuasaan terputus dari pengalaman sosial rakyat, dan ketika simbol-simbol legitimasi kehilangan daya persuasinya, maka *'ashabiyyah* melemah. Negara mungkin masih berdiri secara formal, tetapi secara komunikatif telah runtuh. Pandangan ini sangat relevan dengan analisis kontemporer tentang krisis legitimasi negara modern, populisme, dan erosi kepercayaan publik.

Ibnu Khaldun juga katakan sosiologi komunikasi modern tidak bersifat simbolik atau historis semata, melainkan konseptual dan analitis. Ia telah meletakkan dasar pemahaman bahwa masyarakat adalah tatanan komunikatif, kekuasaan bergantung pada pengelolaan makna, dan stabilitas sosial ditentukan oleh kualitas komunikasi legitimatif. Pandangan ini menandai pergeseran penting dari pemahaman kekuasaan sebagai dominasi material menuju kekuasaan sebagai relasi makna yang diakui secara sosial.

Menempatkan masyarakat sebagai tatanan komunikatif, Ibnu Khaldun secara implisit menolak pandangan yang melihat struktur sosial sebagai entitas objektif yang bekerja terlepas dari kesadaran dan interaksi manusia. Struktur sosial, dalam kerangka ini, hanya dapat bertahan sejauh ia terus diproduksi dan direproduksi melalui komunikasi—melalui bahasa, simbol, narasi, dan ritual yang menanamkan kesepahaman kolektif. Ketika proses komunikasi ini terganggu atau kehilangan

kredibilitas, struktur sosial tidak serta-merta runtuh secara fisik, tetapi mengalami kerapuhan legitimatif yang pada akhirnya berujung pada disintegrasi.

Lebih jauh, penekanan Ibnu Khaldun pada pengelolaan makna sebagai fondasi kekuasaan memperlihatkan bahwa kekuasaan bukan sekadar kemampuan memerintah, melainkan kemampuan mendefinisikan realitas sosial. Penguasa yang berhasil adalah mereka yang mampu membingkai kepentingan politik sebagai kepentingan kolektif, serta menyelaraskan bahasa kekuasaan dengan nilai dan pengalaman sosial masyarakat. Dalam perspektif ini, komunikasi tidak lagi dipahami sebagai instrumen tambahan kekuasaan, tetapi sebagai mekanisme utama produksi legitimasi.

Stabilitas sosial, menurut logika ini, bukan hasil dari kepatuhan yang dipaksakan, melainkan dari penerimaan yang dikomunikasikan. Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa ketika komunikasi legitimatif berjalan dengan baik—yakni ketika narasi kekuasaan dipandang masuk akal, adil, dan bermakna—masyarakat akan mematuhi tatanan sosial tanpa memerlukan kontrol koersif yang berlebihan. Sebaliknya, ketika komunikasi tersebut gagal, kekuasaan terpaksa bergantung pada paksaan, yang justru mempercepat erosi kepercayaan dan memperlemah stabilitas peradaban.

Pendalaman ini memperlihatkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun sejalan dengan inti sosiologi komunikasi modern yang menempatkan komunikasi sebagai prasyarat keberlangsungan tatanan sosial. Konsep-konsep yang kemudian dirumuskan dalam teori modern—seperti legitimasi, kesadaran kolektif, diskursus, dan kekuasaan simbolik—telah memiliki embrio analitis dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Oleh karena itu, relevansinya tidak berhenti pada pengakuan historis, tetapi terletak pada kemampuannya menyediakan kerangka konseptual lintas zaman untuk memahami hubungan antara komunikasi, kekuasaan, dan stabilitas sosial.

Kontribusi Ibnu Khaldun terhadap sosiologi komunikasi modern bukanlah klaim normatif, melainkan argumen teoretis yang dapat diuji dan dikembangkan. Ia menawarkan cara pandang yang melihat krisis sosial dan politik—baik dalam masyarakat pra-modern maupun modern—sebagai persoalan komunikasi legitimatif. Perspektif inilah yang menjadikan pemikirannya tetap relevan dan produktif sebagai fondasi analisis sosiologi komunikasi di era kontemporer.

E. Profil Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir dengan nama lengkap *Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun* pada tahun 1332 M di Tunis, Afrika Utara. Ia berasal dari keluarga terpelajar yang memiliki tradisi panjang dalam dunia birokrasi dan keilmuan Islam. Leluhurnya berasal dari Andalusia dan dikenal sebagai pejabat administratif serta ulama, sebelum akhirnya bermigrasi ke Afrika Utara akibat pergolakan politik di Semenanjung Iberia.

Lingkungan keluarga yang dekat dengan tradisi ilmu pengetahuan dan pemerintahan membentuk karakter intelektual Ibnu Khaldun sejak usia dini. Ia tumbuh dalam suasana yang menghargai ilmu, diskusi, dan keterlibatan aktif dalam urusan sosial-politik. Namun, masa kecilnya juga diwarnai tragedi besar: wabah *Black Death* yang melanda dunia Islam dan Eropa pada pertengahan abad ke-14, merenggut nyawa kedua orang tuanya serta banyak gurunya. Peristiwa ini memberi pengalaman awal tentang rapuhnya kehidupan sosial dan institusi manusia.

Pendidikan Ibnu Khaldun berlangsung dalam tradisi klasik Islam yang kuat. Ia mempelajari Al-Qur'an, hadis, fiqh, tata bahasa Arab, logika, filsafat, dan sejarah dari para ulama terkemuka di Tunis. Penguasaan ilmu agama dipadukan dengan studi rasional seperti logika dan filsafat, menjadikannya seorang sarjana dengan spektrum keilmuan luas.

Membedakan Ibnu Khaldun dari kebanyakan cendekiawan sezamannya adalah sikap kritis terhadap tradisi keilmuan. Ia tidak menerima pengetahuan secara dogmatis,

melainkan mempertanyakan metode dan validitas penulisan sejarah. Pengalaman hidup dalam situasi politik yang tidak stabil mendorongnya untuk melihat ilmu bukan sekadar sebagai warisan teks, tetapi sebagai alat untuk memahami realitas sosial secara rasional dan empiris.

Selain sebagai sarjana, Ibnu Khaldun juga aktif dalam dunia pemerintahan. Ia menduduki berbagai jabatan administratif dan diplomatik di beberapa kerajaan Islam di Afrika Utara dan Andalusia. Ia pernah menjadi sekretaris istana, penasihat politik, dan utusan diplomatik, berpindah dari satu pusat kekuasaan ke pusat kekuasaan lain mengikuti dinamika politik yang penuh intrik.

Pengalaman langsung terlibat dalam perebutan kekuasaan, pengkhianatan politik, dan naik-turunnya dinasti memberi Ibnu Khaldun wawasan empiris yang sangat kaya. Dunia politik menjadi laboratorium sosial baginya. Dari sanalah ia menyaksikan bagaimana kekuasaan dibangun, dipertahankan, dan akhirnya runtuh—bukan hanya karena kekalahan militer, tetapi karena melemahnya solidaritas sosial dan legitimasi.

Namun, keterlibatan politik juga membawa risiko. Ia beberapa kali dipenjara dan dipaksa mengasingkan diri. Justru dalam masa pengasingan inilah lahir karya terbesarnya. Puncak karya intelektual Ibnu Khaldun lahir ketika ia menarik diri dari hiruk-pikuk politik dan menetap di Qal'at Ibn Salamah. Di tempat inilah ia menulis *Al-Muqaddimah*, sebuah pengantar panjang untuk karya sejarah besarnya *Kitab al-'Ibar*. Namun, *Al-Muqaddimah* justru melampaui fungsi pengantar dan berdiri sebagai karya orisinal tentang masyarakat, kekuasaan, ekonomi, pendidikan, dan peradaban.

Buku *Al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun merumuskan konsep *ashabiyyah*, siklus naik-turun peradaban, serta metode kritis dalam penulisan sejarah. Ia menolak sejarah sebagai kumpulan cerita heroik, dan menggantinya dengan analisis sebab-akibat sosial. Pendekatan inilah yang kemudian membuatnya diakui

sebagai peletak dasar ilmu sosiologi, jauh sebelum disiplin tersebut berkembang di Barat.

Pada fase akhir hidupnya, Ibnu Khaldun menetap di Kairo dan mengabdikan diri sebagai pengajar serta hakim mazhab Maliki. Ia dihormati sebagai ulama besar dan cendekiawan terkemuka. Di Mesir, ia juga sempat bertemu dengan penguasa besar Timur, Timur Lenk (Tamerlane), dalam sebuah peristiwa diplomatik yang menunjukkan reputasinya sebagai intelektual berwibawa lintas wilayah.

Ibnu Khaldun wafat pada tahun 1406 M di Kairo. Dia meninggalkan warisan intelektual yang luar biasa, meskipun pada masanya pemikirannya belum sepenuhnya diapresiasi. Baru berabad-abad kemudian, dunia akademik modern mengakui kedalaman dan orisinalitas gagasannya.

Kehidupan Ibnu Khaldun menunjukkan perpaduan unik antara pengalaman hidup, praktik politik, dan refleksi intelektual. Ia bukan pemikir menara gading, melainkan pengamat tajam masyarakat yang berpijak pada realitas sejarah. Dari masa kecil yang penuh kehilangan, pendidikan klasik yang ketat, pengalaman pahit-manis dalam pemerintahan, hingga karya monumental yang melampaui zamannya, Ibnu Khaldun tampil sebagai sosok pemikir besar yang menjembatani sejarah, sosiologi, dan komunikasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, S. F. (2014). *Applying Ibn Khaldun: The recovery of a lost tradition in sociology*. London: Routledge.

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Cambridge: Polity Press.

Durkheim, E. (1912). *The elementary forms of the religious life*. New York: Free Press.

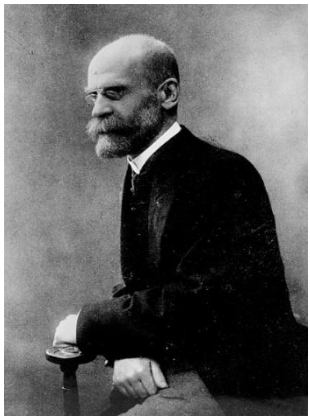
Ibn Khaldun. (1967). *The Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton: Princeton University Press.

Ibn Khaldun. (2005). *Muqaddimah* (Terj. Ahmadie Thaha). Jakarta: Pustaka Firdaus

BAB 2

ÉMILE DURKHEIM: SIMBOL, RITUAL, DAN KESADARAN KOLEKTIF

Dr. Ahdan Sinilele, S.Ag, S.Sos, M.Si



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim

Pemikiran Émile Durkheim menempati posisi fundamental dalam sosiologi klasik, khususnya dalam menjelaskan bagaimana masyarakat mempertahankan keteraturan dan kohesi sosial. Berbeda dari pendekatan individualistik yang menempatkan kehendak atau rasionalitas individu sebagai sumber utama tindakan sosial, Durkheim menegaskan bahwa masyarakat merupakan realitas moral dan simbolik yang memiliki kekuatan memaksa atas individu-individunya (Durkheim, 1982). Dalam kerangka ini, simbol dan ritual bukan sekadar fenomena kultural, melainkan mekanisme komunikasi sosial utama yang membentuk dan mereproduksi kesadaran kolektif.

Durkheim secara tegas menolak reduksionisme psikologis dan rasionalisme individualistik yang memandang tindakan sosial semata-mata sebagai hasil pilihan rasional atau motivasi subjektif individu. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa individu justru dibentuk terlebih dahulu oleh struktur sosial sebelum mampu bertindak sebagai subjek otonom.

Konsepsi masyarakat sebagai realitas moral dan simbolik merupakan inti dari perbedaan Durkheim dengan pendekatan individualistik. Realitas sosial, menurut Durkheim, tidak bersifat material semata, tetapi terutama tersusun dari sistem makna, nilai, dan simbol yang dihayati bersama oleh anggota masyarakat. Nilai moral, norma sosial, dan kategori berpikir kolektif hadir sebagai sesuatu yang "di luar" individu, namun sekaligus menembus kesadaran individu dan membimbing tindakannya. Dengan demikian, keteraturan sosial bukanlah hasil kontrak rasional antarindividu, melainkan akibat dari internalisasi makna kolektif yang dikomunikasikan secara berulang.

Aspek paling krusial dari pandangan ini adalah gagasan tentang kekuatan memaksa (coercive power) realitas sosial. Kekuatan memaksa tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk sanksi fisik atau hukum formal, tetapi sering bekerja melalui mekanisme simbolik dan moral—rasa bersalah, rasa malu, tekanan sosial, dan kewajiban normatif (Durkheim, 1982). Dalam konteks sosiologi komunikasi, hal ini berarti bahwa komunikasi simbolik merupakan sarana utama melalui mana kekuatan sosial tersebut dioperasikan. Norma menjadi mengikat bukan karena dipaksakan secara eksternal, melainkan karena dikomunikasikan dan diterima sebagai sesuatu yang sah dan wajar.

Analisis Durkheim ini memiliki implikasi teoretis yang mendalam. Pertama, ia menggeser fokus analisis dari tindakan individual menuju struktur makna kolektif. Tindakan sosial tidak dapat dipahami secara memadai tanpa menelusuri sistem simbolik yang mendahuluinya. Kedua, ia menempatkan komunikasi pada posisi strategis: komunikasi bukan sekadar medium penyampaian norma, tetapi mekanisme utama reproduksi realitas sosial. Masyarakat bertahan sejauh nilai dan simbolnya terus

dikomunikasikan melalui institusi seperti pendidikan, agama, hukum, dan ritual sosial.

Kohesi sosial bukanlah kondisi alamiah, melainkan hasil kerja komunikasi moral yang berkelanjutan. Ketika komunikasi simbolik berjalan efektif, individu merasakan keterikatan pada masyarakat dan mematuhi norma secara sukarela. Sebaliknya, ketika sistem simbolik kehilangan legitimasi atau mengalami fragmentasi, keteraturan sosial melemah dan masyarakat berisiko mengalami anomie, yakni kondisi disorientasi normatif (Durkheim, 1912). Krisis sosial dapat dipahami sebagai krisis komunikasi simbolik, bukan semata-mata kegagalan ekonomi atau politik.

Tesis ini menolak pandangan naturalistik dan individualistik yang menganggap keteraturan sosial muncul secara spontan dari kepentingan pribadi atau kontrak rasional antarindividu. Sebaliknya, Durkheim menegaskan bahwa kohesi sosial adalah produk sosial yang harus terus-menerus diproduksi dan dipelihara melalui sistem nilai, norma, dan makna kolektif yang dikomunikasikan secara konsisten (Durkheim, 1912; 1982).

Kerangka pikir Durkheimian, komunikasi moral merujuk pada proses sosial di mana nilai dan norma kolektif disampaikan, dilegitimasi, dan diinternalisasi oleh individu. Proses ini tidak terbatas pada komunikasi verbal atau diskursif, tetapi berlangsung melalui simbol, ritual, institusi, dan praktik sosial sehari-hari. Ketika komunikasi simbolik berjalan efektif—yakni ketika simbol dipahami, dipercaya, dan dihormati secara luas—individu merasakan keterikatan emosional dan moral terhadap masyarakat. Kepatuhan terhadap norma dalam kondisi ini bersifat sukarela, karena norma telah dihayati sebagai bagian dari kesadaran diri, bukan sebagai paksaan eksternal (Durkheim, 1982).

Kepatuhan sukarela ini menunjukkan mekanisme utama integrasi sosial menurut Durkheim: internalisasi moral. Norma sosial tidak perlu ditegakkan secara terus-menerus melalui sanksi fisik, karena daya mengikatnya bekerja melalui legitimasi simbolik. Individu menaati aturan karena mereka menganggapnya wajar, benar, dan sah. Dalam perspektif sosiologi komunikasi, legitimasi ini hanya mungkin terjadi melalui pengulangan komunikasi

simbolik yang stabil—melalui pendidikan, hukum, agama, ritual publik, dan media—yang menegaskan kembali makna kolektif lintas waktu dan generasi (Alexander, 2003).

Sebaliknya, ketika sistem simbolik kehilangan legitimasi atau mengalami fragmentasi, mekanisme integrasi tersebut melemah. Fragmentasi simbolik dapat terjadi ketika nilai yang dikomunikasikan oleh institusi sosial menjadi tidak konsisten, saling bertentangan, atau tidak lagi dipercaya. Dalam kondisi ini, individu kehilangan rujukan moral bersama yang sebelumnya memberi orientasi tentang apa yang benar dan salah, pantas dan menyimpang. Durkheim menyebut situasi ini sebagai anomie, yakni kondisi disorientasi normatif di mana norma sosial melemah dan keteraturan sosial terganggu (Durkheim, 1912).

Anomie bukan sekadar ketiadaan aturan, melainkan krisis komunikasi moral. Norma mungkin masih ada secara formal, tetapi kehilangan daya mengikat karena tidak lagi dihayati sebagai sah. Dari sudut pandang sosiologi komunikasi, anomie muncul ketika komunikasi simbolik gagal menjembatani struktur sosial dengan kesadaran individu. Individu tidak lagi merasakan keterikatan emosional atau kewajiban moral terhadap nilai kolektif, sehingga tindakan sosial menjadi tidak terkoordinasi dan cenderung bersifat instrumental atau oportunistik (Ritzer, 2011).

Kohesi sosial sangat bergantung pada kualitas komunikasi simbolik, bukan semata pada keberadaan norma atau institusi. Masyarakat dengan sistem hukum yang kompleks sekalipun dapat mengalami disintegrasi jika komunikasi moral yang menopangnya kehilangan legitimasi. Dengan kata lain, keteraturan sosial tidak dijamin oleh banyaknya aturan, tetapi oleh kepercayaan kolektif terhadap makna simbolik aturan tersebut.

Konteks masyarakat modern dan kontemporer, tesis Durkheim ini tetap relevan. Diferensiasi sosial, pluralitas nilai, dan fragmentasi media memperbesar tantangan komunikasi moral. Ketika ruang publik dipenuhi oleh simbol dan narasi yang saling bersaing tanpa rujukan normatif bersama, risiko anomie meningkat. Oleh karena itu, kohesi sosial modern menuntut kerja komunikasi yang lebih reflektif dan institusional untuk membangun konsensus

moral minimal yang memungkinkan integrasi di tengah keberagaman (Alexander, 2003; Collins, 2004).

Kohesi sosial adalah hasil dari proses komunikasi yang bersifat normatif dan simbolik. Keteraturan sosial tidak bersumber dari kepentingan individual semata, melainkan dari keberhasilan masyarakat dalam mengomunikasikan nilai bersama secara sah dan bermakna. Ketika komunikasi moral melemah, masyarakat tidak hanya menghadapi konflik sosial, tetapi juga kehilangan orientasi normatif yang menjadi dasar eksistensinya sebagai tatanan sosial yang terintegrasi

Perspektif sosiologi komunikasi, alenia ini menegaskan bahwa kontribusi Durkheim tidak hanya bersifat historis, tetapi juga konseptual-fundamental. Ia meletakkan dasar bagi pemahaman komunikasi sebagai fondasi ontologis masyarakat—mekanisme yang membentuk, memelihara, dan menegosiasikan keteraturan sosial. Pandangan ini tetap relevan dalam masyarakat modern dan digital, di mana simbol, media, dan praktik komunikasi memainkan peran yang semakin menentukan dalam menjaga atau meretakkan kohesi sosial.

A. Fakta Sosial dan Fungsi Simbol

Konsep fakta sosial merupakan landasan teoritis Durkheim dalam memahami kehidupan masyarakat. Fakta sosial didefinisikan sebagai cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang berada di luar individu, bersifat umum, serta memiliki daya memaksa (coercive power) terhadap individu (Durkheim, 1982). Bahasa, norma, hukum, dan simbol kolektif termasuk dalam kategori fakta sosial karena keberadaannya mendahului individu dan membentuk perilaku mereka.

Definisi ini menandai pemutusan tegas Durkheim dari pendekatan individualistik dan psikologis yang menjelaskan tindakan sosial semata-mata sebagai hasil kehendak atau rasionalitas personal.

Fakta sosial sebagai *cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang berada di luar individu, bersifat umum, serta memiliki daya memaksa terhadap individu*, Durkheim secara tegas menetapkan

masyarakat sebagai realitas objektif dan otonom, yang tidak dapat direduksi menjadi agregasi kehendak atau kesadaran individual (Durkheim, 1982).

Pertama, sifat eksternalitas fakta sosial menunjukkan bahwa norma, nilai, bahasa, hukum, dan simbol sosial telah ada sebelum individu menjadi anggota masyarakat dan tetap bertahan setelah individu meninggalkannya. Individu lahir ke dalam tatanan simbolik yang sudah mapan, sehingga orientasi berpikir dan bertindak mereka sejak awal dibentuk oleh struktur sosial yang mendahului. Pandangan ini menolak asumsi individualistik yang menempatkan individu sebagai titik awal analisis sosial, dan sebaliknya menegaskan bahwa individu adalah produk sekaligus pembawa fakta sosial (Ritzer, 2011).

Kedua, karakter generalisasi (bersifat umum) menegaskan bahwa fakta sosial tidak bersifat sporadis atau kebetulan, melainkan tersebar luas dan berulang dalam kehidupan kolektif. Bahasa yang digunakan bersama, norma moral yang dianut secara luas, atau aturan hukum yang berlaku umum menciptakan keseragaman makna dan ekspektasi yang memungkinkan koordinasi sosial. Dalam perspektif ini, keteraturan sosial bukan hasil kebetulan, melainkan akibat dari keberadaan pola simbolik yang relatif stabil dan dikomunikasikan secara konsisten (Durkheim, 1912).

Ketiga, aspek paling krusial dari fakta sosial adalah daya memaksa (coercive power). Daya memaksa ini tidak selalu hadir dalam bentuk sanksi fisik atau hukum formal, tetapi sering bekerja melalui mekanisme tekanan moral dan simbolik, seperti rasa bersalah, rasa malu, atau ketakutan akan pengucilan sosial. Individu menaati norma bukan semata karena takut hukuman, tetapi karena norma tersebut telah terinternalisasi sebagai sesuatu yang "seharusnya". Dengan demikian, paksaan sosial bekerja secara halus melalui legitimasi simbolik, bukan dominasi material semata (Durkheim, 1982).

Perspektif sosiologi komunikasi, definisi fakta sosial ini memiliki implikasi yang sangat penting. Fakta sosial hanya dapat mempertahankan daya mengikatnya sejauh ia

dikomunikasikan, dilegitimasi, dan direproduksi secara berkelanjutan melalui simbol, bahasa, ritual, dan institusi sosial. Pendidikan mengomunikasikan disiplin dan nilai moral, hukum mengartikulasikan batas perilaku yang sah, sementara ritual dan media memperkuat kesadaran kolektif. Dengan kata lain, komunikasi bukan sekadar saluran penyebaran norma, tetapi mekanisme utama yang memungkinkan fakta sosial bekerja sebagai kekuatan objektif (Alexander, 2003).

Durkheim menjelaskan mengapa krisis sosial sering kali berakar pada krisis komunikasi simbolik. Ketika norma kehilangan legitimasi, simbol dipertanyakan, atau pesan moral institusi menjadi tidak konsisten, daya memaksa fakta sosial melemah. Kondisi ini membuka ruang bagi anomie, yaitu situasi disorientasi normatif ketika individu tidak lagi memiliki rujukan moral bersama untuk bertindak (Durkheim, 1912). Dalam konteks ini, runtuhnya keteraturan sosial bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan, melainkan oleh kegagalan komunikasi moral dalam mempertahankan makna kolektif.

Krisis sosial sering kali berakar pada krisis komunikasi simbolik merupakan salah satu implikasi paling penting dari analisis Émile Durkheim tentang keteraturan dan disintegrasi sosial. Durkheim menegaskan bahwa stabilitas masyarakat tidak bergantung terutama pada kekuatan material atau paksaan fisik, melainkan pada keberhasilan sistem simbolik dalam mengomunikasikan dan melegitimasi norma kolektif. Ketika komunikasi simbolik ini terganggu, daya mengikat fakta sosial melemah, dan masyarakat kehilangan fondasi normatifnya (Durkheim, 1912; 1982).

Kerangka pikir Durkheimian, legitimasi norma merupakan prasyarat utama agar fakta sosial memiliki daya memaksa (*coercive power*). Norma tidak bekerja karena ia tertulis atau dipaksakan secara formal, tetapi karena ia dipersepsi sebagai sah, wajar, dan bermakna oleh anggota masyarakat. Persepsi ini dibentuk melalui komunikasi simbolik yang konsisten—melalui bahasa, ritual, pendidikan, hukum, dan institusi sosial. Ketika simbol-simbol normatif dipertanyakan,

dipolitisasi secara ekstrem, atau disampaikan secara tidak konsisten oleh institusi, legitimasi tersebut terkikis. Akibatnya, norma tetap ada secara formal, tetapi kehilangan kekuatan moralnya.

Fragmentasi simbolik mempercepat proses ini. Dalam situasi di mana berbagai simbol dan narasi moral saling bersaing tanpa rujukan kolektif yang diakui bersama, individu dihadapkan pada pluralitas makna yang tidak terkoordinasi. Durkheim menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan tingkat keseragaman simbolik minimum agar integrasi sosial dapat dipertahankan. Ketika keseragaman ini runtuh, individu tidak lagi memiliki orientasi normatif yang stabil untuk bertindak. Dalam konteks inilah muncul kondisi anomie, yang oleh Durkheim dipahami bukan sekadar ketiadaan aturan, tetapi ketiadaan makna normatif yang mengikat (Durkheim, 1912).

Anomie, dengan demikian, merupakan gejala kegagalan komunikasi moral, bukan semata kegagalan regulasi sosial. Individu tidak berhenti bertindak karena tidak ada aturan, tetapi karena aturan yang ada tidak lagi dipahami atau dipercaya. Dari perspektif sosiologi komunikasi, kondisi ini menandakan terputusnya relasi antara struktur sosial dan kesadaran individu. Fakta sosial tetap eksis sebagai struktur objektif, tetapi gagal diinternalisasi karena komunikasi simbolik yang menopangnya tidak lagi efektif atau kredibel (Ritzer, 2011).

Institusi sosial sebagai komunikator moral. Pendidikan, hukum, agama, dan negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi berperan sebagai agen utama yang mengomunikasikan nilai kolektif secara sah dan konsisten. Ketika institusi-institusi tersebut menyampaikan pesan moral yang kontradiktif, bias, atau kehilangan kepercayaan publik, komunikasi moral mengalami krisis. Dalam kondisi ini, masyarakat modern—yang ditandai oleh diferensiasi dan pluralitas nilai—justru semakin rentan terhadap anomie karena tidak adanya rujukan simbolik bersama yang mampu menjembatani perbedaan (Alexander, 2003).

Pemikiran Durkheim ini memiliki relevansi yang kuat dalam konteks masyarakat kontemporer. Fragmentasi media, polarisasi wacana publik, dan percepatan sirkulasi simbol di ruang digital memperbesar risiko krisis komunikasi simbolik. Ketika pesan moral beredar secara simultan namun saling bertentangan, dan tidak ada otoritas simbolik yang diakui secara luas, kesadaran kolektif melemah. Dari sudut pandang Durkheimian, kondisi ini menciptakan lahan subur bagi anomie, bahkan di masyarakat yang secara struktural tampak maju dan terinstitusionalisasi. Durkheim memiliki relevansi kuat dalam konteks masyarakat kontemporer menegaskan daya jelajah teoretis sosiologi klasik dalam membaca problem komunikasi modern. Meskipun Durkheim menulis dalam konteks masyarakat pra-digital, kerangka analitisnya tentang simbol, kesadaran kolektif, dan anomie justru semakin relevan ketika masyarakat menghadapi fragmentasi komunikasi yang intens akibat perkembangan media dan teknologi digital.

Perspektif Durkheimian, kesadaran kolektif bergantung pada stabilitas dan legitimasi sistem simbolik yang dikomunikasikan secara luas dan konsisten. Fragmentasi media dan polarisasi wacana publik—yang ditandai oleh banyaknya sumber informasi, narasi moral yang saling bertentangan, serta melemahnya otoritas simbolik tunggal—mengganggu proses ini. Ketika simbol-simbol sosial tidak lagi memiliki makna yang relatif seragam, komunikasi gagal membangun horizon normatif bersama yang menjadi dasar integrasi sosial (Durkheim, 1912).

Percepatan sirkulasi simbol di ruang digital memperparah kondisi tersebut. Media digital memungkinkan pesan moral, nilai, dan identitas beredar secara simultan, cepat, dan masif, tetapi tanpa mekanisme seleksi normatif yang jelas. Dalam situasi ini, individu terpapar pada pluralitas simbolik yang tidak terkoordinasi, sehingga sulit membedakan mana nilai yang sah, mana yang bersifat partikular, dan mana yang sekadar strategis. Dari sudut pandang Durkheim, kondisi ini melemahkan fungsi komunikasi simbolik sebagai penopang kesadaran kolektif.

Ketiadaan otoritas simbolik yang diakui secara luas menjadi faktor kunci dalam analisis ini. Durkheim menekankan bahwa simbol memperoleh kekuatan normatif bukan karena sifat intrinsiknya, melainkan karena pengakuan kolektif terhadap legitimasi simbol tersebut. Ketika institusi sosial—seperti negara, pendidikan, hukum, dan media—kehilangan kepercayaan publik atau menyampaikan pesan moral yang kontradiktif, simbol-simbol yang mereka komunikasikan kehilangan daya mengikatnya. Norma tetap ada secara formal, tetapi tidak lagi dihayati sebagai kewajiban moral (Durkheim, 1982).

Pada kondisi inilah muncul anomie, yang oleh Durkheim dipahami sebagai situasi disorientasi normatif akibat melemahnya rujukan moral bersama. Penting ditegaskan bahwa anomie bukan ketiadaan aturan, melainkan ketiadaan makna normatif yang dipercaya. Individu menghadapi terlalu banyak tuntutan simbolik yang saling bersaing tanpa pedoman legitimasi yang jelas. Akibatnya, tindakan sosial menjadi tidak terkoordinasi, dan keterikatan moral terhadap masyarakat melemah (Durkheim, 1912; Ritzer, 2011).

Kemajuan struktural dan institusional tidak secara otomatis menjamin integrasi sosial. Masyarakat yang tampak maju—dengan sistem hukum, teknologi, dan institusi yang kompleks—tetap rentan terhadap disintegrasi jika komunikasi simboliknya mengalami krisis. Dari perspektif sosiologi komunikasi, kondisi ini menegaskan bahwa krisis sosial modern sering kali merupakan krisis komunikasi moral, bukan semata-mata krisis ekonomi atau politik.

Relevansi berkelanjutan pemikiran Durkheim dalam membaca masyarakat digital. Fragmentasi media dan polarisasi wacana publik dapat dipahami sebagai tantangan serius bagi kesadaran kolektif, karena mengganggu kemampuan masyarakat untuk membangun makna bersama. Dalam kerangka Durkheimian, menjaga kohesi sosial di era digital menuntut komunikasi simbolik yang mampu membangun legitimasi normatif lintas perbedaan, bukan sekadar

memperbanyak arus informasi. Perspektif ini menjadikan sosiologi komunikasi sebagai disiplin kunci untuk memahami dinamika integrasi dan anomie dalam masyarakat kontemporer.

Tesis fundamental Durkheim: keteraturan sosial bergantung pada keberlangsungan komunikasi simbolik yang sah dan bermakna. Krisis sosial tidak selalu bermula dari kegagalan ekonomi atau konflik politik, tetapi sering kali berakar pada runtuhnya legitimasi simbolik dan komunikasi moral. Perspektif ini menempatkan sosiologi komunikasi sebagai disiplin kunci untuk memahami dinamika integrasi dan disintegrasi masyarakat, karena komunikasi merupakan medium utama di mana norma memperoleh, mempertahankan, atau kehilangan kekuatan mengikatnya.

Konsep fakta sosial bukan sekadar definisi metodologis, tetapi fondasi ontologis sosiologi Durkheim. Ia menunjukkan bahwa masyarakat bertahan bukan karena kontrak rasional atau kepentingan individual, melainkan karena keberhasilan mengomunikasikan nilai dan norma sebagai realitas objektif yang mengikat. Konsep ini menjadikan komunikasi sebagai prasyarat eksistensi struktur sosial, sekaligus menjelaskan bagaimana kohesi, keteraturan, dan integrasi masyarakat diproduksi dan dipertahankan lintas generasi.

Sifat eksternalitas fakta sosial menunjukkan bahwa norma, nilai, bahasa, hukum, dan simbol sosial telah ada sebelum individu lahir dan tetap bertahan setelah individu meninggal. Individu tidak menciptakan fakta sosial secara bebas, melainkan dimasukkan ke dalam tatanan simbolik dan normatif yang sudah mapan. Dengan demikian, individu sejak awal dibentuk oleh struktur sosial yang mendahuluinya. Pandangan ini memiliki implikasi epistemologis penting: realitas sosial tidak dapat direduksi menjadi kesadaran subjektif, melainkan harus dipahami sebagai struktur objektif yang dapat diamati dan dianalisis secara ilmiah (Ritzer, 2011).

Karakter generalisasi (bersifat umum) menegaskan bahwa fakta sosial tidak bersifat sporadis atau insidental. Ia hadir secara luas dan konsisten dalam kehidupan kolektif, seperti tata

bahasa, adat istiadat, sistem hukum, dan moralitas. Generalitas ini menunjukkan bahwa fakta sosial memiliki stabilitas relatif dan berfungsi sebagai pola keteraturan yang memungkinkan masyarakat beroperasi secara terkoordinasi. Tanpa adanya keseragaman makna dan norma yang dikomunikasikan secara luas, interaksi sosial akan mengalami fragmentasi dan ketidakpastian (Durkheim, 1912).

Aspek paling krusial dari fakta sosial adalah daya memaksa (coercive power). Daya memaksa ini tidak selalu muncul dalam bentuk sanksi fisik atau hukuman formal, tetapi sering bekerja secara halus melalui tekanan moral dan simbolik, seperti rasa bersalah, rasa malu, atau ketakutan akan pengucilan sosial. Individu mematuhi norma bukan hanya karena takut dihukum, tetapi karena norma tersebut telah terinternalisasi sebagai sesuatu yang wajar dan seharusnya. Dalam konteks ini, kekuatan fakta sosial beroperasi terutama melalui mekanisme komunikasi simbolik, bukan paksaan material semata (Durkheim, 1982).

Perspektif sosiologi komunikasi, konsep fakta sosial memiliki implikasi mendalam. Fakta sosial hanya dapat bertahan sejauh ia dikomunikasikan, dilegitimasi, dan direproduksi secara berkelanjutan melalui simbol, bahasa, ritual, dan institusi sosial. Pendidikan mengomunikasikan disiplin dan nilai moral, hukum mengartikulasikan batas perilaku yang sah, sementara ritual dan media menyebarkan simbol kolektif yang memperkuat kesadaran bersama. Dengan demikian, komunikasi bukan sekadar sarana penyebaran norma, tetapi mekanisme utama produksi dan reproduksi fakta sosial itu sendiri (Alexander, 2003).

Pemahaman ini juga menjelaskan mengapa krisis sosial sering kali berakar pada krisis komunikasi simbolik. Ketika norma kehilangan legitimasi, simbol dipertanyakan, atau pesan moral institusi menjadi tidak konsisten, daya memaksa fakta sosial melemah. Kondisi inilah yang oleh Durkheim disebut sebagai anomie, yakni situasi disorientasi normatif akibat runtuhnya rujukan moral kolektif (Durkheim, 1912). Dengan

kata lain, gangguan terhadap komunikasi simbolik akan berdampak langsung pada keteraturan sosial.

Menempatkan fakta sosial sebagai realitas simbolik yang memiliki daya memaksa, Durkheim meletakkan dasar konseptual bagi sosiologi komunikasi. Ia menunjukkan bahwa masyarakat tidak dipertahankan oleh kehendak individual semata, tetapi oleh struktur makna kolektif yang dikomunikasikan dan diinternalisasi. Konsep ini menjadikan komunikasi sebagai fondasi ontologis kehidupan sosial, sekaligus menjelaskan bagaimana keteraturan, integrasi, dan kohesi sosial dapat bertahan lintas generasi.

Perspektif sosiologi komunikasi, simbol berfungsi sebagai media objektivasi nilai-nilai kolektif. Nilai moral yang abstrak—seperti kebaikan, kesucian, keadilan, atau otoritas—menjadi konkret dan dapat dialami secara bersama melalui simbol. Melalui simbol, masyarakat "berkomunikasi" dengan anggotanya tentang apa yang dianggap sah, benar, dan mengikat. Oleh karena itu, simbol tidak bersifat netral, melainkan membawa kekuatan normatif yang menopang keteraturan sosial (Alexander, 2003).

B. Ritual sebagai Proses Komunikasi Sosial

Pemikiran Émile Durkheim, ritual menempati posisi sentral dalam memahami bagaimana masyarakat membangun, memelihara, dan mentransmisikan keteraturan sosial. Durkheim menolak pandangan yang melihat ritual semata-mata sebagai praktik keagamaan atau tradisi simbolik tanpa fungsi sosial. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa ritual adalah mekanisme komunikasi sosial yang fundamental, melalui mana masyarakat menegaskan kembali nilai, norma, dan identitas kolektifnya.

Ritual, dalam kerangka Durkheimian, merupakan tindakan sosial yang terlembagakan, dilakukan secara berulang, kolektif, dan sarat makna simbolik. Melalui ritual, masyarakat tidak hanya mengekspresikan keyakinan, tetapi juga mengomunikasikan dan menginternalisasikan kesadaran kolektif kepada para anggotanya. Dengan demikian, ritual

berfungsi sebagai medium komunikasi yang menghubungkan individu dengan struktur sosial yang lebih luas.

Salah satu kontribusi utama Durkheim adalah pemahamannya bahwa ritual merupakan momen di mana komunikasi sosial mencapai intensitas tertingginya. Dalam *The Elementary Forms of the Religious Life*, Durkheim memperkenalkan konsep *collective effervescence*, yaitu kondisi emosional bersama yang muncul ketika individu berkumpul dalam praktik ritual. Ledakan emosi kolektif ini tidak bersifat psikologis individual, melainkan sosial: ia memperkuat rasa kebersamaan dan menegaskan bahwa individu adalah bagian dari entitas moral yang lebih besar, yakni masyarakat itu sendiri (Durkheim, 1912).

Perspektif sosiologi komunikasi, *collective effervescence* dapat dipahami sebagai proses komunikasi afektif, di mana makna tidak hanya disampaikan melalui bahasa verbal, tetapi juga melalui gestur, ritme, simbol visual, dan emosi bersama. Ritual, dengan demikian, adalah bentuk komunikasi multimodal yang sangat efektif dalam menanamkan nilai kolektif, karena ia bekerja pada level kognitif sekaligus emosional. Pesan sosial yang disampaikan melalui ritual cenderung lebih kuat dan tahan lama dibandingkan komunikasi diskursif biasa.

Dalam perspektif sosiologi komunikasi, konsep *collective effervescence* yang diperkenalkan oleh Émile Durkheim dapat dipahami sebagai proses komunikasi afektif yang bekerja melampaui bahasa verbal dan diskursus rasional. Durkheim menunjukkan bahwa dalam momen-momen ritual kolektif, makna sosial tidak terutama ditransmisikan melalui argumen atau proposisi linguistik, melainkan melalui sinkronisasi emosi, tubuh, dan simbol yang dialami secara bersama oleh para partisipan.

Komunikasi afektif dalam *collective effervescence* berlangsung melalui berbagai medium nonverbal: gestur tubuh yang seragam, ritme gerak atau suara yang berulang, simbol visual yang sarat makna, serta intensitas emosi yang dibagi secara kolektif. Unsur-unsur ini membentuk apa yang dapat

disebut sebagai bahasa sosial non-diskursif, yakni cara masyarakat "berkomunikasi" tentang nilai, identitas, dan keterikatan tanpa harus merumuskannya secara eksplisit dalam kata-kata. Dalam kondisi ini, emosi tidak bersifat individual, tetapi menjadi fenomena sosial yang diproduksi dan dirasakan bersama.

Durkheim menegaskan bahwa kekuatan utama *collective effervescence* terletak pada kemampuannya menciptakan pengalaman transendensi sosial: individu merasakan dirinya larut dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, yakni masyarakat. Dari sudut pandang sosiologi komunikasi, pengalaman ini merupakan bentuk internalisasi makna kolektif yang sangat efektif, karena pesan sosial disampaikan melalui pengalaman emosional yang intens, bukan sekadar melalui instruksi normatif. Makna yang dikomunikasikan secara afektif cenderung lebih mendalam dan tahan lama dibandingkan makna yang hanya disampaikan secara kognitif.

Analisis ini menunjukkan bahwa komunikasi afektif memiliki daya integratif yang sangat kuat. Ketika individu mengalami emosi yang sama pada waktu yang sama, tercipta keseragaman perasaan yang memperkuat solidaritas sosial. Dalam istilah Durkheim, momen ini memperbaharui kesadaran kolektif dan menegaskan kembali batas antara yang sakral dan yang profan. Dengan demikian, *collective effervescence* bukan sekadar efek samping ritual, tetapi merupakan mekanisme komunikasi utama yang memungkinkan nilai dan norma kolektif memperoleh legitimasi moral.

Lebih jauh, pemahaman *collective effervescence* sebagai komunikasi afektif memperluas cakupan analisis sosiologi komunikasi. Ia menunjukkan bahwa komunikasi sosial tidak dapat direduksi menjadi pertukaran pesan rasional atau informasi semata. Sebaliknya, komunikasi juga bekerja melalui emosi, tubuh, dan simbol, yang sering kali justru lebih menentukan dalam membangun keterikatan sosial. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa ritual, upacara massal, peristiwa media besar, atau bahkan fenomena viral di era digital

mampu menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, meskipun minim argumentasi rasional.

Aspek masyarakat modern dan digital, konsep ini tetap relevan. Media massa dan media sosial menciptakan bentuk-bentuk baru *collective effervescence*, di mana emosi kolektif diproduksi melalui gambar, video, musik, dan narasi visual yang tersebar luas. Dari sudut pandang Durkheimian, fenomena ini menunjukkan bahwa logika komunikasi afektif tetap menjadi fondasi integrasi sosial, meskipun medium dan skalanya berubah. Dengan demikian, *collective effervescence* dapat dipahami sebagai jembatan teoretis yang menghubungkan ritual klasik dengan praktik komunikasi kontemporer.

Pendalaman ini menegaskan bahwa dalam sosiologi komunikasi, *collective effervescence* adalah konsep kunci untuk memahami bagaimana masyarakat membangun makna dan solidaritas melalui komunikasi yang bersifat emosional, simbolik, dan kolektif. Ia memperlihatkan bahwa komunikasi bukan hanya soal apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang dirasakan bersama, dan bagaimana perasaan tersebut membentuk realitas sosial yang dianggap sah dan mengikat.

Durkheim juga menekankan bahwa ritual berfungsi untuk memperbaharui dan mereproduksi fakta sosial. Nilai dan norma kolektif tidak bersifat permanen; ia harus terus-menerus ditegaskan agar tetap hidup dan mengikat. Ritual menyediakan ruang dan waktu khusus bagi masyarakat untuk "berkomunikasi dengan dirinya sendiri", menegaskan kembali batas antara yang sakral dan yang profan, serta memperkuat legitimasi norma yang berlaku.

Tanpa ritual, fakta sosial akan kehilangan daya memaksanya dan masyarakat berisiko mengalami disintegrasi normatif atau *anomie*.

Lebih jauh, ritual memiliki fungsi integratif yang sangat penting. Dalam masyarakat yang kompleks dan terdiferensiasi, ritual berperan sebagai mekanisme penyatu yang melampaui perbedaan kelas, kepentingan, dan identitas individual. Upacara keagamaan, peringatan nasional, atau ritus institusional seperti

wisuda dan pelantikan jabatan dapat dipahami sebagai ritual modern yang mengomunikasikan nilai bersama dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, ritual tidak terbatas pada masyarakat tradisional, tetapi tetap relevan Pada aspek masyarakat modern.

Analisis Durkheim juga membuka ruang kritik. Dengan menekankan fungsi integratif ritual, pendekatannya cenderung mengabaikan dimensi konflik dan kekuasaan yang melekat dalam praktik ritual. Ritual tidak selalu netral; ia dapat menjadi sarana legitimasi kekuasaan dan reproduksi dominasi simbolik. Meski demikian, justru di sinilah kekuatan kerangka Durkheimian: ritual dapat dipahami sebagai arena komunikasi sosial yang strategis, di mana makna, otoritas, dan identitas dinegosiasikan dan dipertahankan.

Aspek sosiologi komunikasi kontemporer, pemikiran Durkheim tentang ritual memberikan dasar teoritis yang kuat untuk menganalisis fenomena modern seperti ritual media, peristiwa viral, atau praktik kolektif di ruang digital. Media massa dan media sosial menciptakan bentuk-bentuk baru *collective effervescence*, di mana emosi kolektif dan makna sosial diproduksi melalui komunikasi simbolik berskala luas. Hal ini menunjukkan bahwa ritual sebagai proses komunikasi sosial tidak kehilangan relevansinya, melainkan mengalami transformasi medium.

Sosiologi komunikasi kontemporer, pemikiran Émile Durkheim tentang ritual menyediakan kerangka analitis yang sangat relevan untuk membaca transformasi praktik komunikasi di masyarakat modern, khususnya dalam lingkungan media dan ruang digital. Durkheim menunjukkan bahwa ritual bukan semata praktik tradisional yang terkait dengan agama atau adat, melainkan mekanisme sosial universal yang berfungsi untuk memproduksi dan memperbarui solidaritas melalui komunikasi simbolik. Dengan kerangka ini, fenomena modern seperti ritual media, peristiwa viral, dan praktik kolektif daring dapat dipahami sebagai bentuk baru ritual sosial**,** bukan sekadar produk teknologi atau hiburan massal.

Ritual media—seperti siaran langsung peristiwa kenegaraan, peringatan nasional, atau liputan bencana besar—berfungsi serupa dengan ritual klasik yang dianalisis Durkheim. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi menciptakan momen komunikasi kolektif di mana perhatian publik tersinkronisasi, emosi dibagi secara luas, dan makna sosial ditegaskan bersama. Dalam momen-momen ini, masyarakat mengalami versi modern dari *collective effervescence*, di mana simbol, narasi, dan emosi diproduksi secara simultan dan membentuk kesadaran kolektif berskala nasional bahkan global.

Fenomena peristiwa viral di media sosial juga dapat dibaca melalui lensa Durkheimian. Konten viral—baik berupa simbol visual, slogan, atau narasi emosional—berfungsi sebagai pemicu ritual digital, yang mengundang partisipasi kolektif melalui berbagi, memberi reaksi, dan berkomentar. Partisipasi ini bukan tindakan individual yang terisolasi, melainkan praktik sosial yang memperkuat rasa kebersamaan, identitas kelompok, atau bahkan polarisasi. Dengan demikian, viralitas bukan sekadar soal algoritma, tetapi tentang kemampuan simbol tertentu memobilisasi emosi kolektif dan menghasilkan resonansi sosial.

Praktik kolektif di ruang digital—seperti kampanye daring, gerakan solidaritas virtual, atau ritual peringatan online—menunjukkan bahwa fungsi integratif ritual tetap bekerja meskipun tanpa kehadiran fisik. Durkheim membantu kita memahami bahwa yang esensial dari ritual bukanlah kedekatan spasial, melainkan sinkronisasi simbolik dan afektif. Ruang digital memungkinkan sinkronisasi tersebut terjadi secara cepat dan masif, meskipun dalam bentuk yang lebih cair dan temporer. Akibatnya, solidaritas yang dihasilkan sering kali bersifat intens tetapi tidak selalu stabil.

Tidak semua ritual digital menghasilkan integrasi sosial; sebagian justru memperkuat fragmentasi dan konflik simbolik. Dari sudut pandang Durkheimian, kondisi ini dapat dipahami sebagai kompetisi antarritual, di mana berbagai simbol dan

narasi saling berebut legitimasi dalam ruang komunikasi yang terfragmentasi. Ketika tidak ada simbol dominan yang diakui secara luas, kesadaran kolektif menjadi terpecah dan integrasi sosial melemah.

Pemikiran Durkheim tentang ritual memberikan dasar teoretis yang kokoh untuk memahami komunikasi kontemporer sebagai arena ritualisasi makna. Media dan teknologi digital tidak menghapus fungsi ritual, melainkan mentransformasikannya. Sosiologi komunikasi, melalui lensa Durkheimian, dapat melihat bahwa di balik peristiwa viral dan praktik daring terdapat proses komunikasi simbolik yang menentukan bagaimana masyarakat modern membangun solidaritas, mengelola konflik, dan mendefinisikan realitas sosialnya.

Ritual dalam perspektif Durkheim bukan sekadar tradisi atau kebiasaan, tetapi mekanisme komunikasi sosial yang menopang integrasi, legitimasi, dan keberlanjutan masyarakat. Subbab ini menegaskan bahwa memahami ritual berarti memahami bagaimana masyarakat membangun keteraturan melalui komunikasi simbolik yang berulang, emosional, dan terlembagakan.

C. Integrasi Sosial dan Moral Kolektif

Bagi Durkheim, kesadaran kolektif merupakan sistem kepercayaan dan sentimen bersama yang mengikat individu ke dalam tatanan sosial. Kesadaran ini tidak muncul secara spontan, melainkan dibentuk dan dipelihara melalui komunikasi simbolik dan ritual yang berulang. Dalam masyarakat tradisional, kesadaran kolektif bersifat kuat dan homogen. Dalam masyarakat modern yang terdiferensiasi, kesadaran kolektif menjadi lebih abstrak, tetapi tetap diperlukan dalam bentuk simbol nasional, hukum, dan pendidikan untuk menjaga integrasi sosial (Durkheim, 1912).

Kesadaran kolektif (*conscience collective*) merujuk pada keseluruhan nilai, norma, keyakinan, dan emosi bersama yang hidup di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai perekat moral

yang memungkinkan keteraturan sosial terjaga (Durkheim, 1912). Dalam pandangan ini, individu tidak berdiri sebagai entitas otonom yang sepenuhnya bebas, melainkan selalu terhubung dengan kerangka makna kolektif yang membimbing cara berpikir, merasakan, dan bertindak.

Durkheim secara tegas menolak anggapan bahwa kesadaran kolektif muncul secara alamiah atau spontan dari interaksi individual. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa kesadaran kolektif adalah hasil konstruksi sosial yang terorganisasi, yang dibentuk dan dipelihara melalui proses komunikasi simbolik yang berulang dan terlembagakan. Kesadaran kolektif bertahan bukan karena kesepakatan rasional semata, tetapi karena ia dikomunikasikan secara konsisten sebagai sesuatu yang sah, benar, dan mengikat (Durkheim, 1982).

Komunikasi simbolik menempati posisi sentral. Bahasa, simbol keagamaan, lambang nasional, hukum, serta kategori moral berfungsi sebagai media melalui mana masyarakat menyampaikan dan menanamkan nilai kolektif kepada individu. Komunikasi simbolik memungkinkan nilai yang abstrak—seperti keadilan, kesucian, atau kewajiban—menjadi konkret dan dapat dialami bersama. Dengan demikian, kesadaran kolektif bukan entitas abstrak yang terpisah dari praktik sosial, melainkan produk dari sirkulasi makna simbolik dalam kehidupan sehari-hari (Alexander, 2003).

Ritual memperkuat dan mengintensifkan proses komunikasi simbolik tersebut. Dalam ritual, masyarakat menciptakan momen khusus di mana nilai dan identitas kolektif ditegaskan kembali melalui praktik bersama yang sarat makna. Konsep *collective effervescence* yang diperkenalkan Durkheim menjelaskan bagaimana emosi kolektif yang muncul dalam ritual berfungsi sebagai mekanisme internalisasi kesadaran kolektif. Emosi yang dialami bersama tidak hanya mempererat ikatan sosial, tetapi juga membuat nilai kolektif dirasakan secara afektif, sehingga lebih mudah tertanam dalam kesadaran individu (Durkheim, 1912).

Perspektif sosiologi komunikasi, kesadaran kolektif dapat dipahami sebagai hasil dari proses komunikasi normatif. Komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi membangun orientasi moral bersama yang memungkinkan individu memahami posisi dirinya dalam tatanan sosial. Ketika komunikasi simbolik berjalan stabil dan dipercaya, kesadaran kolektif menjadi kuat dan integrasi sosial terjaga. Sebaliknya, ketika komunikasi simbolik terfragmentasi atau kehilangan legitimasi, kesadaran kolektif melemah dan masyarakat berisiko mengalami disorientasi normatif.

Kesadaran kolektif bersifat historis dan dinamis. Dalam masyarakat tradisional, kesadaran kolektif cenderung homogen dan diwujudkan melalui ritual yang relatif seragam. Dalam masyarakat modern yang terdiferensiasi, kesadaran kolektif menjadi lebih abstrak dan kompleks, namun tetap bergantung pada komunikasi simbolik yang dilembagakan melalui institusi seperti pendidikan, hukum, dan negara. Tanpa mekanisme komunikasi tersebut, pluralitas nilai berpotensi mengarah pada fragmentasi dan anomie (Ritzer, 2011).

Tesis utama Durkheim bahwa kesadaran kolektif adalah hasil kerja komunikasi sosial yang berkelanjutan. Masyarakat bertahan bukan karena kehendak individual atau kepentingan material semata, melainkan karena keberhasilan mengomunikasikan nilai dan sentimen bersama secara sah dan bermakna. Perspektif ini menempatkan komunikasi simbolik dan ritual sebagai fondasi ontologis integrasi sosial, sekaligus menjelaskan mengapa krisis sosial sering kali berakar pada krisis komunikasi moral.

Masyarakat tradisional kesadaran kolektif bersifat kuat dan homogen, sedangkan dalam masyarakat modern yang terdiferensiasi kesadaran kolektif menjadi lebih abstrak merupakan tesis kunci dalam pemikiran Émile Durkheim mengenai transformasi bentuk solidaritas sosial. Distingsi ini berakar pada konsep Durkheim tentang solidaritas mekanik dan solidaritas organik, yang digunakan untuk menjelaskan

perubahan struktur moral masyarakat seiring dengan meningkatnya kompleksitas sosial (Durkheim, 1912).

Pada masyarakat tradisional, kesadaran kolektif bersifat kuat, konkret, dan relatif seragam. Individu disatukan oleh kesamaan keyakinan, praktik, dan simbol yang secara langsung mengatur hampir seluruh aspek kehidupan sosial. Norma dan nilai kolektif hadir secara eksplisit dan menembus kesadaran individu secara mendalam, sehingga ruang bagi perbedaan dan otonomi individual relatif terbatas. Dalam konteks ini, integrasi sosial dicapai melalui keseragaman makna yang dikomunikasikan secara intensif melalui ritual, adat, dan simbol keagamaan. Komunikasi simbolik bekerja secara langsung dan emosional, menjadikan kesadaran kolektif sebagai kekuatan moral yang nyata dan mudah dikenali.

Sebaliknya, dalam masyarakat modern yang terdiferensiasi, pembagian kerja sosial meningkat dan menghasilkan spesialisasi peran, kepentingan, serta orientasi nilai yang beragam. Dalam kondisi ini, kesadaran kolektif tidak lagi dapat bertumpu pada kesamaan keyakinan yang konkret dan homogen. Durkheim menegaskan bahwa kesadaran kolektif modern mengalami transformasi dari yang konkret menjadi lebih abstrak—yakni beralih dari simbol religius dan adat yang seragam menuju prinsip-prinsip normatif umum seperti keadilan, hukum, kewargaan, dan tanggung jawab sosial (Durkheim, 1912).

Meskipun menjadi lebih abstrak, kesadaran kolektif tidak kehilangan fungsinya. Justru dalam masyarakat modern, kesadaran kolektif tetap diperlukan sebagai kerangka normatif minimum yang memungkinkan individu-individu dengan latar belakang, peran, dan nilai yang berbeda tetap terikat dalam satu tatanan sosial. Tanpa kerangka ini, diferensiasi sosial berpotensi berubah menjadi fragmentasi sosial. Oleh karena itu, Durkheim menegaskan bahwa masyarakat modern tetap membutuhkan simbol dan institusi kolektif—seperti simbol nasional, sistem hukum, dan pendidikan—sebagai sarana komunikasi moral yang menjaga integrasi sosial.

Perspektif sosiologi komunikasi, transformasi ini menunjukkan pergeseran bentuk komunikasi simbolik. Jika dalam masyarakat tradisional komunikasi moral bersifat langsung dan ritualistik, maka dalam masyarakat modern komunikasi moral menjadi institusional dan terlembagakan. Pendidikan berfungsi mengomunikasikan nilai kewargaan dan disiplin moral; hukum mengartikulasikan batas perilaku yang sah dan tidak sah; simbol nasional dan ritual kenegaraan membangun identitas kolektif yang melampaui perbedaan lokal dan sektoral. Semua ini menunjukkan bahwa integrasi sosial modern sangat bergantung pada kualitas komunikasi simbolik yang dikelola oleh institusi sosial (Durkheim, 1982).

Kesadaran kolektif modern bersifat lebih abstrak, ia lebih rentan terhadap krisis legitimasi. Ketika simbol nasional dipertanyakan, hukum dipersepsi tidak adil, atau pendidikan gagal mengomunikasikan nilai bersama secara konsisten, kesadaran kolektif melemah. Dalam kondisi ini, masyarakat modern—meskipun tampak terinstitusionalisasi secara struktural—berisiko mengalami anomie, yaitu disorientasi normatif akibat runtuhnya rujukan moral bersama (Durkheim, 1912; Ritzer, 2011).

Dengan demikian, alenia tersebut menegaskan bahwa modernitas tidak menghapus kebutuhan akan kesadaran kolektif, melainkan mengubah bentuk dan mediumnya. Kesadaran kolektif modern tidak lagi diwujudkan melalui keseragaman keyakinan religius, tetapi melalui simbol dan institusi yang mengomunikasikan nilai-nilai abstrak yang bersifat inklusif. Perspektif ini menempatkan komunikasi—khususnya komunikasi institusional dan simbolik—sebagai prasyarat utama integrasi sosial dalam masyarakat modern yang kompleks.

Ketika komunikasi simbolik melemah atau kehilangan legitimasi, masyarakat berisiko mengalami anomie, yakni kondisi disorientasi normatif akibat melemahnya rujukan moral bersama. Dengan demikian, krisis sosial tidak hanya dapat

dipahami sebagai krisis ekonomi atau politik, tetapi juga sebagai krisis komunikasi simbolik.

D. Kontribusi Durkheim terhadap Sosiologi Komunikasi

Meskipun Durkheim tidak secara eksplisit merumuskan teori komunikasi, kontribusinya terhadap sosiologi komunikasi bersifat fundasional. Ia menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar pertukaran pesan antarindividu, melainkan mekanisme konstitutif masyarakat. Fakta sosial hanya memiliki daya mengikat sejauh ia dikomunikasikan, dilembagakan, dan diinternalisasi melalui simbol, ritual, dan institusi sosial. Durkheim tidak membahas komunikasi sebagai bidang kajian tersendiri, sebagaimana berkembang dalam ilmu komunikasi modern. Namun, melalui analisis tentang fakta sosial, simbol, ritual, dan institusi, ia justru menyediakan kerangka ontologis dan sosiologis yang memungkinkan komunikasi dipahami sebagai mekanisme konstitutif masyarakat, bukan sekadar aktivitas interpersonal (Durkheim, 1912; 1982).

Inti kontribusi Durkheim terletak pada pemahamannya bahwa masyarakat tidak dapat direduksi menjadi agregasi tindakan individu, melainkan hadir sebagai realitas moral dan simbolik yang berdiri di atas dan di luar individu. Dalam kerangka ini, komunikasi tidak berfungsi hanya sebagai sarana pertukaran informasi, melainkan sebagai proses sosial yang membentuk dan mempertahankan realitas kolektif. Fakta sosial—seperti norma, hukum, bahasa, dan nilai moral—tidak memiliki daya mengikat secara alamiah. Ia memperoleh kekuatan normatifnya karena dikomunikasikan secara berulang, dilembagakan, dan diinternalisasi dalam kesadaran individu.

Komunikasi pada posisi konstitutif, bukan sekadar transmisif. Komunikasi tidak hanya menyampaikan nilai yang telah ada, tetapi ikut memproduksi apa yang dianggap sah, benar, dan mengikat dalam masyarakat. Melalui simbol dan bahasa, nilai kolektif diwujudkan dalam bentuk yang dapat dipahami dan dialami bersama. Melalui ritual, nilai tersebut dipertegas secara emosional dan afektif. Melalui institusi

sosial—seperti pendidikan, hukum, agama, dan negara—nilai itu distandardisasi, diberi otoritas, dan diwariskan lintas generasi. Tanpa proses komunikasi simbolik ini, fakta sosial akan kehilangan daya eksistensialnya dan tereduksi menjadi aturan formal yang kosong (Durkheim, 1982).

Fakta sosial hanya mengikat sejauh ia dikomunikasikan memiliki implikasi teoretis yang sangat penting. Ia menunjukkan bahwa struktur sosial tidak bekerja secara otomatis, melainkan bergantung pada keberlangsungan praktik komunikasi yang menopangnya. Keteraturan sosial bukan kondisi statis, tetapi hasil dari reproduksi simbolik yang terus-menerus. Ketika komunikasi simbolik berjalan stabil dan dipercaya, norma diinternalisasi secara sukarela. Sebaliknya, ketika komunikasi institusional kehilangan legitimasi atau menjadi inkonsisten, daya mengikat fakta sosial melemah dan masyarakat berisiko mengalami disintegrasi normatif atau anomie (Durkheim, 1912). Perspektif Durkheimian, fakta sosial—norma, nilai, hukum, dan simbol kolektif—tidak bekerja sebagai kekuatan objektif yang otomatis mengatur perilaku individu. Sebaliknya, daya mengikat fakta sosial bergantung pada keberlangsungan praktik komunikasi simbolik yang membuat norma tersebut dipahami, dipercaya, dan diinternalisasi sebagai kewajiban moral (Durkheim, 1982).

Implikasi pertama dari pernyataan ini adalah penolakan terhadap pandangan deterministik tentang struktur sosial. Struktur sosial tidak berfungsi secara mekanis atau alamiah, melainkan memerlukan kerja sosial yang terus-menerus agar tetap efektif. Kerja sosial tersebut berlangsung melalui komunikasi—baik dalam bentuk bahasa, ritual, pendidikan, hukum, maupun praktik institusional lainnya. Tanpa komunikasi yang berkelanjutan, struktur sosial akan kehilangan makna dan legitimasi, sehingga tidak lagi mampu mengarahkan tindakan individu secara konsisten.

Kedua, pernyataan ini menegaskan bahwa keteraturan sosial bersifat prosesual, bukan statis. Keteraturan bukan kondisi yang telah selesai dibentuk, tetapi hasil dari reproduksi simbolik

yang terus-menerus. Norma dan nilai harus selalu diperbarui melalui praktik komunikasi agar tetap relevan dan mengikat. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai medium penyampaian aturan, tetapi sebagai mekanisme reproduksi realitas sosial. Melalui pengulangan simbolik, fakta sosial tampil sebagai sesuatu yang objektif dan "wajar", meskipun sejatinya ia adalah hasil konstruksi sosial jangka panjang (Durkheim, 1912).

Ketiga, analisis ini memperjelas mekanisme internalisasi normatif. Ketika komunikasi simbolik berjalan stabil, konsisten, dan dipercaya, individu tidak lagi merasakan norma sebagai tekanan eksternal, melainkan sebagai bagian dari kesadaran dirinya. Kepatuhan terhadap norma dalam kondisi ini bersifat sukarela dan refleksif, karena individu telah menginternalisasi nilai kolektif sebagai orientasi moral. Dari sudut pandang sosiologi komunikasi, internalisasi ini merupakan hasil dari komunikasi normatif yang efektif, yakni komunikasi yang berhasil membangun legitimasi simbolik dan kepercayaan sosial (Alexander, 2003).

Sebaliknya, ketika komunikasi institusional kehilangan legitimasi atau menjadi inkonsisten, daya mengikat fakta sosial melemah. Inkonsistensi pesan moral—misalnya antara hukum dan praktik, antara wacana publik dan kebijakan, atau antara simbol resmi dan pengalaman sosial nyata—mengikis kepercayaan individu terhadap norma kolektif. Dalam kondisi ini, norma mungkin masih ada secara formal, tetapi kehilangan kekuatan normatifnya karena tidak lagi dipercaya sebagai sah atau adil. Dari perspektif Durkheimian, inilah kondisi awal menuju anomie, yaitu disorientasi normatif ketika individu tidak lagi memiliki rujukan moral bersama untuk bertindak (Durkheim, 1912).

Keempat, analisis ini menunjukkan bahwa anomie adalah fenomena komunikatif sekaligus struktural. Ia tidak sekadar disebabkan oleh ketiadaan aturan, tetapi oleh kegagalan komunikasi simbolik dalam menjaga kesinambungan antara struktur sosial dan kesadaran individu. Dalam masyarakat

modern yang terdiferensiasi dan plural, risiko ini semakin besar karena komunikasi moral harus menjembatani berbagai kepentingan, identitas, dan sistem nilai yang beragam. Ketika komunikasi tersebut gagal membangun konsensus normatif minimal, integrasi sosial terganggu meskipun institusi formal tetap berdiri (Ritzer, 2011).

Dengan demikian, alenia tersebut menegaskan posisi sentral komunikasi dalam teori sosial Durkheimian. Struktur sosial hanya efektif sejauh ia dikomunikasikan secara sah, konsisten, dan bermakna. Keteraturan sosial bukan produk otomatis dari institusi atau aturan tertulis, melainkan hasil dari praktik komunikasi simbolik yang terus-menerus mereproduksi makna kolektif. Perspektif ini menjadikan sosiologi komunikasi sebagai disiplin kunci untuk memahami dinamika integrasi dan disintegrasi sosial, karena krisis masyarakat modern sering kali berakar pada krisis legitimasi dan komunikasi moral, bukan semata-mata pada perubahan material atau konflik kepentingan.

Kontribusi Durkheim juga memperluas cakupan analisis komunikasi melampaui ranah diskursif rasional. Ia menunjukkan bahwa komunikasi sosial bekerja melalui dimensi nonverbal dan afektif, seperti emosi kolektif dalam ritual (*collective effervescence*). Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menyampaikan makna secara kognitif, tetapi juga membangun keterikatan emosional dan moral yang menjadi dasar kohesi sosial. Perspektif ini menjadi fondasi bagi kajian komunikasi simbolik, komunikasi ritual, dan sosiologi budaya modern (Alexander, 2003; Collins, 2004).

Lebih jauh, pemikiran Durkheim memungkinkan pemahaman komunikasi sebagai mekanisme pemeliharaan sekaligus transformasi sosial. Karena keteraturan sosial direproduksi melalui komunikasi, maka perubahan dalam sistem simbolik—pergeseran makna, delegitimasi institusi, atau transformasi ritual—akan berdampak langsung pada struktur sosial. Dengan kata lain, perubahan sosial dapat bermula dari krisis komunikasi simbolik, bukan semata dari konflik material atau revolusi struktural.

Kontribusi Durkheim terhadap sosiologi komunikasi bersifat ontologis dan fundasional. Ia meletakkan dasar bagi pemahaman komunikasi sebagai jantung kehidupan sosial—mekanisme yang membentuk realitas, menopang integrasi, dan menentukan keberlangsungan masyarakat. Meskipun kemudian dikembangkan dan dikritisi oleh pemikir lain seperti Weber, Mead, Bourdieu, dan Habermas, fondasi Durkheim tetap menjadi rujukan utama dalam melihat komunikasi sebagai prasyarat eksistensi struktur sosial itu sendiri.

Kontribusi Durkheim terhadap sosiologi komunikasi bersifat ontologis dan fundasional menegaskan posisi unik pemikiran Durkheim dalam sejarah teori sosial. Kontribusi ontologis berarti bahwa Durkheim tidak sekadar menawarkan konsep atau variabel tambahan bagi analisis komunikasi, melainkan menentukan apa yang dianggap "ada" dan "mungkin ada" dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka Durkheimian, masyarakat tidak dipahami sebagai kumpulan individu yang kemudian berkomunikasi, tetapi sebagai realitas moral dan simbolik yang eksis melalui komunikasi itu sendiri (Durkheim, 1912; 1982).

Durkheim meletakkan dasar bagi pemahaman komunikasi sebagai jantung kehidupan sosial, karena ia menunjukkan bahwa realitas sosial—norma, nilai, hukum, identitas kolektif—hanya memiliki daya mengikat sejauh ia dikomunikasikan, dilembagakan, dan diinternalisasi. Fakta sosial tidak bekerja secara otomatis atau alamiah, melainkan bergantung pada proses komunikasi simbolik yang menjembatani struktur sosial dengan kesadaran individu. Dengan demikian, komunikasi tidak bersifat sekunder atau instrumental, tetapi konstitutif: ia membentuk realitas, bukan sekadar merepresentasikannya.

Kontribusi fundasional Durkheim juga tampak dalam cara ia menjelaskan integrasi sosial. Integrasi tidak dicapai melalui kontrak rasional antarindividu atau kepentingan material semata, melainkan melalui kesadaran kolektif—sistem kepercayaan dan sentimen bersama yang diproduksi dan

direproduksi melalui simbol, ritual, dan institusi. Dalam perspektif ini, komunikasi berfungsi sebagai mekanisme yang menanamkan nilai kolektif secara kognitif dan afektif, sehingga individu mematuhi norma secara sukarela. Tanpa komunikasi simbolik yang sah dan dipercaya, integrasi sosial akan melemah dan masyarakat berisiko mengalami disorientasi normatif atau anomie (Durkheim, 1912).

Pondasi Durkheim tetap menjadi rujukan utama meskipun telah dikembangkan dan dikritisi oleh pemikir lain menunjukkan ketahanan teoretis kerangka Durkheimian. Weber, misalnya, menggeser fokus ke makna subjektif dan legitimasi otoritas; Mead menekankan interaksi simbolik dan pembentukan diri; Bourdieu mengungkap dimensi dominasi dan ketimpangan simbolik; sementara Habermas mengembangkan horizon normatif tindakan komunikatif dan legitimasi diskursif. Namun, seluruh pendekatan ini tetap berangkat dari asumsi dasar yang sejalan dengan Durkheim: struktur sosial tidak dapat dipisahkan dari proses komunikasi yang menopangnya.

Perbedaan di antara para pemikir tersebut lebih bersifat pengayaan dan diferensiasi, bukan penolakan terhadap fondasi Durkheim. Weber menambahkan dimensi interpretatif, Mead memperdalam level mikro, Bourdieu mengkritik ilusi netralitas simbol, dan Habermas menawarkan standar normatif komunikasi. Namun, semua pendekatan ini tetap mengandaikan bahwa komunikasi adalah prasyarat eksistensi struktur sosial, bukan sekadar medium eksternal bagi tindakan sosial.

Perspektif sosiologi komunikasi kontemporer, kontribusi ontologis Durkheim menjadi semakin relevan. Dalam masyarakat modern dan digital, di mana simbol, media, dan arus komunikasi semakin kompleks dan terfragmentasi, pertanyaan tentang bagaimana realitas sosial diproduksi dan dilegitimasi secara komunikatif menjadi semakin mendesak. Analisis Durkheim membantu menjelaskan mengapa krisis sosial modern sering kali berakar pada krisis legitimasi simbolik

dan komunikasi moral, bukan semata pada kegagalan ekonomi atau politik.

Durkheim bukan hanya tokoh sejarah dalam sosiologi, tetapi peletak fondasi ontologis sosiologi komunikasi. Ia mengajarkan bahwa masyarakat bertahan sejauh komunikasi simbolik berhasil membangun makna bersama, menopang integrasi, dan memberi legitimasi pada struktur sosial. Dalam pengertian ini, komunikasi adalah syarat keberadaan masyarakat itu sendiri, dan pemikiran Durkheim tetap menjadi rujukan utama dalam memahami komunikasi sebagai mekanisme dasar kehidupan sosial.

Menempatkan simbol dan ritual sebagai pusat analisis, Durkheim meletakkan dasar bagi kajian komunikasi simbolik, komunikasi ritual, dan sosiologi budaya. Pemikirannya tetap relevan untuk membaca fenomena komunikasi kontemporer—mulai dari ritual kenegaraan, peristiwa media massal, hingga praktik kolektif di ruang digital—yang semuanya menunjukkan bahwa komunikasi afektif dan simbolik masih menjadi fondasi integrasi sosial.

Durkheim menempatkan simbol dan ritual sebagai pusat analisis menegaskan kontribusi teoretisnya yang bersifat lintas-disipliner dan fundasional. Dengan menjadikan simbol dan ritual sebagai mekanisme utama pembentukan kesadaran kolektif, Durkheim secara implisit membuka jalan bagi berkembangnya kajian komunikasi simbolik, komunikasi ritual, dan sosiologi budaya, jauh sebelum bidang-bidang tersebut dilembagakan secara formal. Dalam kerangka Durkheimian, komunikasi tidak direduksi menjadi pertukaran pesan rasional, tetapi dipahami sebagai proses sosial yang bekerja melalui makna, emosi, dan praktik kolektif (Durkheim, 1912).

Makna sosial tidak bersifat alamiah atau individual, melainkan dikonstruksi dan dilegitimasi secara kolektif. Simbol berfungsi sebagai medium objektivasi nilai dan norma, memungkinkan masyarakat mengkomunikasikan apa yang dianggap sakral, penting, dan mengikat. Dengan demikian, komunikasi simbolik memiliki fungsi normatif: ia tidak hanya

menyampaikan informasi, tetapi menetapkan batas moral dan identitas kolektif. Inilah dasar konseptual bagi sosiologi budaya yang melihat kebudayaan sebagai sistem makna yang diproduksi dan direproduksi melalui praktik simbolik (Alexander, 2003).

Ritual memperlihatkan dimensi afektif dan performatif komunikasi sosial. Durkheim menunjukkan bahwa ritual merupakan momen intensifikasi komunikasi, di mana simbol tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi dialami secara emosional melalui partisipasi kolektif. Konsep *collective effervescence* menjelaskan bagaimana emosi bersama memperkuat solidaritas dan memperbaharui kesadaran kolektif. Dari perspektif sosiologi komunikasi, ini menegaskan bahwa komunikasi afektif—melalui tubuh, gestur, ritme, dan pengalaman bersama—sering kali lebih menentukan integrasi sosial dibandingkan komunikasi diskursif semata (Collins, 2004).

Relevansi pemikiran Durkheim menjadi semakin jelas ketika diterapkan pada fenomena komunikasi kontemporer. Ritual kenegaraan, seperti upacara nasional atau pelantikan pejabat, berfungsi sebagai bentuk ritual modern yang menegaskan simbol negara, otoritas, dan identitas kolektif. Peristiwa media massal—misalnya siaran langsung peristiwa krisis, olahraga, atau bencana—menciptakan momen komunikasi kolektif di mana perhatian publik tersinkronisasi dan emosi dibagi secara luas. Dalam konteks ini, media berperan sebagai arena ritualisasi simbolik yang memperbaharui atau menantang kesadaran kolektif.

Praktik kolektif di ruang digital menunjukkan bahwa logika komunikasi simbolik dan afektif tidak hilang, melainkan bertransformasi medium. Fenomena viral, kampanye daring, atau solidaritas virtual dapat dipahami sebagai bentuk ritual digital, di mana simbol dan emosi kolektif diproduksi melalui interaksi daring. Meskipun sering bersifat lebih cair dan temporer, praktik-praktik ini tetap menunjukkan bahwa integrasi sosial kontemporer sangat bergantung pada

komunikasi simbolik dan afektif, bukan hanya pada pertukaran informasi rasional.

Simbol dan ritual merupakan mekanisme komunikasi yang kuat, ia dapat berfungsi baik sebagai sarana integrasi maupun sebagai alat legitimasi kekuasaan. Tidak semua ritual dan simbol bersifat inklusif; sebagian dapat mereproduksi dominasi atau mengeksklusi kelompok tertentu. Namun, justru di sinilah kekuatan kerangka Durkheimian: dengan menempatkan simbol dan ritual di pusat analisis, sosiologi komunikasi dapat membaca dinamika kekuasaan, legitimasi, dan resistensi dalam praktik komunikasi budaya kontemporer.

Kontribusi Durkheim tidak berhenti pada analisis masyarakat tradisional, tetapi menyediakan kerangka konseptual yang sangat relevan untuk memahami komunikasi modern dan digital. Komunikasi afektif dan simbolik tetap menjadi fondasi integrasi sosial, meskipun bentuk, medium, dan skalanya berubah. Perspektif Durkheimian membantu sosiologi komunikasi melihat bahwa di balik kompleksitas teknologi dan media baru, masyarakat tetap bergantung pada ritualisasi makna dan emosi bersama untuk mempertahankan keterikatan sosial.

E. Profil Émile Durkheim

Émile Durkheim lahir pada 15 April 1858 di Épinal, Prancis, dalam sebuah keluarga Yahudi yang taat dan memiliki tradisi keagamaan kuat. Ayah dan kakeknya adalah rabi, sehingga sejak kecil Durkheim dibesarkan dalam lingkungan yang menekankan disiplin moral, ritual keagamaan, dan kepatuhan terhadap norma kolektif. Latar ini sangat penting karena membentuk sensitivitas awal Durkheim terhadap peran moral, simbol, dan ritual dalam menjaga kohesi komunitas—tema yang kelak menjadi inti pemikiran sosiologisnya.

Namun, Durkheim tidak meneruskan tradisi keagamaan keluarganya. Ia secara sadar memilih jalur intelektual sekuler. Pilihan ini bukan penolakan total terhadap agama, melainkan pergeseran fokus: dari agama sebagai iman menuju agama

sebagai fakta sosial. Pengalaman hidup di tengah komunitas religius justru memberinya perspektif empiris tentang bagaimana kepercayaan, simbol, dan ritual berfungsi sebagai sarana integrasi sosial—sebuah fondasi penting bagi kontribusinya dalam sosiologi komunikasi.

Durkheim menempuh pendidikan di École Normale Supérieure, salah satu institusi paling prestisius di Prancis. Di sini, ia terpapar pada filsafat positivisme, pemikiran rasionalisme, serta perdebatan tentang krisis moral masyarakat modern pasca-Revolusi Prancis. Pendidikan ini membentuk komitmen Durkheim untuk menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang otonom, dengan metode dan objek kajian yang berbeda dari filsafat maupun psikologi.

Secara intelektual, Durkheim dipengaruhi oleh Auguste Comte, tetapi ia melampaui Comte dengan menekankan pentingnya fakta sosial sebagai objek kajian empiris. Ia menolak reduksi sosial ke dalam motif psikologis individual. Pandangan ini memiliki implikasi langsung bagi sosiologi komunikasi: komunikasi tidak dipahami sebagai ekspresi niat individu, melainkan sebagai mekanisme sosial yang dilembagakan, bekerja melalui simbol, bahasa, dan institusi.

Masa paling produktif Durkheim berlangsung dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Karya-karyanya—*The Division of Labor in Society* (1893), *The Rules of Sociological Method* (1895), *Suicide* (1897), dan *The Elementary Forms of the Religious Life* (1912)—secara sistematis membangun kerangka teoritis tentang bagaimana masyarakat mempertahankan keteraturan.

Karya-karya Durkheim menaruh perhatian besar pada komunikasi simbolik sebagai fondasi integrasi sosial. Konsep kesadaran kolektif, solidaritas mekanik dan organik, serta ritual keagamaan menunjukkan bahwa keteraturan sosial bertumpu pada makna bersama yang dikomunikasikan secara berulang. Puncak analisisnya terlihat dalam *The Elementary Forms of the Religious Life*, ketika Durkheim menunjukkan bahwa ritual adalah momen di mana masyarakat "berkomunikasi dengan dirinya sendiri" dan memperbarui ikatan moral kolektif.

Émile Durkheim bukan hanya bapak sosiologi modern, tetapi juga peletak fondasi teoretis sosiologi komunikasi. Melalui analisis fakta sosial, simbol, ritual, dan institusi, ia menunjukkan bahwa komunikasi adalah jantung kehidupan sosial—mekanisme yang membentuk, memelihara, dan mentransformasikan keteraturan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander, J. C. (2003). *The meanings of social life: A cultural sociology*. Oxford University Press.

Collins, R. (2004). *Interaction ritual chains*. Princeton University Press.

Durkheim, E. (1912). *The elementary forms of the religious life*. Free Press.

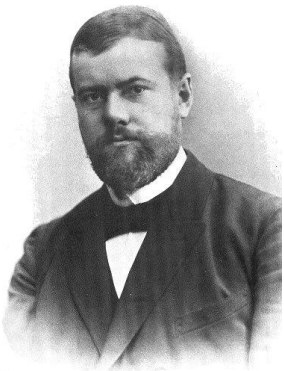
Durkheim, E. (1982). *The rules of sociological method*. Free Press.

Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8th ed.). McGraw-Hill.

BAB 3

MAX WEBER: MAKNA, TINDAKAN SOSIAL DAN OTORITAS

Dr Asni Djamereng, M.Si



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Weber

Max Weber menempatkan makna subjektif sebagai inti analisis sosial. Masyarakat dipahami melalui tindakan sosial, yakni tindakan yang secara sadar diarahkan kepada orang lain dan dimaknai oleh pelakunya (Weber, 1978). Dalam kerangka ini, komunikasi bukan sekadar pertukaran pesan, melainkan mekanisme pembentukan dan koordinasi makna dalam interaksi sosial.

Dia menempatkan makna subjektif (subjektiver Sinn) sebagai fondasi ontologis analisis sosial. Bagi Weber, realitas sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai struktur objektif atau fakta eksternal, melainkan sebagai hasil dari tindakan aktor yang sarat

makna. Oleh karena itu, masyarakat bukanlah entitas yang berdiri di atas individu, tetapi konstelasi tindakan sosial yang saling berorientasi dan ditautkan oleh proses pemaknaan (Weber, 1978).

Konsep tindakan sosial menjadi kunci pembeda Weber dari pendekatan positivistik. Suatu tindakan disebut "sosial" bukan karena dilakukan Pada aspek sosial semata, melainkan karena aktor secara reflektif mengaitkan tindakannya dengan keberadaan orang lain, baik secara langsung maupun imajiner. Orientasi ini bersifat komunikatif dalam pengertian paling mendasar: aktor bertindak dengan asumsi bahwa tindakannya akan ditafsirkan, dipahami, atau ditanggapi oleh pihak lain. Dengan demikian, makna subjektif tidak bersifat solipsistik, melainkan selalu berpotensi menjadi makna intersubjektif (Weber, 1978; Schutz, 1967).

Pada kerangka ini, komunikasi tidak dapat direduksi menjadi proses teknis penyampaian informasi (sender–message–receiver), sebagaimana diasumsikan dalam model transmisional. Sebaliknya, komunikasi adalah mekanisme sosial yang memungkinkan koordinasi tindakan melalui pemaknaan bersama, meskipun kesepahaman itu sering kali parsial, sementara, atau bahkan dipenuhi kesalahpahaman. Weber secara implisit menunjukkan bahwa stabilitas sosial tidak menuntut konsensus total, melainkan kesesuaian minimal makna yang memungkinkan tindakan saling terprediksi (Weber, 1978).

Implikasi penting bagi sosiologi komunikasi yakni; pertama, makna tidak melekat secara inheren pada pesan, simbol, atau bahasa, tetapi dihasilkan dalam relasi antara aktor, aspek, dan orientasi tindakan. Pesan yang sama dapat memunculkan makna berbeda tergantung pada rasionalitas yang mendasari tindakan—apakah instrumental, bernilai, afektif, atau tradisional. Kedua, komunikasi menjadi arena di mana rasionalitas sosial dipertarungkan, bukan sekadar disampaikan. Bahasa, gestur, dan simbol berfungsi sebagai medium untuk menegosiasikan tujuan, nilai, emosi, dan kebiasaan yang saling bersaing (Swidler, 1986).

Pendekatan Weber membuka ruang untuk memahami kekuasaan dan legitimasi sebagai fenomena komunikatif. Karena tindakan sosial selalu berorientasi pada makna, maka kepatuhan

terhadap otoritas tidak hanya bergantung pada paksaan material, tetapi pada keyakinan subjektif akan kesahihan makna yang dikomunikasikan oleh pihak berkuasa. Dengan kata lain, kekuasaan bekerja sejauh maknanya dipahami dan diterima sebagai wajar, sah, atau tak terelakkan (Weber, 1978; Bourdieu, 1991).

Secara kritis, penekanan Weber pada makna subjektif juga mengandung ambiguitas. Di satu sisi, ia memberikan dasar kuat bagi analisis interpretatif komunikasi; di sisi lain, fokus pada subjektivitas berisiko mengaburkan ketimpangan struktural dalam distribusi kemampuan memproduksi dan memaksakan makna. Kritik inilah yang kemudian dikembangkan oleh Bourdieu melalui konsep kekuasaan simbolik dan oleh Habermas melalui rasionalitas komunikatif (Bourdieu, 1991; Habermas, 1984). Namun demikian, tanpa fondasi Weberian tentang makna dan tindakan sosial, kritik-kritik tersebut kehilangan pijakan konseptualnya.

Pemikiran Weber menegaskan bahwa komunikasi adalah jantung dari kehidupan sosial, bukan sekadar instrumen teknis, melainkan proses fundamental yang membentuk, mengoordinasikan, dan melegitimasi tindakan sosial. Inilah kontribusi paling mendasar Weber bagi sosiologi komunikasi: menunjukkan bahwa untuk memahami masyarakat, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana makna diproduksi, diarahkan, dan dipertukarkan dalam tindakan sosial.

Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat tipe ideal: rasional instrumental, rasional bernilai, afektif, dan tradisional (Weber, 1978). Tipologi ini relevan bagi sosiologi komunikasi karena menjelaskan beragam logika komunikasi: dari persuasi berbasis efisiensi, legitimasi moral, mobilisasi emosi, hingga reproduksi kebiasaan simbolik. Dengan demikian, Weber menolak asumsi bahwa komunikasi publik selalu rasional-instrumental; rasionalitas bersifat plural dan kontekstual.

Secara metodologis, Weber mengembangkan pendekatan Verstehen (pemahaman interpretatif), yang menuntut peneliti menautkan tindakan dengan makna yang dimaksudkan aktor, sambil menggunakan tipe ideal sebagai alat analisis, bukan cerminan realitas empiris (Weber, 1949). Pendekatan ini menjadi

fondasi penting bagi riset komunikasi interpretatif, termasuk analisis wacana politik dan komunikasi institusional.

Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat tipe ideal: rasional instrumental (Zweckrational), rasional bernilai (Wertrational), afektif, dan tradisional (Weber, 1978). Tipologi ini memiliki signifikansi penting bagi sosiologi komunikasi karena memungkinkan analisis atas keragaman logika rasionalitas yang bekerja di balik praktik komunikasi sosial dan politik. Komunikasi tidak lagi dipahami sebagai aktivitas homogen yang selalu tunduk pada efisiensi tujuan, melainkan sebagai arena di mana berbagai orientasi makna beroperasi secara simultan dan sering kali saling bertabrakan.

Tindakan rasional instrumental melandasi komunikasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan secara kalkulatif, misalnya komunikasi kebijakan publik, kampanye berbasis data, atau manajemen citra institusional. Pada aspek ini, bahasa diperlakukan sebagai alat strategis untuk memengaruhi perilaku audiens secara efisien. Sebaliknya, tindakan rasional bernilai menjelaskan komunikasi yang berakar pada keyakinan normatif atau etis, di mana keberhasilan komunikasi tidak diukur dari efektivitas hasil, melainkan dari kesetiaan pada nilai yang dianggap sah—seperti keadilan, demokrasi, atau identitas kolektif (Weber, 1978). Di sini, komunikasi berfungsi sebagai sarana legitimasi moral, bukan sekadar persuasi teknis.

Tindakan afektif menyoroti dimensi emosional komunikasi, yang sering kali diremehkan dalam teori rasional klasik. Weber menunjukkan bahwa ekspresi emosi—kemarahan, ketakutan, harapan, atau kebanggaan—dapat menjadi dasar tindakan sosial yang kuat. Pada aspek komunikasi kontemporer, terutama di media digital, dimensi afektif ini menjelaskan mengapa pesan yang memicu emosi sering kali lebih efektif dalam memobilisasi publik dibandingkan argumen rasional-instrumental. Adapun tindakan tradisional mengacu pada komunikasi yang direproduksi melalui kebiasaan dan rutinitas simbolik, seperti ritual politik, bahasa birokrasi yang mapan, atau simbol nasional yang diterima tanpa refleksi kritis (Weber, 1978).

Weber secara implisit mengkritik reduksionisme rasionalitas tunggal dalam analisis komunikasi publik. Ia menolak pandangan yang mengasumsikan bahwa aktor selalu bertindak berdasarkan kalkulasi untung-rugi, dan menunjukkan bahwa komunikasi sering kali dipandu oleh nilai, emosi, dan tradisi yang tidak sepenuhnya rasional secara instrumental. Oleh karena itu, rasionalitas dalam komunikasi bersifat plural, berlapis, dan kontekstual, bergantung pada situasi sosial, posisi aktor, serta struktur makna yang melingkupinya.

Implikasi teoretisnya signifikan: kegagalan komunikasi publik tidak selalu disebabkan oleh kurangnya informasi atau argumentasi rasional, melainkan oleh ketidakselarasan rasionalitas antara komunikator dan audiens. Pesan yang dirancang secara instrumental dapat ditolak jika audiens beroperasi dalam kerangka nilai atau afeksi yang berbeda. Dengan demikian, tipologi tindakan sosial Weber menyediakan perangkat analitis yang kuat untuk memahami kompleksitas komunikasi sosial dan politik, sekaligus menghindarkan sosiologi komunikasi dari asumsi normatif bahwa rasionalitas instrumental adalah satu-satunya dasar komunikasi modern.

A. Tindakan Sosial dan Pemahaman (*Verstehen*)

Kerangka sosiologi interpretatif Max Weber, tindakan sosial (soziales Handeln) merupakan unit analisis dasar untuk memahami masyarakat. Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai perilaku manusia yang secara subjektif dimaknai oleh pelakunya dan diarahkan kepada tindakan orang lain, baik secara aktual maupun imajiner (Weber, 1978). Dengan definisi ini, Weber secara tegas membedakan tindakan sosial dari perilaku reaktif atau refleks biologis, karena hanya tindakan yang mengandung orientasi makna yang relevan bagi analisis sosiologis.

Pada kerangka sosiologi interpretatif Max Weber, tindakan sosial (*soziales Handeln*) ditempatkan sebagai unit analisis paling elementer untuk memahami realitas sosial. Pilihan ini mencerminkan posisi epistemologis Weber yang

menolak pandangan bahwa masyarakat dapat dijelaskan semata-mata melalui struktur objektif atau hukum-hukum sosial yang berdiri independen dari aktor. Sebaliknya, masyarakat dipahami sebagai hasil dari rangkaian tindakan individual yang bermakna, yang saling terhubung melalui orientasi timbal balik antaraktor (Weber, 1978).

Definisi Weber tentang tindakan sosial menekankan dua unsur kunci. Pertama, tindakan tersebut secara subjektif dimaknai oleh pelakunya (*subjektiv gemeinter Sinn*). Artinya, tindakan sosial selalu melibatkan proses reflektif—pelaku bertindak berdasarkan pemahaman, penafsiran, atau keyakinan tertentu tentang situasi sosial yang dihadapinya. Makna ini tidak harus sepenuhnya rasional atau disadari secara eksplisit, tetapi cukup bahwa pelaku mengaitkan tindakannya dengan suatu maksud atau orientasi tertentu. Dengan demikian, makna menjadi kategori analitis yang tidak dapat diabaikan dalam penjelasan sosial (Weber, 1978; Schutz, 1967).

Kedua, tindakan sosial diarahkan kepada tindakan orang lain, baik secara aktual maupun imajiner. Orientasi ini menunjukkan bahwa tindakan sosial bersifat relasional dan komunikatif sejak awal. Aktor bertindak dengan memperhitungkan keberadaan orang lain—baik sebagai lawan bicara langsung, audiens kolektif, maupun "yang lain" yang dibayangkan (generalized other). Bahkan tindakan yang tampak soliter sekalipun, seperti menulis teks atau mengikuti aturan birokrasi, tetap bersifat sosial sejauh ia mengandaikan pemahaman dan respons pihak lain. Di titik ini, Weber membuka jalan bagi pemahaman bahwa komunikasi adalah dimensi inheren dari tindakan sosial, bukan aktivitas terpisah yang terjadi setelah tindakan berlangsung.

Implikasi teoretis yang signifikan menjadikan tindakan sosial sebagai unit analisis dasar, Weber menolak reduksionisme struktural yang melihat individu semata-mata sebagai "pembawa peran" atau "efek sistem". Namun, ia juga tidak jatuh pada individualisme psikologis, karena makna subjektif selalu dibentuk dan dibatasi oleh aspek sosial, budaya, dan historis.

Tindakan sosial, dengan demikian, berada di persimpangan antara subjektivitas aktor dan keteraturan sosial yang lebih luas (Giddens, 1971).

Aspek sosiologi komunikasi, pendekatan ini menegaskan bahwa praktik komunikasi—pidato politik, percakapan publik, wacana media, maupun interaksi digital—harus dianalisis sebagai tindakan sosial yang sarat makna dan orientasi sosial. Fokus analisis tidak cukup pada isi pesan atau medium yang digunakan, melainkan pada bagaimana aktor memaknai situasi komunikasi, mengantisipasi interpretasi pihak lain, dan menyesuaikan tindakannya untuk mencapai pemahaman, pengaruh, atau legitimasi. Kegagalan komunikasi, dalam perspektif Weberian, sering kali berakar pada perbedaan orientasi makna antaraktor, bukan semata pada gangguan teknis atau kurangnya informasi.

Pendekatan *Verstehen* memiliki implikasi epistemologis yang mendasar bagi sosiologi komunikasi karena ia menggeser fokus analisis dari transmisi informasi ke produksi makna sosial. Dalam perspektif Weberian, komunikasi tidak dapat direduksi menjadi mekanisme teknis penyampaian pesan dari pengirim ke penerima, sebagaimana diasumsikan dalam model linear dan positivistik. Sebaliknya, komunikasi dipahami sebagai tindakan sosial bermakna, di mana pesan, simbol, dan bahasa memperoleh signifikansinya hanya dalam relasi dengan orientasi subjektif aktor serta aspek sosial yang melingkupinya (Weber, 1978).

Kerangka berpikir *Verstehen*, setiap praktik komunikasi diperlakukan sebagai ekspresi dari orientasi tindakan tertentu. Pidato politik, misalnya, bukan sekadar rangkaian argumen atau retorika, tetapi tindakan yang diarahkan untuk membangun legitimasi, memobilisasi dukungan, atau menegaskan identitas kolektif. Demikian pula, teks media dan dokumen birokrasi tidak bersifat netral secara makna; ia memuat asumsi, nilai, dan rasionalitas tertentu yang mencerminkan posisi aktor dan struktur kekuasaan tempat komunikasi itu diproduksi. Pendekatan interpretatif memungkinkan peneliti menyingkap

makna laten yang tidak selalu eksplisit dalam teks atau ujaran (Weber, 1949; Schutz, 1967).

Verstehen menekankan bahwa makna komunikasi tidak bersifat inheren pada pesan, melainkan dihasilkan melalui proses interpretasi yang melibatkan pengalaman sosial, pengetahuan bersama, dan ekspektasi terhadap tindakan orang lain. Oleh karena itu, komunikasi selalu mengandaikan intersubjektivitas, yakni kerangka pemahaman yang dibagi secara parsial oleh aktor-aktor sosial. Kesepahaman yang dihasilkan pun bersifat kontingen dan dapat dipertentangkan. Pada aspek ini, konflik komunikasi tidak selalu mencerminkan kegagalan teknis, melainkan perbedaan orientasi makna dan rasionalitas sosial antaraktor (Schutz, 1967).

Implikasi metodologisnya signifikan. Pendekatan *Verstehen* mendorong sosiologi komunikasi untuk mengutamakan analisis interpretatif, seperti analisis wacana, hermeneutika sosial, dan studi retorika, dibandingkan semata-mata pengukuran efek atau frekuensi pesan. Peneliti dituntut untuk merekonstruksi aspek tindakan, posisi sosial aktor, serta tujuan simbolik yang ingin dicapai melalui komunikasi. Dengan demikian, komunikasi dipahami sebagai proses yang secara simultan bersifat simbolik, relasional, dan politis.

Namun, pendekatan ini juga membuka ruang kritik. Penekanan pada makna subjektif berpotensi mengabaikan ketimpangan struktural dalam produksi dan sirkulasi makna. Tidak semua aktor memiliki kapasitas yang sama untuk mendefinisikan situasi komunikasi atau memaksakan interpretasi tertentu sebagai "makna yang sah". Kritik ini kemudian dikembangkan oleh Bourdieu melalui konsep kekuasaan simbolik dan oleh Habermas melalui gagasan distorsi komunikasi sistemik (Bourdieu, 1991; Habermas, 1984). Meski demikian, kedua kritik tersebut tetap berangkat dari fondasi Weberian bahwa komunikasi adalah tindakan bermakna yang hanya dapat dipahami secara interpretatif.

Pendekatan *Verstehen* menegaskan posisi komunikasi sebagai inti dari kehidupan sosial, bukan sekadar alat teknis atau instrumen netral. Ia menempatkan sosiologi komunikasi sebagai disiplin yang berfokus pada bagaimana makna diproduksi, dinegosiasikan, dan dilegitimasi melalui tindakan sosial, serta bagaimana proses tersebut membentuk struktur kekuasaan dan tatanan sosial yang lebih luas.

Secara kritis, penekanan Weber pada makna subjektif sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang ketimpangan dalam kemampuan memproduksi dan memaksakan makna. Tidak semua aktor memiliki posisi yang setara dalam menentukan definisi situasi sosial. Kritik inilah yang kemudian dikembangkan oleh Bourdieu melalui konsep kekuasaan simbolik dan oleh Habermas melalui teori tindakan komunikatif (Bourdieu, 1991; Habermas, 1984). Namun demikian, kritik-kritik tersebut justru menegaskan posisi Weber sebagai fondasi: tanpa konsep tindakan sosial yang bermakna, analisis tentang dominasi simbolik atau distorsi komunikasi kehilangan pijakan awalnya.

Konsep tindakan sosial Weber tidak hanya berfungsi sebagai definisi teknis, tetapi sebagai kerangka analitis yang menempatkan makna, relasi sosial, dan komunikasi di jantung penjelasan sosiologis. Inilah kontribusi mendasar Weber bagi sosiologi komunikasi: menunjukkan bahwa masyarakat hanya dapat dipahami sejauh kita memahami bagaimana manusia bertindak, berkomunikasi, dan memberi makna satu sama lain.

Konsepsi ini menempatkan masyarakat bukan sebagai struktur objektif yang berdiri di luar individu, melainkan sebagai jaringan tindakan bermakna yang saling terhubung. Struktur sosial, institusi, dan kekuasaan dipahami sebagai hasil sedimentasi historis dari tindakan-tindakan sosial yang berulang dan terlembagakan (Weber, 1978; Giddens, 1971). Pada aspek sosiologi komunikasi, hal ini menegaskan bahwa komunikasi bukan fenomena tambahan, melainkan dimensi inheren dari tindakan sosial itu sendiri

Menganalisis tindakan sosial, Weber mengembangkan pendekatan Verstehen atau pemahaman interpretatif. *Verstehen* mengacu pada upaya ilmiah untuk memahami makna subjektif yang dilekatkan aktor pada tindakannya, bukan sekadar menjelaskan hubungan kausal eksternal (Weber, 1949). Pendekatan ini menjadi kritik langsung terhadap positivisme yang memodelkan ilmu sosial secara analog dengan ilmu alam. Weber membedakan antara *aktuelles Verstehen* (pemahaman langsung terhadap makna tindakan, misalnya ekspresi emosi) dan *erklärendes Verstehen* (pemahaman kausal-motivasional terhadap rangkaian tindakan Pada aspek sosial yang lebih luas) (Weber, 1978). Dalam praktik penelitian, *Verstehen* menuntut rekonstruksi aspek sosial, orientasi aktor, serta sistem makna yang membingkai tindakan tersebut.

Namun, *Verstehen* bukanlah empati subjektif atau spekulasi psikologis. Weber menekankan penggunaan tipe ideal sebagai alat analisis konseptual untuk menguji realitas empiris. Dengan demikian, pemahaman interpretatif tetap tunduk pada disiplin metodologis dan argumentasi rasional (Weber, 1949). Dalam perspektif Weberian, komunikasi tidak dapat direduksi menjadi transmisi informasi, melainkan harus dipahami sebagai proses penautan makna dalam tindakan sosial. Setiap praktik komunikasi—pidato politik, percakapan sehari-hari, atau dokumen birokrasi—mengandung orientasi subjektif tertentu yang hanya dapat dipahami melalui pendekatan interpretatif.

Pendekatan *Verstehen* memungkinkan peneliti komunikasi untuk: Mengungkap logika makna di balik pesan, bukan hanya isi tekstualnya. Menganalisis bagaimana aktor mengantisipasi pemaknaan audiens dan menyesuaikan tindak komunikatifnya. Memahami kegagalan komunikasi sebagai akibat dari ketidaksesuaian kerangka makna, bukan semata kekurangan informasi. *Verstehen* membuka ruang bagi analisis wacana, studi retorika, dan penelitian komunikasi politik yang menekankan makna, intensi, dan interpretasi, bukan hanya efek atau variabel terukur (Schutz, 1967).

Pendekatan interpretatif Weber juga memiliki implikasi penting bagi analisis kekuasaan. Karena tindakan sosial selalu bermakna, maka kepatuhan terhadap otoritas bergantung pada pemahaman dan penerimaan makna legitimasi oleh aktor yang dikuasai (Weber, 1978). Otoritas bekerja secara efektif ketika makna perintah dipahami sebagai sah dan layak ditaati.

Pada aspek ini, komunikasi berfungsi sebagai mekanisme utama reproduksi legitimasi. Narasi, simbol, dan bahasa institusional membingkai tindakan kekuasaan sedemikian rupa sehingga tampak wajar dan rasional. Analisis *Verstehen* memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana legitimasi itu diproduksi, dinegosiasikan, atau ditantang dalam interaksi sosial.

Meskipun berpengaruh besar, pendekatan *Verstehen* tidak lepas dari kritik. Tradisi struktural dan materialis menilai Weber terlalu menekankan makna subjektif dan kurang memperhatikan determinasi ekonomi dan struktur kekuasaan objektif (Giddens, 1971). Kritik lain menyasar potensi relativisme interpretatif dalam memahami makna sosial.

Pengembangan terhadap Weber dilakukan oleh Alfred Schutz, yang mengintegrasikan fenomenologi Husserl untuk menjelaskan intersubjektivitas sebagai basis pemaknaan sosial (Schutz, 1967). Sementara itu, Jürgen Habermas mengkritik *Verstehen* Weberian yang dianggap terlalu individualistik dan mengajukan konsep rasionalitas komunikatif sebagai landasan normatif komunikasi sosial (Habermas, 1984).

Secara keseluruhan, konsep tindakan sosial dan *Verstehen* memberikan fondasi epistemologis yang kuat bagi sosiologi komunikasi. Weber menunjukkan bahwa untuk memahami masyarakat, peneliti harus terlebih dahulu memahami bagaimana aktor memaknai dunia sosial dan mengorientasikan tindakannya melalui komunikasi. Pendekatan ini menjadikan sosiologi komunikasi bukan sekadar studi tentang pesan dan media, melainkan analisis mendalam tentang makna, tindakan, dan legitimasi sosial.

Pendekatan *Verstehen* menegaskan posisi komunikasi sebagai dimensi konstitutif kehidupan sosial, bukan sekadar sarana teknis untuk menyampaikan informasi atau instrumen netral yang berada di luar relasi sosial. Dalam kerangka Weberian, komunikasi adalah bagian inheren dari tindakan sosial itu sendiri, karena setiap tindakan yang bermakna selalu mengandaikan orientasi terhadap orang lain dan antisipasi atas penafsiran mereka (Weber, 1978). Dengan demikian, kehidupan sosial pada dasarnya tersusun dari proses-proses komunikatif di mana makna diproduksi, dipertukarkan, dan distabilkan.

Penegasan ini membawa implikasi ontologis penting: realitas sosial tidak hadir sebagai fakta objektif yang selesai, melainkan sebagai hasil dari proses pemaknaan yang terus berlangsung. Makna sosial—tentang otoritas, kewajiban, identitas, atau kebenaran—tidak melekat secara alamiah pada institusi atau struktur, tetapi dibentuk dan dipelihara melalui praktik komunikasi yang berulang. Dalam perspektif ini, struktur sosial dapat dipahami sebagai hasil "pembekuan makna" (sedimentasi) dari tindakan-tindakan komunikatif yang memperoleh pengakuan sosial secara relatif stabil (Weber, 1978; Berger & Luckmann, 1966).

Pendekatan *Verstehen* juga menempatkan sosiologi komunikasi pada fokus analitis yang berbeda dari paradigma positivistik. Alih-alih bertanya "seberapa efektif pesan disampaikan", sosiologi komunikasi Weberian bertanya bagaimana makna didefinisikan, oleh siapa, Pada aspek apa, dan dengan konsekuensi sosial apa. Proses produksi makna selalu bersifat relasional dan kontestatif: makna tidak hanya diciptakan, tetapi juga dinegosiasikan dan diperebutkan dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, komunikasi menjadi arena di mana aktor dengan sumber daya simbolik yang berbeda berusaha mendefinisikan realitas sosial secara sah (Bourdieu, 1991).

Dimensi legitimasi menjadi krusial dalam analisis ini. Pendekatan *Verstehen* menunjukkan bahwa stabilitas tatanan sosial dan kekuasaan tidak terutama bertumpu pada paksaan

material, melainkan pada penerimaan makna tertentu sebagai sah, wajar, dan masuk akal. Kekuasaan bekerja secara efektif ketika definisi realitas yang dikomunikasikan oleh aktor dominan dipahami dan diakui oleh pihak lain. Dengan kata lain, legitimasi adalah hasil dari keberhasilan komunikasi makna, bukan sekadar produk aturan formal atau kekuatan koersif (Weber, 1978).

Sosiologi komunikasi menjadi disiplin yang secara inheren politis. Ia mengkaji bagaimana komunikasi berperan dalam membentuk, mereproduksi, atau menantang struktur kekuasaan. Bahasa kebijakan, retorika politik, wacana media, hingga komunikasi birokrasi sehari-hari merupakan praktik simbolik yang turut menentukan siapa yang berhak berbicara, makna mana yang dianggap sah, dan kepentingan siapa yang dilembagakan. Pendekatan *Verstehen* memungkinkan analisis kritis atas proses-proses tersebut dengan menelusuri makna subjektif aktor sekaligus konsekuensi objektif dari tindakan komunikatif mereka (Habermas, 1984).

Namun, ketajaman pendekatan ini juga menyingkap keterbatasannya. Fokus pada pemahaman makna berisiko mengaburkan asimetri struktural dalam distribusi kemampuan memproduksi dan memaksakan makna. Tidak semua aktor memiliki peluang yang sama untuk menjadikan interpretasinya sebagai definisi sosial yang dominan. Kritik inilah yang kemudian dikembangkan oleh Bourdieu melalui konsep kekuasaan simbolik dan oleh Habermas melalui analisis distorsi komunikasi oleh sistem ekonomi dan administratif (Bourdieu, 1991; Habermas, 1984). Meski demikian, kritik-kritik tersebut tidak meniadakan *Verstehen*, melainkan memperluasnya dengan menambahkan dimensi kekuasaan dan struktur.

Pendekatan *Verstehen* menempatkan sosiologi komunikasi sebagai disiplin yang berfokus pada jantung proses sosial: bagaimana makna diproduksi melalui tindakan sosial, dinegosiasikan dalam interaksi, dilegitimasi melalui komunikasi institusional, dan pada akhirnya membentuk tatanan sosial serta relasi kekuasaan. Dalam kerangka ini, memahami masyarakat

berarti memahami proses komunikatif yang membuat dunia sosial dapat dimengerti, diterima, dan dipertahankan oleh para aktornya.

B. Komunikasi sebagai Proses Pemberian Makna

Pemikiran Max Weber, komunikasi tidak pernah dirumuskan sebagai konsep otonom atau teori komunikasi dalam arti sempit. Namun, justru karena itu, komunikasi menempati posisi yang fundamental dan implisit dalam keseluruhan kerangka sosiologi interpretatif Weber. Komunikasi hadir sebagai dimensi internal dari tindakan sosial, yakni sebagai proses di mana aktor memberi makna pada tindakannya sendiri dan mengorientasikannya pada tindakan orang lain (Weber, 1978).

Bagi Weber, masyarakat hanya dapat dipahami sejauh peneliti mampu merekonstruksi makna subjektif (*subjektiv gemeinter Sinn*) yang dilekatkan aktor pada tindakannya. Pernyataan ini menandai posisi epistemologis yang tegas: realitas sosial tidak hadir sebagai fakta objektif yang sepenuhnya terpisah dari kesadaran manusia, melainkan sebagai hasil dari proses pemaknaan yang dilakukan aktor sosial. Dengan demikian, analisis sosial tidak dapat berhenti pada deskripsi perilaku atau struktur eksternal, tetapi harus menelusuri bagaimana aktor menafsirkan situasi, mendefinisikan tujuan, dan memberi arti pada tindakannya sendiri (Weber, 1978).

Penekanan pada makna subjektif ini tidak berarti Weber menganut individualisme psikologis. Makna subjektif dalam tindakan sosial selalu bersifat relasional, karena tindakan tersebut secara inheren berorientasi pada "yang lain". Orientasi ini dapat bersifat langsung—misalnya dalam percakapan atau interaksi tatap muka—maupun tidak langsung dan imajiner, seperti ketika aktor bertindak dengan mempertimbangkan ekspektasi publik, norma sosial, atau otoritas institusional. Pada semua kasus tersebut, tindakan sosial mengandaikan kemungkinan dipahami oleh orang lain, sehingga makna

subjektif selalu diarahkan pada horizon sosial yang lebih luas (Weber, 1978; Schutz, 1967).

Di titik inilah komunikasi memperoleh peran sentral. Jika tindakan sosial selalu berorientasi pada orang lain, maka komunikasi menjadi medium utama pemberian, penautan, dan penyelarasan makna. Komunikasi memungkinkan makna subjektif aktor keluar dari ranah individual dan memasuki ruang intersubjektif, tempat makna tersebut dapat direspons, diterima, ditolak, atau ditafsirkan ulang. Dengan demikian, komunikasi tidak sekadar menyampaikan informasi yang telah "jadi", tetapi secara aktif membentuk realitas sosial itu sendiri.

Konsepsi ini secara teoretis menolak pandangan instrumentalis tentang komunikasi sebagai saluran netral (*neutral conduit*). Dalam perspektif Weberian, komunikasi selalu mengandung dimensi interpretatif dan normatif: ia membingkai bagaimana suatu tindakan dipahami, nilai apa yang dilekatkan padanya, serta legitimasi apa yang dihasilkan. Bahasa, simbol, dan narasi bukan hanya merepresentasikan realitas, tetapi mengonstruksi definisi situasi sosial yang kemudian memandu tindakan lebih lanjut (Weber, 1978; Berger & Luckmann, 1966).

Pemahaman komunikasi sebagai proses pemaknaan intersubjektif memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap kekuasaan dan legitimasi. Realitas sosial menjadi "nyata" dan "berlaku" bukan karena kekuatan material semata, melainkan karena makna tertentu berhasil dikomunikasikan dan diterima sebagai sah. Pada aspek ini, komunikasi berfungsi sebagai mekanisme utama melalui mana otoritas dilegitimasi, norma dilembagakan, dan tatanan sosial distabilkan. Kekuasaan, dengan demikian, bergantung pada keberhasilan aktor dominan dalam mendefinisikan makna realitas sosial yang diakui bersama (Weber, 1978; Bourdieu, 1991).

Pendekatan ini juga membuka ruang kritik. Fokus pada rekonstruksi makna subjektif berpotensi mengaburkan ketimpangan struktural dalam kemampuan memproduksi dan memaksakan makna. Tidak semua aktor memiliki posisi simbolik yang setara untuk menjadikan interpretasinya sebagai

definisi sosial yang dominan. Kritik inilah yang kemudian dikembangkan oleh Bourdieu melalui konsep kekuasaan simbolik dan oleh Habermas melalui analisis distorsi komunikasi sistemik (Bourdieu, 1991; Habermas, 1984). Meski demikian, kedua pendekatan tersebut tetap berangkat dari asumsi Weberian bahwa komunikasi adalah proses makna, bukan sekadar transmisi pesan.

Kontribusi mendasar Weber bagi sosiologi komunikasi: memahami masyarakat berarti memahami proses komunikatif di mana makna subjektif ditransformasikan menjadi realitas sosial yang dapat dipahami bersama. Komunikasi, dalam perspektif ini, adalah jantung kehidupan sosial—tempat tindakan memperoleh arti, kekuasaan memperoleh legitimasi, dan tatanan sosial dibentuk serta dipertahankan.

Bagi Weber, masyarakat hanya dapat dipahami sejauh peneliti mampu merekonstruksi makna subjektif yang dilekatkan aktor pada tindakannya. Karena tindakan sosial selalu berorientasi pada "yang lain", maka komunikasi menjadi medium utama pemberian dan penautan makna. Dengan demikian, komunikasi bukan sekadar saluran penyampaian pesan, melainkan proses sosial di mana realitas dimaknai, ditafsirkan, dan dibuat dapat dipahami secara intersubjektif.

Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai tindakan yang "secara subjektif dimaknai oleh pelakunya dan diarahkan kepada orang lain" (Weber, 1978). Definisi ini mengandung implikasi komunikatif yang kuat. Pertama, tindakan tidak memiliki makna objektif yang melekat, melainkan memperoleh signifikansinya melalui proses interpretasi aktor. Kedua, makna tersebut selalu mengandaikan keberadaan orang lain sebagai pihak yang diantisipasi pemahamannya.

Komunikasi dapat dipahami sebagai proses pemberian makna (meaning-making process) yang memungkinkan tindakan sosial menjadi "masuk akal" bagi pihak lain. Seorang aktor berbicara, menulis, atau bertindak bukan hanya untuk mengekspresikan diri, tetapi untuk menghasilkan pemahaman tertentu—baik berupa persetujuan, kepatuhan, pengakuan,

maupun respons lainnya. Makna komunikasi, karenanya, tidak bersifat individualistik, tetapi berorientasi pada kemungkinan dipahami secara sosial

Tipologi tindakan sosial Weber—rasional instrumental, rasional bernilai, afektif, dan tradisional—memberikan kerangka penting untuk memahami variasi makna dalam praktik komunikasi (Weber, 1978).

1. Dalam tindakan rasional instrumental, komunikasi berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan tertentu. Makna pesan ditentukan oleh efektivitasnya dalam memengaruhi tindakan orang lain.
2. Dalam tindakan rasional bernilai, komunikasi berfungsi untuk menegaskan keyakinan normatif atau moral. Makna tidak diukur dari keberhasilan praktis, melainkan dari kesetiaan pada nilai yang dianggap sah.
3. Dalam tindakan afektif, makna komunikasi terletak pada ekspresi emosi dan resonansi perasaan, bukan pada argumentasi rasional.
4. Dalam tindakan tradisional, makna direproduksi melalui kebiasaan dan simbol yang diterima tanpa refleksi kritis.

Tipologi ini menunjukkan bahwa Weber menolak reduksi komunikasi pada rasionalitas instrumental semata. Makna komunikasi bersifat plural, situasional, dan bergantung pada orientasi tindakan sosial yang melatarinya. Hal ini menjadi kontribusi penting Weber bagi sosiologi komunikasi, khususnya dalam membaca kompleksitas komunikasi politik, ritual sosial, dan interaksi sehari-hari.

Meskipun Weber menekankan makna subjektif, ia tidak memandang makna sebagai sesuatu yang sepenuhnya privat. Sebaliknya, makna tindakan sosial selalu mengarah pada intersubjektivitas, yakni kemungkinan dipahami oleh orang lain dalam kerangka pengetahuan dan harapan bersama. Di sinilah komunikasi berfungsi sebagai jembatan antara subjektivitas individu dan keteraturan sosial.

Pengembangan atas gagasan ini dilakukan oleh Alfred Schutz, yang menunjukkan bahwa dunia sosial tersusun atas "stok pengetahuan bersama" (*stock of knowledge at hand*) yang memungkinkan aktor menafsirkan tindakan satu sama lain (Schutz, 1967). Dalam kerangka ini, komunikasi menjadi mekanisme utama melalui mana makna subjektif dapat distandardisasi secara sosial, meskipun tidak pernah sepenuhnya seragam.

Salah satu implikasi paling penting dari konsep komunikasi sebagai pemberian makna dalam pemikiran Weber terletak pada analisis kekuasaan dan legitimasi. Weber menunjukkan bahwa kekuasaan bertahan bukan terutama melalui paksaan, melainkan melalui keyakinan subjektif akan kesahihan makna yang dikomunikasikan oleh otoritas (Weber, 1978).

Perintah hanya efektif sejauh dipahami dan diterima sebagai sah. Dengan demikian, komunikasi menjadi sarana utama untuk: Membingkai otoritas sebagai wajar atau sah, Menjustifikasi ketimpangan sosial, Mereproduksi kepatuhan melalui bahasa, simbol, dan prosedur. Komunikasi tidak bersifat netral, melainkan sarat kepentingan dan relasi kekuasaan. Analisis Weberian membuka jalan bagi kritik selanjutnya tentang kekuasaan simbolik (Bourdieu, 1991) dan distorsi komunikasi dalam masyarakat modern (Habermas, 1984).

Memahami komunikasi sebagai proses pemberian makna menuntut pendekatan metodologis yang interpretatif, bukan sekadar kuantitatif atau behavioristik. Penelitian komunikasi dalam tradisi Weberian berfokus pada: rekonstruksi makna subjektif aktor, analisis aspek sosial dan historis komunikasi, pemahaman orientasi tindakan dan tujuan simbolik. Pendekatan ini menjadi dasar bagi analisis wacana, studi retorika, dan penelitian komunikasi politik yang menempatkan makna, bukan pesan semata, sebagai pusat analisis.

Secara keseluruhan, konsep komunikasi sebagai proses pemberian makna menegaskan kontribusi Weber yang mendasar bagi sosiologi komunikasi. Weber menunjukkan

bahwa komunikasi adalah mekanisme utama melalui mana tindakan sosial menjadi bermakna, dapat dipahami, dan dilegitimasi. Dalam perspektif ini, memahami komunikasi berarti memahami bagaimana masyarakat itu sendiri dibentuk dan dipertahankan melalui proses pemaknaan sosial.

C. Legitimasi Otoritas dan Bahasa Kekuasaan

Kerangka sosiologi Max Weber, otoritas (*Herrschaft*) tidak didefinisikan sebagai kemampuan memaksakan kehendak semata, melainkan sebagai probabilitas bahwa perintah tertentu akan ditaati oleh mereka yang diperintah (Weber, 1978). Ketaatan ini tidak terutama bersumber dari kekerasan atau kepentingan material, tetapi dari keyakinan subjektif akan kesahihan (legitimacy) otoritas tersebut. Dengan demikian, legitimasi menjadi fondasi utama kekuasaan yang stabil dan berkelanjutan.

Pada konsep sosiologi Max Weber, otoritas (*Herrschaft*) tidak dipahami sebagai kemampuan memaksakan kehendak secara sepihak melalui kekuatan fisik atau sanksi material, melainkan sebagai probabilitas bahwa perintah tertentu akan ditaati oleh mereka yang diperintah (Weber, 1978). Definisi ini mengandung pergeseran konseptual yang fundamental: pusat analisis kekuasaan tidak terletak pada pihak yang memerintah, melainkan pada relasi sosial yang memungkinkan terjadinya kepatuhan.

Merumuskan otoritas sebagai probabilitas ketaatan, Weber menegaskan bahwa kekuasaan selalu bersifat relasional dan kontingen. Ketaatan tidak pernah otomatis atau alamiah, melainkan bergantung pada kondisi sosial tertentu yang membuat perintah dipahami sebagai sah, masuk akal, atau tak terhindarkan. Oleh karena itu, kekuasaan tidak dapat dijelaskan hanya melalui kepemilikan sumber daya koersif, tetapi harus dianalisis melalui mekanisme legitimasi yang membentuk orientasi makna para aktor sosial (Weber, 1978).

Definisi ini juga membedakan secara tegas antara kekuasaan (*Macht*) dan otoritas (*Herrschaft*). Kekuasaan merujuk pada kemampuan memaksakan kehendak bahkan menghadapi perlawanan, sedangkan otoritas mengandaikan kepatuhan yang relatif sukarela, yakni kepatuhan yang didasarkan pada keyakinan subjektif akan kesahihan perintah. Dengan demikian, otoritas merupakan bentuk kekuasaan yang telah mengalami transformasi simbolik, di mana dominasi diterima sebagai wajar atau sah (Weber, 1978; Giddens, 1971).

Di titik inilah dimensi komunikasi menjadi krusial. Probabilitas ketaatan tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan komunikasi makna legitimasi. Perintah hanya akan ditaati jika ia dapat dipahami, diterima, dan diinternalisasi dalam kerangka makna tertentu oleh pihak yang diperintah. Bahasa, simbol, prosedur, dan narasi berfungsi sebagai medium utama untuk mengartikulasikan perintah sebagai sesuatu yang patut ditaati. Dengan kata lain, otoritas bekerja melalui bahasa, bukan hanya melalui ancaman sanksi (Weber, 1978).

Lebih jauh, konsep probabilitas ketaatan menegaskan bahwa legitimasi otoritas selalu rapuh dan dapat dipertanyakan. Karena ketaatan bergantung pada keyakinan subjektif, ia dapat melemah ketika bahasa kekuasaan kehilangan daya persuasifnya, ketika simbol otoritas tidak lagi dipercaya, atau ketika interpretasi alternatif terhadap perintah menjadi lebih meyakinkan. Krisis otoritas, dalam perspektif Weberian, sering kali tampil sebagai krisis komunikasi dan krisis makna, bukan semata krisis kapasitas institusional.

Implikasi analitisnya penting bagi sosiologi komunikasi dan komunikasi politik. Pidato pemimpin, pernyataan kebijakan, bahasa hukum, dan wacana media harus dipahami sebagai upaya meningkatkan probabilitas ketaatan melalui pembingkaian makna tertentu. Ketika otoritas negara menggunakan bahasa teknokratis, moral, atau populis, yang dipertaruhkan bukan hanya dukungan opini publik, melainkan kelangsungan relasi otoritas itu sendiri.

Pendekatan Weber juga membuka ruang kritik. Fokus pada probabilitas ketaatan berisiko mengaburkan ketimpangan struktural yang membatasi kemampuan aktor untuk menolak perintah, bahkan ketika legitimasi dipertanyakan. Kritik ini kemudian dikembangkan oleh Bourdieu melalui konsep kekuasaan simbolik, yang menekankan bahwa tidak semua aktor memiliki kapasitas yang setara untuk mendefinisikan makna perintah sebagai sah atau tidak sah (Bourdieu, 1991). Meski demikian, kritik tersebut justru memperkuat relevansi Weber dengan menegaskan bahwa ketaatan selalu merupakan hasil interaksi antara makna, posisi sosial, dan struktur kekuasaan.

Definisi Weber tentang otoritas sebagai probabilitas ketaatan menempatkan komunikasi, makna, dan legitimasi di jantung analisis kekuasaan. Otoritas tidak bertahan karena perintah itu dikeluarkan, melainkan karena perintah tersebut berhasil dikomunikasikan sebagai layak ditaati. Inilah kontribusi teoretis Weber yang paling penting bagi sosiologi komunikasi: menunjukkan bahwa dominasi sosial pada dasarnya adalah fenomena simbolik dan komunikatif, bukan sekadar persoalan kekuatan material.

Konsepsi ini menggeser analisis kekuasaan dari ranah koersif ke ranah simbolik dan komunikatif. Kekuasaan bertahan bukan hanya karena mampu menghukum, tetapi karena mampu mendefinisikan makna ketaatan sebagai sesuatu yang wajar, benar, atau tak terhindarkan. Di titik inilah bahasa dan komunikasi memperoleh peran sentral dalam reproduksi otoritas.

Weber membedakan tiga tipe ideal legitimasi otoritas: tradisional, karismatik, dan legal-rasional (Weber, 1978). Masing-masing tipe memiliki bahasa kekuasaan dan logika komunikatif yang khas.

1. Otoritas Tradisional, legitimasi bersumber dari kebiasaan yang telah berlangsung lama. Bahasa kekuasaan bersifat ritualistik, repetitif, dan sarat simbol historis. Ketaatan diproduksi melalui narasi warisan, adat, dan kontinuitas

masa lalu. Pada aspek ini, bahasa berfungsi untuk menormalkan hierarki dan mengaburkan relasi kuasa sebagai "tradisi yang sewajarnya".

2. Otoritas Karismatik, Legitimasi bertumpu pada kualitas luar biasa seorang pemimpin. Bahasa kekuasaan bersifat performatif, emosional, dan personal. Retorika, gaya bicara, dan narasi heroik menjadi instrumen utama. Namun, legitimasi karismatik bersifat tidak stabil karena bergantung pada pengakuan berkelanjutan dari pengikut. Weber menekankan bahwa karisma harus terus "dibuktikan" melalui tindakan simbolik dan komunikasi publik (Weber, 1978).
3. Otoritas Legal-Rasional, Legitimasi berasal dari sistem aturan formal dan prosedur impersonal. Bahasa kekuasaan cenderung teknokratis, administratif, dan tertulis. Ketaatan diarahkan bukan pada individu, melainkan pada aturan yang dianggap sah. Pada aspek ini, bahasa berfungsi untuk mengobjektifikasi kekuasaan dan meminimalkan dimensi personalnya.

Tipologi ini menunjukkan bahwa legitimasi selalu bekerja melalui praktik komunikasi tertentu, bukan melalui kekuatan material semata

Weber tidak mengembangkan teori bahasa secara eksplisit, tetapi analisisnya mengandung pemahaman implisit bahwa bahasa adalah medium utama melalui mana legitimasi diproduksi dan direproduksi. Perintah, aturan, pidato, dan dokumen bukan sekadar instrumen administratif, melainkan tindakan simbolik yang membingkai relasi kuasa. Bahasa kekuasaan berfungsi untuk: Mendefinisikan situasi sosial (apa yang sah dan tidak sah), menjustifikasi hierarki, mengarahkan orientasi tindakan warga.

Aspek birokrasi modern, bahasa hukum dan administrasi menciptakan kesan objektivitas dan rasionalitas, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi otoritas legal-rasional. Namun, Weber juga mengingatkan bahwa rasionalisasi bahasa

ini dapat menghasilkan "sangkar besi" dominasi impersonal yang sulit dipertanyakan (Weber, 1978).

Pada birokrasi modern, Max Weber menunjukkan bahwa bahasa hukum dan administrasi memainkan peran sentral dalam memproduksi dan mempertahankan legitimasi otoritas legal-rasional. Bahasa ini dicirikan oleh sifat impersonal, formal, tertulis, dan terstandarisasi, yang secara simbolik menciptakan kesan objektivitas, netralitas, dan rasionalitas teknis. Perintah birokratis tidak disampaikan sebagai kehendak individu tertentu, melainkan sebagai konsekuensi logis dari aturan, prosedur, dan kompetensi formal yang dianggap sah (Weber, 1978).

Bahasa birokrasi berfungsi sebagai mekanisme depersonalisasi kekuasaan. Otoritas tidak lagi melekat pada figur personal, melainkan pada sistem aturan yang abstrak. Justru karena tampil tidak emosional dan tidak personal, bahasa hukum dan administrasi memperoleh daya legitimasi yang kuat: kepatuhan diproduksi bukan melalui persuasi moral atau karisma, melainkan melalui keyakinan bahwa aturan tersebut bersifat rasional, perlu, dan tidak dapat dinegosiasikan. Dengan kata lain, rasionalitas bahasa menjadi sumber kepercayaan terhadap otoritas.

Namun, Weber secara kritis memperingatkan bahwa rasionalisasi bahasa birokrasi ini mengandung konsekuensi paradoksal. Proses yang pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, prediktabilitas, dan keadilan prosedural justru dapat melahirkan apa yang ia sebut sebagai "sangkar besi" (*iron cage*) dominasi impersonal (Weber, 1978; Weber, 2002). Dalam sangkar besi ini, individu terikat pada sistem aturan dan bahasa formal yang kaku, yang membatasi ruang refleksi, kreativitas, dan penilaian etis.

Bahasa birokrasi dalam sangkar besi tidak sekadar mengatur tindakan, tetapi mendefinisikan horizon berpikir dan berbicara. Masalah sosial direduksi menjadi kategori administratif; penderitaan manusia diterjemahkan menjadi variabel, kode, atau indikator; dan keputusan politik

disamarkan sebagai keharusan teknis. Karena bahasa tersebut tampil rasional dan objektif, ia menjadi sulit dipertanyakan secara normatif. Kritik terhadap kebijakan sering kali ditolak bukan dengan argumen substantif, melainkan dengan rujukan pada prosedur: "aturan sudah demikian", "sesuai mekanisme", atau "tidak memenuhi syarat administratif".

Dari perspektif sosiologi komunikasi, kondisi ini menunjukkan bahwa bahasa birokrasi berfungsi sebagai alat dominasi simbolik yang halus. Dominasi tidak lagi membutuhkan justifikasi ideologis yang eksplisit, karena ia beroperasi melalui logika teknis yang tampak netral. Inilah yang membuat sangkar besi Weberian sangat kuat: dominasi tidak dirasakan sebagai dominasi, melainkan sebagai konsekuensi rasional yang tak terhindarkan dari sistem modern (Weber, 1978).

Analisis ini menjadi semakin relevan Pada aspek kontemporer, ketika birokrasi diperluas melalui teknokrasi, audit culture, dan governance berbasis indikator. Bahasa administrasi kini tidak hanya hadir dalam dokumen hukum, tetapi juga dalam algoritma, skor kinerja, dan metrik kebijakan. Rasionalisasi bahasa mencapai tingkat yang lebih abstrak, sekaligus semakin jauh dari pengalaman hidup warga. Dalam kondisi ini, sangkar besi tidak lagi hanya berupa aturan tertulis, tetapi arsitektur komunikatif yang membingkai apa yang dapat dikatakan, dipertanyakan, dan diperjuangkan secara sah.

Meski demikian, Weber tidak menawarkan solusi normatif untuk membebaskan diri dari sangkar besi. Ia lebih berfungsi sebagai diagnostikus kritis modernitas, yang menunjukkan bahwa rasionalitas legal-rasional, meskipun efektif dan sah secara formal, membawa risiko dehumanisasi dan penutupan ruang refleksi moral. Kritik lanjutan terhadap kondisi ini dikembangkan oleh Habermas melalui konsep kolonisasi dunia-kehidupan oleh sistem, serta oleh Bourdieu melalui analisis kekuasaan simbolik bahasa administratif (Habermas, 1984; Bourdieu, 1991).

Peringatan Weber tentang sangkar besi menegaskan bahwa legitimasi otoritas legal-rasional tidak identik dengan emansipasi sosial. Bahasa birokrasi yang rasional dan objektif dapat sekaligus menjadi instrumen dominasi impersonal yang sulit digugat. Dalam perspektif ini, tugas sosiologi komunikasi bukan hanya menjelaskan bagaimana bahasa birokrasi bekerja, tetapi juga membuka kembali ruang kritik terhadap rasionalitas yang telah membeku menjadi kekuasaan simbolik.

Proses rasionalisasi modern menghasilkan bentuk kekuasaan yang semakin bergantung pada bahasa teknis dan prosedural. Dalam birokrasi, kekuasaan dilegitimasi melalui aturan tertulis, formulir, standar, dan terminologi administratif. Bahasa semacam ini menciptakan jarak simbolik antara penguasa dan yang dikuasai, serta membatasi ruang interpretasi dan resistensi.

Weber melihat fenomena ini sebagai paradoks modernitas: di satu sisi, rasionalisasi meningkatkan efisiensi dan prediktabilitas; di sisi lain, ia mempersempit ruang kebebasan dan kreativitas sosial. Bahasa birokrasi berfungsi sebagai alat dominasi simbolik yang sulit ditantang karena tampil netral dan rasional (Weber, 1978).

Kerangka Weberian memberikan kontribusi penting bagi sosiologi komunikasi, khususnya dalam memahami bagaimana bahasa dan komunikasi membentuk legitimasi kekuasaan. Dalam komunikasi politik, pidato pemimpin, narasi kebijakan, dan framing media dapat dianalisis sebagai upaya untuk: mengukuhkan basis legitimasi tertentu (tradisional, karismatik, atau legal-rasional), mengelola kepatuhan publik, menetralkan kritik melalui bahasa teknokratis atau moral. Pendekatan ini juga membantu menjelaskan mengapa krisis legitimasi sering kali muncul sebagai krisis komunikasi: ketika bahasa kekuasaan gagal meyakinkan publik, otoritas menjadi rapuh meskipun kapasitas koersif tetap ada.

Meskipun analisis Weber sangat berpengaruh, ia relatif kurang mengeksplisitkan ketimpangan dalam distribusi kemampuan berbahasa dan akses komunikasi. Kritik ini

dikembangkan oleh Bourdieu melalui konsep kekuasaan simbolik, yang menunjukkan bahwa legitimasi bahasa bergantung pada posisi sosial penuturnya (Bourdieu, 1991). Habermas, di sisi lain, mengkritik dominasi bahasa instrumental dan menawarkan konsep rasionalitas komunikatif sebagai basis normatif legitimasi demokratis (Habermas, 1984).

Namun, kedua kritik tersebut tetap berangkat dari asumsi Weberian bahwa kekuasaan modern bergantung pada keberhasilan komunikasi legitimasi. Dengan demikian, Weber tetap menjadi fondasi teoretis utama dalam analisis bahasa kekuasaan.

D. Weber dan Fondasi Sosiologi Komunikasi Interpretatif

Max Weber menempati posisi kunci dalam sejarah ilmu sosial sebagai perumus sosiologi interpretatif, suatu pendekatan yang menempatkan makna subjektif tindakan sebagai titik tolak analisis sosial. Meskipun Weber tidak pernah mengembangkan teori komunikasi secara eksplisit, keseluruhan kerangka pemikirannya menyediakan fondasi konseptual yang sangat kuat bagi sosiologi komunikasi, khususnya tradisi interpretatif yang menolak reduksi komunikasi menjadi proses teknis atau mekanis.

Bagi Weber, masyarakat hanya dapat dipahami melalui rekonstruksi makna yang dilekatkan aktor pada tindakannya. Karena tindakan sosial selalu berorientasi pada orang lain, maka komunikasi menjadi dimensi konstitutif dari kehidupan sosial, bukan sekadar instrumen tambahan. Dengan demikian, Weber meletakkan dasar bagi pemahaman komunikasi sebagai proses sosial bermakna yang membentuk interaksi, institusi, dan kekuasaan (Weber, 1978).

Fondasi utama sosiologi komunikasi interpretatif Weber terletak pada konsep tindakan sosial (*soziales Handeln*). Tindakan sosial didefinisikan sebagai tindakan yang dimaknai secara subjektif oleh pelakunya dan diarahkan kepada tindakan orang lain, baik secara aktual maupun imajiner (Weber, 1978). Definisi ini secara implisit bersifat komunikatif, karena tindakan hanya

menjadi "sosial" sejauh ia mengandaikan pemahaman dan penafsiran pihak lain.

Dalam perspektif ini, komunikasi bukan sekadar pertukaran simbol, melainkan mekanisme orientasi sosial: aktor berbicara, menulis, atau bertindak dengan memperhitungkan bagaimana tindakannya akan dipahami. Makna tidak bersifat individualistik, tetapi selalu mengarah pada kemungkinan intersubjektivitas. Inilah dasar konseptual yang kemudian dikembangkan dalam tradisi interaksionisme simbolik, fenomenologi sosial, dan analisis wacana interpretatif (Schutz, 1967).

Pendekatan pemahaman interpretatif (*Verstehen*) merupakan kontribusi metodologis Weber yang paling berpengaruh bagi sosiologi komunikasi. *Verstehen* menuntut peneliti untuk tidak berhenti pada pengukuran efek pesan atau frekuensi komunikasi, tetapi untuk memahami makna yang dimaksud aktor Pada aspek sosial tertentu (Weber, 1949).

Sosiologi komunikasi interpretatif, *Verstehen* berarti: Menempatkan makna sebagai kategori analitis utama, menganalisis komunikasi Pada aspek tindakan sosial, mengakui bahwa realitas komunikasi bersifat kontekstual, historis, dan terbuka terhadap penafsiran. Pendekatan ini, Weber secara fundamental menolak model positivistik dan behavioristik dalam studi komunikasi, yang memandang pesan sebagai stimulus dan respons sebagai akibat yang dapat diprediksi secara linier.

Weber juga meletakkan fondasi penting melalui tipologi rasionalitas tindakan: rasional instrumental, rasional bernilai, afektif, dan tradisional. Tipologi ini memperkaya sosiologi komunikasi dengan menunjukkan bahwa komunikasi tidak selalu digerakkan oleh logika efisiensi, melainkan juga oleh nilai, emosi, dan kebiasaan (Weber, 1978).

Implikasinya, sosiologi komunikasi interpretatif harus peka terhadap: Retorika moral dan ideologis, mobilisasi emosi dalam komunikasi publik, reproduksi simbol dan ritual dalam interaksi sosial. Kerangka ini menjadi dasar untuk memahami

komunikasi politik, komunikasi budaya, dan komunikasi keagamaan sebagai praktik bermakna yang tidak dapat direduksi menjadi kalkulasi rasional-instrumental semata. Fondasi Weberian bagi sosiologi komunikasi interpretatif mencapai kedalaman maksimal dalam analisis otoritas dan legitimasi. Weber menunjukkan bahwa kekuasaan yang stabil bergantung pada keberhasilan komunikasi legitimasi, yakni kemampuan aktor berkuasa untuk membingkai perintah sebagai sah dan layak ditaati (Weber, 1978).

Bahasa, simbol, dan prosedur administratif berfungsi sebagai mekanisme simbolik yang memungkinkan dominasi diterima secara sukarela. Dengan demikian, komunikasi menjadi medium utama reproduksi kekuasaan. Perspektif ini membuka jalan bagi analisis kritis terhadap bahasa hukum, wacana kebijakan, dan retorika politik sebagai praktik komunikatif yang membentuk tatanan sosial. Melalui konsep rasionalisasi dan "sangkar besi", Weber juga menyediakan fondasi kritis bagi sosiologi komunikasi modern. Rasionalisasi bahasa dan komunikasi birokratis menciptakan efisiensi dan prediktabilitas, tetapi sekaligus menghasilkan dominasi impersonal yang membatasi ruang refleksi dan kritik (Weber, 1978).

Pada aspek ini, Weber dapat dibaca sebagai pendahulu sosiologi komunikasi kritis: ia menunjukkan bagaimana bahasa yang tampak netral dan rasional dapat menjadi instrumen dominasi simbolik. Kritik ini kemudian dikembangkan oleh Habermas melalui teori tindakan komunikatif dan oleh Bourdieu melalui analisis kekuasaan simbolik (Habermas, 1984; Bourdieu, 1991). Secara keseluruhan, Max Weber menyediakan fondasi epistemologis, ontologis, dan metodologis bagi sosiologi komunikasi interpretatif. Ia menempatkan komunikasi sebagai: proses pemberian dan penautan makna, mekanisme orientasi tindakan sosial, medium legitimasi kekuasaan dan institusi.

Tanpa Weber, sosiologi komunikasi berisiko terjebak pada reduksionisme teknis dan ahistoris. Dengan Weber, komunikasi dipahami sebagai inti dari kehidupan sosial, tempat makna,

kekuasaan, dan struktur sosial diproduksi serta dipertahankan. Inilah warisan teoretis Weber yang menjadikannya fondasi utama sosiologi komunikasi interpretatif.

E. Profil Intelektual dan Kontribusinya

Maximilian Carl Emil Weber lahir pada 21 April 1864 di Erfurt, Prusia (kini Jerman), dalam keluarga kelas menengah terdidik. Ayahnya, Max Weber Sr., adalah seorang birokrat dan politisi liberal yang aktif dalam parlemen, sementara ibunya, Helene Weber, dikenal religius, asketik, dan memiliki orientasi etika yang kuat. Ketegangan antara orientasi rasional-politis ayahnya dan etika religius ibunya menjadi latar psikososial penting yang membentuk sensibilitas intelektual Weber terhadap konflik nilai, otoritas, dan makna (Giddens, 1971).

Sejak usia muda, Weber menunjukkan ketertarikan luar biasa pada sejarah, filsafat, dan politik. Ia tumbuh dalam lingkungan rumah yang kerap menjadi tempat diskusi elite intelektual dan politik Jerman, sehingga sejak dini terbiasa dengan bahasa kekuasaan, argumentasi rasional, dan perdebatan ideologis—unsur-unsur yang kelak menjadi fokus utama pemikirannya tentang tindakan sosial dan legitimasi otoritas.

Weber menempuh pendidikan tinggi di Universitas Heidelberg, Berlin, dan Göttingen, dengan fokus pada hukum, sejarah, ekonomi, dan filsafat. Disertasi doktornya membahas sejarah organisasi dagang abad pertengahan, sementara habilitasinya menelaah hubungan antara struktur agraria dan kekuasaan politik di Romawi Kuno (Weber, 1978).

Formasi intelektual Weber bersifat interdisipliner. Ia tidak pernah memposisikan sosiologi sebagai disiplin yang terpisah secara ketat, melainkan sebagai medan sintesis antara sejarah, ekonomi politik, hukum, dan filsafat. Pendekatan ini kelak menjadikan pemikirannya sangat relevan bagi sosiologi komunikasi, yang juga berada di persimpangan berbagai disiplin.

Pada akhir 1890-an, Weber mengalami krisis psikologis serius yang membuatnya berhenti mengajar selama beberapa tahun. Namun periode ini justru menjadi fase refleksi intelektual mendalam, di mana Weber mematangkan pendekatan sosiologi interpretatif (verstehende Soziologie) yang kemudian menjadi fondasi karyanya.

Karya Weber tidak ditulis sebagai sistem teori tunggal, melainkan sebagai rangkaian analisis historis dan konseptual yang saling terhubung. Beberapa karya utamanya antara lain: *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (1905), yang menunjukkan hubungan antara etika keagamaan, makna subjektif, dan perkembangan kapitalisme modern. *Economy and Society* (diterbitkan pasca wafat, 1922), karya magnum opus yang merumuskan konsep tindakan sosial, rasionalitas, otoritas, dan birokrasi. *The Methodology of the Social Sciences* (1949), yang menjelaskan prinsip *Verstehen*, tipe ideal, dan netralitas nilai. Karya-karya ini, Weber secara konsisten menempatkan makna, interpretasi, dan orientasi subjektif aktor sebagai pusat analisis sosial

Meskipun Weber tidak mengembangkan teori komunikasi secara eksplisit, kontribusinya terhadap sosiologi komunikasi bersifat fundasional dan multidimensional. Konsep tindakan sosial Weber—tindakan yang dimaknai secara subjektif dan diarahkan pada orang lain—secara implisit bersifat komunikatif. Komunikasi, dalam perspektif Weberian, adalah mekanisme utama orientasi tindakan sosial, tempat aktor mengantisipasi pemahaman dan respons pihak lain (Weber, 1978).

Pendekatan pemahaman interpretatif (*Verstehen*) menjadi dasar epistemologis bagi sosiologi komunikasi interpretatif. Weber menunjukkan bahwa komunikasi hanya dapat dipahami melalui rekonstruksi makna, bukan sekadar pengukuran efek atau transmisi pesan (Weber, 1949). Pendekatan ini memengaruhi fenomenologi sosial, interaksionisme simbolik, dan analisis wacana.

Tipologi rasionalitas Weber (instrumental, bernilai, afektif, tradisional) memperkaya analisis komunikasi dengan menunjukkan bahwa praktik komunikasi tidak tunduk pada satu logika rasional tunggal. Ini sangat penting untuk memahami komunikasi politik, ritual sosial, dan mobilisasi emosi publik.

Analisis Weber tentang otoritas dan legitimasi menempatkan bahasa dan komunikasi sebagai sarana utama reproduksi kekuasaan. Otoritas bertahan sejauh perintah dikomunikasikan dan diterima sebagai sah. Perspektif ini menjadi pijakan bagi kajian bahasa kekuasaan, komunikasi birokrasi, dan legitimasi politik.

Konsep rasionalisasi dan "sangkar besi" menyediakan kerangka kritis untuk memahami dominasi bahasa teknokratis dan birokratis dalam masyarakat modern. Weber dapat dibaca sebagai pendahulu kritik terhadap komunikasi impersonal dan dehumanisasi simbolik.

Max Weber wafat pada 14 Juni 1920, tetapi warisan intelektualnya tetap menjadi salah satu pilar utama ilmu sosial. Dalam sosiologi komunikasi, Weber berfungsi sebagai fondasi epistemologis yang menghubungkan makna, tindakan, komunikasi, dan kekuasaan. Pemikirannya terus dikembangkan dan dikritisi oleh tokoh-tokoh seperti Alfred Schutz, Jürgen Habermas, dan Pierre Bourdieu, namun hampir seluruh tradisi interpretatif dan kritis dalam studi komunikasi modern berutang pada kerangka Weberian tentang makna dan tindakan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.

Giddens, A. (1971). *Capitalism and modern social theory: An analysis of the writings of Marx, Durkheim and Max Weber*. Cambridge University Press.

Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action, Vol. 1: Reason and the rationalization of society*. Beacon Press.

Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8th ed.). McGraw-Hill.

Schutz, A. (1967). *The phenomenology of the social world*. Northwestern University Press.

Swidler, A. (1986). Culture in action: Symbols and strategies. *American Sociological Review, 51*(2), 273–286. https://doi.org/10.2307/2095521

Weber, M. (1949). *The methodology of the social sciences*. Free Press.

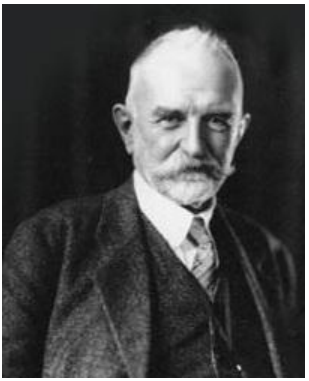
Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.

Weber, M. (2002). *The Protestant ethic and the "spirit" of capitalism and other writings*. Penguin Books.

BAB 4

GEORGE HERBERT MEAD: INTERAKSI SIMBOLIK DAN PEMBENTUKAN DIRI

Dr Maemunah, S.Ag, M.Pd



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/George_Herbert_Mead

George Herbert Mead (1863–1931) merupakan salah satu tokoh kunci dalam tradisi pragmatisme Amerika dan peletak fondasi utama interaksionisme simbolik. Berbeda dengan sosiolog klasik Eropa yang berfokus pada struktur sosial makro, Mead menempatkan interaksi sosial sehari-hari sebagai locus utama pembentukan makna, identitas, dan tatanan sosial. Meskipun Mead sendiri tidak menulis karya sistematis selama hidupnya, gagasannya dihimpun dan dikembangkan melalui kuliah-kuliahnya, terutama dalam *Mind, Self, and Society* (1934).

Kontribusi Mead sangat signifikan bagi sosiologi komunikasi karena ia menempatkan komunikasi simbolik sebagai prasyarat munculnya kesadaran diri (*self*) dan kehidupan sosial. Dalam

perspektif Mead, masyarakat tidak mendahului individu secara ontologis, tetapi muncul dan direproduksi melalui proses interaksi simbolik yang berkelanjutan (Mead, 1934).

Konsep inti pemikiran Mead adalah interaksi simbolik, yakni proses interaksi sosial yang dimediasi oleh simbol—terutama bahasa—yang memiliki makna bersama. Mead membedakan antara gestur non-signifikan (reaksi otomatis) dan gestur signifikan, yaitu simbol yang maknanya dipahami bersama oleh pengirim dan penerima (Mead, 1934).

Bahasa, dalam hal ini, bukan sekadar alat komunikasi, tetapi mekanisme sosial pembentuk makna dan koordinasi tindakan. Melalui simbol-simbol linguistik, individu dapat: mengantisipasi respons orang lain, merefleksikan tindakannya sendiri, menyesuaikan perilakunya Pada aspek sosial. Makna tidak bersifat internal atau privat, melainkan lahir dari proses interaksi sosial. Posisi ini menolak pandangan individualistik tentang makna dan sekaligus menghindari determinisme struktural yang mengabaikan peran aktor.

Pemikiran Mead, pikiran (*mind*) bukan entitas biologis atau mental yang berdiri sendiri, melainkan produk proses sosial. Pikiran berkembang melalui kemampuan individu menggunakan simbol signifikan dan melakukan *internal conversation*—dialog batin yang meniru proses komunikasi eksternal (Mead, 1934). Artinya, berpikir adalah bentuk komunikasi yang terinternalisasi. Tanpa interaksi sosial dan bahasa, *mind* tidak akan berkembang. Pandangan ini memiliki implikasi penting bagi sosiologi komunikasi: komunikasi mendahului kesadaran individual, bukan sebaliknya.

Konsep paling terkenal dari Mead adalah teori tentang diri (*self*), yang ia pahami sebagai proses, bukan substansi. *Self* terbentuk melalui interaksi sosial dan terdiri dari dua dimensi dialektis: "Me": aspek diri yang merefleksikan sikap, norma, dan harapan sosial yang terinternalisasi. "I": aspek diri yang bersifat spontan, kreatif, dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi (Mead, 1934). Interaksi antara *I* dan *Me* menjelaskan bagaimana individu dapat sekaligus menjadi produk masyarakat dan agen perubahan sosial. Pada aspek

komunikasi, *Me* memungkinkan individu menyesuaikan diri dengan norma komunikatif, sementara *I* membuka ruang inovasi, resistensi, dan ekspresi diri.

Proses pembentukan diri berlangsung melalui mekanisme pengambilan peran (*role-taking*), yaitu kemampuan individu membayangkan perspektif orang lain. Mead membedakan dua tahap penting: Play stage: anak mengambil peran orang lain secara terpisah (misalnya ayah atau ibu). Game stage: individu memahami sistem peran yang terorganisasi dan kompleks.

Pada tahap lanjut, individu menginternalisasi "generalized other", yakni representasi abstrak dari norma dan harapan sosial masyarakat secara keseluruhan (Mead, 1934). Konsep ini sangat penting dalam sosiologi komunikasi karena menjelaskan bagaimana aturan komunikasi sosial (kesopanan, legitimasi, otoritas) menjadi bagian dari kesadaran individu.

Pemikiran Mead memberikan fondasi mikro yang kuat bagi sosiologi komunikasi: Komunikasi sebagai proses pembentukan identitas, Identitas tidak dimiliki sejak lahir, tetapi dibentuk dan dinegosiasikan melalui interaksi simbolik. Makna sebagai hasil interaksi, Makna pesan tidak melekat secara inheren, tetapi muncul dalam proses sosial. Relasi antara individu dan struktu, Mead menjembatani mikro dan makro: norma sosial terinternalisasi melalui komunikasi sehari-hari. Relevansi kontemporer Konsep *self*, *role-taking*, dan *generalized other* sangat relevan untuk menganalisis identitas digital, performativitas diri di media sosial, dan komunikasi interpersonal modern.

Meski berpengaruh besar, pemikiran Mead juga menuai kritik. Tradisi kritis menilai Mead kurang memberi perhatian pada kekuasaan, konflik, dan ketimpangan struktural. Interaksi simbolik cenderung diasosiasikan dengan stabilitas dan konsensus, sementara relasi dominasi kurang dieksplorasi. George Herbert Mead meletakkan dasar bagi pemahaman bahwa komunikasi adalah proses fundamental pembentukan diri dan masyarakat. Ia menunjukkan bahwa identitas, kesadaran, dan tatanan sosial lahir dari interaksi simbolik yang berulang. Dalam sosiologi komunikasi, Mead berfungsi sebagai fondasi mikro-interpretatif yang

menjelaskan bagaimana makna dan identitas diproduksi dari bawah ke atas.

A. Bahasa dan Simbol dalam Interaksi Sosial

Sosiologi interpretatif dan interaksionisme simbolik, bahasa dan simbol dipahami sebagai fondasi utama kehidupan sosial. Interaksi sosial tidak berlangsung secara langsung melalui rangsangan dan respons biologis, melainkan dimediasi oleh simbol—tanda yang memiliki makna bersama dan memungkinkan aktor menginterpretasikan tindakan satu sama lain. Bahasa, sebagai sistem simbol paling kompleks, berfungsi bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi untuk membangun makna, mengoordinasikan tindakan, dan membentuk realitas sosial (Mead, 1934).

Pandangan ini menolak reduksionisme biologis dan psikologis dalam memahami perilaku sosial. Manusia berinteraksi bukan karena refleks, tetapi karena kemampuan simbolik yang memungkinkan mereka memahami situasi, menilai konsekuensi tindakan, dan menyesuaikan perilaku secara reflektif. Dengan demikian, bahasa dan simbol merupakan prasyarat ontologis bagi interaksi sosial yang bermakna.

George Herbert Mead membedakan antara gestur non-signifikan dan gestur signifikan. Gestur non-signifikan memicu respons otomatis tanpa pemahaman bersama, sementara gestur signifikan adalah simbol yang maknanya dipahami secara serempak oleh pengirim dan penerima (Mead, 1934). Bahasa verbal adalah bentuk paling maju dari gestur signifikan, karena memungkinkan aktor tidak hanya memengaruhi orang lain, tetapi juga merefleksikan tindakannya sendiri.

Makna simbol tidak melekat secara alamiah pada tanda, melainkan dihasilkan melalui proses interaksi sosial. Simbol memperoleh makna karena digunakan secara berulang Pada aspek tertentu dan diakui secara kolektif. Oleh karena itu, makna selalu bersifat kontekstual, dinamis, dan terbuka terhadap penafsiran ulang. Interaksi sosial, dalam perspektif ini, adalah

arena produksi dan negosiasi makna yang berkelanjutan (Blumer, 1969).

Pernyataan bahwa makna simbol tidak melekat secara alamiah pada tanda, melainkan dihasilkan melalui proses interaksi sosial, merupakan salah satu tesis paling fundamental dalam sosiologi komunikasi dan teori interaksi simbolik. Pandangan ini menolak asumsi esensialis dan naturalistik tentang makna yang menganggap simbol memiliki arti tetap dan universal. Sebaliknya, makna dipahami sebagai produk relasional, yang hanya muncul ketika simbol digunakan, ditafsirkan, dan dinegosiasikan Pada aspek interaksi sosial tertentu (Mead, 1934; Blumer, 1969).

Perspektif ini, simbol—baik berupa kata, gestur, citra, maupun praktik—tidak pernah bermakna dengan sendirinya. Simbol memperoleh signifikansi karena ia digunakan secara berulang dalam situasi sosial tertentu dan dipahami bersama oleh para pelaku interaksi. Proses pengulangan ini menciptakan stabilitas makna relatif, tetapi stabilitas tersebut selalu bersifat sementara dan bergantung pada keberlanjutan pengakuan kolektif. Dengan kata lain, makna simbol adalah hasil dari konvensi sosial yang terus diproduksi ulang, bukan sifat intrinsik tanda itu sendiri.

Dimensi kolektif pengakuan ini sangat penting. Makna simbol hanya menjadi "sosial" ketika ia diakui dan diharapkan oleh lebih dari satu aktor. Di sinilah interaksi simbolik berfungsi sebagai mekanisme penyelarasan makna: individu belajar bagaimana simbol digunakan, dalam situasi apa ia relevan, dan respons apa yang diharapkan. Tanpa pengakuan kolektif, simbol kehilangan daya komunikatifnya. Oleh karena itu, makna selalu terkait dengan komunitas interpretatif yang menopangnya.

Konsekuensi logis dari pandangan ini adalah bahwa makna bersifat kontekstual. Simbol yang sama dapat memiliki arti berbeda Pada aspek sosial, historis, atau kultural yang berbeda. Sebuah kata, gestur, atau tanda visual tidak dapat dipahami secara terlepas dari situasi interaksi, relasi sosial antaraktor, serta norma dan nilai yang berlaku. Dalam sosiologi

komunikasi, hal ini menegaskan pentingnya analisis konteks (*contextual analysis*) dan menolak pendekatan yang memisahkan pesan dari situasi sosialnya.

Lebih jauh, karena makna dihasilkan melalui interaksi, ia juga bersifat dinamis dan terbuka terhadap penafsiran ulang. Perubahan makna terjadi ketika pola interaksi berubah, ketika aktor baru masuk ke dalam arena sosial, atau ketika simbol digunakan untuk tujuan yang berbeda. Proses ini menjelaskan bagaimana makna simbol dapat dipertentangkan, dinegosiasikan, bahkan dipolitisasi. Pada aspek komunikasi publik dan politik, perebutan makna simbol—seperti "demokrasi", "keadilan", atau "identitas"—menjadi arena utama konflik sosial.

Analisis ini juga memiliki implikasi penting bagi pemahaman keteraturan dan perubahan sosial. Keteraturan sosial bertahan sejauh makna simbolik yang menopangnya terus direproduksi tanpa banyak dipertanyakan. Sebaliknya, perubahan sosial sering kali bermula dari destabilisasi makna, ketika simbol yang sebelumnya dianggap mapan mulai ditafsirkan ulang atau ditantang. Dengan demikian, perubahan makna simbolik merupakan mekanisme mikro yang dapat menjelaskan transformasi sosial makro.

Namun, penting dicatat bahwa proses produksi makna tidak berlangsung dalam ruang yang netral. Tidak semua aktor memiliki kapasitas simbolik yang setara untuk mendefinisikan atau mengubah makna. Di sinilah pendekatan interaksionisme simbolik perlu diperkaya dengan analisis kekuasaan. Pierre Bourdieu, misalnya, menunjukkan bahwa makna simbolik sering kali mencerminkan posisi sosial dan modal simbolik aktor yang dominan. Makna yang diakui secara kolektif sering kali adalah makna yang berhasil dilegitimasi oleh pihak yang memiliki otoritas simbolik (Bourdieu, 1991).

Makna simbol merupakan hasil dari proses sosial yang terus berlangsung, bersifat kontekstual, dinamis, dan politis. Dalam sosiologi komunikasi, pemahaman ini menggeser fokus analisis dari pesan sebagai objek statis menuju proses interaksi

di mana makna diproduksi, dinegosiasikan, distabilkan, atau diubah. Komunikasi, dalam perspektif ini, bukan sekadar penyampaian tanda, melainkan arena utama pembentukan realitas sosial.

Bahasa memiliki fungsi refleksif yang krusial dalam pembentukan kesadaran diri (*self*). Melalui bahasa, individu dapat melakukan *internal conversation*—dialog batin yang meniru komunikasi eksternal. Proses ini memungkinkan individu melihat dirinya dari perspektif orang lain dan mengontrol tindakannya sesuai dengan norma sosial (Mead, 1934).

Bahasa tidak hanya menghubungkan individu satu sama lain, tetapi juga menghubungkan individu dengan dirinya sendiri. Kesadaran diri bukanlah entitas internal yang stabil, melainkan hasil dari proses simbolik yang terus berlangsung. Pada aspek ini, bahasa menjadi medium utama internalisasi norma, nilai, dan ekspektasi sosial.

Simbol berperan penting dalam pembentukan identitas sosial melalui mekanisme pengambilan peran (*role-taking*). Individu belajar memahami dirinya dengan membayangkan bagaimana orang lain melihat dan menilai tindakannya. Proses ini bergantung pada kemampuan simbolik untuk merepresentasikan perspektif orang lain secara mental.

Pada tahap lanjut, individu menginternalisasi generalized other, yaitu sistem simbol dan norma yang mewakili masyarakat secara keseluruhan. Bahasa dan simbol memungkinkan individu menavigasi kompleksitas peran sosial dan menyesuaikan perilaku dalam berbagai aspek interaksi. Dengan demikian, identitas sosial merupakan hasil interaksi simbolik yang terstruktur, bukan ekspresi esensial diri (Mead, 1934).

Bahasa dan simbol juga berfungsi sebagai mekanisme utama pembentukan keteraturan sosial. Norma, aturan, dan institusi sosial tidak hanya ditegakkan melalui sanksi material, tetapi melalui internalisasi simbolik yang membuat aturan tersebut dipahami sebagai wajar dan sah. Keteraturan sosial

bertahan sejauh simbol-simbol yang menopangnya terus direproduksi dalam interaksi sehari-hari.

Pada perspektif ini, stabilitas sosial bukan hasil determinasi struktural semata, melainkan hasil keselarasan interpretatif. Ketika makna simbol dipertanyakan atau ditafsirkan ulang, keteraturan sosial dapat terganggu. Dengan demikian, perubahan sosial sering kali bermula dari pergeseran makna simbolik dalam interaksi mikro.

Meskipun interaksionisme simbolik memberikan pemahaman mendalam tentang makna dan interaksi, pendekatan ini juga menuai kritik karena relatif kurang memperhatikan relasi kekuasaan dan ketimpangan struktural. Tidak semua aktor memiliki kapasitas simbolik yang sama untuk mendefinisikan makna atau memaksakan interpretasi tertentu sebagai dominan.

Kritik ini kemudian dikembangkan oleh Pierre Bourdieu melalui konsep kekuasaan simbolik, yang menunjukkan bahwa bahasa dan simbol selalu terkait dengan posisi sosial dan modal simbolik penuturnya. Dengan demikian, analisis bahasa dan simbol dalam interaksi sosial perlu dilengkapi dengan sensitivitas terhadap struktur kekuasaan yang membingkai interaksi tersebut (Bourdieu, 1991).

Secara keseluruhan, kajian tentang bahasa dan simbol dalam interaksi sosial menegaskan bahwa komunikasi adalah proses sosial konstitutif, bukan sekadar alat penyampaian pesan. Bahasa dan simbol membentuk cara individu memahami diri, orang lain, dan dunia sosial. Dalam sosiologi komunikasi, pendekatan ini mengarahkan perhatian pada proses pemaknaan, negosiasi simbolik, dan pembentukan identitas, serta membuka ruang analisis kritis terhadap bagaimana makna dan kekuasaan saling terkait dalam praktik komunikasi sehari-hari.

B. Konsep *Self*, *Mind*, dan *Society*

Pemikiran George Herbert Mead, konsep *self*, *mind*, dan *society* membentuk satu kesatuan analitis yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan proses sosial yang saling membentuk melalui interaksi simbolik. Mead menolak pandangan yang memisahkan individu dari masyarakat secara ontologis; sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kesadaran individu dan keteraturan sosial muncul secara simultan melalui komunikasi simbolik (Mead, 1934).

George Herbert Mead, dengan konsep *self*, *mind*, dan *society* membentuk satu kesatuan analitis yang bersifat relasional dan prosesual, bukan tiga entitas yang dapat dipahami secara terpisah. Mead secara eksplisit menolak pendekatan substansialis yang memperlakukan kesadaran individu, identitas diri, dan masyarakat sebagai unit yang otonom. Sebaliknya, ia mengajukan kerangka ontologis di mana ketiganya muncul secara simultan dan saling membentuk melalui interaksi simbolik (Mead, 1934).

Pertama, *mind* dalam pemikiran Mead bukanlah kapasitas mental bawaan atau mekanisme kognitif individual yang berdiri sendiri. *Mind* adalah kemampuan reflektif yang lahir dari penggunaan simbol signifikan, terutama bahasa, dalam interaksi sosial. Proses berpikir dipahami sebagai *internalized social communication*, yakni dialog batin yang mereplikasi pola komunikasi eksternal. Dengan demikian, *mind* hanya mungkin berkembang Pada aspek sosial yang menyediakan sistem simbol bersama. Tanpa masyarakat dan bahasa, tidak ada *mind* dalam pengertian Mead (Mead, 1934).

Kedua, *self* merupakan konsekuensi langsung dari berkembangnya *mind*. *Self* muncul ketika individu mampu menjadikan dirinya sendiri sebagai objek refleksi—melihat dirinya dari perspektif orang lain. Proses ini sepenuhnya bersifat sosial dan komunikatif, karena bergantung pada mekanisme *role-taking* dan internalisasi sikap orang lain. Dialektika antara "I" dan "Me" menunjukkan bahwa diri tidak pernah statis: ia

terus dibentuk melalui respons spontan terhadap situasi sosial dan penyesuaian terhadap norma yang terinternalisasi. Dengan demikian, *self* adalah proses reflektif yang berlangsung dalam interaksi, bukan identitas esensial yang telah selesai.

Ketiga, *society* dalam kerangka Mead tidak dipahami sebagai struktur objektif yang mendahului individu secara ontologis, melainkan sebagai pola interaksi simbolik yang terorganisasi. Norma, peran, dan institusi sosial hadir sebagai hasil sedimentasi dari praktik komunikasi yang berulang dan relatif stabil. Konsep *generalized other* menjelaskan bagaimana masyarakat hadir dalam kesadaran individu sebagai sistem harapan kolektif yang memungkinkan koordinasi tindakan dalam skala luas. Dengan demikian, masyarakat bukanlah kekuatan eksternal yang sepenuhnya memaksa, tetapi hadir melalui internalisasi simbolik dalam diri individu.

Keunggulan teoretis Mead terletak pada kemampuannya menjelaskan relasi sirkular dan dialektis antara *self*, *mind*, dan *society*. Masyarakat menyediakan simbol dan norma; simbol memungkinkan berkembangnya *mind*; *mind* memungkinkan pembentukan *self*; dan *self*, melalui tindakan komunikatifnya, mereproduksi atau mengubah masyarakat. Tidak ada titik awal yang absolut dalam relasi ini. Ketiganya saling mengandaikan dan hanya dapat dipahami sebagai proses yang berlangsung terus-menerus.

Implikasi analitis dari kerangka ini sangat penting bagi sosiologi komunikasi. Pertama, komunikasi tidak dapat diperlakukan sebagai variabel turunan atau sekadar sarana penyampaian pesan, melainkan sebagai mekanisme konstitutif pembentukan individu dan masyarakat. Kedua, identitas dan keteraturan sosial dipahami sebagai hasil negosiasi simbolik yang selalu terbuka terhadap perubahan. Ketiga, perubahan sosial dapat ditelusuri dari level mikro—yakni inovasi makna dalam interaksi—sebelum termanifestasi dalam transformasi institusional yang lebih luas.

Ketajaman pendekatan Mead juga memperlihatkan keterbatasannya. Dengan fokus pada proses interaksi simbolik, kerangka *self–mind–society* cenderung kurang mengeksplorasi relasi kekuasaan dan ketimpangan struktural yang membatasi kemungkinan interaksi yang setara. Tidak semua aktor memiliki kapasitas simbolik yang sama untuk membentuk *generalized other* atau mendefinisikan makna yang dominan. Kritik ini kemudian dikembangkan oleh Goffman melalui analisis performativitas dan oleh Bourdieu melalui konsep kekuasaan simbolik. Meski demikian, kritik-kritik tersebut justru menegaskan relevansi Mead: bahkan dominasi dan kekuasaan simbolik hanya dapat bekerja melalui proses komunikasi dan interaksi.

Pemikiran Mead menawarkan fondasi ontologis dan epistemologis yang kokoh bagi sosiologi komunikasi. *Self*, *mind*, dan *society* bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan proses sosial yang saling membentuk melalui interaksi simbolik. Dalam perspektif Mead, memahami komunikasi berarti memahami bagaimana manusia menjadi subjek sosial dan bagaimana masyarakat terus-menerus diciptakan kembali dalam praktik simbolik sehari-hari. Kerangka ini menjadi fondasi utama interaksionisme simbolik dan memberikan kontribusi penting bagi sosiologi komunikasi, khususnya dalam memahami bagaimana makna, identitas, dan tatanan sosial diproduksi dari level interaksi mikro.

Mind: Kesadaran sebagai Produk Proses Sosial

Bagi Mead, *mind* tidak dipahami sebagai substansi mental bawaan atau kapasitas biologis semata, melainkan sebagai kemampuan reflektif yang berkembang melalui interaksi simbolik. *Mind* muncul ketika individu mampu menggunakan simbol signifikan, terutama bahasa, untuk mengarahkan tindakannya dan mengantisipasi respons orang lain (Mead, 1934). Tapi George Herbert Mead, *mind* tidak dipahami sebagai substansi mental bawaan atau kapasitas biologis yang hadir secara alamiah dalam diri individu, melainkan sebagai

kemampuan reflektif yang berkembang melalui interaksi simbolik. Dengan posisi ini, Mead secara tegas menolak reduksionisme psikologis dan biologis yang memandang kesadaran sebagai proses internal individual yang dapat dijelaskan terlepas dari aspek sosial. Sebaliknya, *mind* dipahami sebagai produk sosial, yang hanya mungkin muncul dalam lingkungan interaksi yang dimediasi oleh simbol-simbol bermakna (Mead, 1934).

Konsep *mind* Mead berakar pada gagasan bahwa berpikir pada dasarnya adalah komunikasi yang terinternalisasi (*internalized communication*). Individu mulai "berpikir" ketika ia mampu menggunakan simbol signifikan—terutama bahasa—bukan hanya untuk memengaruhi orang lain, tetapi juga untuk mengatur dan merefleksikan tindakannya sendiri. Dalam proses ini, individu mengadopsi posisi komunikatif ganda: sebagai pengirim sekaligus penerima pesan. Dengan kata lain, *mind* muncul ketika individu dapat berbicara kepada dirinya sendiri sebagaimana ia berbicara kepada orang lain (Mead, 1934).

Kemampuan menggunakan simbol signifikan menjadi kunci dalam perkembangan *mind*. Simbol signifikan adalah gestur atau tanda yang memunculkan makna yang sama bagi aktor yang menggunakannya maupun bagi pihak yang meresponsnya. Bahasa verbal merupakan bentuk paling maju dari simbol signifikan karena memungkinkan aktor mengantisipasi respons sosial sebelum bertindak. Antisipasi ini tidak bersifat instingtif, melainkan reflektif: individu mempertimbangkan bagaimana tindakannya akan dipahami, dinilai, atau ditanggapi oleh orang lain. Proses antisipasi inilah yang membedakan *mind* dari sekadar kesadaran biologis.

Konsep *mind* tidak muncul sebelum interaksi sosial, tetapi tumbuh di dalam dan melalui interaksi tersebut. Individu tidak memiliki *mind* terlebih dahulu untuk kemudian berinteraksi; justru melalui interaksi simboliklah individu mengembangkan kapasitas mental reflektif. Pandangan ini memiliki implikasi ontologis yang penting: kesadaran manusia tidak dapat dipisahkan dari struktur komunikasi sosial yang

melingkupinya. Tanpa bahasa dan simbol bersama, *mind* dalam pengertian Mead tidak mungkin eksis.

Analisis ini juga memperlihatkan bahwa *mind* bersifat relasional dan situasional, bukan universal dan statis. Cara individu berpikir, menilai, dan merefleksikan diri sangat dipengaruhi oleh aspek sosial, jenis interaksi, dan sistem simbol yang tersedia. Oleh karena itu, variasi budaya, bahasa, dan struktur sosial akan menghasilkan bentuk-bentuk *mind* yang berbeda. Dalam sosiologi komunikasi, hal ini menegaskan bahwa proses kognitif tidak dapat dilepaskan dari praktik komunikasi konkret.

Lebih jauh, pemahaman Mead tentang *mind* membuka jalan bagi analisis hubungan antara agensi dan kontrol sosial. Di satu sisi, *mind* memungkinkan individu mengendalikan tindakannya secara reflektif dan kreatif. Di sisi lain, karena refleksi tersebut dibentuk melalui internalisasi simbol dan harapan sosial, *mind* juga menjadi medium internalisasi norma dan kekuasaan. Dengan kata lain, *mind* adalah arena di mana kebebasan dan regulasi sosial bertemu. Analisis ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh teori-teori tentang internalisasi norma, disiplin sosial, dan kekuasaan simbolik.

Pendekatan Mead juga mengandung keterbatasan. Dengan menekankan perkembangan *mind* melalui interaksi simbolik, Mead relatif kurang membahas bagaimana ketimpangan struktural dan relasi kekuasaan membatasi akses individu terhadap simbol signifikan tertentu. Tidak semua aktor memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam komunikasi yang membentuk *mind*. Kritik ini kemudian diperkaya oleh perspektif kritis, terutama oleh Bourdieu, yang menunjukkan bahwa kemampuan simbolik selalu terkait dengan modal dan posisi sosial. Meski demikian, kritik tersebut tidak meniadakan argumen Mead, melainkan memperluasnya: *mind* tetap dipahami sebagai produk komunikasi, tetapi komunikasi itu sendiri berlangsung dalam struktur kekuasaan.

Konsep *mind* dalam pemikiran Mead memberikan kontribusi fundamental bagi sosiologi komunikasi. Ia menunjukkan bahwa berpikir bukanlah proses privat yang terisolasi, melainkan aktivitas sosial yang terinternalisasi, yang hanya dapat dipahami melalui analisis bahasa, simbol, dan interaksi. Dalam perspektif ini, memahami *mind* berarti memahami bagaimana komunikasi membentuk kesadaran manusia dan memungkinkan kehidupan sosial berlangsung secara reflektif.

***Self*: Diri sebagai Proses Dialektis**

Konsep *self* merupakan inti pemikiran Mead. *Self* dipahami bukan sebagai substansi tetap, melainkan sebagai proses reflektif yang terbentuk melalui interaksi sosial. Mead membedakan dua dimensi *self* yang saling berinteraksi:

1. "Me": aspek diri yang mencerminkan sikap, norma, dan harapan sosial yang terinternalisasi.
2. "I": aspek diri yang bersifat spontan, kreatif, dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi.

Dialektika antara "I" dan "Me" menjelaskan bagaimana individu dapat sekaligus menjadi produk masyarakat dan agen perubahan sosial. Pada aspek komunikasi, "Me" memungkinkan individu menyesuaikan diri dengan aturan dan ekspektasi simbolik, sementara "I" membuka ruang bagi inovasi, resistensi, dan redefinisi makna. Dialektika antara "I" dan "Me" merupakan inti teoritis yang memungkinkan Mead menjelaskan paradoks klasik dalam ilmu sosial: bagaimana individu dapat sekaligus menjadi produk masyarakat dan agen perubahan sosial.

Mead menghindari dikotomi determinisme sosial versus voluntarisme individual dengan menunjukkan bahwa diri (*self*) selalu terbentuk dalam ketegangan dinamis antara internalisasi norma sosial (*Me*) dan respons kreatif individu terhadap norma tersebut (*I*) (Mead, 1934). Dialektika ini bersifat prosesual, bukan statis, dan berlangsung terus-menerus dalam interaksi sosial.

Aspek komunikasi, "Me" merepresentasikan dimensi diri yang terbentuk melalui internalisasi simbol, bahasa, dan ekspektasi sosial. "Me" memungkinkan individu memahami "aturan main" komunikasi: apa yang pantas dikatakan, bagaimana menafsirkan simbol, dan respons apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Tanpa "Me", komunikasi sosial akan kehilangan keteraturan, karena tidak ada kerangka simbolik bersama yang memungkinkan pemahaman timbal balik. Dengan demikian, "Me" berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi makna dan reproduksi tatanan sosial melalui praktik komunikasi yang berulang.

Sebaliknya, "I" merupakan dimensi diri yang bersifat spontan, tidak sepenuhnya terprediksi, dan tidak sepenuhnya dapat direduksi pada norma yang terinternalisasi. Dalam komunikasi, "I" muncul sebagai respons kreatif terhadap situasi sosial, yang dapat mengambil bentuk inovasi simbolik, penyimpangan dari ekspektasi, atau penolakan terhadap definisi situasi yang dominan. "I" memungkinkan individu tidak hanya mereproduksi makna yang ada, tetapi juga mengganggu, menegosiasikan ulang, dan menciptakan makna baru. Di sinilah letak potensi perubahan sosial dalam teori Mead.

Analisis ini memiliki implikasi teoretis yang penting bagi sosiologi komunikasi. Pertama, ia menunjukkan bahwa komunikasi tidak pernah sepenuhnya bersifat repetitif atau mekanis. Setiap tindakan komunikatif selalu mengandung kemungkinan deviasi, karena respons "I" tidak pernah dapat dipastikan sepenuhnya oleh "Me". Kedua, perubahan sosial tidak harus dipahami sebagai peristiwa makro yang datang dari luar, tetapi dapat ditelusuri dari mikro-interaksi komunikatif di mana aktor mulai menggunakan simbol secara berbeda, menantang norma komunikasi yang mapan, atau memperkenalkan definisi situasi alternatif.

Lebih jauh, dialektika "I" dan "Me" juga membantu menjelaskan ketegangan antara konformitas dan resistensi dalam komunikasi publik. Individu dapat secara bersamaan mematuhi norma komunikasi dominan (melalui "Me") sambil

menyisipkan kritik, ironi, atau subversi simbolik (melalui "I"). Pada aspek komunikasi politik dan budaya, praktik seperti satire, parodi, atau reapropriasi simbol dapat dipahami sebagai ekspresi "I" yang beroperasi di dalam kerangka simbolik "Me". Dengan demikian, resistensi tidak selalu berada di luar sistem simbolik, tetapi sering kali bekerja dari dalam bahasa dan simbol yang sama.

Namun, penting untuk dicatat bahwa ruang bagi "I" tidak sepenuhnya bebas. Kemungkinan inovasi dan resistensi selalu dibatasi oleh struktur simbolik dan relasi kekuasaan yang membingkai komunikasi. Tidak semua ekspresi "I" memiliki peluang yang sama untuk diakui atau dilegitimasi. Di sinilah kritik terhadap Mead menjadi relevan: ia relatif kurang mengeksplorasi bagaimana posisi sosial, otoritas simbolik, dan ketimpangan struktural memengaruhi sejauh mana respons "I" dapat diterima atau justru disingkirkan. Kritik ini kemudian diperkaya oleh Bourdieu melalui konsep kekuasaan simbolik, yang menunjukkan bahwa redefinisi makna hanya efektif jika didukung oleh modal simbolik tertentu.

Meski demikian, kekuatan utama konsep "I" dan "Me" terletak pada kemampuannya menjelaskan perubahan sosial sebagai proses komunikatif yang berakar pada interaksi sehari-hari. Mead menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya direproduksi melalui kepatuhan simbolik, tetapi juga terus-menerus dinegosiasikan melalui respons kreatif individu. Dalam perspektif ini, komunikasi menjadi arena utama di mana stabilitas dan perubahan, konformitas dan inovasi, saling berkelindan.

Dialektika "I" dan "Me" menyediakan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami komunikasi sebagai mekanisme reproduksi sekaligus transformasi sosial. Individu tidak sekadar "dibentuk" oleh masyarakat, tetapi secara aktif—melalui praktik komunikasi—ikut membentuk kembali makna dan tatanan sosial yang melingkupinya.

Society: Tatanan Sosial sebagai Proses Interaksi

Pemikiran George Herbert Mead, *society* tidak dipahami sebagai struktur eksternal yang bersifat objektif dan mendahului individu, sebagaimana diasumsikan dalam pendekatan struktural-fungsional atau positivistik klasik. Sebaliknya, masyarakat dipahami sebagai pola interaksi simbolik yang terorganisasi, yakni jaringan relasi sosial yang terbentuk, dipertahankan, dan diubah melalui praktik komunikasi bermakna yang berlangsung secara terus-menerus (Mead, 1934). Dengan posisi ini, Mead secara teoretis menolak reifikasi masyarakat sebagai entitas supra-individual yang berdiri di luar dan di atas aktor sosial.

Pemahaman ini membawa implikasi ontologis yang penting: masyarakat bersifat prosesual, bukan substansial. Masyarakat tidak "ada" sebagai benda atau struktur yang tetap, melainkan sebagai rangkaian tindakan simbolik yang berulang dan relatif stabil. Norma, peran, dan institusi sosial tidak memiliki keberadaan mandiri, tetapi memperoleh realitasnya sejauh ia direproduksi dalam interaksi sosial sehari-hari. Ketika praktik komunikasi yang menopang norma dan peran tersebut melemah atau berubah, maka masyarakat—dalam bentuk tatanan simboliknya—ikut mengalami transformasi.

Pada kerangka ini, norma sosial tidak dipahami sebagai aturan eksternal yang dipaksakan secara mekanis, melainkan sebagai harapan simbolik yang dipelajari, diinternalisasi, dan diaktualkan melalui komunikasi. Individu memahami apa yang "boleh", "layak", atau "diwajibkan" bukan semata melalui sanksi, tetapi melalui proses *role-taking* dan internalisasi sikap orang lain. Norma menjadi efektif bukan karena kekuatan koersifnya, tetapi karena dipahami dan diterima sebagai definisi situasi yang sah. Dengan demikian, komunikasi menjadi mekanisme utama internalisasi dan reproduksi norma sosial.

Hal yang sama berlaku pada peran sosial. Dalam perspektif Mead, peran bukan skrip tetap yang melekat pada posisi struktural, melainkan pola ekspektasi simbolik yang diwujudkan dalam interaksi. Individu "memainkan" peran

dengan mengantisipasi respons orang lain dan menyesuaikan tindakannya secara reflektif. Peran sosial hanya bermakna sejauh ia dikenali dan direspons oleh pihak lain dalam komunikasi. Oleh karena itu, perubahan peran—misalnya redefinisi peran gender atau profesional—dapat dipahami sebagai hasil dari pergeseran makna simbolik dalam interaksi, bukan semata akibat perubahan struktural makro.

Lebih lanjut, institusi sosial dalam pemikiran Mead tidak dipahami sebagai struktur formal yang kaku, melainkan sebagai pola interaksi simbolik yang telah mengalami stabilisasi historis. Institusi seperti pendidikan, hukum, atau politik bertahan karena praktik komunikatif yang menopangnya terus direproduksi dan diakui secara kolektif. Bahasa institusional, ritual, dan prosedur bukan hanya alat administratif, tetapi mekanisme simbolik yang membuat institusi tampak nyata dan sah. Institusi sosial selalu rentan terhadap perubahan ketika praktik komunikasi yang menopangnya mulai dipertanyakan atau ditafsirkan ulang.

Keunggulan pendekatan Mead terletak pada kemampuannya menjelaskan keteraturan sosial tanpa mengorbankan agensi individual. Melalui konsep *generalized other*, masyarakat hadir dalam kesadaran individu sebagai sistem harapan kolektif yang memungkinkan koordinasi tindakan dalam skala luas. Namun, karena individu selalu berada dalam dialektika antara "I" dan "Me", reproduksi masyarakat tidak pernah sepenuhnya mekanis. Setiap tindakan komunikatif mengandung potensi untuk mereproduksi sekaligus memodifikasi pola interaksi yang ada. Dalam perspektif ini, stabilitas dan perubahan sosial merupakan dua sisi dari proses komunikatif yang sama.

Bagi sosiologi komunikasi, pandangan Mead ini memiliki implikasi metodologis dan analitis yang signifikan. Masyarakat tidak dapat dipahami hanya melalui analisis struktur atau institusi formal, tetapi harus ditelusuri pada praktik komunikasi konkret di mana norma, peran, dan institusi dihidupkan. Analisis komunikasi menjadi kunci untuk memahami

bagaimana tatanan sosial dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus bagaimana benih perubahan sosial muncul dari interaksi mikro.

Namun, pendekatan ini juga membuka ruang kritik. Dengan menekankan reproduksi masyarakat melalui interaksi simbolik, Mead relatif kurang memberi perhatian pada relasi kekuasaan dan ketimpangan struktural yang membatasi kemungkinan komunikasi yang setara. Tidak semua aktor memiliki kapasitas yang sama untuk mendefinisikan norma, peran, atau institusi sebagai "wajar". Kritik ini kemudian dikembangkan oleh Bourdieu melalui konsep kekuasaan simbolik, yang menunjukkan bahwa reproduksi masyarakat melalui komunikasi selalu terkait dengan distribusi modal simbolik yang tidak merata. Meski demikian, kritik tersebut tidak meniadakan Mead, melainkan melengkapinya: bahkan dominasi struktural pun bekerja melalui praktik komunikasi yang terorganisasi.

Kontribusi mendasar Mead bagi sosiologi komunikasi: masyarakat bukan latar belakang statis bagi komunikasi, melainkan hasil dan proses dari komunikasi itu sendiri. Norma, peran, dan institusi sosial hidup sejauh ia direproduksi dalam interaksi simbolik sehari-hari. Dalam perspektif Mead, memahami masyarakat berarti memahami bagaimana komunikasi membentuk, menstabilkan, dan mengubah tatanan sosial secara berkelanjutan.

Konsep generalized other menjadi kunci untuk memahami bagaimana masyarakat hadir dalam kesadaran individu. *Generalized other* merepresentasikan sikap dan harapan kolektif yang diinternalisasi individu, sehingga memungkinkan koordinasi tindakan dalam masyarakat yang kompleks. Dengan demikian, keteraturan sosial tidak dipaksakan dari luar, tetapi diinternalisasi melalui komunikasi simbolik (Mead, 1934).

Relasi Dialektis *Self*, *Mind*, dan *Society*

Keunggulan teoretis Mead terletak pada kemampuannya menjelaskan relasi dialektis antara *self*, *mind*, dan *society*. *Mind* memungkinkan refleksi simbolik; *self* memungkinkan individu menjadi objek bagi dirinya sendiri; dan *society* menyediakan kerangka simbolik yang memungkinkan keduanya berkembang. Relasi ini bersifat sirkular dan dinamis: Masyarakat menyediakan simbol dan norma, Simbol memungkinkan terbentuknya *mind* dan *self*, *Self* dan *mind* mereproduksi atau mengubah masyarakat melalui interaksi.

Kerangka berfikir ini, Mead berhasil menjembatani dualisme klasik antara individu dan masyarakat tanpa mereduksi salah satunya. Pada sosiologi komunikasi, konsep *self*, *mind*, dan *society* menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar alat penyampaian pesan, melainkan mekanisme fundamental pembentukan identitas dan tatanan sosial. Analisis komunikasi harus diarahkan pada: Proses pembentukan makna melalui symbol, Pembentukan identitas melalui interaksi, Reproduksi norma dan struktur sosial melalui praktik komunikasi.

Pendekatan ini relevan untuk memahami interaksi tatap muka, komunikasi organisasi, hingga pembentukan identitas di ruang digital. Meski berpengaruh besar, pemikiran Mead dikritik karena relatif kurang memberi perhatian pada relasi kekuasaan dan ketimpangan struktural. Interaksi simbolik sering diasosiasikan dengan konsensus dan stabilitas, sementara konflik dan dominasi kurang dieksplorasi.

Kritik ini kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Erving Goffman, yang menekankan performativitas dan manajemen kesan, serta Pierre Bourdieu, yang memperkenalkan konsep kekuasaan simbolik. Namun demikian, kontribusi Mead tetap fundamental karena ia menyediakan fondasi mikro bagi analisis komunikasi dan identitas. Konsep *self*, *mind*, dan *society* dalam pemikiran George Herbert Mead menunjukkan bahwa komunikasi adalah inti dari pembentukan manusia dan masyarakat. Melalui interaksi simbolik, individu menjadi subjek

sosial, dan masyarakat terbentuk sebagai tatanan makna yang dinamis. Kerangka ini menjadikan Mead sebagai salah satu fondasi utama sosiologi komunikasi interpretatif.

C. Komunikasi sebagai Proses Pembentukan Identitas

Pada sosiologi komunikasi, identitas tidak dipahami sebagai atribut esensial yang melekat secara alamiah pada individu, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk, dinegosiasikan, dan direproduksi melalui proses komunikasi. Perspektif ini berangkat dari tradisi interaksionisme simbolik, khususnya pemikiran George Herbert Mead, yang menempatkan komunikasi simbolik sebagai prasyarat munculnya *self* dan kehidupan sosial (Mead, 1934). Dengan demikian, komunikasi bukan sekadar sarana ekspresi identitas, tetapi mekanisme konstitutif pembentukan identitas itu sendiri.

Kerangka interaksionisme simbolik, identitas bersifat prosesual dan relasional. Individu membangun pemahaman tentang "siapa dirinya" melalui interaksi dengan orang lain, terutama melalui mekanisme *role-taking* dan internalisasi *generalized other*. Proses ini sepenuhnya komunikatif, karena bergantung pada penggunaan simbol bersama—bahasa, gestur, dan praktik simbolik—yang memungkinkan individu menafsirkan bagaimana ia dipersepsi dan diharapkan oleh lingkungan sosial (Mead, 1934).

Identitas bukan produk refleksi internal yang terisolasi, melainkan hasil dari pertukaran makna yang berulang. Individu belajar mengenali dirinya sebagai subjek sosial ketika ia mampu melihat dirinya dari perspektif orang lain dan menyesuaikan tindakannya sesuai dengan norma simbolik yang berlaku. **I**dentitas dalam sosiologi komunikasi dipahami sebagai konstruksi sosial, bukan atribut esensial, menegaskan pergeseran paradigma fundamental dari pendekatan esensialis menuju konstruktivis dan relasional. Identitas tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang "ada sejak lahir" atau melekat secara alamiah pada individu, melainkan sebagai hasil proses sosial yang berlangsung terus-menerus, terutama melalui komunikasi.

Dengan demikian, identitas bersifat historis, kontekstual, dan dapat berubah, seiring perubahan relasi sosial dan praktik komunikatif.

Komunikasi memiliki peran konstitutif, bukan sekadar ekspresif. Identitas tidak lebih dahulu ada lalu dikomunikasikan, tetapi justru terbentuk di dalam dan melalui komunikasi. Tradisi interaksionisme simbolik—khususnya pemikiran George Herbert Mead—menunjukkan bahwa *self* muncul melalui interaksi simbolik, ketika individu belajar melihat dirinya dari perspektif orang lain (*role-taking*). Identitas, karenanya, adalah produk intersubjektivitas: ia bergantung pada pengakuan, respons, dan interpretasi sosial terhadap klaim-klaim diri yang dikomunikasikan.

Proses negosiasi identitas menjadi aspek kunci dalam sosiologi komunikasi. Identitas tidak pernah sepenuhnya ditentukan oleh individu secara sepihak, melainkan selalu berada dalam ketegangan antara definisi diri (self-definition) dan definisi sosial (social definition). Dalam setiap interaksi, individu mengajukan klaim identitas tertentu—melalui bahasa, simbol, gaya komunikasi—yang kemudian diterima, dipertanyakan, atau ditolak oleh pihak lain. Identitas menjadi stabil hanya sejauh klaim tersebut direproduksi secara konsisten dalam praktik komunikasi.

Ketika aspek sosial berubah, identitas pun berpotensi dinegosiasikan ulang.

Analisis ini juga menegaskan bahwa identitas bersifat situasional dan multipel. Individu menampilkan identitas yang berbeda Pada aspek komunikasi yang berbeda—keluarga, pekerjaan, ruang publik, media digital—tanpa harus dipahami sebagai kontradiksi. Justru, keberagaman performa identitas ini menunjukkan bahwa identitas adalah hasil artikulasi komunikatif yang kontekstual, bukan refleksi esensi tunggal yang tetap. Pendekatan dramaturgis Erving Goffman memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa identitas dipentaskan secara strategis sesuai arena interaksi dan ekspektasi audiens.

Pemahaman identitas sebagai konstruksi komunikatif membuka analisis kritis tentang kekuasaan dan ketimpangan sosial. Tidak semua identitas memiliki peluang yang sama untuk diakui atau dilegitimasi. Perspektif Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung dalam arena dengan distribusi modal simbolik yang tidak setara. Identitas kelompok dominan cenderung dilegitimasi sebagai "normal" atau "wajar", sementara identitas kelompok subordinat sering kali distigmatisasi atau dipinggirkan. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya membentuk identitas, tetapi juga menyaring identitas mana yang sah dan mana yang marjinal.

Aspek masyarakat jaringan dan media digital, konstruksi identitas melalui komunikasi menjadi semakin intens dan kompleks. Identitas digital dibentuk melalui visibilitas, interaksi, dan arus komunikasi jaringan, yang bersifat cepat dan terfragmentasi. Di satu sisi, media digital membuka ruang baru bagi artikulasi identitas alternatif; di sisi lain, identitas menjadi lebih rapuh, karena bergantung pada pengakuan algoritmik dan atensi publik. Proses reproduksi identitas semakin bergantung pada kontinuitas komunikasi dan respons audiens, bukan pada kelekatan sosial yang stabil.

Sosiologi komunikasi, identitas harus dipahami sebagai proses sosial yang dinamis, bukan sebagai sifat individu yang tetap. Identitas dibentuk melalui komunikasi, dipertahankan melalui pengulangan simbolik, dan dapat berubah ketika struktur komunikasi berubah. Konsekuensinya, studi identitas tidak dapat dilepaskan dari analisis media, interaksi, kekuasaan simbolik, dan aspek sosial tempat komunikasi berlangsung. Memahami identitas berarti memahami bagaimana komunikasi membentuk subjek sosial secara berkelanjutan, bukan sekadar bagaimana individu "menyatakan siapa dirinya".

Bahasa dan simbol memainkan peran sentral dalam pembentukan identitas. Melalui bahasa, individu mengklasifikasikan dirinya dan orang lain ke dalam kategori sosial tertentu—misalnya gender, profesi, etnisitas, atau afiliasi

politik. Kategori-kategori ini tidak netral, melainkan sarat nilai dan ekspektasi sosial. Identitas, karenanya, selalu merupakan hasil negosiasi simbolik antara klaim diri (*self-definition*) dan pengakuan sosial (*social recognition*).

Proses ini bersifat dinamis dan kontekstual. Identitas yang diaktualisasikan dalam satu situasi komunikasi dapat berbeda dengan identitas yang ditampilkan Pada aspek lain. Dengan kata lain, identitas bersifat situasional dan performatif, bergantung pada arena komunikasi tempat ia dibentuk dan dipertarungkan. Pembentukan identitas melalui komunikasi selalu berada dalam dialektika antara stabilitas dan perubahan. Di satu sisi, internalisasi norma dan ekspektasi sosial melalui dimensi "Me" (dalam istilah Mead) memberikan stabilitas identitas. Di sisi lain, dimensi "I" membuka ruang bagi individu untuk merespons secara kreatif, menantang definisi identitas yang mapan, dan memperkenalkan makna baru (Mead, 1934).

Aspek komunikasi, dialektika ini menjelaskan bagaimana identitas dapat direproduksi secara rutin sekaligus menjadi locus perubahan sosial. Inovasi simbolik dalam interaksi sehari-hari—misalnya penggunaan istilah baru, redefinisi peran, atau strategi komunikasi alternatif—dapat memicu transformasi identitas pada level kolektif. Pembentukan identitas melalui komunikasi tidak berlangsung dalam ruang yang netral. Proses ini selalu terkait dengan relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya simbolik. Tidak semua klaim identitas memiliki peluang yang sama untuk diakui atau dilegitimasi. Bahasa, kategori, dan narasi yang dominan sering kali mencerminkan kepentingan kelompok yang memiliki otoritas simbolik (Bourdieu, 1991).

Pada perspektif ini, komunikasi menjadi arena di mana identitas dipertarungkan dan dinegosiasikan secara politis. Pengakuan identitas tertentu sebagai "normal", "sah", atau "layak" merupakan hasil dari proses komunikatif yang melibatkan dominasi simbolik. Oleh karena itu, analisis identitas dalam sosiologi komunikasi perlu sensitif terhadap struktur kekuasaan yang membingkai interaksi simbolik.

Memahami komunikasi sebagai proses pembentukan identitas menuntut pendekatan metodologis yang interpretatif dan kontekstual. Analisis tidak cukup berfokus pada isi pesan atau efek komunikasi, tetapi harus menelusuri: Bagaimana aktor mendefinisikan diri dan orang lain dalam interaksi. Bagaimana simbol dan bahasa digunakan untuk mengklaim atau menolak identitas. Bagaimana pengakuan sosial dinegosiasikan Pada aspek tertentu. Metode seperti observasi partisipan, analisis wacana, dan etnografi komunikasi menjadi sangat relevan dalam kerangka ini

Aspek masyarakat digital, pembentukan identitas melalui komunikasi menjadi semakin kompleks. Media sosial memperluas ruang interaksi simbolik dan mempercepat proses negosiasi identitas. Identitas digital bersifat lebih cair, performatif, dan terfragmentasi, tetapi tetap tunduk pada logika pengakuan sosial dan kekuasaan simbolik. Kerangka interaksionisme simbolik tetap relevan untuk menganalisis dinamika ini, meskipun perlu diperkaya dengan perspektif kritis dan politik.

Secara keseluruhan, komunikasi sebagai proses pembentukan identitas menegaskan bahwa identitas tidak dapat dipisahkan dari praktik simbolik yang membentuk kehidupan sosial. Identitas lahir, bertahan, dan berubah melalui komunikasi. Dalam perspektif sosiologi komunikasi, memahami identitas berarti memahami bagaimana makna diri dinegosiasikan dalam interaksi simbolik dan bagaimana proses tersebut membentuk tatanan sosial yang lebih luas.

D. Peran Mead dalam Sosiologi Komunikasi Mikro

George Herbert Mead menempati posisi sentral dalam sosiologi komunikasi mikro karena ia menempatkan interaksi simbolik sebagai titik tolak analisis kehidupan sosial. Berbeda dengan pendekatan makro yang menekankan struktur dan institusi, Mead berangkat dari situasi interaksi konkret—percakapan, gestur, dan praktik simbolik sehari-hari—sebagai locus pembentukan makna, identitas, dan keteraturan sosial.

Dalam perspektif ini, komunikasi bukan sekadar variabel perantara, melainkan mekanisme konstitutif realitas sosial pada level mikro (Mead, 1934).

Kontribusi Mead sangat penting karena ia menunjukkan bahwa proses komunikasi mikro bukan fenomena remeh atau sekunder, tetapi justru fondasi dari keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan. Struktur makro hanya dapat dipahami sejauh ia direproduksi dalam praktik komunikasi mikro yang berulang.

Perspektif Mead, masyarakat tidak "ada" di luar atau di atas individu, melainkan terwujud secara konkret dalam praktik interaksi simbolik sehari-hari. Komunikasi mikro bukan sekadar ekspresi dari struktur yang telah mapan, tetapi mekanisme utama melalui mana struktur itu terus-menerus diciptakan, distabilkan, dan direproduksi (Mead, 1934).

Menempatkan komunikasi mikro sebagai unit analisis dasar, Mead menunjukkan bahwa keteraturan sosial bersifat prosesual, bukan struktural dalam arti statis. Norma, nilai, peran, dan institusi tidak bekerja secara otomatis, melainkan bergantung pada kemampuan aktor untuk saling memahami makna simbolik dan mengoordinasikan tindakannya. Setiap percakapan, gestur, dan respons simbolik menjadi momen kecil di mana masyarakat "dijalankan". Tanpa reproduksi mikro ini, struktur makro kehilangan daya operasionalnya.

Secara ontologis, Mead menolak pandangan reifikasi struktur sosial. Struktur makro—seperti negara, hukum, atau institusi pendidikan—tidak dipahami sebagai kekuatan eksternal yang sepenuhnya otonom, melainkan sebagai pola interaksi yang telah mengendap dan dilembagakan. Struktur tersebut hanya bermakna sejauh ia diinternalisasi dalam kesadaran aktor (melalui *generalized other*) dan diwujudkan dalam praktik komunikasi mikro. Dengan demikian, makro dan mikro tidak berada dalam hubungan sebab–akibat satu arah, melainkan dalam relasi dialektis yang berkelanjutan.

Lebih jauh, penekanan Mead pada komunikasi mikro mengungkap dimensi kreatif tindakan sosial. Melalui dialektika "I" dan "Me", individu tidak hanya mereproduksi struktur, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memodifikasi dan menantangnya. Setiap interaksi mikro mengandung potensi inovasi simbolik—perubahan kecil dalam makna, interpretasi, atau respons—yang dalam akumulasi dapat menghasilkan transformasi struktural. Dengan demikian, perubahan sosial tidak harus selalu dijelaskan melalui krisis makro atau intervensi institusional besar, tetapi dapat ditelusuri pada pergeseran makna dalam interaksi sehari-hari.

Analisis struktur makro tanpa pemahaman praktik komunikasi mikro berisiko menjadi ahistoris dan abstrak. Sebaliknya, dengan mengikuti Mead, sosiologi komunikasi dapat menjelaskan bagaimana ideologi, kekuasaan, dan institusi memperoleh daya sosialnya melalui proses pemaknaan yang berulang dalam interaksi mikro. Inilah titik temu penting antara Mead dan tradisi makro-kritis: struktur tidak hilang, tetapi harus selalu dilacak ke level komunikasi konkret.

Relevansi pemikiran Mead semakin kuat Pada aspek masyarakat kontemporer dan digital. Media sosial, platform daring, dan komunikasi jaringan menunjukkan secara nyata bagaimana struktur makro digital (algoritma, platform, regulasi) hanya berfungsi sejauh ia dioperasikan, ditafsirkan, dan dinegosiasikan dalam praktik komunikasi mikro pengguna. Fenomena viral, polarisasi, atau pembentukan identitas digital tidak dapat dipahami tanpa menelusuri interaksi simbolik mikro yang direproduksi secara masif.

Kontribusi Mead bukan hanya pada level teori mikro, tetapi pada rekonstruksi keseluruhan logika sosiologis. Ia menunjukkan bahwa masyarakat bertahan bukan karena struktur abstrak yang memaksa, melainkan karena komunikasi mikro yang memungkinkan koordinasi makna dan tindakan. Struktur makro, dalam perspektif ini, adalah hasil yang selalu sementara dari praktik komunikasi mikro yang terus berlangsung. Inilah alasan mengapa Mead menjadi fondasi

penting bagi sosiologi komunikasi: ia menempatkan komunikasi bukan di pinggiran analisis sosial, tetapi di pusat ontologi masyarakat itu sendiri**.**

Sosiologi komunikasi mikro, Mead memperkenalkan interaksi simbolik sebagai unit analisis utama. Interaksi sosial dipahami sebagai proses pertukaran simbol bermakna, bukan respons mekanis terhadap rangsangan. Gestur signifikan, khususnya bahasa, memungkinkan aktor: Mengantisipasi respons orang lain, menyesuaikan tindakannya secara reflektif, mengkoordinasikan makna dalam situasi sosial tertentu (Mead, 1934).

Komunikasi mikro menjadi arena produksi makna, bukan sekadar penyampaian informasi. Setiap percakapan, ekspresi nonverbal, atau praktik simbolik merupakan tindakan sosial bermakna yang membentuk relasi antarindividu Salah satu kontribusi paling berpengaruh Mead bagi sosiologi komunikasi mikro adalah teorinya tentang pembentukan diri (*self*). Mead menunjukkan bahwa *self* tidak terbentuk di dalam kesadaran individual yang terisolasi, melainkan melalui proses komunikasi mikro yang berulang. Melalui mekanisme *role-taking*, individu belajar melihat dirinya dari perspektif orang lain dan menyesuaikan tindakannya sesuai ekspektasi sosial.

Dialektika antara "I" dan "Me" menjelaskan bagaimana individu dapat secara simultan mematuhi norma komunikasi dan memperkenalkan respons kreatif. Pada aspek mikro, hal ini menjadikan komunikasi sebagai ruang di mana identitas dinegosiasikan secara terus-menerus, bukan sekadar diekspresikan. Mead juga memberikan fondasi mikro yang kuat melalui konsep mind sebagai komunikasi yang terinternalisasi. Berpikir dipahami sebagai dialog batin yang meniru percakapan sosial. Dengan demikian, proses kognitif individual tidak dapat dilepaskan dari praktik komunikasi mikro. Setiap refleksi, penilaian, atau perencanaan tindakan merupakan hasil internalisasi interaksi simbolik.

Konsep ini menegaskan bahwa sosiologi komunikasi mikro tidak hanya mempelajari percakapan eksternal, tetapi juga dimensi reflektif internal yang memungkinkan individu mengatur tindakannya dalam interaksi sosial. Melalui konsep generalized other, Mead menjelaskan bagaimana norma dan harapan sosial hadir dalam interaksi mikro. Dalam setiap situasi komunikasi, individu bertindak dengan mempertimbangkan sikap kolektif yang telah diinternalisasi. Dengan demikian, norma makro hadir secara konkret dalam praktik mikro.

Pendekatan ini menjembatani analisis mikro dan makro tanpa mereduksi salah satunya. Sosiologi komunikasi mikro, dalam kerangka Mead, mampu menjelaskan bagaimana keteraturan sosial dihasilkan dari koordinasi simbolik dalam interaksi sehari-hari. Peran Mead membawa implikasi metodologis yang jelas: Penekanan pada observasi interaksi konkret, Analisis makna Pada aspek situasional, Pendekatan kualitatif dan interpretatif (etnografi, analisis percakapan, analisis wacana mikro). Sosiologi komunikasi mikro yang berangkat dari Mead menolak reduksionisme kuantitatif yang mengabaikan proses pemaknaan dalam interaksi.

Meskipun fundamental, pendekatan Mead sering dikritik karena kurang eksplisit membahas relasi kekuasaan dan konflik dalam interaksi mikro. Kritik ini kemudian dikembangkan oleh Erving Goffman melalui dramaturgi dan oleh Pierre Bourdieu melalui konsep kekuasaan simbolik. Namun, kritik tersebut tidak meniadakan kontribusi Mead. Sebaliknya, Mead menyediakan fondasi mikro yang memungkinkan analisis kritis terhadap kekuasaan simbolik dalam interaksi sehari-hari.

Secara keseluruhan, peran Mead dalam sosiologi komunikasi mikro bersifat fundasional dan paradigmatik. Ia menunjukkan bahwa komunikasi mikro adalah ruang utama pembentukan makna, identitas, dan keteraturan sosial. Tanpa memahami proses komunikasi pada level mikro, analisis makro tentang masyarakat kehilangan pijakan empiris dan teoretisnya.

Mead, dengan demikian, menempatkan sosiologi komunikasi mikro sebagai jantung analisis kehidupan sosial, sekaligus membuka jalan bagi perkembangan teori komunikasi interpretatif dan kritis di kemudian hari.

E. Profil Intelektual dan Kontribusinya

George Herbert Mead lahir pada 27 Februari 1863 di South Hadley, Massachusetts, Amerika Serikat, dalam lingkungan keluarga akademik dan religius. Ayahnya, Hiram Mead, adalah seorang pendeta dan profesor teologi, sedangkan ibunya, Elizabeth Storrs Mead, dikenal sebagai perempuan terdidik yang kemudian menjadi presiden Mount Holyoke College. Lingkungan keluarga ini membentuk Mead dalam tradisi intelektual, moral, dan reflektif, yang kelak memengaruhi perhatiannya pada hubungan antara individu, masyarakat, dan nilai-nilai sosial.

Sejak muda, Mead menunjukkan minat kuat pada filsafat, psikologi, dan masalah-masalah sosial. Ia tumbuh Pada aspek Amerika akhir abad ke-19 yang ditandai oleh industrialisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial cepat—kondisi yang mendorong pemikiran tentang identitas, interaksi sosial, dan pembentukan masyarakat modern

Mead menempuh pendidikan di Oberlin College, kemudian melanjutkan studi di Harvard University, di mana ia belajar filsafat dan psikologi. Di Harvard, Mead dipengaruhi oleh pemikir pragmatis seperti William James dan Josiah Royce, yang menekankan pengalaman, tindakan, dan proses dalam memahami kesadaran manusia.

Selanjutnya, Mead melanjutkan studi di Jerman (Leipzig dan Berlin), tempat ia bersentuhan dengan tradisi filsafat dan psikologi Eropa, termasuk pemikiran Wilhelm Wundt dan tradisi idealisme Jerman. Perpaduan antara pragmatisme Amerika dan filsafat Eropa inilah yang membentuk karakter khas pemikiran Mead: empiris, prosesual, dan berorientasi pada tindakan sosial.

Sebagian besar karier akademik Mead berlangsung di University of Chicago, tempat ia mengajar filsafat dan psikologi sosial. Di universitas ini, Mead berinteraksi dengan sosiolog Chicago School dan terlibat dalam pengembangan pendekatan empiris terhadap kehidupan sosial perkotaan.

Menariknya, Mead tidak pernah menerbitkan buku besar selama hidupnya. Pemikirannya tersebar dalam artikel, esai, dan terutama dalam kuliah-kuliah yang kemudian dihimpun oleh murid-muridnya setelah ia wafat pada tahun 1931. Karya terpentingnya adalah: *Mind, Self, and Society* (1934) – karya pascawafat yang menjadi fondasi utama interaksionisme simbolik. *The Philosophy of the Act* (1938) – membahas tindakan dan pengalaman manusia. *Movements of Thought in the Nineteenth Century* (1936).

Melalui karya-karya ini, Mead mengembangkan teori tentang interaksi simbolik, pembentukan diri, dan hubungan antara individu dan masyarakat. Inti pemikiran Mead terletak pada gagasan bahwa kehidupan sosial dibangun melalui interaksi simbolik. Ia menekankan bahwa manusia berinteraksi bukan hanya melalui respons biologis, tetapi melalui simbol bermakna, terutama bahasa. Bahasa memungkinkan individu mengantisipasi respons orang lain dan merefleksikan tindakannya sendiri.

Mead memperkenalkan konsep mind, self, dan society sebagai satu kesatuan analitis: *Mind* berkembang melalui komunikasi simbolik, *Self* terbentuk melalui kemampuan mengambil peran orang lain (*role-taking*), *Society* hadir sebagai pola interaksi simbolik yang terorganisasi. Konsep dialektika "I" dan "Me" menjelaskan bagaimana individu dapat sekaligus mematuhi norma sosial dan bertindak kreatif. Kontribusi Mead bagi pengembangan sosiologi komunikasi bersifat fundasional, terutama dalam tradisi mikro-interpretatif.

Aspek masyarakat digital, pemikiran Mead tetap relevan. Media sosial, komunikasi daring, dan identitas digital menunjukkan bahwa diri dan masyarakat terus dibentuk melalui interaksi simbolik, meskipun medianya berubah.

Dengan demikian, Mead tidak hanya penting secara historis, tetapi juga kritis untuk memahami komunikasi dan identitas kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. University of California Press.

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.

Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Anchor Books.

Joas, H. (1997). *G. H. Mead: A contemporary re-examination of his thought*. MIT Press.

Mead, G. H. (1934). *Mind, self, and society*. University of Chicago Press.

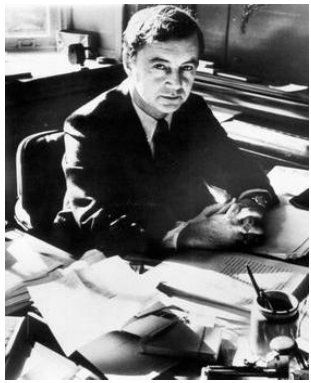
Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8th ed.). McGraw-Hill.

Turner, J. H. (2013). *Theoretical sociology*. Sage Publications.

BAB 5

ERVING GOFFMAN: DRAMATURGI, PRESENTASI DIRI, DAN MANAJEMEN KESAN

Dr. I Ketut Yakobus, S.Th. M.Si



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman

Erving Goffman (1922–1982) merupakan tokoh sentral dalam sosiologi interaksional dan sosiologi komunikasi mikro. Dia memperluas dan mengkritisi tradisi interaksionisme simbolik (Mead–Blumer) dengan fokus tajam pada bagaimana individu mengelola penampilan diri dalam situasi interaksi konkret. Jika Mead menekankan pembentukan *self* melalui proses simbolik, Goffman menyoroti praktik performatif melalui mana identitas ditampilkan, dipertahankan, dan dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari (Goffman, 1959).

Kontribusi Goffman bersifat metodologis sekaligus analitis: ia tidak membangun teori besar tentang masyarakat, melainkan menyediakan kerangka mikro yang presisi untuk menganalisis

interaksi tatap muka, bahasa nonverbal, dan aturan implisit komunikasi sosial.

Konsep kunci Goffman adalah dramaturgi, yakni metafora teater untuk memahami interaksi sosial. Dalam pandangan ini, kehidupan sosial dianalogikan sebagai panggung pertunjukan, di mana individu bertindak sebagai aktor yang menampilkan peran tertentu di hadapan audiens. Interaksi sosial dipahami bukan sebagai ekspresi diri yang spontan dan autentik semata, tetapi sebagai pertunjukan yang diatur, disusun, dan disesuaikan dengan aspek situasional (Goffman, 1959).

Dramaturgi yang dikembangkan Erving Goffman merepresentasikan pergeseran radikal dalam memahami interaksi sosial, dari pandangan esensialis tentang diri menuju pemahaman relasional dan performatif. Dengan menggunakan metafora teater, Goffman tidak bermaksud menyatakan bahwa kehidupan sosial bersifat palsu atau manipulatif, melainkan menegaskan bahwa keteraturan sosial hanya dapat berlangsung jika individu secara aktif "memainkan peran" yang dapat dikenali dan diterima oleh orang lain (Goffman, 1959).

Perspektif dramaturgi, interaksi sosial selalu berlangsung dalam situasi yang terdefinisi secara sosial (*definition of the situation*). Individu tidak bertindak dalam ruang hampa, melainkan Pada aspek yang sarat norma, ekspektasi, dan aturan implisit. Oleh karena itu, apa yang tampak sebagai ekspresi diri yang "alami" sejatinya merupakan hasil dari penyesuaian berkelanjutan terhadap tuntutan situasional. Aktor sosial secara reflektif memilih bahasa, gestur, ekspresi emosi, dan sikap tubuh yang dianggap sesuai dengan peran yang sedang dipentaskan.

Implikasi penting bagi pemahaman komunikasi, tidak dipahami sebagai cermin langsung dari identitas internal, melainkan sebagai praktik performatif yang bertujuan membangun kesan tertentu di hadapan audiens. Dalam setiap interaksi, aktor tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengelola makna tentang "siapa dirinya", "apa situasinya", dan "bagaimana relasi sosial seharusnya berlangsung". Dengan demikian,

komunikasi berfungsi sebagai mekanisme utama produksi dan stabilisasi realitas sosial mikro.

Gagasan bahwa pertunjukan sosial "diatur dan disusun" menunjukkan bahwa interaksi tidak bersifat acak. Goffman menekankan adanya skrip sosial tidak tertulis yang dipelajari individu melalui sosialisasi. Skrip ini mengarahkan bagaimana peran harus dimainkan, kesan apa yang harus dijaga, dan pelanggaran apa yang harus dihindari. Ketika skrip ini dilanggar—misalnya melalui perilaku tidak pantas atau kegagalan menjaga kesan—interaksi mengalami gangguan yang sering kali harus diperbaiki melalui strategi komunikatif tertentu, seperti permintaan maaf atau humor (Goffman, 1967).

Dramaturgi juga menyoroti dimensi normatif komunikasi. Pertunjukan sosial bukan hanya soal ekspresi diri, tetapi juga soal kewajiban interaksional. Individu dituntut untuk menjaga "wajah" (*face*)—baik wajahnya sendiri maupun wajah orang lain—demi mempertahankan kelangsungan interaksi. Pada aspek ini, manajemen kesan bukanlah tindakan oportunistik individual, melainkan kerja sosial kolektif untuk menjaga ketertiban interaksional.

Salah satu kontribusi paling penting Erving Goffman bagi sosiologi komunikasi, yakni penempatan komunikasi sebagai praktik yang bersifat normatif, bukan sekadar ekspresif. Dalam perspektif dramaturgis, interaksi sosial tidak berlangsung secara bebas dan spontan, melainkan diatur oleh kewajiban interaksional (*interactional obligations*) yang mengikat para partisipannya. Setiap individu yang terlibat dalam interaksi membawa tanggung jawab simbolik untuk bertindak sedemikian rupa sehingga interaksi dapat terus berlangsung secara tertib dan dapat diprediksi (Goffman, 1967).

Konsep "wajah" (*face*) menjadi pusat analisis normatif ini. *Face* merujuk pada citra diri positif yang secara implisit diklaim individu dalam suatu situasi interaksi dan diharapkan diakui oleh orang lain. Menjaga wajah bukan hanya soal mempertahankan harga diri personal, tetapi merupakan syarat sosial bagi keberlangsungan interaksi. Ketika wajah seseorang terancam—

melalui rasa malu, penghinaan, atau pelanggaran norma—interaksi berpotensi runtuh atau mengalami gangguan serius. Oleh karena itu, individu tidak hanya berkepentingan menjaga wajahnya sendiri, tetapi juga berkewajiban menjaga wajah orang lain.

Di titik ini, Goffman menunjukkan bahwa komunikasi selalu mengandung dimensi moral yang tersirat. Kewajiban menjaga wajah orang lain menuntut aktor untuk mengontrol bahasa, gestur, emosi, dan bahkan kejujuran situasionalnya. Praktik seperti menghindari topik sensitif, menggunakan eufemisme, berpura-pura tidak melihat kesalahan, atau memberi kesempatan "menyelamatkan muka" (*face-saving*) bukanlah kepura-puraan semata, melainkan mekanisme normatif untuk menjaga ketertiban sosial mikro. Dengan demikian, etika interaksi tidak tertulis, tetapi sangat mengikat.

Pada kerangka pikir ini, manajemen kesan tidak dapat dipahami sebagai strategi oportunistik individual yang bertujuan memanipulasi audiens demi keuntungan pribadi. Sebaliknya, Goffman menekankan bahwa manajemen kesan merupakan kerja sosial kolektif (*collaborative work*). Interaksi hanya dapat berlangsung jika semua pihak secara implisit bekerja sama untuk mempertahankan definisi situasi yang koheren dan kredibel. Audiens tidak bersifat pasif; mereka turut berpartisipasi dengan "memercayai" pertunjukan, menanggapi secara pantas, dan menutup mata terhadap inkonsistensi kecil demi menjaga kelancaran interaksi.

Ketertiban tidak semata-mata ditegakkan oleh hukum, sanksi formal, atau struktur makro, melainkan diproduksi melalui praktik komunikasi sehari-hari yang tampak sepele tetapi normatif. Salam, basa-basi, tawa sopan, hingga permintaan maaf adalah ritual komunikasi yang berfungsi menjaga stabilitas relasi sosial. Dalam perspektif ini, masyarakat bertahan bukan hanya karena konsensus nilai besar, tetapi karena kerja interaksional mikro yang terus-menerus dilakukan oleh para anggotanya.

Pendekatan ini juga membuka pemahaman kritis tentang kerentanan sosial individu. Karena wajah selalu dipertaruhkan dalam interaksi, setiap individu berada dalam posisi yang secara

potensial rapuh. Kegagalan menjaga wajah—baik karena kesalahan sendiri maupun karena penolakan sosial—dapat menghasilkan stigma, eksklusi, atau disrupsi identitas. Dengan demikian, dimensi normatif komunikasi juga berkaitan dengan kekuasaan simbolik, meskipun Goffman tidak mengelaborasinya secara eksplisit. Siapa yang memiliki kemampuan lebih besar untuk menuntut penghormatan wajah, dan siapa yang harus lebih sering "menyelamatkan muka", sangat dipengaruhi oleh posisi sosial.

Bagi sosiologi komunikasi, alenia ini menegaskan bahwa komunikasi adalah mekanisme moral dan institusional pada level mikro. Interaksi bukan sekadar pertukaran pesan atau ekspresi diri, melainkan arena di mana norma sosial dipraktikkan, diuji, dan dipertahankan. Dramaturgi Goffman dengan demikian memperlihatkan bahwa kehidupan sosial sehari-hari dijaga oleh etos interaksional yang tidak tertulis, tetapi sangat menentukan.

Dimensi normatif dramaturgi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya "dibayangkan" atau "dipikirkan", tetapi dikerjakan secara konkret melalui komunikasi. Menjaga wajah, mengelola kesan, dan bekerja sama dalam pertunjukan sosial adalah cara-cara mikro di mana keteraturan sosial diproduksi dan direproduksi setiap hari.

Analisis Goffman juga mengandung kritik implisit terhadap gagasan tentang diri autentik. Dengan menunjukkan bahwa diri selalu ditampilkan secara situasional, Goffman menolak anggapan bahwa ada identitas murni yang sepenuhnya terlepas dari aspek sosial. Namun, ini tidak berarti bahwa diri sepenuhnya palsu; sebaliknya, diri bersifat multipel dan kontekstual, terbentuk dari rangkaian peran yang dimainkan dalam berbagai arena sosial. Keaslian, dalam kerangka ini, bukan ketiadaan performa, melainkan konsistensi dan kredibilitas pertunjukan.

Dari sudut pandang sosiologi komunikasi, dramaturgi Goffman menyediakan perangkat analitis yang tajam untuk memahami bagaimana kekuasaan, norma, dan hierarki sosial bekerja secara halus dalam interaksi sehari-hari. Siapa yang berhak menjadi audiens, peran apa yang dianggap sah, dan kesan mana yang dinilai kredibel, semuanya mencerminkan relasi sosial yang

lebih luas. Meskipun Goffman tidak secara eksplisit mengembangkan teori kekuasaan, analisis dramaturgis membuka ruang untuk memahami bagaimana dominasi simbolik direproduksi melalui praktik komunikasi mikro.

Konsep dramaturgi bukan sekadar metafora deskriptif, melainkan kerangka analitis yang menempatkan komunikasi sebagai praktik performatif yang membentuk identitas, relasi sosial, dan keteraturan interaksional. Kehidupan sosial, dalam pandangan Goffman, bukanlah cerminan diri yang statis, tetapi hasil dari pertunjukan simbolik yang terus-menerus disusun, dinegosiasikan, dan dievaluasi dalam interaksi.

Metafora dramaturgi ini menegaskan bahwa komunikasi selalu bersifat strategis dan kontekstual. Aktor sosial mempertimbangkan siapa audiensnya, apa ekspektasi situasional, dan kesan apa yang ingin ditampilkan. Dengan demikian, makna interaksi tidak hanya terletak pada isi pesan, tetapi pada bagaimana pesan itu dipentaskan. Buku *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959), Goffman mengemukakan bahwa individu secara aktif melakukan presentasi diri, yaitu upaya menampilkan citra tertentu agar diakui secara sosial. Presentasi diri bukanlah tindakan manipulatif semata, melainkan kebutuhan struktural interaksi sosial: tanpa asumsi tentang peran dan identitas aktor, interaksi akan kehilangan keteraturan.

Presentasi diri mencakup; Setting (lingkungan fisik dan simbolik), Appearance (penampilan, pakaian, atribut), Manner (gaya bicara, sikap, ekspresi nonverbal). Ketiga unsur ini bekerja secara simultan untuk membangun definisi situasi yang dapat diterima oleh audiens. Salah satu distingsi paling berpengaruh dalam teori Goffman adalah antara front stage dan back stage. Front stage adalah ruang interaksi di mana aktor menampilkan peran secara resmi dan sesuai ekspektasi sosial. Back stage adalah ruang privat atau semi-privat di mana aktor dapat melepaskan peran, bersikap tidak formal, dan menyiapkan pertunjukan berikutnya (Goffman, 1959).

Distingsi ini menunjukkan bahwa identitas sosial bersifat situasional dan tersegmentasi. Tidak ada "diri autentik" yang sepenuhnya terpisah dari aspek sosial; yang ada adalah pengelolaan peran yang berbeda-beda sesuai arena interaksi. Konsep manajemen kesan merujuk pada strategi aktor untuk mengontrol persepsi audiens terhadap dirinya. Manajemen kesan mencakup pemilihan kata, gestur, emosi yang ditampilkan, hingga pengelolaan informasi yang disembunyikan atau ditonjolkan.

Perspektif sosiologi komunikasi, manajemen kesan menunjukkan bahwa komunikasi tidak netral. Setiap interaksi mengandung upaya untuk: Mempertahankan wajah (*face*), Menghindari rasa malu (*embarrassment*), Menjaga keteraturan interaksional. Komunikasi berfungsi sebagai mekanisme regulasi sosial mikro, yang menjaga stabilitas hubungan sosial sehari-hari.

Goffman memperkenalkan gagasan tentang interaction order, yaitu tatanan normatif yang mengatur perilaku dalam situasi tatap muka. Aturan ini sering kali tidak tertulis, tetapi dipahami secara implisit oleh para partisipan interaksi. Pelanggaran terhadap aturan interaksional—misalnya melalui kesalahan bicara atau perilaku tidak pantas—dapat menimbulkan gangguan sosial yang harus diperbaiki melalui strategi komunikatif tertentu (Goffman, 1967).

Dia menunjukkan bahwa ketertiban sosial diproduksi pada level mikro, melalui praktik komunikasi yang tampak sepele tetapi berulang. Pemikiran Goffman sangat relevan Pada aspek komunikasi modern dan digital: Media sosial memperluas front stage dan mengaburkan batas dengan back stage. Identitas digital menuntut manajemen kesan yang intens dan berkelanjutan. Komunikasi politik dan organisasi semakin bergantung pada performativitas dan citra.

Goffman menyediakan perangkat analitis yang kuat untuk memahami presentasi diri, citra publik, dan performa simbolik dalam masyarakat kontemporer. Secara keseluruhan, Erving Goffman memberikan kontribusi fundamental bagi sosiologi komunikasi dengan menunjukkan bahwa kehidupan sosial adalah pertunjukan simbolik yang dikelola melalui komunikasi.

Dramaturgi, presentasi diri, dan manajemen kesan menjelaskan bagaimana identitas, norma, dan keteraturan sosial diproduksi dalam interaksi mikro. Tanpa Goffman, sosiologi komunikasi kehilangan salah satu lensa paling tajam untuk memahami praktik komunikasi sehari-hari.

A. Interaksi Sosial sebagai Pertunjukan

Konsep interaksi sosial sebagai pertunjukan merupakan inti dari pendekatan dramaturgis Erving Goffman. Dengan menggunakan metafora teater, Goffman menunjukkan bahwa kehidupan sosial sehari-hari tersusun dari rangkaian pertunjukan simbolik di mana individu menampilkan peran tertentu di hadapan audiens. Interaksi sosial tidak dipahami sebagai ekspresi spontan dari diri yang autentik semata, melainkan sebagai praktik performatif yang diatur oleh norma, ekspektasi, dan aturan implisit situasi sosial (Goffman, 1959).

Realitas sosial tidak hadir secara alamiah atau spontan, melainkan dibangun melalui praktik performatif yang berulang. Identitas, peran, dan relasi sosial tidak diekspresikan begitu saja dari "diri autentik" yang tersembunyi di balik interaksi, tetapi diproduksi dan dikenali melalui pertunjukan yang dapat dibaca secara sosial. Goffman menantang asumsi esensialis tentang diri dan menggantinya dengan pemahaman relasional dan situasional tentang identitas. Perspektif dramaturgis, yang disebut "keaslian" tidak berada di luar performa, tetapi justru dihasilkan melalui konsistensi, kredibilitas, dan keberhasilan pertunjukan. Diri yang dianggap autentik adalah diri yang mampu menampilkan peran secara meyakinkan sesuai ekspektasi audiens. Performativitas bukan antitesis keaslian, melainkan kondisi sosial bagi pengakuan identitas.

Pertunjukan sosial diatur oleh norma, ekspektasi, dan aturan implisit, Goffman menunjukkan bahwa interaksi selalu bersifat normatif. Setiap situasi sosial membawa tuntutan tertentu mengenai bagaimana seseorang harus berbicara, bersikap, mengekspresikan emosi, dan menampilkan tubuhnya. Norma-norma ini jarang diformalkan, tetapi dipahami secara

praktis melalui sosialisasi dan pengalaman interaksional. Kegagalan memenuhi tuntutan normatif tersebut dapat mengganggu pertunjukan dan memunculkan rasa malu, kehilangan muka, atau sanksi simbolik.

Komunikasi bukan sekadar pertukaran pesan atau ekspresi subjektif, melainkan mekanisme utama pengelolaan makna dan keteraturan sosial mikro. Bahasa, intonasi, gestur, jarak tubuh, dan ekspresi wajah menjadi bagian dari perangkat dramaturgis yang memungkinkan aktor menampilkan peran secara efektif. Komunikasi, dengan demikian, berfungsi sebagai alat orkestrasi pertunjukan sosial, bukan sekadar medium informasi.

Dramaturgis juga menyoroti sifat kolaboratif dari interaksi sebagai pertunjukan. Pertunjukan sosial hanya dapat berlangsung jika audiens bersedia menerima definisi situasi yang ditawarkan aktor. Audiens tidak pasif, melainkan berpartisipasi aktif dengan memberikan respons yang sesuai, menahan kritik, atau bahkan membantu aktor "menyelamatkan muka" ketika terjadi gangguan. Oleh karena itu, keteraturan interaksi merupakan hasil dari kerja sosial bersama, bukan semata keterampilan individual.

Namun, pendekatan ini juga membuka ruang analisis kritis. Karena kemampuan menampilkan peran yang kredibel tidak terdistribusi secara merata, interaksi sebagai pertunjukan sekaligus menjadi arena reproduksi ketimpangan simbolik. Status sosial, gender, kelas, dan otoritas memengaruhi sejauh mana suatu pertunjukan dianggap sah atau pantas. Dengan kata lain, norma dan ekspektasi yang mengatur pertunjukan tidak netral, melainkan terkait dengan struktur kekuasaan yang lebih luas—meskipun Goffman sendiri tidak mengelaborasinya secara eksplisit.

Konsep interaksi sosial sebagai pertunjukan menawarkan lensa analitis yang sangat kuat memahami komunikasi sebagai praktik performatif yang membentuk identitas, menjaga keteraturan sosial, dan secara simultan mereproduksi relasi kekuasaan. Kehidupan sosial, dalam pandangan Goffman,

bukanlah cerminan diri yang stabil, melainkan hasil dari pertunjukan simbolik yang terus-menerus diatur, dinegosiasikan, dan dievaluasi dalam interaksi sehari-hari. Pendekatan ini menggeser fokus analisis sosiologi komunikasi dari isi pesan menuju bagaimana interaksi dipentaskan, serta bagaimana keteraturan sosial dijaga melalui pengelolaan kesan.

Kerangka pikir dramaturgi, setiap interaksi memiliki elemen-elemen yang menyerupai pertunjukan teater: aktor, audiens, panggung, skrip, dan properti simbolik. Aktor adalah individu yang terlibat dalam interaksi; audiens adalah pihak yang menafsirkan dan mengevaluasi pertunjukan; sementara panggung merujuk pada aspek situasional di mana interaksi berlangsung.

Dramaturgi Erving Goffman, pemetaan elemen-elemen interaksi sosial—aktor, audiens, panggung, skrip, dan properti simbolik—berfungsi sebagai alat analitis untuk membongkar mekanisme mikro keteraturan sosial. Metafora teater ini tidak dimaksudkan sebagai analogi dangkal, melainkan sebagai model konseptual yang memungkinkan peneliti memahami bagaimana komunikasi diorganisasikan, dikendalikan, dan dinilai dalam situasi konkret (Goffman, 1959).

Pertama, aktor dalam dramaturgi bukan sekadar individu yang "hadir" dalam interaksi, melainkan subjek sosial yang secara aktif mengelola penampilannya. Aktor bertindak dengan kesadaran bahwa tindakannya akan ditafsirkan, dievaluasi, dan diberi makna oleh orang lain. Dengan demikian, aktor selalu berada dalam posisi reflektif: ia tidak hanya bertindak, tetapi bertindak sambil memikirkan bagaimana tindakannya akan dipahami. Ini menegaskan bahwa tindakan komunikatif bersifat simultan—ekspresif sekaligus strategis—dan bahwa identitas sosial dibentuk melalui praktik presentasi diri yang berulang.

Kedua, audiens dalam dramaturgi tidak dipahami sebagai penerima pasif, melainkan sebagai partisipan aktif dalam produksi makna. Audiens menafsirkan pertunjukan, memberikan umpan balik simbolik (melalui respons verbal maupun nonverbal), dan secara implisit menentukan apakah

pertunjukan dianggap kredibel, pantas, atau gagal. Bahkan, audiens turut menjaga kelangsungan pertunjukan dengan menahan kritik, mengabaikan kesalahan kecil, atau membantu aktor "menyelamatkan muka". Dengan demikian, interaksi sosial adalah kerja kolaboratif, bukan unilateralisme aktor.

Ketiga, panggung sebagai aspek situasional memiliki peran krusial dalam menentukan aturan main interaksi. Panggung mencakup ruang fisik, waktu, setting sosial, serta kerangka normatif yang mendefinisikan apa yang boleh dan tidak boleh ditampilkan. Perubahan panggung—misalnya dari ruang publik ke ruang privat, atau dari situasi formal ke informal—secara langsung mengubah skrip interaksi dan ekspektasi audiens. Ini menunjukkan bahwa makna komunikasi tidak dapat dilepaskan dari aspek, dan bahwa tindakan yang sama dapat ditafsirkan berbeda tergantung pada panggung tempat ia dipentaskan.

Keempat, meskipun tidak dijelaskan rinci dalam alenia tersebut, keberadaan skrip dan properti simbolik melengkapi analisis dramaturgis. Skrip merujuk pada pola perilaku yang diharapkan secara sosial—aturan tidak tertulis tentang apa yang seharusnya dikatakan atau dilakukan dalam situasi tertentu. Properti simbolik, seperti pakaian, gelar, artefak, atau bahasa teknis, berfungsi memperkuat kredibilitas peran yang dimainkan. Keduanya menunjukkan bahwa pertunjukan sosial tidak diimprovisasi sepenuhnya, tetapi berakar pada konvensi simbolik yang telah dipelajari melalui sosialisasi.

Elemen-elemen ini memiliki implikasi penting bagi sosiologi komunikasi. Ia menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar pertukaran pesan antara pengirim dan penerima, melainkan proses performatif yang melibatkan pengaturan peran, penilaian sosial, dan pengelolaan aspek. Komunikasi menjadi sarana utama melalui mana individu menegosiasikan identitas, mempertahankan legitimasi sosial, dan menjaga keteraturan interaksi.

Pendekatan ini membuka ruang analisis kritis terhadap ketimpangan simbolik dalam interaksi. Tidak semua aktor memiliki akses yang sama terhadap properti simbolik yang meningkatkan kredibilitas pertunjukan, dan tidak semua audiens memiliki posisi yang setara dalam mengevaluasi pertunjukan. Status sosial, otoritas, dan modal simbolik memengaruhi siapa yang lebih "dipercaya" di panggung sosial. Dengan demikian, elemen dramaturgis juga menjadi sarana halus reproduksi kekuasaan dalam interaksi sehari-hari.

Kehidupan sosial berlangsung sebagai praktik simbolik yang terorganisasi, di mana komunikasi berfungsi sebagai medium utama koordinasi, evaluasi, dan legitimasi sosial. Dalam perspektif Goffman, memahami interaksi berarti memahami bagaimana pertunjukan sosial diatur, ditafsirkan, dan dipertahankan Pada aspek konkret kehidupan sehari-hari. Metafora ini menegaskan bahwa tindakan sosial selalu bersifat terarah dan terstruktur. Individu bertindak dengan mempertimbangkan bagaimana penampilannya akan dipersepsi oleh orang lain. Dengan demikian, interaksi sosial merupakan proses di mana definisi situasi dinegosiasikan dan distabilkan melalui pertunjukan simbolik yang koheren.

Salah satu kontribusi analitis utama Goffman adalah pembedaan antara front stage dan back stage. *Front stage* adalah arena interaksi di mana individu menampilkan peran sesuai ekspektasi sosial dan menjaga kesan yang diinginkan. *Back stage* adalah ruang di mana individu dapat melepaskan peran, mengekspresikan diri secara informal, dan mempersiapkan pertunjukan berikutnya (Goffman, 1959).

Distingsi ini menunjukkan bahwa identitas sosial bersifat situasional dan tersegmentasi. Tidak ada diri tunggal yang tampil secara konsisten di semua aspek; yang ada adalah serangkaian pertunjukan yang disesuaikan dengan audiens dan situasi. Pada aspek komunikasi, hal ini menegaskan bahwa makna diri tidak terletak pada interioritas, melainkan pada praktik interaksional yang dapat diamati.

Identitas sosial bersifat situasional dan tersegmentasi menegaskan kritik fundamental terhadap pandangan esensialis tentang diri. Perspektif dramaturgis Goffman, tidak ada "diri sejati" yang tampil secara konsisten lintas aspek sosial. Sebaliknya, identitas sosial terdiri atas serangkaian pertunjukan (*performances*) yang disesuaikan dengan audiens, situasi, dan aturan interaksional tertentu (Goffman, 1959). Distingsi ini menggeser fokus analisis identitas dari ranah psikologis internal menuju ranah interaksional yang bersifat publik dan dapat diamati.

Konsep ini menunjukkan bahwa identitas tidak bersifat unitary, melainkan tersegmentasi menurut arena sosial. Individu yang sama dapat menampilkan identitas profesional di tempat kerja, identitas intim di ruang privat, dan identitas politis di ruang publik, tanpa harus dianggap inkonsisten atau tidak autentik. Justru, kemampuan mengelola segmentasi ini merupakan kompetensi sosial yang diperlukan untuk menjaga keteraturan interaksi. Identitas yang dianggap "stabil" sesungguhnya adalah identitas yang mampu menyesuaikan pertunjukan secara tepat tanpa menimbulkan gangguan definisi situasi.

Aspek komunikasi, segmentasi identitas ini menegaskan bahwa makna diri tidak dapat ditelusuri ke interioritas subjektif semata, seperti niat batin, kepribadian terdalam, atau motivasi psikologis. Goffman secara eksplisit menghindari spekulasi tentang "apa yang sebenarnya dirasakan individu", dan lebih menekankan apa yang ditampilkan, dipertahankan, dan diakui dalam interaksi. Makna diri, dengan demikian, bersifat intersubjektif: ia muncul dari hubungan antara pertunjukan aktor dan interpretasi audiens.

Analisis ini memiliki implikasi epistemologis yang penting bagi sosiologi komunikasi. Jika identitas terletak pada praktik interaksional, maka komunikasi menjadi medan utama pembentukan identitas, bukan sekadar medium ekspresinya. Bahasa, gestur, penampilan, dan pengelolaan kesan bukan ornamen tambahan, tetapi unsur konstitutif dari diri sosial.

Identitas ada sejauh ia dikenali dan diterima dalam proses komunikasi; ketika pertunjukan gagal atau ditolak, identitas pun terancam—sebuah kondisi yang oleh Goffman dijelaskan melalui konsep kehilangan muka (*loss of face*).

Lebih jauh, penekanan pada praktik interaksional memungkinkan analisis kritis tentang relasi kekuasaan dalam pembentukan identitas. Tidak semua individu memiliki kebebasan yang sama untuk memilih dan menampilkan segmen identitas tertentu. Norma sosial, hierarki status, dan ekspektasi institusional membatasi jenis pertunjukan yang dianggap sah atau pantas**.** Dalam hal ini, segmentasi identitas bukan sekadar pilihan personal, tetapi juga hasil negosiasi dengan struktur sosial dan kekuasaan simbolik**.** Identitas tertentu dilegitimasi, sementara yang lain distigmatisasi atau ditekan.

Masyarakat kontemporer—terutama di era media digital—segmentasi identitas menjadi semakin kompleks. Platform media sosial memperluas audiens dan mengaburkan batas antara arena interaksi, sehingga berbagai segmen identitas dapat bertabrakan dalam satu ruang komunikasi (*context collapse*). Kondisi ini memperkuat tesis Goffman bahwa identitas selalu bergantung pada pengelolaan pertunjukan; ketika pengelolaan tersebut gagal, konflik identitas dan krisis makna diri pun muncul.

Kontribusi penting pendekatan dramaturgis bagi sosiologi komunikasi: identitas tidak dapat dipahami sebagai esensi internal yang stabil, melainkan sebagai hasil dari praktik komunikasi yang tersegmentasi, situasional, dan dapat diamati secara empiris. Diri sosial bukan "siapa kita di dalam", tetapi siapa kita dalam interaksi—yakni dalam pertunjukan simbolik yang terus-menerus dinegosiasikan dengan audiens dan aspek sosial.

Interaksi sosial sebagai pertunjukan tidak pernah menjadi kerja individual semata. Goffman menekankan bahwa pertunjukan sosial bersifat kolaboratif. Aktor dan audiens secara implisit bekerja sama untuk mempertahankan definisi situasi yang stabil dan kredibel. Audiens tidak sekadar menilai

pertunjukan, tetapi juga berpartisipasi dengan memberikan respons yang pantas, menahan kritik, atau mengabaikan kesalahan kecil demi kelancaran interaksi.

Keteraturan interaksi merupakan hasil dari kerja sosial bersama. Ketika kolaborasi ini gagal—misalnya melalui pelanggaran norma interaksional—interaksi mengalami gangguan yang sering kali harus diperbaiki melalui strategi komunikatif seperti humor, permintaan maaf, atau pengalihan topik.

Pendekatan dramaturgis juga menyoroti dimensi normatif interaksi sosial. Pertunjukan sosial diikat oleh aturan moral tidak tertulis yang mengatur apa yang pantas ditampilkan dan bagaimana kesalahan harus ditangani. Konsep face dan *face-work* menjelaskan bahwa individu memiliki kewajiban untuk menjaga citra diri—baik dirinya sendiri maupun orang lain—demi keberlangsungan interaksi (Goffman, 1967).

Interaksi sosial berfungsi sebagai mekanisme regulasi sosial mikro. Norma tidak hanya ditegakkan melalui sanksi formal, tetapi melalui praktik komunikasi sehari-hari yang mengatur emosi, bahasa, dan ekspresi tubuh. Meskipun Goffman tidak secara eksplisit mengembangkan teori kekuasaan, pendekatan interaksi sebagai pertunjukan membuka ruang analisis kritis terhadap ketimpangan simbolik. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama untuk mengelola kesan atau menuntut penghormatan audiens. Posisi sosial, status, dan modal simbolik memengaruhi kredibilitas pertunjukan dan risiko kehilangan wajah.

Interaksi sosial sebagai pertunjukan juga menjadi arena di mana relasi kekuasaan direproduksi secara halus melalui praktik komunikasi mikro. Pada masyarakat digital, metafora pertunjukan semakin relevan. Media sosial memperluas *front stage* dan mengaburkan batas dengan *back stage*. Individu dituntut melakukan presentasi diri secara berkelanjutan di hadapan audiens yang luas dan tidak selalu terdefinisi. Konsep dramaturgi Goffman memberikan kerangka analitis yang tajam

untuk memahami identitas digital, performativitas daring, dan budaya visibilitas.

Secara keseluruhan, memahami interaksi sosial sebagai pertunjukan memungkinkan sosiologi komunikasi melihat kehidupan sosial sebagai proses simbolik yang dikelola melalui komunikasi. Interaksi bukan cerminan diri yang statis, melainkan pertunjukan yang disusun, dinegosiasikan, dan dievaluasi secara terus-menerus. Pendekatan dramaturgis Goffman dengan demikian menempatkan komunikasi sebagai mekanisme utama pembentukan identitas, keteraturan sosial, dan relasi kekuasaan pada level mikro.

B. *Front Stage*, *Back Stage*, dan Peran Sosial

Konsep front stage dan back stage merupakan salah satu kontribusi paling berpengaruh Erving Goffman dalam memahami bagaimana peran sosial dijalankan dan dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kerangka dramaturgis, Goffman menunjukkan bahwa identitas sosial tidak diekspresikan secara tunggal dan konsisten, melainkan dipentaskan secara berbeda tergantung pada arena interaksi. Distingsi ini memungkinkan analisis yang presisi terhadap bagaimana individu mengelola diri, makna, dan relasi sosial melalui komunikasi (Goffman, 1959).

Konsep front stage dan back stage merupakan salah satu kontribusi paling berpengaruh Erving Goffman karena ia memberikan cara pandang baru untuk memahami bagaimana peran sosial dijalankan, dikomunikasikan, dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kerangka dramaturgis, Goffman menggeser analisis identitas dari ranah psikologis atau esensialis menuju ranah interaksional dan performatif. Identitas sosial tidak lagi dipahami sebagai sifat internal yang stabil dan konsisten, melainkan sebagai hasil dari pertunjukan simbolik yang bergantung pada arena interaksi tempat individu berhadapan dengan audiens tertentu (Goffman, 1959).

Front stage adalah arena di mana individu menampilkan identitas yang telah disesuaikan dengan ekspektasi normatif situasi sosial. Di ruang ini, komunikasi bersifat terkontrol, selektif, dan strategis. Bahasa, ekspresi wajah, gestur tubuh, pilihan kata, hingga emosi yang ditampilkan diatur sedemikian rupa agar sejalan dengan peran yang diharapkan. Front stage dengan demikian menjadi ruang legitimasi identitas sosial, tempat individu memperoleh pengakuan dan kredibilitas melalui keberhasilan mempertahankan definisi situasi yang koheren.

Sebaliknya, back stage merupakan ruang di mana tuntutan pertunjukan publik dilonggarkan. Di arena ini, individu dapat melepaskan peran formal, mengekspresikan emosi yang ditekan di front stage, serta mendiskusikan atau mempersiapkan strategi pertunjukan berikutnya. Back stage bukanlah wilayah "diri sejati" yang bebas dari sosialitas, melainkan arena interaksi dengan aturan normatif yang berbeda. Ia tetap merupakan ruang sosial, tetapi dengan audiens yang lebih terbatas dan ekspektasi yang lebih longgar. Dengan demikian, perbedaan antara front stage dan back stage bukan antara "palsu" dan "asli", melainkan antara rezim komunikasi yang berbeda.

Analisis ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman tentang identitas. Dengan menunjukkan bahwa identitas dipentaskan secara berbeda di berbagai arena, Goffman menolak gagasan tentang diri tunggal dan konsisten lintas situasi. Identitas bersifat multipel, tersegmentasi, dan situasional. Namun, fragmentasi ini tidak berarti kekacauan; justru sebaliknya, keteraturan sosial tercipta karena individu mampu mengelola perbedaan pertunjukan identitas sesuai aspek. Konsistensi identitas tidak terletak pada keseragaman ekspresi, melainkan pada kemampuan menjaga batas antara arena interaksi.

Sudut pandang sosiologi komunikasi, konsep front stage–back stage menegaskan bahwa komunikasi adalah mekanisme utama pengelolaan peran sosial. Apa yang dikatakan dan tidak

dikatakan, apa yang ditampilkan dan disembunyikan, merupakan bagian integral dari praktik komunikatif. Komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan makna, tetapi juga mengatur akses terhadap informasi tentang diri, sehingga memungkinkan peran sosial tampil stabil dan dapat dipercaya. Kebocoran informasi back stage ke front stage—misalnya terbongkarnya konflik internal, emosi tersembunyi, atau strategi manipulatif—dapat merusak pertunjukan dan menimbulkan krisis legitimasi identitas.

Lebih jauh, kerangka pikir ini membuka analisis kritis tentang ketimpangan simbolik dan kekuasaan. Tidak semua individu memiliki kapasitas yang sama untuk memisahkan front stage dan back stage. Aktor dengan status sosial rendah sering kali memiliki ruang back stage yang lebih sempit dan lebih rentan terhadap pengawasan. Sebaliknya, aktor dengan otoritas tinggi cenderung memiliki perlindungan simbolik yang lebih kuat terhadap eksposur. Dengan demikian, konsep front stage dan back stage tidak hanya menjelaskan peran sosial, tetapi juga mengungkap bagaimana relasi kekuasaan bekerja secara halus melalui pengaturan visibilitas dan privasi.

Aspek kontemporer—terutama masyarakat digital—relevansi analisis Goffman semakin menguat. Media sosial memperluas front stage dan mengaburkan batas dengan back stage, sehingga individu dituntut melakukan manajemen identitas secara terus-menerus di hadapan audiens yang luas dan tidak selalu terdefinisi. Tekanan performativitas meningkat, sementara ruang untuk pelepasan peran menyempit. Hal ini menegaskan kembali ketajaman intuisi Goffman tentang pentingnya arena interaksi dalam pembentukan dan pemeliharaan identitas.

Kontribusi Goffman melalui konsep front stage dan back stage bukan sekadar tipologi ruang interaksi, melainkan kerangka analitis mendasar untuk memahami identitas sebagai praktik komunikatif yang situasional, normatif, dan terikat relasi kekuasaan. Identitas sosial, dalam pandangan dramaturgis,

bukan sesuatu yang "dimiliki", tetapi sesuatu yang dikerjakan melalui komunikasi dalam arena interaksi yang berbeda-beda.

Front stage merujuk pada ruang interaksi di mana individu menampilkan peran sosial secara resmi di hadapan audiens. Di arena ini, aktor berupaya menjaga konsistensi antara penampilan (appearance), sikap (manner), dan setting agar sesuai dengan ekspektasi normatif situasi. Komunikasi di front stage bersifat terkendali, selektif, dan strategis, karena setiap tindakan, ujaran, atau ekspresi tubuh berpotensi dievaluasi oleh audiens.

Peran sosial bukan sekadar posisi struktural, melainkan paket ekspektasi simbolik yang harus ditampilkan secara kredibel. Kegagalan menjaga kesesuaian peran—misalnya melalui bahasa yang tidak pantas atau gestur yang keliru—dapat mengganggu definisi situasi dan merusak legitimasi aktor. Dengan demikian, front stage menjadi arena utama manajemen kesan dan reproduksi keteraturan sosial mikro. Sebaliknya, back stage adalah ruang di mana aktor relatif terbebas dari tuntutan pertunjukan publik. Di sini, individu dapat melepaskan peran formal, mengekspresikan emosi yang disembunyikan di front stage, serta mempersiapkan strategi komunikasi untuk pertunjukan berikutnya. Back stage memungkinkan aktor mengelola kontradiksi antara tuntutan peran sosial dan pengalaman subjektifnya.

Keberadaan back stage menegaskan bahwa performa sosial bersifat tersegmentasi. Tidak ada diri yang sepenuhnya "otentik" di luar aspek sosial; yang ada adalah perbedaan tingkat pengawasan dan ekspektasi. Dalam perspektif ini, keotentikan bukan lawan dari performativitas, melainkan fungsi dari batas-batas panggung yang memungkinkan aktor mengatur jarak antara peran dan pengalaman personal. Kerangka Goffman, peran sosial tidak dipahami sebagai skrip statis yang dilekatkan pada individu, tetapi sebagai praktik komunikatif yang harus terus-menerus dipentaskan. Peran hanya "ada" sejauh ia dikenali dan direspons oleh audiens dalam interaksi.

Artinya, peran sosial bersifat relasional dan bergantung pada keberhasilan komunikasi simbolik.

Distingsi front stage–back stage menunjukkan bahwa peran sosial selalu melibatkan pengelolaan informasi: apa yang ditampilkan, apa yang disembunyikan, dan kepada siapa. Dengan demikian, komunikasi bukan sekadar penyampaian pesan, tetapi proses seleksi dan pengaturan makna yang memungkinkan peran tampil koheren. Pemisahan antara front stage dan back stage juga mengandung dimensi normatif dan moral. Aktor memiliki kewajiban interaksional untuk menjaga konsistensi peran di front stage demi kelangsungan interaksi. Audiens, pada gilirannya, sering kali ikut menjaga batas tersebut dengan tidak "membocorkan" informasi back stage ke ruang publik. Praktik ini menunjukkan bahwa pertunjukan sosial bersifat kolaboratif dan diikat oleh etika interaksi tidak tertulis.

Pelanggaran batas antara front stage dan back stage—misalnya terbongkarnya informasi privat di ruang publik—dapat menimbulkan rasa malu, kehilangan muka, atau delegitimasi sosial. Dengan demikian, batas panggung berfungsi sebagai mekanisme perlindungan keteraturan sosial. Analisis front stage dan back stage juga membuka ruang kritik terhadap ketimpangan simbolik. Tidak semua aktor memiliki akses yang sama terhadap back stage yang aman, atau kemampuan mengendalikan apa yang tampil di front stage. Posisi sosial, status, dan otoritas memengaruhi sejauh mana individu dapat memisahkan peran publik dan ruang privatnya.

Aspek ini, dramaturgi Goffman dapat dibaca sebagai lensa untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja secara halus dalam interaksi: siapa yang selalu berada di bawah sorotan, siapa yang memiliki ruang perlindungan, dan siapa yang paling rentan terhadap eksposur simbolik. Pada masyarakat digital, batas antara front stage dan back stage semakin kabur. Media sosial memperluas front stage dan mengurangi ruang privat, sehingga manajemen peran menjadi lebih intens dan berkelanjutan. Analisis Goffman tetap relevan

untuk memahami identitas digital, budaya visibilitas, dan tekanan performativitas dalam komunikasi kontemporer.

Secara keseluruhan, konsep front stage, back stage, dan peran sosial memberikan kerangka analitis yang tajam untuk memahami komunikasi sebagai praktik performatif yang membentuk identitas dan keteraturan sosial. Goffman menunjukkan bahwa kehidupan sosial tidak dijalani begitu saja, tetapi dipentaskan melalui komunikasi yang diatur oleh norma, ekspektasi, dan batas-batas simbolik. Distingsi ini menempatkan sosiologi komunikasi mikro sebagai kunci untuk memahami bagaimana masyarakat bekerja dari level interaksi sehari-hari.

C. Komunikasi Nonverbal dan Kesan Sosial

Sosiologi komunikasi mikro, komunikasi nonverbal menempati posisi yang sangat krusial karena ia berfungsi sebagai medium utama pembentukan kesan sosial (*social impression*). Berbeda dengan bahasa verbal yang bersifat eksplisit dan diskursif, komunikasi nonverbal bekerja secara implisit, sering kali tidak disadari, namun justru sangat menentukan bagaimana individu dinilai, dipercaya, atau diposisikan dalam interaksi sosial (Goffman, 1959).

Erving Goffman menunjukkan bahwa kesan sosial tidak dibangun terutama melalui apa yang dikatakan individu, melainkan melalui bagaimana tubuh, ekspresi, dan sikap ditampilkan dalam situasi interaksi. Dengan demikian, komunikasi nonverbal menjadi elemen inti dalam dramaturgi sosial, karena ia menyokong kredibilitas pertunjukan identitas di hadapan audiens.

Penekanan ini, Goffman secara implisit menggeser pusat analisis komunikasi dari bahasa sebagai proposisi menuju tubuh sebagai medium simbolik. Interaksi sosial dipahami bukan pertama-tama sebagai pertukaran argumen atau pesan verbal, melainkan sebagai peristiwa performatif yang dinilai melalui tanda-tanda nonverbal yang bersifat langsung, situasional, dan sering kali pra-reflektif (Goffman, 1959).

Komunikasi nonverbal—postur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, intonasi, jarak fisik, ritme gerak—berfungsi sebagai indikator kredibilitas sosial. Audiens cenderung mempercayai apa yang "ditampilkan" tubuh daripada apa yang "diklaim" secara verbal. Hal ini karena tanda-tanda nonverbal dianggap lebih sulit dimanipulasi secara penuh dan karenanya dibaca sebagai petunjuk keaslian **(***signs given off***)**, bukan sekadar pesan yang disengaja (*signs given*) (Goffman, 1959). Dengan demikian, komunikasi nonverbal memiliki bobot epistemik yang lebih kuat dalam penilaian sosial sehari-hari.

Kredibilitas identitas sosial tidak ditentukan oleh koherensi narasi verbal, tetapi oleh konsistensi performatif**.** Ketika ujaran verbal tidak selaras dengan ekspresi tubuh—misalnya pernyataan percaya diri yang disertai gestur ragu—pertunjukan identitas menjadi rapuh. Audiens akan meragukan definisi situasi yang ditawarkan aktor. Pada aspek ini, komunikasi nonverbal berfungsi sebagai mekanisme verifikasi sosial yang menguji apakah peran yang dipentaskan layak dipercaya.

Penempatan komunikasi nonverbal sebagai elemen inti dramaturgi sosial menegaskan bahwa identitas adalah hasil kerja tubuh yang terdisiplinkan secara sosial. Tubuh tidak netral atau alami, melainkan telah dilatih melalui sosialisasi untuk menampilkan sikap yang dianggap pantas dalam situasi tertentu. Cara berdiri, tersenyum, menatap, atau mengendalikan emosi merupakan bagian dari aturan interaksional tak tertulis yang menopang keteraturan sosial. Dengan kata lain, tubuh menjadi lokasi internalisasi norma sosial, dan komunikasi nonverbal menjadi sarana utama reproduksi norma tersebut.

Sosiologi komunikasi, hal ini memiliki implikasi metodologis penting. Jika makna diri dan kesan sosial terutama dibangun melalui praktik nonverbal, maka analisis komunikasi tidak dapat berhenti pada teks atau wacana verbal. Ia harus mencakup observasi interaksi konkret, termasuk detail gestural, ekspresif, dan situasional. Pendekatan Goffman dengan

demikian memperluas sosiologi komunikasi dari analisis pesan menuju analisis pertunjukan sosial secara holistik.

Tidak semua tubuh dibaca dengan cara yang sama. Status sosial, gender, usia, ras, dan kelas memengaruhi bagaimana ekspresi nonverbal ditafsirkan. Gestur yang sama dapat dianggap wajar atau menyimpang tergantung pada posisi sosial aktor. Dengan demikian, komunikasi nonverbal bukan hanya sarana pembentukan kesan, tetapi juga medan diferensiasi simbolik, di mana legitimasi identitas tertentu diperkuat dan identitas lain dipersoalkan atau distigmatisasi.

Masyarakat kontemporer dan digital, tesis Goffman ini justru semakin relevan. Media visual—foto, video, siaran langsung—memperluas arena pertunjukan nonverbal. Ekspresi wajah di layar, bahasa tubuh dalam video pendek, hingga estetika visual profil media sosial menjadi penopang utama kredibilitas identitas digital. Namun, karena pertunjukan ini berlangsung di hadapan audiens yang luas dan terfragmentasi, risiko kegagalan performatif dan kehilangan muka menjadi semakin besar.

Dramaturgi sosial Goffman, komunikasi nonverbal adalah fondasi utama pembentukan kesan dan legitimasi identitas. Bahasa verbal penting, tetapi tidak menentukan. Yang menentukan adalah bagaimana tubuh "berbicara" dalam situasi interaksi, dan bagaimana audiens menafsirkan pertunjukan tersebut. Identitas sosial, dalam perspektif ini, bukan apa yang kita katakan tentang diri kita, melainkan apa yang berhasil kita tampilkan dan dipertahankan dalam interaksi sosial yang konkret.

Goffman secara fundamental menggeser cara memahami bagaimana kesan sosial (*social impression*) dibentuk dalam interaksi. Ia menunjukkan bahwa kesan sosial tidak terutama ditentukan oleh isi ujaran verbal—apa yang dikatakan individu—melainkan oleh bagaimana tubuh, ekspresi wajah, sikap, dan gaya kehadiran ditampilkan dalam situasi interaksi konkret (Goffman, 1959). Dalam perspektif dramaturgis, komunikasi nonverbal berfungsi sebagai fondasi epistemik bagi

penilaian sosial: audiens cenderung mempercayai apa yang "ditunjukkan" tubuh dibandingkan apa yang "diklaim" melalui kata-kata.

Pandangan ini menantang asumsi rasionalistik dalam teori komunikasi yang menempatkan bahasa verbal sebagai medium utama makna. Goffman memperlihatkan bahwa dalam praktik interaksi sehari-hari, individu menilai keaslian, kompetensi, dan kredibilitas aktor melalui sinyal-sinyal nonverbal yang sulit dikontrol sepenuhnya. Postur tubuh, kontak mata, intonasi suara, ritme gerak, dan ekspresi emosi berfungsi sebagai indikator yang dianggap lebih "jujur" karena diasumsikan mencerminkan keadaan internal aktor secara langsung. Dengan demikian, komunikasi nonverbal memiliki status simbolik yang lebih kuat dalam pembentukan kesan sosial.

Pada kerangka dramaturgi, tubuh dan ekspresi nonverbal merupakan bagian dari apa yang disebut Goffman sebagai "expressive equipment"—perangkat ekspresif yang menopang pertunjukan identitas. Identitas sosial hanya dapat tampil kredibel jika pertunjukan verbal dan nonverbal selaras secara simbolik. Ketika terjadi ketidaksesuaian—misalnya ujaran yang sopan tetapi ekspresi tubuh yang defensif—pertunjukan menjadi rapuh dan audiens cenderung meragukan definisi situasi yang ditawarkan aktor. Di titik inilah komunikasi nonverbal berfungsi sebagai uji konsistensi performatif dari identitas sosial.

Analisis Goffman menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal tidak bersifat netral atau alamiah, melainkan diatur oleh norma situasional yang ketat. Setiap arena interaksi memiliki ekspektasi implisit tentang bagaimana tubuh harus ditampilkan: kapan tersenyum, seberapa lama menatap, seberapa dekat jarak fisik yang pantas, emosi apa yang boleh diekspresikan. Individu dituntut melakukan self-monitoring tubuh secara konstan agar tidak melanggar aturan interaksional. Dengan demikian, komunikasi nonverbal merupakan bagian

dari kerja normatif dan moral untuk menjaga keteraturan sosial mikro.

Kekuatan analitis Goffman terletak pada penunjukan bahwa kesan sosial bukanlah hasil manipulasi individual semata, melainkan produk kolaboratif antara aktor dan audiens. Audiens secara aktif menafsirkan sinyal nonverbal, menguji koherensi pertunjukan, dan memberikan umpan balik simbolik—melalui tatapan, sikap tubuh, atau respons emosional—yang menentukan apakah identitas yang ditampilkan dapat diterima. Bahkan, audiens sering kali turut "menyelamatkan" pertunjukan dengan mengabaikan ketidaksempurnaan kecil demi menjaga kelangsungan interaksi. Artinya, kredibilitas identitas bukan semata soal keterampilan aktor, tetapi juga kesediaan kolektif untuk mempertahankan definisi situasi.

Dia juga membuka dimensi kritis terkait kekuasaan simbolik dalam komunikasi nonverbal. Tidak semua tubuh dibaca dengan cara yang sama. Ekspresi nonverbal yang identik dapat ditafsirkan berbeda tergantung pada status sosial, gender, usia, atau posisi institusional aktor. Sikap tegas dapat dibaca sebagai kepemimpinan ketika dilakukan oleh aktor berotoritas, tetapi sebagai ancaman atau ketidaksopanan ketika dilakukan oleh aktor subordinat. Dengan demikian, komunikasi nonverbal menjadi medium halus reproduksi ketimpangan sosial, meskipun Goffman sendiri tidak mengembangkannya secara eksplisit.

Aspek kontemporer—terutama masyarakat visual dan digital—argumen Goffman menjadi semakin relevan. Platform media sosial, konferensi video, dan budaya citra memperluas arena di mana tubuh, ekspresi, dan gaya kehadiran dipantau secara intensif. Kesan sosial dibangun melalui foto profil, bahasa tubuh di layar, ekspresi mikro, dan estetika visual. Namun, perluasan ini juga meningkatkan risiko delegitimasi simbolik ketika pertunjukan nonverbal dianggap tidak konsisten atau tidak sesuai norma audiens yang beragam.

Dramaturgi sosial, komunikasi nonverbal adalah penopang utama kredibilitas identitas. Ia bukan sekadar pelengkap komunikasi verbal, melainkan medium kunci yang memungkinkan pertunjukan sosial dipercaya, diterima, dan distabilkan. Memahami komunikasi nonverbal dalam perspektif Goffman berarti memahami bagaimana identitas, norma, dan kekuasaan diproduksi secara konkret dalam interaksi sehari-hari—melalui tubuh yang berbicara bahkan ketika kata-kata berhenti.

Perspektif dramaturgis, tubuh bukan sekadar entitas biologis, melainkan medium simbolik yang menyampaikan makna sosial. Postur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, jarak fisik, intonasi suara, dan ritme gerak berfungsi sebagai penanda peran sosial. Melalui tubuh, individu mengkomunikasikan status, emosi, niat, dan orientasi relasional bahkan sebelum atau tanpa ujaran verbal.

Goffman menyebut dimensi ini sebagai bagian dari "expressive equipment", yakni perangkat ekspresif yang digunakan aktor untuk menampilkan peran secara meyakinkan. Ketidaksesuaian antara pesan verbal dan nonverbal—misalnya kata-kata sopan dengan ekspresi dingin—dapat merusak pertunjukan dan menimbulkan ketidakpercayaan audiens. Ini menunjukkan bahwa kesan sosial sangat bergantung pada koherensi simbolik nonverbal.

Kesan sosial (*social impression*) tidak bersifat subjektif murni, melainkan produk interaksional. Kesan terbentuk melalui proses evaluasi kolektif yang melibatkan aktor dan audiens. Komunikasi nonverbal menyediakan "petunjuk situasional" (*interactional cues*) yang digunakan audiens untuk menafsirkan siapa aktor, peran apa yang sedang ia mainkan, dan bagaimana hubungan sosial seharusnya dijalankan.

Selain itu kesan sosial juga bukan sekadar hasil niat individu, tetapi juga hasil dari respon audiens terhadap sinyal nonverbal. Bahkan upaya presentasi diri yang dirancang dengan cermat dapat gagal jika sinyal nonverbal ditafsirkan negatif atau bertentangan dengan norma situasional. Dengan demikian,

komunikasi nonverbal menjadi arena utama negosiasi makna dalam interaksi mikro.

Komunikasi nonverbal juga mengandung dimensi normatif dan disipliner. Setiap situasi sosial memiliki aturan implisit tentang bagaimana tubuh harus ditampilkan—kapan menatap, kapan menunduk, seberapa dekat jarak yang pantas, emosi apa yang boleh diekspresikan. Individu dituntut untuk mengendalikan tubuhnya agar sesuai dengan ekspektasi situasional.

Goffman mengatakan, kegagalan mengelola ekspresi nonverbal—misalnya gerak tubuh yang canggung, ekspresi emosi yang tidak tepat—dapat memicu rasa malu (*embarrassment*) dan mengganggu ketertiban interaksional. Oleh karena itu, komunikasi nonverbal merupakan bagian dari kerja moral mikro untuk menjaga kelangsungan interaksi sosial.

Meskipun Goffman jarang membahas kekuasaan secara eksplisit, analisis komunikasi nonverbal membuka ruang penting untuk memahami ketimpangan simbolik. Tidak semua aktor memiliki kebebasan yang sama dalam mengekspresikan tubuh dan emosi. Status sosial, gender, usia, dan posisi institusional memengaruhi bagaimana komunikasi nonverbal ditafsirkan.

Misalnya, sikap tubuh tegas dapat dibaca sebagai otoritas ketika dilakukan oleh aktor berstatus tinggi, tetapi dianggap agresif ketika dilakukan oleh aktor subordinat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal beroperasi dalam struktur kekuasaan simbolik yang tidak netral. Kesan sosial yang dihasilkan tubuh sangat dipengaruhi oleh posisi sosial aktor dalam hierarki interaksi.

Pada masyarakat kontemporer yang semakin visual, komunikasi nonverbal menjadi semakin dominan. Media sosial, video conference, dan budaya citra memperluas ruang pertunjukan tubuh dan ekspresi nonverbal. Senyum kamera, bahasa tubuh di layar, pilihan sudut pengambilan gambar, hingga emoji menjadi bagian dari ekonomi kesan sosial digital.

Namun, perluasan ini juga mempersempit ruang kesalahan. Ketidaktepatan ekspresi nonverbal dapat terdokumentasi dan disirkulasikan secara luas, sehingga meningkatkan risiko kehilangan muka dan delegitimasi simbolik. Pada aspek ini, analisis Goffman tetap relevan untuk memahami tekanan performativitas dan manajemen kesan di era digital.

Secara keseluruhan, komunikasi nonverbal merupakan komponen sentral dalam pembentukan kesan sosial. Melalui tubuh dan ekspresi, individu menampilkan peran, menjaga norma interaksional, dan menegosiasikan posisi sosialnya. Dalam perspektif dramaturgis Goffman, komunikasi nonverbal bukan pelengkap komunikasi verbal, melainkan fondasi simbolik dari pertunjukan sosial itu sendiri. Memahami komunikasi nonverbal berarti memahami bagaimana keteraturan sosial, identitas, dan kekuasaan diproduksi dan dipertahankan pada level interaksi sehari-hari.

D. Relevansi Goffman di Era Media Sosial

Meskipun Erving Goffman mengembangkan teori dramaturginya Pada aspek interaksi tatap muka pada pertengahan abad ke-20, kerangka analitisnya justru menunjukkan daya jelajah konseptual yang sangat kuat di era media sosial. Platform digital seperti Instagram, X, TikTok, dan LinkedIn memperluas logika interaksi sosial sebagai pertunjukan, menjadikannya lebih terbuka, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Pada aspek ini, media sosial dapat dipahami sebagai panggung sosial baru yang mengintensifkan praktik presentasi diri, manajemen kesan, dan pengelolaan audiens—tema-tema inti dalam pemikiran Goffman (Goffman, 1959).

Pada kerangka dramaturgis, media sosial berfungsi sebagai front stage yang diperluas dan dipermanenkan. Individu menampilkan identitas melalui unggahan, foto, video, caption, dan interaksi simbolik seperti *likes* dan komentar. Berbeda dengan interaksi tatap muka yang bersifat sementara, pertunjukan di media sosial: terdokumentasi secara permanen,

dapat diakses oleh audiens luas dan beragam, terbuka terhadap evaluasi publik yang berkelanjutan.

Hal ini menguatkan tesis Goffman bahwa identitas sosial dibentuk melalui pengelolaan kesan, namun dengan intensitas dan risiko yang lebih tinggi. Kegagalan pertunjukan di media sosial—misalnya unggahan yang dianggap tidak pantas—dapat menghasilkan delegitimasi simbolik yang cepat dan masif.

Salah satu kontribusi paling relevan Goffman di era digital adalah konsep front stage–back stage. Media sosial secara struktural mengaburkan batas antara ruang publik dan privat. Aktivitas yang sebelumnya berada di back stage—emosi personal, opini spontan, atau konflik internal—kini sering terdorong ke front stage melalui logika visibilitas dan kecepatan distribusi konten.

Kaburnya batas ini menghasilkan tekanan performatif yang intens: individu dituntut untuk selalu siap tampil, bahkan di ruang yang semula bersifat privat. Dalam perspektif Goffman, situasi ini mempersempit ruang back stage yang berfungsi sebagai arena pemulihan diri dan persiapan pertunjukan, sehingga meningkatkan risiko kelelahan identitas (*identity fatigue*).

Media sosial menghadirkan fenomena audiens terfragmentasi atau *context collapse*, yakni situasi di mana berbagai audiens dengan ekspektasi berbeda (keluarga, kolega, publik luas) hadir secara simultan di satu panggung (boyd, 2010). Dalam kondisi ini, strategi presentasi diri menjadi jauh lebih kompleks.

Konsep dramaturgi Goffman membantu menjelaskan dilema ini: aktor harus menampilkan pertunjukan yang cukup fleksibel untuk diterima oleh berbagai audiens, namun tetap cukup konsisten untuk menjaga kredibilitas identitas. Kegagalan menyeimbangkan tuntutan ini dapat memicu konflik makna dan krisis kesan sosial. Di era media sosial, manajemen kesan tidak hanya bersifat interaksional, tetapi juga algoritmik. Platform digital memediasi visibilitas melalui algoritma yang memberi penghargaan pada konten tertentu. Dengan demikian,

pertunjukan identitas tidak hanya diarahkan pada audiens manusia, tetapi juga pada logika sistem teknologis.

Jika dalam interaksi tatap muka manajemen kesan terutama diarahkan pada audiens manusia—dengan norma, ekspektasi, dan penilaian sosial yang relatif dapat diperkirakan—maka dalam media sosial, pertunjukan identitas berlangsung di hadapan audiens ganda: manusia *dan* sistem algoritmik.

Kerangka dramaturgis, media sosial dapat dipahami sebagai panggung berlapis (multi-layered stage). Di satu sisi, individu tetap melakukan presentasi diri untuk memperoleh pengakuan sosial—*likes*, komentar, pengikut, dan validasi simbolik dari audiens manusia. Namun di sisi lain, pertunjukan tersebut juga harus "terbaca" dan "disukai" oleh algoritma yang menentukan visibilitas konten. Dengan demikian, algoritma berfungsi sebagai penilai non-manusia yang secara struktural memediasi siapa yang terlihat, siapa yang tenggelam, dan identitas mana yang memperoleh legitimasi simbolik.

Algoritma bukan sekadar alat teknis, melainkan aktor struktural dalam proses komunikasi sosial. Dengan memberikan penghargaan pada konten tertentu—misalnya yang emosional, kontroversial, visual, atau memicu keterlibatan tinggi—algoritma secara tidak langsung mengarahkan gaya pertunjukan identitas. Individu belajar, secara sadar maupun tidak, untuk menyesuaikan ekspresi diri mereka dengan logika sistem: memilih topik, emosi, bahkan sikap politik yang dianggap "algoritmically favorable". Manajemen kesan, dengan demikian, tidak lagi hanya soal membaca audiens sosial, tetapi juga membaca dan mengantisipasi logika sistem teknologi.

Implikasi sosiologisnya sangat signifikan. Pertama, terjadi pergeseran locus kekuasaan dalam interaksi sosial. Jika pada era Goffman kekuasaan interaksional terutama berada pada audiens manusia dan norma sosial yang mereka bawa, maka di era digital, platform dan algoritma mengambil alih sebagian fungsi evaluatif tersebut. Pengakuan sosial tidak hanya bergantung pada penerimaan langsung, tetapi pada keputusan sistem yang

bersifat opak, tidak transparan, dan tidak dapat dinegosiasikan secara dialogis.

Kedua, manajemen kesan algoritmik menciptakan standarisasi performatif. Karena algoritma cenderung menghargai pola tertentu, identitas yang tampil di ruang digital mengalami kecenderungan homogenisasi: gaya ekspresi, narasi diri, bahkan emosi menjadi seragam. Identitas yang tidak sesuai dengan logika algoritmik—misalnya yang terlalu reflektif, ambigu, atau tidak memicu keterlibatan—mengalami invisibilitas struktural. Pada aspek ini, kegagalan pertunjukan bukan karena penolakan sosial langsung, tetapi karena ketiadaan distribusi algoritmik.

Ketiga, kondisi ini memperkuat kerapuhan identitas digital. Karena visibilitas bergantung pada sistem yang terus berubah, identitas menjadi kontingen dan tidak stabil. Perubahan kecil dalam algoritma dapat menggeser status sosial, pengaruh, dan pengakuan simbolik seseorang secara drastis. Hal ini menciptakan tekanan performatif yang tinggi: individu terdorong untuk memproduksi diri secara terus-menerus, mengikuti ritme platform, dan menyesuaikan ekspresi dengan metrik keterlibatan. Dalam istilah Goffman, *front stage* menjadi permanen, sementara *back stage* menyempit atau bahkan menghilang.

Keempat, dari perspektif kekuasaan, manajemen kesan algoritmik mengaburkan relasi dominasi. Tidak ada aktor manusia yang secara langsung memerintah bagaimana individu harus menampilkan diri. Namun, justru melalui logika insentif algoritmik—*visibility rewards* dan *attention economy*—platform mengatur perilaku komunikatif secara efektif tanpa paksaan eksplisit. Ini sejalan dengan analisis Castells tentang kekuasaan jaringan dan Van Dijck tentang platformisasi komunikasi, di mana kekuasaan bekerja melalui arsitektur sistem, bukan melalui perintah langsung.

Aspek komunikasi politik dan identitas publik, implikasinya semakin tajam. Politisi, aktivis, dan figur publik tidak hanya berkomunikasi untuk meyakinkan warga, tetapi

juga untuk mengoptimalkan performa algoritmik. Narasi politik dipendekkan, dipersonalisasi, dan diekskalasi secara emosional agar sesuai dengan logika visibilitas platform. Akibatnya, ruang publik digital semakin didominasi oleh tindakan strategis algoritmik, bukan oleh diskursus deliberatif sebagaimana dibayangkan Habermas.

Di era media sosial, manajemen kesan telah bertransformasi menjadi praktik sosio-teknis yang kompleks**.** Pertunjukan identitas tidak lagi hanya dinegosiasikan secara intersubjektif, tetapi juga dikondisikan secara struktural oleh sistem teknologi yang tidak netral. Komunikasi digital, dalam perspektif ini, bukan sekadar perluasan dramaturgi klasik, melainkan medan baru di mana identitas, kekuasaan, dan teknologi saling berkelindan secara mendalam.

Pada aspek ini, dramaturgi Goffman perlu dibaca secara kritis: aktor sosial kini menyesuaikan pertunjukan mereka agar "terbaca" oleh algoritma—misalnya melalui estetika visual tertentu, narasi emosional, atau ritme unggahan. Identitas menjadi bagian dari ekonomi perhatian, di mana kesan sosial dikonversi menjadi modal simbolik dan bahkan ekonomi.

Goffman menekankan pentingnya komunikasi nonverbal dalam membangun kesan sosial. Di media sosial, komunikasi nonverbal bertransformasi menjadi isyarat visual dan paralinguistik digital: ekspresi wajah dalam foto, sudut kamera, filter, emoji, hingga gaya desain. Unsur-unsur ini berfungsi sebagai penopang kredibilitas performa identitas.

Namun, karena komunikasi nonverbal digital sangat mudah dimodifikasi, audiens sering kali mengembangkan sikap skeptis terhadap keaslian pertunjukan. Hal ini memperlihatkan paradoks dramaturgis era digital: semakin canggih teknik presentasi diri, semakin besar pula kecurigaan audiens terhadap keautentikannya.

Pendekatan Goffman juga relevan untuk memahami stigma dan eksklusi di ruang digital. Mekanisme *face-work* dan kehilangan muka kini terjadi di hadapan audiens global. Kesalahan kecil dapat dengan cepat berubah menjadi *public*

shaming, yang merusak identitas sosial individu secara luas dan permanen. Selain itu, tidak semua aktor memiliki sumber daya simbolik yang sama untuk mengelola kesan di media sosial. Akses terhadap estetika, teknologi, dan literasi digital memengaruhi ketimpangan performatif, sehingga memperkuat relevansi kritik struktural terhadap dramaturgi digital.

Secara keseluruhan, relevansi Goffman di era media sosial terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana identitas, makna, dan keteraturan sosial diproduksi melalui pertunjukan simbolik, bahkan ketika medium interaksi berubah secara radikal. Media sosial tidak membatalkan dramaturgi; sebaliknya, ia mengintensifkan dan mempersulit praktik dramaturgis.

Pemikiran Goffman tetap menjadi lensa analitis kunci bagi sosiologi komunikasi kontemporer, khususnya untuk memahami identitas digital, budaya visibilitas, dan politik kesan di ruang publik daring.

E. Profil Intelektual dan Kontribusinya

Erving Goffman lahir pada 11 Juni 1922 di Mannville, Alberta, Kanada, dalam keluarga Yahudi imigran kelas menengah. Orang tuanya berasal dari Eropa Timur dan menetap di Kanada sebagai bagian dari gelombang migrasi awal abad ke-20. Latar sosial ini—minoritas etnis, pengalaman marjinalitas, dan kehidupan komunitas kecil—sering disebut sebagai aspek awal yang membentuk kepekaan Goffman terhadap stigma, identitas sosial, dan relasi kekuasaan yang halus dalam interaksi sehari-hari.

Sejak muda, Goffman menunjukkan ketertarikan pada observasi sosial dan perilaku manusia dalam situasi konkret. Ia dikenal sebagai pribadi yang tajam, kritis, dan cenderung skeptis terhadap teori-teori besar yang terlalu abstrak. Sensibilitas ini kelak tercermin dalam gaya analisisnya yang mikro, deskriptif, dan berfokus pada detail interaksi.

Goffman menempuh pendidikan sarjana di University of Toronto, awalnya dalam bidang kimia, sebelum kemudian beralih ke sosiologi. Peralihan ini menandai minatnya yang kuat pada analisis kehidupan sosial, khususnya interaksi tatap muka.

Ia melanjutkan studi pascasarjana di University of Chicago, pusat penting perkembangan sosiologi Amerika dan tradisi Chicago School. Di lingkungan ini, Goffman dipengaruhi oleh interaksionisme simbolik (Mead–Blumer), etnografi perkotaan, serta pendekatan empiris terhadap kehidupan sehari-hari. Disertasi doktoralnya, yang berbasis penelitian etnografis di Kepulauan Shetland (Skotlandia), menjadi fondasi bagi karya monumentalnya *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959).

Goffman mengajar di beberapa institusi prestisius, termasuk University of California, Berkeley, dan kemudian University of Pennsylvania, tempat ia menghabiskan sebagian besar karier akademiknya. Ia dikenal sebagai akademisi yang produktif, meskipun sering dianggap "menyendiri" secara intelektual dan tidak terikat kuat pada mazhab teoretis tertentu.

Karya-karya utamanya meliputi: *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959) *Asylums* (1961), *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (1963) *Interaction Ritual* (1967), *Frame Analysis* (1974).

Karya-karya ini membangun analisis sistematis tentang interaksi sosial, identitas, stigma, ritual komunikasi, dan pembingkaian makna. Di era media sosial, pemikiran Goffman mengalami revitalisasi. Presentasi diri digital, manajemen kesan daring, *context collapse*, dan budaya visibilitas global menunjukkan bahwa dramaturgi sosial tidak memudar, tetapi justru menguat. Hal ini menegaskan relevansi abadi Goffman dalam sosiologi komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. University of California Press.

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.

boyd, d. (2010). Social network sites as networked publics. In Z. Papacharissi (Ed.), *A networked self: Identity, community, and culture on social network sites* (pp. 39–58). Routledge.

Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Anchor Books.

Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Prentice-Hall.

Goffman, E. (1967). *Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior*. Pantheon Books.

Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harper & Row.

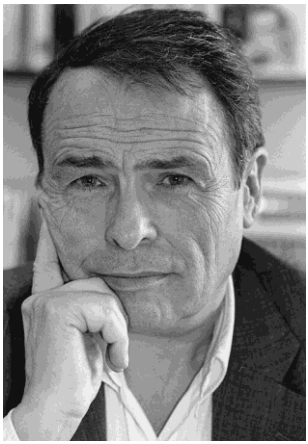
Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8th ed.). McGraw-Hill.

Turner, J. H. (2013). *Theoretical sociology*. Sage Publications.

BAB 6

PIERRE BOURDIEU: BAHASA, SIMBOL, DAN KEKUASAAN

Dr Sudirman, S.Pd. M.Si



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu

Pierre Bourdieu (1930–2002) menempati posisi sentral dalam sosiologi kontemporer sebagai penghubung antara struktur sosial, praktik simbolik, dan kekuasaan. Pada aspek sosiologi komunikasi, kontribusinya bersifat kritis dan korektif terhadap pendekatan interpretatif murni (Mead, Goffman) yang dinilai terlalu menekankan interaksi mikro tanpa cukup memperhitungkan ketimpangan struktural.

Bourdieu menolak pandangan bahwa bahasa dan komunikasi adalah medium netral pertukaran makna. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa bahasa selalu terikat pada relasi kekuasaan, dan praktik komunikasi merupakan arena utama reproduksi

dominasi sosial (Bourdieu, 1991). Dengan demikian, komunikasi tidak hanya soal "siapa berbicara" dan "apa yang dikatakan", tetapi juga siapa yang memiliki hak untuk didengar dan diakui. Kerangka berdikir Bourdieu, komunikasi adalah arena sosial di mana hak bicara (*right to speak*) dan hak untuk didengar (*right to be heard*) didistribusikan secara tidak setara (Bourdieu, 1991).

Bourdieu menunjukkan bahwa tidak semua aktor yang "berbicara" benar-benar berkomunikasi secara efektif. Secara formal, banyak individu dapat mengucapkan kata-kata; namun secara sosial, hanya sebagian yang ucapannya dianggap sah, rasional, penting, atau layak diperhatikan. Di sinilah komunikasi harus dipahami sebagai praktik yang melibatkan pengakuan simbolik (*symbolic recognition*). Tanpa pengakuan ini, ujaran kehilangan daya sosialnya, meskipun secara linguistik sempurna.

Konsep ini berkaitan langsung dengan gagasan modal simbolik. Aktor yang memiliki modal simbolik—pendidikan, status, otoritas institusional, reputasi—memiliki peluang jauh lebih besar untuk didengar dan dipercaya. Sebaliknya, aktor dengan modal simbolik rendah sering kali mengalami apa yang Bourdieu sebut sebagai delegitimasi struktural: mereka mungkin berbicara, tetapi suaranya dianggap emosional, tidak kompeten, tidak relevan, atau "tidak pantas". Dengan demikian, ketimpangan komunikasi tidak terletak pada kemampuan berbicara, melainkan pada struktur sosial yang mengatur nilai ujaran.

Hak untuk didengar tidak bersifat universal, melainkan bersifat kontekstual dan bergantung pada medan (*field*). Dalam medan politik, misalnya, hanya aktor tertentu yang diakui sebagai "narasumber sah"; dalam medan akademik, hanya bahasa ilmiah tertentu yang dianggap kredibel; dalam media, suara yang sesuai dengan logika berita dan algoritma memperoleh visibilitas. Dengan kata lain, setiap medan memiliki pasar simbolik sendiri yang menentukan siapa yang boleh berbicara dengan otoritas dan siapa yang harus diam atau disisihkan.

Komunikasi sering kali menciptakan ilusi kesetaraan. Secara formal, ruang publik tampak terbuka—semua orang dapat berbicara. Namun secara substantif, hanya sebagian suara yang

diakui sebagai bermakna. Inilah yang oleh Bourdieu disebut sebagai kekerasan simbolik, yakni dominasi yang bekerja bukan melalui paksaan, tetapi melalui penerimaan sosial terhadap hierarki suara sebagai sesuatu yang wajar. Kelompok subordinat sering kali menerima ketidakdidengaran mereka sebagai kegagalan pribadi, bukan sebagai hasil struktur sosial.

Pada komunikasi politik dan media, debat publik sering kali tidak dimenangkan oleh argumen terbaik, melainkan oleh aktor yang memiliki otoritas simbolik terbesar. Bahasa teknokratis, gaya bicara elite, atau label "ahli" berfungsi sebagai penanda legitimasi, yang secara otomatis meningkatkan peluang didengar. Sebaliknya, bahasa awam, dialek lokal, atau ekspresi emosional sering kali didiskualifikasi sebagai tidak rasional, meskipun mengandung pengalaman sosial yang valid.

Bourdieu menunjukkan bahwa ketidaksetaraan komunikasi bersifat struktural, bukan anomali yang dapat diatasi hanya dengan etika dialog atau prosedur diskursif. Sebelum berbicara tentang konsensus atau deliberasi, sosiologi komunikasi perlu bertanya: siapa yang sejak awal diakui sebagai subjek komunikasi yang sah?

Komunikasi adalah arena perjuangan simbolik. Ia bukan hanya proses penyampaian makna, tetapi mekanisme distribusi pengakuan sosial. Memahami komunikasi berarti memahami bagaimana hak untuk berbicara dan didengar diproduksi, dibatasi, dan dilegitimasi dalam struktur sosial tertentu. Inilah kontribusi utama perspektif Bourdieu bagi sosiologi komunikasi: membuka dimensi kekuasaan yang sering tersembunyi di balik praktik komunikasi yang tampak biasa dan egaliter.

Habitus juga menentukan gaya komunikasi (*style of expression*). Bahkan ketika individu berbicara, habitus mengatur apakah mereka berbicara dengan percaya diri atau ragu-ragu, dengan bahasa formal atau informal, dengan argumen sistematis atau narasi pengalaman. Dalam banyak medan—akademik, politik, hukum—gaya berbicara sering kali lebih menentukan legitimasi daripada isi pesan itu sendiri. Akibatnya, pesan dari aktor subordinat dapat didiskualifikasi bukan karena salah, tetapi karena disampaikan dengan "cara yang salah".

Secara formal, ruang publik tampak terbuka: semua orang boleh berbicara. Namun secara substantif, habitus menciptakan hierarki tak kasatmata yang menentukan siapa yang merasa berhak berbicara dan siapa yang merasa harus diam. Dengan demikian, kesetaraan prosedural tidak menjamin kesetaraan komunikatif. Tanpa mengatasi habitus dan struktur yang membentuknya, pembukaan ruang bicara sering kali hanya menguntungkan mereka yang sejak awal telah memiliki modal simbolik.

Pada aspek komunikasi kontemporer—termasuk media sosial—mekanisme ini tidak menghilang, melainkan bertransformasi. Meskipun platform digital menurunkan hambatan teknis untuk berbicara, habitus tetap menentukan: siapa yang berani bersuara, siapa yang menyensor diri, siapa yang merasa pendapatnya "layak diposting", dan siapa yang mengantisipasi stigma sebelum bicara.

Komunikasi tidak pernah sepenuhnya bebas atau netral. Ia selalu dibentuk oleh disposisi sosial yang tertanam dalam tubuh dan kesadaran. Memahami ketimpangan komunikasi berarti menelusuri bukan hanya aturan formal dan struktur institusional, tetapi juga mekanisme batiniah yang membuat individu "tahu diri" dan membatasi dirinya sendiri. Inilah kontribusi kritis konsep habitus bagi sosiologi komunikasi: mengungkap bahwa kekuasaan paling kuat sering kali bekerja tanpa suara, tanpa larangan, dan tanpa paksaan langsung.

Bourdieu memperkenalkan gagasan pasar linguistik (*linguistic market*), yakni ruang sosial di mana ujaran dinilai dan diberi harga simbolik. Setiap medan—politik, akademik, media, hukum—memiliki: bahasa yang sah, gaya bicara yang dianggap kredibel, penutur yang diakui otoritasnya. Di pasar linguistik, tidak semua ujaran memiliki nilai yang sama. Bahasa kelompok dominan cenderung dilegitimasi sebagai "bahasa yang benar", sementara dialek, aksen, atau gaya bicara kelompok subordinat dianggap kurang bernilai. Mekanisme ini menjelaskan bagaimana dominasi sosial direproduksi melalui komunikasi sehari-hari, tanpa perlu paksaan fisik.

Konsep paling berpengaruh Bourdieu dalam sosiologi komunikasi adalah kekuasaan simbolik (*symbolic power*), yakni kemampuan untuk: "menjadikan sesuatu diakui sebagai sah tanpa tampak sebagai paksaan." Pierre Bourdieu memperkenalkan gagasan pasar linguistik (*linguistic market*) untuk menegaskan bahwa praktik berbahasa tidak pernah berlangsung dalam ruang netral. Bahasa beroperasi dalam ruang sosial yang terstruktur, di mana ujaran dinilai, dipertukarkan, dan diberi "harga simbolik" berdasarkan aturan yang ditentukan oleh medan (*field*) tempat komunikasi berlangsung (Bourdieu, 1991). Dengan metafora pasar, Bourdieu ingin menunjukkan bahwa bahasa tunduk pada logika penilaian sosial yang mirip dengan mekanisme ekonomi: tidak semua ujaran memiliki nilai yang sama, dan tidak semua penutur memiliki daya tukar simbolik yang setara.

Pada setiap medan—politik, akademik, media, hukum, atau birokrasi—terdapat aturan spesifik yang menentukan bahasa apa yang sah, gaya bicara apa yang dianggap kredibel, dan siapa yang diakui memiliki otoritas untuk berbicara. "Bahasa yang sah" (*legitimate language*) bukan semata persoalan tata bahasa yang benar, melainkan bahasa yang dilegitimasi oleh institusi dominan dalam medan tersebut. Di dunia akademik, misalnya, bahasa teoritis dan metodologis tertentu dianggap sah, sementara narasi pengalaman personal sering kali dipandang kurang ilmiah. Di medan hukum, bahasa teknis-yuridis memiliki otoritas simbolik yang jauh lebih besar dibanding bahasa awam, meskipun membicarakan persoalan yang sama.

Implikasi penting bagi sosiologi komunikasi. Pertama, ia menegaskan bahwa komunikasi bukan hanya soal kompetensi linguistik individual, tetapi soal posisi sosial penutur dalam medan tertentu. Kedua, ketimpangan komunikasi tidak dapat dijelaskan hanya melalui akses bicara formal, melainkan melalui struktur pasar simbolik yang menentukan nilai ujaran. Ketiga, pasar linguistik menjelaskan bagaimana dominasi sosial direproduksi secara halus: kelompok dominan tidak perlu membungkam secara langsung, karena aturan pasar telah membuat suara tertentu lebih bernilai dan suara lain kurang berharga.

Konsep pasar linguistik juga membantu memahami proses self-censorship dalam komunikasi. Karena aktor sosial telah menginternalisasi logika pasar melalui habitus, mereka secara intuitif menyesuaikan cara berbicara atau bahkan memilih untuk diam ketika merasa ujarannya tidak "laku" di pasar tertentu. Dengan demikian, pasar linguistik tidak hanya mengatur evaluasi ujaran, tetapi juga produksi ujaran itu sendiri.

Aspek kontemporer, konsep ini semakin relevan untuk menganalisis media dan ruang digital. Algoritma media sosial dapat dipahami sebagai bentuk baru pasar linguistik, yang memberi "harga" pada ujaran melalui visibilitas, *likes*, *shares*, dan *engagement*. Bahasa yang emosional, provokatif, atau sesuai dengan logika platform sering kali lebih bernilai dibanding bahasa reflektif dan kompleks. Namun, seperti dalam pasar linguistik klasik, nilai ini tetap terkait dengan posisi sosial penutur—jumlah pengikut, status selebritas, atau legitimasi institusional.

Kekuasaan simbolik bekerja melalui kekerasan simbolik (*symbolic violence*), yaitu bentuk dominasi yang diterima sebagai wajar oleh mereka yang didominasi. Pada aspek bahasa, kekerasan simbolik terjadi ketika: bahasa dominan diterima sebagai standar universal, penutur subordinat menyalahkan diri sendiri atas "ketidakmampuan" berbahasa, ketimpangan komunikasi dianggap sebagai perbedaan kompetensi individual, bukan struktur sosial. Bahasa menjadi instrumen dominasi yang paling efektif justru karena tidak disadari sebagai dominasi.

Pierre Bourdieu memperlihatkan bahwa bahasa dan simbol adalah instrumen kekuasaan yang bekerja secara halus, sistemik, dan berjangka panjang. Komunikasi bukan hanya sarana ekspresi, melainkan mekanisme utama reproduksi dominasi sosial. Dengan menempatkan bahasa dalam kerangka habitus, medan, dan modal simbolik, Bourdieu memberikan fondasi teoretis yang kokoh bagi sosiologi komunikasi kritis.

A. Habitus, Modal, dan Arena Sosial

Pemikiran Pierre Bourdieu, habitus, modal, dan arena sosial (*field*) membentuk satu kesatuan analitis yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya merupakan perangkat konseptual utama untuk menjelaskan bagaimana praktik sosial—termasuk praktik komunikasi—diproduksi, direproduksi, dan dipertarungkan dalam masyarakat yang berlapis dan timpang. Berbeda dari pendekatan yang memisahkan struktur dan agensi, Bourdieu mengajukan kerangka relasional yang menjelaskan bagaimana struktur sosial bekerja melalui disposisi internal aktor, tanpa harus hadir sebagai paksaan eksplisit (Bourdieu, 1984; 1991).

Habitus adalah sistem disposisi yang bersifat tahan lama (*durable*) dan dapat dipindahkan (*transposable*), yang terbentuk melalui pengalaman sosial jangka panjang—keluarga, pendidikan, kelas sosial, dan lingkungan budaya. Habitus membentuk cara individu: berpikir dan menilai, merasakan apa yang pantas atau tidak pantas, berbicara, diam, atau menarik diri, berperilaku dalam situasi sosial tertentu (Bourdieu, 1990).

Aspek komunikasi, habitus bekerja sebagai struktur tak sadar yang mengatur praktik berbahasa. Ia menentukan *apa yang bisa dibayangkan untuk diucapkan*, *bagaimana cara mengucapkannya*, dan *kepada siapa ujaran ditujukan*. Karena habitus beroperasi di bawah kesadaran reflektif, individu sering kali menganggap batas-batas komunikatifnya sebagai "alamiah" atau "masuk akal", padahal ia merupakan hasil internalisasi struktur sosial.

Habitus menjelaskan mengapa ketimpangan komunikasi tidak selalu muncul sebagai pembungkaman eksternal, melainkan sebagai *self-censorship*—individu membatasi dirinya sendiri karena merasa "tidak pada tempatnya". Inilah salah satu mekanisme utama kekerasan simbolik dalam komunikasi.

Aspek komunikasi, ketika dikatakan bahwa habitus bekerja sebagai struktur tak sadar yang mengatur praktik berbahasa, yang dimaksud adalah bahwa tindakan komunikatif individu tidak didahului oleh kalkulasi rasional yang sepenuhnya sadar, melainkan oleh disposisi yang telah terbentuk jauh sebelum situasi komunikasi aktual terjadi.

Habitus menyediakan semacam *sense of the game*—rasa intuitif tentang apa yang mungkin, pantas, dan efektif untuk dilakukan dalam situasi sosial tertentu (Bourdieu, 1990). Dalam komunikasi, rasa ini menentukan batas-batas imajiner dari ujaran bahkan sebelum ujaran itu dirumuskan secara mental.

Penentuan tentang *apa yang bisa dibayangkan untuk diucapkan* merupakan aspek paling mendasar dari kerja habitus. Banyak kemungkinan ujaran tidak pernah muncul ke permukaan kesadaran karena sejak awal telah tersaring oleh disposisi sosial. Individu tidak "memilih untuk diam" secara sadar, melainkan tidak sampai pada tahap memikirkan kemungkinan berbicara. Dengan demikian, ketimpangan komunikasi bekerja pada level pra-reflektif: sebelum ada keputusan, sudah ada pembatasan. Inilah mengapa dominasi simbolik sering kali sulit dideteksi, karena ia bekerja sebelum artikulasi, bukan sesudahnya.

Habitus juga mengatur *bagaimana cara mengucapkannya*. Gaya bicara—intonasi, pilihan kata, struktur kalimat, tingkat kepercayaan diri—bukan sekadar preferensi personal, tetapi ekspresi dari posisi sosial yang terinternalisasi. Dalam banyak arena sosial, gaya komunikasi lebih menentukan legitimasi daripada isi pesan itu sendiri. Habitus kelas dominan cenderung selaras dengan gaya bahasa yang dilegitimasi sebagai "netral", "rasional", atau "objektif", sementara gaya komunikasi kelas subordinat sering distigmatisasi sebagai emosional, tidak sistematis, atau tidak kompeten. Akibatnya, bahkan ketika isi ujaran serupa, efek sosialnya bisa sangat berbeda.

Aspek ketiga—*kepada siapa ujaran ditujukan*—menunjukkan bahwa habitus juga mengatur orientasi relasional komunikasi. Individu tidak berbicara kepada semua orang dengan cara yang sama, dan tidak semua audiens dianggap "layak" atau "aman" untuk diajak berbicara. Habitus membentuk peta sosial internal tentang hierarki audiens: siapa yang boleh dikritik, siapa yang harus dihormati, siapa yang sebaiknya dihindari. Dalam hal ini, komunikasi bukan hanya

soal ekspresi, tetapi juga soal pengenalan dan penerimaan hierarki sosial.

Pernyataan bahwa individu sering menganggap batas-batas komunikatifnya sebagai "alamiah" atau "masuk akal" menyingkap inti dari kekerasan simbolik. Karena habitus bekerja di bawah kesadaran reflektif, individu cenderung menginternalisasi struktur sosial sebagai logika pribadi. Ketidakberanian berbicara di ruang publik, rasa tidak percaya diri, atau keyakinan bahwa pendapatnya "tidak penting" sering dianggap sebagai sifat individual, padahal merupakan hasil dari proses sosial yang panjang. Struktur sosial dengan demikian berhasil menyembunyikan dirinya sendiri di balik pengalaman subjektif.

Analisis ini memiliki implikasi penting bagi sosiologi komunikasi. Ia menunjukkan bahwa membuka ruang bicara secara formal—misalnya melalui kebebasan berekspresi atau akses media—tidak otomatis menghasilkan komunikasi yang setara. Selama habitus tetap mereproduksi rasa "tahu diri" dan batas simbolik, ketimpangan komunikasi akan terus berlangsung. Oleh karena itu, ketidaksetaraan komunikasi tidak dapat dipahami semata sebagai masalah regulasi atau etika dialog, melainkan sebagai masalah disposisi sosial yang terinternalisasi.

Aspek kontemporer, terutama ruang digital, mekanisme ini tetap bekerja meskipun dalam bentuk baru. Media sosial memang menurunkan hambatan teknis untuk berbicara, tetapi habitus tetap menentukan siapa yang berani bersuara, siapa yang menyensor diri, dan siapa yang merasa pantas tampil di ruang publik daring. Dengan demikian, alenia ini menegaskan bahwa komunikasi adalah arena di mana struktur sosial bekerja paling halus, melalui disposisi yang tampak personal tetapi sesungguhnya bersifat sosial.

Secara keseluruhan, tambahan analisis ini menegaskan bahwa memahami komunikasi dalam perspektif Bourdieu berarti menelusuri apa yang tidak diucapkan, tidak

dibayangkan, dan tidak dirasa mungkin, karena justru di situlah kekuasaan simbolik bekerja paling efektif.

Bourdieu memperluas konsep modal melampaui ekonomi dan mengidentifikasi beberapa bentuk utama: *Modal ekonomi: sumber daya material yang dapat langsung dikonversi. Modal kultural: pengetahuan, selera, gaya bicara, pendidikan, dan kompetensi simbolik. Modal sosial: jaringan relasi dan koneksi sosial. Modal simbolik: bentuk legitimasi dan pengakuan sosial atas modal lain*.

Pada komunikasi, modal kultural dan simbolik memiliki peran yang sangat menentukan. Kemampuan berbicara dengan gaya tertentu, menggunakan istilah yang sah, menampilkan kepercayaan diri simbolik, dan menguasai kode komunikasi arena tertentu merupakan bentuk modal yang meningkatkan nilai ujaran. Ujaran yang sama dapat menghasilkan efek sosial yang berbeda tergantung pada modal penuturnya.

Modal simbolik berfungsi sebagai "kredit kepercayaan": semakin besar modal simbolik, semakin besar kemungkinan ujaran diterima sebagai sah, rasional, atau otoritatif. Sebaliknya, kekurangan modal membuat ujaran mudah diabaikan, disalahartikan, atau didelegitimasi. Arena sosial (*field*) adalah ruang relasional yang relatif otonom, tempat aktor dan institusi saling berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya dan legitimasi yang spesifik. Setiap arena—politik, akademik, media, hukum, seni—memiliki: aturan main sendiri, bentuk modal yang paling bernilai bahasa yang sah, hierarki otoritas (Bourdieu, 1993).

Arena sosial berfungsi sebagai pasar simbolik, tempat praktik komunikasi dinilai dan diberi "harga". Bahasa yang efektif di satu arena bisa tidak bernilai di arena lain. Dengan demikian, praktik komunikasi selalu kontekstual dan terikat medan. Pada arena, aktor dengan habitus yang selaras dengan struktur arena dan dengan modal yang sesuai memiliki keuntungan struktural. Aktor lain harus beradaptasi, menyesuaikan gaya komunikasinya, atau tersingkir. Inilah yang menjelaskan mengapa arena sosial cenderung mereproduksi dominasi meskipun tampak terbuka.

Keunggulan teoretis Bourdieu terletak pada kemampuannya menjelaskan praktik sosial melalui relasi dialektis antara habitus, modal, dan arena: Habitus membentuk kecenderungan bertindak, Modal menentukan kapasitas bertindak, Arena menyediakan struktur peluang dan batasan.

Praktik komunikasi muncul dari pertemuan ketiganya. Dengan rumus terkenal Bourdieu:

$$(Habitus \times Modal) + Arena = Praktik$$

Pada aspek sosiologi komunikasi, rumus ini menjelaskan mengapa: tidak semua orang berani berbicara di ruang publik, tidak semua ujaran memiliki efek sosial, tidak semua partisipasi komunikasi menghasilkan pengakuan.

Kerangka habitus–modal–arena membawa implikasi penting:

1. Menolak ilusi komunikasi setara
   Kesetaraan formal berbicara tidak menjamin kesetaraan didengar.
2. Mengungkap mekanisme dominasi simbolik
   Kekuasaan bekerja melalui selera, gaya, bahasa, dan rasa "kepantasan".
3. Menjembatani mikro–makro
   Praktik komunikasi mikro dipahami sebagai ekspresi struktur makro yang terinternalisasi.
4. Relevansi kontemporer
   Di ruang digital, arena baru terbentuk (platform), modal baru muncul (visibilitas, followers), dan habitus digital berkembang—namun logika ketimpangan tetap bekerja.

Melalui konsep habitus, modal, dan arena sosial, Pierre Bourdieu memberikan perangkat analitis yang sangat kuat untuk memahami komunikasi sebagai praktik sosial yang sarat kekuasaan. Komunikasi bukan hanya proses penyampaian makna, melainkan arena perjuangan simbolik di mana disposisi sosial, sumber daya, dan struktur medan saling berkelindan. Dengan kerangka ini, sosiologi komunikasi mampu menyingkap bagaimana dominasi direproduksi secara halus—melalui bahasa, gaya, dan rasa "tahu diri" yang tampak alamiah.

B. Kekuasaan Simbolik dalam Bahasa dan Komunikasi

Sosiologi komunikasi kritis, kekuasaan simbolik merujuk pada kemampuan untuk mendefinisikan realitas sosial dan menjadikannya diterima sebagai sah tanpa paksaan fisik. Pierre Bourdieu menegaskan bahwa bahasa merupakan medium utama dari kekuasaan simbolik karena ia bekerja melalui pengakuan, bukan melalui kekerasan terbuka (Bourdieu, 1991). Bahasa tidak hanya menyampaikan makna, tetapi menetapkan siapa yang berhak berbicara, makna mana yang dianggap benar, dan interpretasi apa yang dilegitimasi. Kekuasaan simbolik bersifat efektif justru karena ia tidak dikenali sebagai kekuasaan. Ketika suatu bentuk bahasa, gaya bicara, atau kategori makna diterima sebagai "wajar", dominasi telah berhasil bekerja tanpa perlawanan.

Kekuasaan simbolik dalam komunikasi tidak melekat pada bahasa sebagai sistem linguistik, melainkan pada hubungan antara bahasa dan posisi sosial penuturnya. Bourdieu menunjukkan bahwa ujaran memperoleh daya sosial bukan karena kebenaran internalnya, tetapi karena otoritas simbolik penutur (Bourdieu, 1991).

Pernyataan bahwa bahasa tidak hanya menyampaikan makna, tetapi menetapkan siapa yang berhak berbicara, makna mana yang dianggap benar, dan interpretasi apa yang dilegitimasi mengungkap dimensi paling mendasar dari kekuasaan simbolik dalam komunikasi. Bahasa, dalam perspektif ini, tidak berfungsi netral sebagai alat representasi realitas, melainkan sebagai mekanisme institusional yang mengatur distribusi otoritas simbolik dalam masyarakat (Bourdieu, 1991).

Pertama, bahasa menetapkan siapa yang berhak berbicara. Hak bicara tidak bersifat universal, meskipun secara formal setiap orang dapat berbicara. Dalam praktik sosial, hanya aktor tertentu yang diakui sebagai penutur sah (*legitimate speakers*). Legitimasi ini bergantung pada posisi sosial, modal simbolik, dan pengakuan institusional—misalnya gelar akademik, jabatan politik, status profesional, atau visibilitas

media. Akibatnya, komunikasi publik bukan arena kesetaraan suara, melainkan arena seleksi penutur, di mana sebagian aktor secara struktural lebih "layak didengar" dibandingkan yang lain.

Kedua, bahasa menentukan makna mana yang dianggap benar. Kebenaran dalam komunikasi sosial tidak semata-mata ditentukan oleh korespondensi dengan realitas empiris, melainkan oleh otoritas simbolik yang mendukung suatu definisi realitas. Bahasa teknokratis, akademik, atau hukum sering kali dilegitimasi sebagai "objektif" dan "rasional", sementara bahasa pengalaman, emosi, atau narasi awam dipinggirkan sebagai subjektif atau tidak ilmiah. Dengan demikian, bahasa berfungsi sebagai alat klasifikasi epistemik yang membedakan pengetahuan sah dan tidak sah.

Ketiga, bahasa mengatur interpretasi apa yang dilegitimasi. Tidak semua tafsir memiliki peluang yang sama untuk diakui sebagai interpretasi resmi atau dominan. Dalam setiap arena sosial terdapat kerangka interpretatif yang diinstitusionalisasikan—misalnya kerangka hukum dalam pengadilan, kerangka ilmiah di akademia, atau kerangka editorial di media. Interpretasi yang selaras dengan kerangka tersebut akan diterima dan disirkulasikan, sementara interpretasi alternatif dianggap menyimpang, tidak relevan, atau bahkan tidak rasional. Di sinilah bahasa bekerja sebagai mekanisme penutupan makna (*closure of meaning*).

Analisis ini menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar medium komunikasi, melainkan instrumen pemerintahan simbolik. Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kebijakan, hukum, atau kekerasan fisik, tetapi melalui penetapan kategori bahasa yang mengatur siapa boleh berbicara, apa yang boleh dipikirkan, dan bagaimana realitas harus dimaknai. Inilah yang oleh Bourdieu disebut sebagai kekerasan simbolik: dominasi yang diterima sebagai wajar karena tertanam dalam bahasa sehari-hari dan praktik komunikasi institusional.

Pernyataan bahwa bahasa bukan sekadar medium komunikasi, melainkan instrumen pemerintahan simbolik, menempatkan bahasa di jantung analisis kekuasaan modern. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kekuasaan tidak terutama bekerja melalui paksaan koersif—seperti hukum atau kekerasan fisik—melainkan melalui pengelolaan makna yang membentuk cara individu memahami dunia sosialnya (Bourdieu, 1991). Bahasa menjadi instrumen utama karena ia mengatur kategori berpikir yang tampak netral, alamiah, dan tak terhindarkan.

Sebagai instrumen pemerintahan simbolik, bahasa berfungsi mendefinisikan batas kemungkinan sosial. Dengan menetapkan kategori tertentu—misalnya "rasional/tidak rasional", "ahli/awam", "resmi/tidak resmi", "ilmiah/subjektif"—bahasa secara implisit menentukan:

1. Siapa yang boleh berbicara (penutur sah),
2. Apa yang boleh dipikirkan dan diucapkan (wilayah wacana yang sah),
3. Bagaimana realitas harus dimaknai (kerangka interpretatif dominan).

Kategori-kategori ini tidak bersifat deskriptif semata, melainkan preskriptif: ia mengarahkan pikiran dan tindakan tanpa harus diperintahkan secara eksplisit. Inilah mengapa bahasa memiliki daya pemerintahan yang sangat efektif—ia bekerja melalui pengakuan, bukan perintah.

Kekerasan simbolik adalah bentuk dominasi yang paling stabil. Ia tidak dialami sebagai kekerasan, melainkan sebagai "akal sehat" (*common sense*). Individu menerima klasifikasi bahasa yang merugikan posisinya sendiri karena klasifikasi tersebut telah: dilegitimasi oleh institusi (pendidikan, negara, media), diinternalisasi melalui habitus, direproduksi dalam praktik komunikasi sehari-hari.

Sebagai contoh, ketika bahasa teknokratis negara dipersepsikan sebagai "objektif" dan "ilmiah", sementara bahasa pengalaman warga dianggap "emosional" atau "tidak berdasar", maka terjadi kekerasan simbolik. Kelompok subordinat tidak dibungkam secara langsung, tetapi

pengalaman mereka kehilangan status epistemik. Mereka boleh berbicara, tetapi tidak diakui sebagai sumber pengetahuan yang sah.

Kekerasan simbolik menjadi semakin kuat karena ia mengaburkan asal-usul sosialnya sendiri. Ketimpangan bahasa ditafsirkan sebagai perbedaan kemampuan individual, bukan sebagai hasil struktur sosial. Individu yang gagal berbicara dalam bahasa dominan akan: menyalahkan dirinya sendiri, merasa tidak kompeten, menyesuaikan diri dengan bahasa dominan, atau memilih diam. Bahasa tidak hanya mengatur komunikasi antarindividu, tetapi juga mendisiplinkan subjek dari dalam. Kekuasaan tidak perlu hadir sebagai larangan; ia bekerja melalui disposisi batin yang membuat individu "tahu diri" akan batas simboliknya.

Praktik komunikasi institusional—pendidikan, hukum, birokrasi, media—kekerasan simbolik dilembagakan secara sistematis. Kurikulum menentukan bahasa pengetahuan yang sah; hukum menentukan bahasa kebenaran; media menentukan bahasa kewajaran publik. Setiap institusi ini berfungsi sebagai mesin legitimasi simbolik, yang mereproduksi struktur kekuasaan melalui bahasa yang tampak netral.

Implikasi analitisnya sangat penting bagi sosiologi komunikasi.

Pertama, ia menegaskan bahwa masalah komunikasi bukan semata soal kebebasan berbicara, tetapi soal struktur pengakuan simbolik. Kedua, ia menunjukkan bahwa demokrasi komunikasi tidak cukup dicapai melalui pembukaan ruang bicara formal, jika kategori bahasa yang mengatur pengakuan tetap timpang. Ketiga, ia menggeser fokus kritik dari pesan ke kerangka simbolik yang menentukan pesan mana yang mungkin dan sah.

Aspek komunikasi politik dan media kontemporer, analisis ini menjelaskan mengapa wacana dominan sering kali bertahan meskipun ditentang secara faktual. Bahasa kebijakan, statistik, dan "pakar" terus mendominasi bukan karena selalu benar, tetapi karena telah dilegitimasi sebagai bahasa kebenaran.

Sebaliknya, bahasa alternatif harus berjuang tidak hanya melawan argumen, tetapi melawan aturan simbolik permainan bahasa itu sendiri.

Bahasa adalah alat pemerintahan yang paling halus dan paling efektif. Kekuasaan simbolik bekerja bukan dengan memaksa orang untuk patuh, tetapi dengan membuat dominasi tampak masuk akal. Memahami komunikasi dalam perspektif Bourdieu berarti menyingkap bagaimana bahasa mengatur kemungkinan berbicara, berpikir, dan diakui—sering kali tanpa pernah disadari sebagai bentuk kekuasaan.

Mekanisme ini diperkuat oleh habitus. Individu dari kelompok subordinat sering kali telah menginternalisasi batas-batas simbolik bahasa sehingga mereka: meragukan validitas pengalamannya sendiri, menganggap bahasanya "tidak pantas" untuk ruang publik, atau menyesuaikan diri dengan bahasa dominan demi memperoleh pengakuan.

Bahasa tidak hanya mengatur komunikasi antarindividu, tetapi juga mendisiplinkan kesadaran—menentukan apa yang layak diucapkan dan apa yang sebaiknya disimpan dalam diam. Debat publik sering kali tidak dimenangkan oleh argumen paling substantif, melainkan oleh aktor yang mampu berbicara dengan bahasa yang telah dilegitimasi sebagai rasional dan kredibel. Bahasa teknokratis, statistik, dan jargon kebijakan memperoleh status kebenaran, sementara bahasa pengalaman warga terdampak kerap didiskualifikasi. Dengan demikian, bahasa berperan aktif dalam mereproduksi hierarki sosial dan epistemik.

Komunikasi adalah arena kekuasaan, bukan sekadar pertukaran makna. Bahasa tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi mengatur kemungkinan berbicara, berpikir, dan diakui dalam masyarakat. Memahami komunikasi berarti memahami bagaimana bahasa bekerja sebagai mekanisme seleksi, legitimasi, dan dominasi simbolik—sering kali tanpa disadari oleh para pelakunya.

Salah satu kritik paling tajam Bourdieu diarahkan pada ilusi komunikasi netral, yaitu anggapan bahwa komunikasi berlangsung dalam kondisi setara dan terbuka. Secara formal, banyak ruang komunikasi tampak demokratis—setiap orang boleh berbicara. Namun secara substantif, tidak semua ujaran memiliki peluang yang sama untuk didengar dan diakui. Bahasa dominan sering kali tampil sebagai "bahasa rasional", "objektif", atau "ilmiah", sementara bahasa lain direduksi sebagai partikular atau subjektif. Inilah mekanisme ideologis utama kekuasaan simbolik: menyamarkan dominasi sebagai rasionalitas.

Analisis kekuasaan simbolik membawa implikasi penting yakni; Komunikasi adalah arena politik, bukan sekadar pertukaran makna. Ketimpangan komunikasi harus dipahami sebagai masalah struktural, bukan kegagalan individu. Studi komunikasi perlu menelusuri siapa yang didefinisikan sebagai subjek bicara yang sah.

Dalam komunikasi politik, kekuasaan simbolik menjelaskan mengapa: bahasa elit dianggap lebih kredibel, narasi teknokratis mengalahkan pengalaman warga, "pakar" lebih didengar daripada kelompok terdampak.

Menempatkan bahasa sebagai medium kekuasaan simbolik, Bourdieu mengungkap bahwa komunikasi bukanlah proses netral atau transparan, melainkan mekanisme utama reproduksi dominasi sosial. Kekuasaan bekerja melalui kata-kata, kategori, dan gaya bicara yang diterima sebagai sah. Oleh karena itu, memahami komunikasi berarti memahami bagaimana bahasa membentuk batas kemungkinan berpikir, berbicara, dan diakui dalam masyarakat.

C. Dominasi dan Reproduksi Sosial

Pada sosiologi kritis Pierre Bourdieu, dominasi sosial tidak dipahami terutama sebagai relasi koersif yang dipaksakan secara terbuka, melainkan sebagai proses simbolik yang bekerja secara halus, berjangka panjang, dan sering kali tidak disadari. Dominasi menjadi efektif justru karena ia tidak tampil sebagai

dominasi, melainkan sebagai tatanan yang tampak wajar, sah, dan "sebagaimana mestinya" (Bourdieu, 1991).

Kekuasaan sosial tidak harus terus-menerus ditegakkan melalui hukum, sanksi, atau kekerasan fisik. Ia direproduksi melalui mekanisme simbolik—bahasa, kategori pengetahuan, norma budaya, dan praktik komunikasi—yang membentuk cara individu memahami dunia sosial dan posisi mereka di dalamnya.

Perspektif Pierre Bourdieu, bentuk-bentuk kekuasaan koersif justru merupakan lapisan paling kasatmata dan sering kali paling tidak efisien dari dominasi. Kekuasaan yang paling stabil dan tahan lama adalah kekuasaan yang tidak perlu dipaksakan, karena telah tertanam dalam cara berpikir, berbicara, dan menilai realitas sosial (Bourdieu, 1991).

Kekuasaan tersebut direproduksi melalui mekanisme simbolik, yakni bahasa, kategori pengetahuan, norma budaya, dan praktik komunikasi sehari-hari. Mekanisme ini bekerja bukan dengan melarang secara langsung, melainkan dengan membentuk horizon kemungkinan kognitif dan simbolik: apa yang dianggap masuk akal, wajar, pantas, atau mungkin. Dengan kata lain, kekuasaan tidak hanya mengatur tindakan, tetapi mengatur persepsi dan interpretasi terhadap dunia sosial.

Bahasa, Pada aspek ini, berfungsi sebagai instrumen utama dominasi simbolik. Bahasa tidak hanya menamai realitas, tetapi mengklasifikasikan dan menghierarkikannya. Kategori seperti "rasional/tidak rasional", "ilmiah/subjektif", "kompeten/tidak kompeten" bukan sekadar deskripsi, melainkan alat evaluasi sosial yang menentukan posisi aktor dalam struktur sosial. Ketika kategori-kategori ini diterima sebagai netral dan alamiah, dominasi telah bekerja secara efektif tanpa perlawanan terbuka.

Kategori pengetahuan dan norma budaya memperkuat mekanisme ini dengan memberikan legitimasi epistemik dan moral pada struktur sosial yang ada. Pengetahuan resmi—kurikulum pendidikan, wacana ilmiah, bahasa kebijakan—mendefinisikan apa yang dianggap benar dan bernilai. Norma

budaya menentukan perilaku apa yang pantas, gaya bicara apa yang sopan, dan ambisi apa yang realistis. Individu yang menyimpang dari norma ini tidak selalu dihukum secara formal, tetapi didiskualifikasi secara simbolik: dianggap tidak layak, tidak serius, atau tidak relevan.

Praktik komunikasi sehari-hari menjadi medium utama reproduksi kekuasaan simbolik karena ia bersifat rutin, berulang, dan tidak disadari. Dalam percakapan, rapat, ruang kelas, media, dan birokrasi, struktur sosial direproduksi melalui siapa yang lebih sering berbicara, siapa yang didengar, siapa yang dipotong, dan siapa yang diabaikan. Ketimpangan ini jarang tampil sebagai konflik terbuka; sebaliknya, ia hadir sebagai pola interaksi yang tampak normal.

Melalui internalisasi mekanisme simbolik ini dalam habitus, individu belajar memahami dunia sosial dan posisinya di dalamnya sebagai sesuatu yang "sudah semestinya". Rasa "tahu diri", pembatasan aspirasi, dan penerimaan hierarki sosial sering kali tidak dialami sebagai penindasan, melainkan sebagai realitas objektif. Inilah inti dari apa yang oleh Bourdieu disebut kekerasan simbolik: dominasi yang diterima dan direproduksi oleh mereka yang didominasi karena ia selaras dengan struktur persepsi mereka sendiri.

Ketimpangan sosial tidak dapat dipahami hanya melalui analisis kebijakan atau institusi formal, melainkan harus ditelusuri pada level simbolik: bahasa yang digunakan, kategori yang dilegitimasi, dan praktik komunikasi yang tampak remeh. Kekuasaan modern bekerja terutama dengan membentuk kesadaran, bukan dengan memaksa tubuh.

Aspek komunikasi politik dan media, mekanisme ini menjelaskan mengapa wacana dominan sering kali bertahan meskipun dipertanyakan secara empiris. Bahasa teknokratis, statistik, dan pakar tetap menguasai ruang publik karena telah dilegitimasi sebagai bahasa kebenaran. Sebaliknya, pengalaman hidup kelompok subordinat sering kali tersingkir bukan karena salah, tetapi karena tidak sesuai dengan kategori simbolik yang diakui.

Kekuasaan sosial bekerja paling efektif ketika ia tidak terlihat sebagai kekuasaan. Ia direproduksi melalui mekanisme simbolik yang membentuk cara individu berpikir, berbicara, dan menempatkan dirinya dalam dunia sosial. Memahami kekuasaan berarti memahami bagaimana komunikasi—dalam bentuk bahasa, norma, dan praktik sehari-hari—menjadi mesin utama reproduksi dominasi sosial.

Konsep reproduksi sosial menjelaskan mengapa struktur ketimpangan—kelas, status, otoritas simbolik—cenderung bertahan lintas generasi, bahkan dalam masyarakat yang mengklaim kesetaraan peluang. Bourdieu menunjukkan bahwa reproduksi tidak terjadi semata-mata melalui transmisi ekonomi, tetapi melalui transmisi simbolik: habitus, selera, gaya bicara, dan cara berpikir yang diwariskan melalui keluarga, pendidikan, dan institusi sosial lainnya (Bourdieu, 1984).

Aspek ini komunikasi memainkan peran sentral. Bahasa dominan, gaya ekspresi yang dilegitimasi, dan kategori pengetahuan resmi berfungsi sebagai mekanisme seleksi sosial. Individu yang sejak awal memiliki habitus dan modal simbolik yang selaras dengan struktur dominan akan lebih mudah berhasil, sementara yang lain tertinggal—tanpa perlu adanya diskriminasi eksplisit.

Komunikasi memainkan peran sentral sebagai mekanisme seleksi sosial yang tidak kasatmata. Bahasa dominan, gaya ekspresi yang dilegitimasi, dan kategori pengetahuan resmi bekerja sebagai filter simbolik yang secara sistematis membedakan siapa yang dianggap kompeten, rasional, dan layak memperoleh pengakuan, serta siapa yang diposisikan sebagai kurang mampu atau tidak relevan. Seleksi ini tidak berlangsung melalui larangan formal atau kebijakan diskriminatif, melainkan melalui logika kewajaran simbolik yang telah dilembagakan dalam praktik komunikasi sehari-hari (Bourdieu, 1991).

Bahasa dominan berfungsi sebagai standar evaluasi sosial. Ia tidak hanya menentukan bentuk ujaran yang "benar", tetapi juga mendefinisikan apa yang dianggap sebagai pengetahuan

yang sah. Dalam arena pendidikan, politik, dan media, bahasa yang selaras dengan selera kelas dominan—abstrak, teknokratis, formal, dan berjarak emosional—cenderung dilegitimasi sebagai objektif dan rasional. Sebaliknya, gaya ekspresi yang berbasis pengalaman hidup, narasi personal, atau emosi sering kali didevaluasi sebagai subjektif atau tidak ilmiah. Dengan demikian, komunikasi menjadi alat klasifikasi epistemik yang mengangkat sebagian suara dan menurunkan yang lain.

Di titik ini, habitus dan modal simbolik memainkan peran penentu. Individu yang sejak awal dibesarkan dalam lingkungan sosial yang menanamkan gaya bicara, kosakata, kepercayaan diri simbolik, dan selera kognitif yang selaras dengan struktur dominan memiliki keunggulan struktural dalam komunikasi. Mereka tidak perlu "belajar ulang" cara berbicara yang sah; habitus mereka sudah sesuai dengan tuntutan arena. Keberhasilan mereka kemudian dipersepsikan sebagai hasil kecakapan individual, bukan sebagai efek dari keselarasan struktural antara disposisi pribadi dan aturan arena.

Sebaliknya, individu yang habitusnya tidak selaras dengan bahasa dan kategori pengetahuan dominan menghadapi hambatan simbolik yang berat. Mereka harus melakukan kerja adaptasi ekstra—mengubah cara berbicara, menekan aksen, menyesuaikan gaya berpikir—atau memilih diam dan menarik diri. Ketertinggalan mereka tidak muncul sebagai akibat diskriminasi eksplisit, tetapi sebagai hasil dari ketidaksesuaian simbolik yang terus-menerus. Inilah bentuk dominasi yang paling sulit dipersoalkan, karena ia tidak meninggalkan jejak kebijakan yang dapat diprotes.

Ketika seleksi sosial berlangsung melalui bahasa dan gaya komunikasi, hasilnya mudah disalahartikan sebagai perbedaan bakat, kecerdasan, atau kerja keras. Padahal, yang sesungguhnya bekerja adalah mekanisme reproduksi sosial: struktur dominan memilih mereka yang paling menyerupainya. Komunikasi, dalam hal ini, menjadi mesin meritokrasi semu, yang menutupi ketimpangan struktural di balik narasi prestasi individual.

Perspektif sosiologi komunikasi, alenia ini menegaskan bahwa akses berbicara tidak identik dengan akses untuk diakui. Banyak individu secara formal dapat berbicara di ruang publik, ruang kelas, atau media digital, tetapi hanya sebagian yang bahasanya "laku" dan diakui bernilai. Ketimpangan komunikasi dengan demikian bersifat kualitatif, bukan kuantitatif: bukan soal siapa berbicara paling banyak, tetapi siapa yang bahasanya dikonversi menjadi legitimasi sosial.

Implikasi kritisnya sangat luas. Upaya demokratisasi komunikasi yang hanya berfokus pada pembukaan ruang bicara—misalnya melalui kebebasan berekspresi atau partisipasi publik—tidak akan cukup selama bahasa dan kategori pengetahuan yang dilegitimasi tetap eksklusif. Tanpa transformasi pada struktur simbolik komunikasi, ruang publik cenderung mereproduksi aktor dan suara yang sama, sementara yang lain terus tertinggal tanpa pernah "secara resmi" didiskriminas

Komunikasi adalah arena kunci reproduksi dominasi sosial. Bahasa, gaya ekspresi, dan kategori pengetahuan resmi berfungsi sebagai mekanisme seleksi yang efisien justru karena ia bekerja secara implisit. Memahami ketimpangan sosial berarti menelusuri bagaimana komunikasi memilih, mengangkat, dan menyingkirkan aktor sosial—sering kali tanpa satu pun larangan eksplisit.

Salah satu kekuatan analitis utama Bourdieu terletak pada penjelasan tentang mengapa dominasi diterima oleh mereka yang didominasi. Melalui konsep habitus, dominasi direproduksi bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam diri subjek. Individu menginternalisasi struktur sosial sebagai disposisi batin—rasa "tahu diri", batas kepantasan, dan ekspektasi realistis tentang apa yang mungkin bagi mereka.

Akibatnya, banyak bentuk ketimpangan komunikasi dan partisipasi sosial tidak muncul sebagai konflik terbuka, melainkan sebagai: rasa tidak layak berbicara, penarikan diri dari arena publik, penerimaan hierarki sebagai sesuatu yang normal.

Inilah yang oleh Bourdieu disebut sebagai kekerasan simbolik: dominasi yang bekerja melalui persetujuan tak sadar, bukan melalui pemaksaan.

Sosiologi komunikasi tidak boleh berhenti pada analisis pesan, tetapi harus mengkaji siapa yang selalu berbicara, siapa yang selalu didengar, dan siapa yang secara sistematis disenyapkan tanpa larangan eksplisit.

Perspektif Bourdieu, dominasi dan reproduksi sosial adalah proses simbolik yang berlangsung melalui komunikasi sehari-hari. Kekuasaan bertahan bukan karena dipaksakan secara terus-menerus, tetapi karena diterima sebagai masuk akal. Bahasa, habitus, dan arena sosial bekerja bersama untuk mereproduksi struktur ketimpangan dengan cara yang halus dan tahan lama. Memahami dominasi berarti memahami bagaimana komunikasi menjadi mekanisme utama yang membuat ketidaksetaraan tampak wajar dan sah.

D. Bourdieu dalam Perspektif Sosiologi Komunikasi Kritis

Bourdieu menempati posisi sentral dalam sosiologi komunikasi kritis karena ia secara sistematis membongkar asumsi netralitas komunikasi dan menunjukkan bahwa praktik komunikasi selalu terikat pada relasi kekuasaan yang tidak setara. Berbeda dari pendekatan interpretatif (Mead, Goffman) yang menekankan makna dan interaksi, Bourdieu mengajukan koreksi struktural dengan menempatkan komunikasi dalam medan kekuasaan sosial yang menentukan siapa dapat berbicara, bagaimana berbicara, dan sejauh mana ujaran diakui sebagai sah (Bourdieu, 1991).

Berbeda dari pendekatan interpretatif—seperti interaksionisme simbolik Mead atau dramaturgi Goffman—yang menekankan makna, interaksi, dan definisi situasi, Bourdieu mengajukan kritik struktural dengan menanyakan kondisi sosial yang memungkinkan makna tertentu dihasilkan, diterima, dan diakui sebagai sah. Jika pendekatan interpretatif bertanya *bagaimana makna dinegosiasikan dalam interaksi*, Bourdieu bertanya *mengapa makna tertentu lebih berkuasa daripada yang lain*

dan *siapa yang diuntungkan oleh distribusi kekuasaan simbolik tersebut*.

Pendekatan interpretatif cenderung berangkat dari asumsi implisit bahwa para aktor relatif setara dalam proses komunikasi. Meskipun tidak secara eksplisit menafikan kekuasaan, fokus mereka pada level mikro sering kali mengaburkan struktur ketimpangan yang mendahului dan membingkai interaksi. Bourdieu justru menegaskan bahwa interaksi komunikatif tidak pernah dimulai dari titik nol. Aktor memasuki arena komunikasi dengan: habitus yang terbentuk oleh kelas dan sejarah sosial, modal simbolik yang menentukan kredibilitas ujaran, posisi dalam arena (*field*) yang memberi atau membatasi otoritas bicara. Komunikasi tidak dapat dipahami hanya sebagai proses intersubjektif, melainkan sebagai praktik sosial yang terstruktur dan bersejarah.

Analisis Bourdieu memperlihatkan bahwa apa yang tampak sebagai komunikasi "biasa" atau "rasional" sering kali merupakan hasil dari dominasi simbolik yang telah dinaturalisasi. Bahasa dominan, gaya bicara yang dilegitimasi, dan kategori pengetahuan resmi berfungsi sebagai mekanisme seleksi sosial: mereka menyaring siapa yang didengar, siapa yang dipercaya, dan siapa yang diabaikan—tanpa perlu larangan eksplisit. Di sinilah Bourdieu melampaui pendekatan interpretatif dengan menunjukkan bahwa ketimpangan komunikasi bekerja melalui pengakuan, bukan pembungkaman.

Bourdieu menolak pandangan bahwa kegagalan komunikasi—misalnya tidak didengarnya suara kelompok tertentu—dapat dijelaskan sebagai masalah keterampilan individual atau miskomunikasi. Ia menunjukkan bahwa kegagalan tersebut merupakan efek struktural dari distribusi modal simbolik yang timpang. Dengan kata lain, komunikasi gagal bukan karena pesan tidak jelas, tetapi karena penutur tidak memiliki otoritas simbolik yang diakui.

Implikasi kritis dari posisi ini sangat besar bagi sosiologi komunikasi. Pertama, ia menuntut pergeseran fokus dari analisis pesan ke analisis struktur pengakuan simbolik. Kedua,

ia mengingatkan bahwa demokratisasi komunikasi tidak cukup dilakukan dengan membuka ruang bicara formal; yang lebih mendasar adalah mengubah aturan simbolik yang menentukan nilai ujaran. Ketiga, ia menjadikan komunikasi sebagai arena strategis reproduksi dan perlawanan terhadap dominasi sosial.

Perspektif ini, komunikasi bukan sekadar proses pertukaran simbol, melainkan arena perjuangan simbolik (*symbolic struggle*) yang menentukan distribusi pengakuan, legitimasi, dan otoritas. Pierre Bourdieu secara meyakinkan menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar cermin struktur sosial, melainkan salah satu mekanisme terpenting yang membuat struktur tersebut terus bertahan dan direproduksi. Bahasa dominan, gaya bicara yang dilegitimasi, dan kategori pengetahuan resmi tidak beroperasi secara pasif sebagai representasi realitas sosial, tetapi berfungsi aktif sebagai instrumen seleksi, klasifikasi, dan legitimasi sosial (Bourdieu, 1991).

Bourdieu menolak pandangan refleksionis yang menganggap bahasa hanya "menggambarkan" dunia sosial. Sebaliknya, bahasa memiliki daya performatif struktural: ia ikut membentuk apa yang dianggap mungkin, masuk akal, dan sah dalam kehidupan sosial. Ketika bahasa kelompok dominan dilegitimasi sebagai bahasa "netral", "rasional", atau "ilmiah", bahasa tersebut tidak hanya mencerminkan posisi dominan, tetapi mengukuhkan dan menormalisasikannya. Dengan cara ini, komunikasi menjadi mekanisme utama reproduksi hierarki kelas, status, dan otoritas.

Gaya bicara yang dilegitimasi memainkan peran krusial dalam proses ini. Kredibilitas sosial tidak ditentukan semata oleh isi pesan, tetapi oleh kesesuaian gaya komunikasi dengan selera simbolik arena dominan. Dalam pendidikan, akademia, media, dan politik, gaya bicara tertentu—terstruktur, abstrak, teknokratis—dianggap sebagai penanda kompetensi dan kecerdasan. Individu yang habitus komunikatifnya selaras dengan gaya ini akan lebih mudah memperoleh pengakuan dan mobilitas sosial.

Sebaliknya, mereka yang menggunakan gaya naratif, emosional, atau kontekstual sering kali didevaluasi secara simbolik, meskipun pengalaman dan pengetahuannya substantif. Proses ini memastikan bahwa arena komunikasi terus merekrut dan mereproduksi aktor yang "mirip" dengan mereka yang telah dominan.

Lebih jauh, kategori pengetahuan resmi—yang diproduksi dan dilegitimasi oleh institusi seperti sekolah, universitas, negara, dan media—berfungsi sebagai perangkat epistemik reproduksi sosial. Kategori-kategori ini menentukan: apa yang dianggap sebagai pengetahuan sah, bentuk argumen yang diakui masalah apa yang layak dibicarakan, dan perspektif mana yang dianggap tidak relevan.

Pengetahuan yang tidak sesuai dengan kategori resmi tidak selalu disangkal secara terbuka, tetapi dipinggirkan melalui mekanisme delegitimasi simbolik. Dengan demikian, komunikasi berfungsi sebagai mekanisme penyaringan epistemik yang menjaga stabilitas struktur sosial.

Keunggulan analisis Bourdieu terletak pada penjelasannya tentang mengapa reproduksi sosial ini jarang dipersoalkan. Melalui internalisasi struktur sosial dalam habitus, individu—termasuk mereka yang dirugikan—cenderung menerima bahasa dominan dan kategori resmi sebagai sesuatu yang wajar. Ketimpangan komunikasi lalu dipersepsikan sebagai perbedaan kemampuan individual ("kurang pintar", "kurang bisa bicara"), bukan sebagai efek sistemik dari distribusi modal simbolik. Inilah inti dari kekerasan simbolik: dominasi yang direproduksi dengan persetujuan tak sadar dari mereka yang didominasi.

Komunikasi tidak hanya mereproduksi struktur sosial pada level makro, tetapi melakukannya secara mikro dan rutin—dalam ruang kelas, rapat, wawancara kerja, diskusi media, dan percakapan sehari-hari. Reproduksi sosial berlangsung bukan melalui momen-momen besar kekuasaan, melainkan melalui praktik komunikasi yang tampak biasa, namun berulang dan terinstitusionalisasi.

Demokratisasi komunikasi tidak dapat dicapai hanya dengan membuka ruang bicara formal, selama bahasa dominan dan kategori pengetahuan resmi tetap menjadi standar tunggal legitimasi. Tanpa transformasi struktur simbolik komunikasi, komunikasi justru akan terus berfungsi sebagai mesin reproduksi ketimpangan sosial.

Kontribusi fundamental Bourdieu bagi sosiologi komunikasi kritis: menunjukkan bahwa komunikasi adalah arena kunci di mana dominasi sosial direproduksi secara halus, sistematis, dan berjangka panjang. Bahasa bukan sekadar alat ekspresi, melainkan mekanisme sosial yang menjaga agar struktur ketimpangan tetap tampak sah dan alamiah.

Salah satu kontribusi paling tajam Bourdieu bagi sosiologi komunikasi kritis adalah kritiknya terhadap ilusi egalitarianisme komunikasi. Banyak teori komunikasi—termasuk versi normatif ruang publik—berasumsi bahwa komunikasi berlangsung di antara subjek yang relatif setara. Bourdieu menunjukkan bahwa asumsi ini mengaburkan kondisi sosial aktual di mana komunikasi terjadi.

Pada praktik, aktor tidak memasuki arena komunikasi dengan sumber daya yang sama. Mereka membawa: habitus yang berbeda, modal simbolik yang timpang, posisi yang tidak setara dalam arena. Akibatnya, komunikasi yang tampak terbuka dan bebas sering kali secara sistematis menguntungkan aktor dominan, sementara aktor subordinat tersingkir tanpa pernah dibungkam secara eksplisit. Inilah ciri utama dominasi simbolik: ketimpangan yang tidak tampak sebagai ketimpangan.

Perspektif sosiologi komunikasi kritis, Bourdieu memperlihatkan bahwa komunikasi berfungsi sebagai mekanisme utama reproduksi sosial. Bahasa dominan, gaya bicara yang dilegitimasi, dan kategori pengetahuan resmi tidak hanya mencerminkan struktur sosial, tetapi secara aktif mereproduksinya. Institusi komunikasi—pendidikan, media, politik, akademia—berperan sebagai mesin legitimasi simbolik. Mereka menentukan; bahasa apa yang sah, pengetahuan apa yang dianggap valid, suara siapa yang layak diakui.

Bourdieu juga memperkaya sosiologi komunikasi kritis melalui konsep arena (*field*), yang memungkinkan analisis komunikasi secara kontekstual dan relasional. Setiap arena—politik, media, hukum, akademik—memiliki: aturan bahasa sendiri, hierarki otoritas, bentuk modal simbolik yang dominan.

Kerangka ini, komunikasi dipahami sebagai praktik situasional yang terikat struktur arena, bukan sebagai proses universal. Analisis komunikasi politik, misalnya, tidak cukup menilai retorika, tetapi harus menelusuri siapa yang diakui sebagai aktor sah dalam arena politik dan bagaimana bahasa teknokratis atau populis dilegitimasi.

Pada sosiologi komunikasi kritis, Bourdieu berfungsi sebagai jembatan teoretis antara mikro dan makro. Ia tidak menolak makna dan interaksi, tetapi menunjukkan bahwa: interaksi mikro selalu dibingkai struktur makro, praktik komunikasi sehari-hari merefleksikan sejarah sosial yang terinternalisasi. Analisis percakapan, retorika, atau media dapat dihubungkan secara langsung dengan struktur kelas, kekuasaan, dan institusi. Ini merupakan keunggulan metodologis utama Bourdieu dibanding pendekatan mikro murni.

Pada aspek kontemporer, perspektif Bourdieu semakin relevan. Ruang digital sering dipersepsikan sebagai demokratis dan terbuka, namun analisis Bourdieu menunjukkan bahwa: algoritma berfungsi sebagai pasar simbolik baru, visibilitas menjadi bentuk modal simbolik, bahasa tertentu lebih "laku" dibanding yang lain. Dominasi simbolik tidak hilang di era digital, melainkan bertransformasi dan dipercepat.

Perspektif sosiologi komunikasi kritis, Pierre Bourdieu memberikan perangkat analitis yang sangat kuat untuk memahami komunikasi sebagai praktik kekuasaan yang terlembaga, terinternalisasi, dan direproduksi secara simbolik. Ia mengajarkan bahwa pertanyaan kunci dalam studi komunikasi bukan hanya *apa yang dikatakan*, tetapi; siapa yang dapat mengatakan, dalam arena apa, dengan modal apa, dan dengan konsekuensi sosial apa. Menyingkap mekanisme dominasi yang

bekerja melalui bahasa, habitus, dan arena, Bourdieu menempatkan komunikasi sebagai medan strategis perjuangan sosial, sekaligus menjadikan sosiologi komunikasi kritis sebagai disiplin yang mampu mengungkap kekuasaan dalam bentuknya yang paling halus.

E. Profil Intelektual dan Kontribusinya

Pierre Bourdieu lahir pada 1 Agustus 1930 di Denguin, sebuah desa kecil di wilayah Béarn, Prancis bagian selatan. Ia berasal dari keluarga kelas pekerja; ayahnya bekerja sebagai pegawai pos, sementara ibunya berasal dari latar pedesaan tradisional. Posisi sosial ini—berada di pinggiran struktur kelas dan jauh dari elite budaya Paris—menjadi pengalaman biografis yang sangat menentukan arah pemikiran Bourdieu.

Pengalaman mobilitas sosial dari desa ke pusat intelektual Prancis membentuk sensitivitas kritis Bourdieu terhadap ketimpangan simbolik, rasa "tidak pantas", dan mekanisme halus dominasi budaya. Banyak konsep kuncinya—seperti *habitus*, *modal kultural*, dan *kekerasan simbolik*—dapat dibaca sebagai refleksi teoretis atas pengalaman eksistensialnya sebagai "orang luar" dalam dunia akademik elite.

Bourdieu menempuh pendidikan di École Normale Supérieure (ENS), salah satu institusi paling prestisius di Prancis, tempat ia belajar filsafat. Di ENS, ia berinteraksi dengan tradisi filsafat Prancis (Descartes, Kant) dan pemikiran kontemporer seperti strukturalisme (Lévi-Strauss) dan fenomenologi (Merleau-Ponty).

Namun, Bourdieu segera mengambil jarak dari filsafat spekulatif dan beralih ke sosiologi empiris. Pengalaman militernya di Aljazair pada masa perang kemerdekaan (1950-an) menjadi titik balik intelektual. Penelitiannya tentang masyarakat Aljazair mempertemukannya dengan realitas kolonial, kekerasan struktural, dan transformasi sosial—yang kemudian mendorongnya mengembangkan sosiologi sebagai ilmu kritis tentang dominasi.

Bourdieu membangun karier akademik di berbagai institusi penting, termasuk École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) dan kemudian Collège de France, tempat ia memegang kursi sosiologi hingga wafatnya pada 23 Januari 2002.

Karya-karya utamanya mencakup: *Outline of a Theory of Practice* (1972), *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste* (1984), *The Logic of Practice* (1990), *Language and Symbolic Power* (1991), *Homo Academicus* (1988) *On Television* (1996). Karya-karya ini mengembangkan kerangka konseptual yang konsisten tentang praktik sosial, dominasi simbolik, dan reproduksi sosial.

Pierre Bourdieu memberi kontribusi mendasar bagi sosiologi komunikasi dengan menunjukkan bahwa komunikasi adalah arena perjuangan simbolik, bukan proses netral pertukaran makna. Bahasa, gaya bicara, dan kategori pengetahuan berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan yang mereproduksi struktur sosial secara halus namun efektif. Melalui kerangka habitus, modal, dan arena, Bourdieu menjadikan sosiologi komunikasi sebagai alat kritis untuk membongkar dominasi yang tersembunyi dalam praktik komunikasi sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. University of California Press.

Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. Harvard University Press.

Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.

Bourdieu, P. (1993). *The field of cultural production: Essays on art and literature*. Columbia University Press.

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). *Reproduction in education, society and culture*. Sage.

Couldry, N. (2010). *Why voice matters: Culture and politics after neoliberalism*. Sage.

Couldry, N. (2012). *Media, society, world: Social theory and digital media practice*. Polity Press.

Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge*. Pantheon Books.

Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Anchor Books.

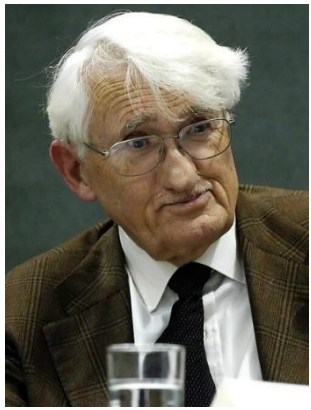
Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8th ed.). McGraw-Hill.

Thompson, J. B. (1991). Editor's introduction. In P. Bourdieu, *Language and symbolic power* (pp. 1–31). Harvard University Press.

BAB 7

JÜRGEN HABERMAS: TINDAKAN KOMUNIKATIF DAN RUANG PUBLIK

Dr. Ahmad Al Yakin, S.Ag, M.Pd



Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas

A. Pengantar Pemikiran Jürgen Habermas dalam Sosiologi Komunikasi

Jürgen Habermas lahir di Düsseldorf Jerman pada 18 Juni 1929, dikenal sebagai salah satu filsuf sosial dan sosiolog paling berpengaruh pada abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Ia merupakan figur sentral Mazhab Frankfurt generasi kedua dan dikenal luas melalui karya-karyanya tentang teori kritis, demokrasi deliberatif, etika diskursus, serta komunikasi publik. Berbeda dengan generasi pertama Mazhab Frankfurt seperti Horkheimer dan Adorno yang cenderung skeptis terhadap rasionalitas modern, Habermas berupaya merekonstruksi

proyek pencerahan dengan menempatkan komunikasi rasional sebagai sumber emansipasi sosial.

Latar belakang intelektual Habermas dibentuk oleh pengalaman sejarah Jerman pasca Perang Dunia II, terutama trauma fasisme dan krisis legitimasi demokrasi modern. Kondisi tersebut mendorong Habermas untuk mencari fondasi normatif baru bagi masyarakat demokratis yang tidak bertumpu pada kekuasaan koersif, melainkan pada rasionalitas dialogis. Ia meyakini bahwa potensi pembebasan manusia tidak terletak pada dominasi teknologi atau pasar, tetapi pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi secara rasional dan saling memahami. Pada aspek inilah, Habermas mengembangkan teori tindakan komunikatif sebagai kerangka utama analisis sosial.

Dalam sosiologi komunikasi, posisi Habermas sangat strategis karena ia menggeser fokus analisis dari kesadaran individual dan determinasi struktural menuju praktik komunikasi sebagai proses sosial yang mendasar. Habermas menegaskan bahwa bahasa bukan sekadar instrumen penyampaian pesan, melainkan medium utama pembentukan dan pemeliharaan tatanan sosial. Ia menyatakan bahwa "Bahasa merupakan medium untuk mencapai pemahaman." (Habermas, 1984). Pernyataan ini menempatkan komunikasi sebagai mekanisme utama integrasi sosial, di mana masyarakat direproduksi melalui proses saling memahami antaraktor sosial.

Sebagai bagian dari teori kritis, Habermas mengajukan kritik terhadap dominasi rasionalitas instrumental yang berorientasi pada efisiensi, kontrol, dan keberhasilan strategis. Rasionalitas semacam ini, menurutnya, telah menguasai sistem ekonomi dan politik modern, sehingga mengabaikan dimensi normatif dan etis kehidupan sosial. Sebagai alternatif, Habermas memperkenalkan konsep rasionalitas komunikatif, yaitu bentuk rasionalitas yang berorientasi pada argumentasi rasional dan kesepahaman bersama. Ia menegaskan bahwa "Konsep rasionalitas komunikatif mengandung makna yang pada akhirnya bertumpu pada pengalaman pokok tentang kekuatan

ujaran argumentatif yang bebas dari paksaan, mempersatukan, dan mampu menghasilkan konsensus." (Habermas, 1984).

Komunikasi, dalam perspektif Habermas, menjadi fondasi utama integrasi sosial dan demokrasi. Ia membedakan antara *lifeworld* (dunia kehidupan) dan *system* (sistem). Dunia kehidupan merupakan ruang interaksi simbolik tempat nilai, norma, dan identitas sosial diproduksi dan direproduksi melalui tindakan komunikatif. Sebaliknya, sistem mencakup mekanisme ekonomi dan politik yang beroperasi melalui uang dan kekuasaan. Habermas memperingatkan bahwa ketika logika sistem mendominasi dunia kehidupan, akan terjadi apa yang ia sebut sebagai "*colonization of the lifeworld*" (Habermas, 1987), yakni distorsi komunikasi yang melemahkan solidaritas sosial dan rasionalitas publik.

Dalam teori demokrasi, pemikiran Habermas menempatkan komunikasi sebagai jantung legitimasi politik. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur elektoral, tetapi sebagai proses diskursif yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam pembentukan opini dan kehendak kolektif. Habermas menegaskan bahwa "Hanya peraturan perundang-undangan yang memperoleh persetujuan dari seluruh warga negara melalui suatu proses legislasi yang bersifat diskursif yang dapat mengklaim legitimasi" (Habermas, 1996). Karena itu, komunikasi rasional dan inklusif menjadi prasyarat utama demokrasi deliberatif.

Relevansi pemikiran Habermas semakin kuat dalam masyarakat kontemporer yang ditandai oleh digitalisasi komunikasi dan transformasi ruang publik. Media sosial dan platform digital menciptakan ruang diskursus baru yang bersifat terbuka dan partisipatif, namun sekaligus rentan terhadap disinformasi, polarisasi, dan manipulasi wacana. Fenomena *echo chamber*, buzzer politik, dan komodifikasi perhatian publik menunjukkan dominasi tindakan strategis dalam komunikasi digital. Pada aspek ini, teori tindakan komunikatif Habermas tetap relevan sebagai kerangka normatif dan kritis untuk menilai kualitas komunikasi publik. Habermas sendiri menegaskan

bahwa kualitas demokrasi modern bergantung pada keberlanjutan dimensi epistemik komunikasi publik (Habermas, 2006).

Bagi sosiologi komunikasi, pemikiran Habermas menyediakan kerangka teoretis yang kuat untuk memahami hubungan antara komunikasi, kekuasaan, dan legitimasi sosial. Di tengah krisis kepercayaan publik dan fragmentasi wacana di era digital, gagasan Habermas tentang komunikasi rasional dan ruang publik deliberatif tetap menjadi rujukan penting untuk membangun kembali komunikasi sosial yang berorientasi pada kepentingan bersama.

B. Tindakan Komunikatif dan Rasionalitas Dialogis

Salah satu kontribusi terpenting Jürgen Habermas dalam sosiologi komunikasi adalah konsep tindakan komunikatif (*communicative action*). Melalui konsep ini, Habermas mengajak kita untuk melihat komunikasi bukan sekadar sebagai proses berbicara, menyampaikan pesan, atau memengaruhi orang lain, melainkan sebagai upaya bersama untuk mencapai pemahaman. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terus berinteraksi, bernegosiasi, dan menafsirkan makna melalui bahasa. Bagi Habermas, proses inilah yang sesungguhnya menjadi fondasi kehidupan sosial.

Habermas membedakan secara tegas antara tindakan komunikatif dan tindakan strategis. Tindakan strategis terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi, misalnya membujuk, memanipulasi, atau mengendalikan orang lain. Dalam situasi ini, komunikasi tidak diarahkan pada kesepahaman, melainkan pada keberhasilan. Sebaliknya, tindakan komunikatif berorientasi pada tercapainya pemahaman bersama (*mutual understanding*). Habermas menyebut bahwa tindakan komunikatif adalah interaksi di mana para partisipan "Mengoordinasikan tindakan mereka melalui kesepakatan yang didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan melalui perhitungan keberhasilan yang bersifat egosentris." (Habermas, 1984).

Dalam kehidupan sosial yang ideal, tindakan komunikatif memungkinkan individu untuk saling mengakui, mendengarkan argumen, dan membangun konsensus secara rasional. Di sinilah letak apa yang disebut Habermas sebagai rasionalitas komunikatif. Rasionalitas ini berbeda dari rasionalitas instrumental yang berfokus pada efisiensi dan hasil akhir. Rasionalitas komunikatif menekankan proses dialog, keterbukaan terhadap kritik, serta kesediaan untuk merevisi pandangan demi kesepahaman bersama. Habermas menegaskan bahwa "Mencapai saling pengertian merupakan tujuan hakiki yang melekat dalam tuturan manusia." (Habermas, 1984).

Konsep ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan realitas komunikasi masyarakat modern. Dalam banyak ruang sosial, termasuk ruang publik dan media, komunikasi sering kali tidak lagi diarahkan pada dialog, melainkan pada kemenangan wacana. Debat politik, diskusi di media sosial, hingga pemberitaan media arus utama kerap menunjukkan pola komunikasi strategis: siapa yang paling viral, siapa yang paling kuat pengaruhnya, dan siapa yang mampu mendominasi narasi. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi kehilangan dimensi etik dan dialogisnya.

Habermas menyadari bahwa masyarakat modern tidak mungkin sepenuhnya bebas dari tindakan strategis. Sistem ekonomi dan politik memang membutuhkan mekanisme kekuasaan dan uang untuk bekerja. Namun, masalah muncul ketika logika strategis tersebut merembes ke dalam ruang-ruang komunikasi yang seharusnya dialogis, seperti diskursus publik, pendidikan, dan kehidupan warga sehari-hari. Ketika komunikasi direduksi menjadi alat manipulasi, maka kepercayaan sosial melemah dan konflik menjadi sulit diselesaikan secara rasional.

Rasionalitas dialogis yang ditawarkan Habermas bukanlah konsep abstrak yang jauh dari kehidupan nyata. Ia justru berangkat dari pengalaman komunikasi sehari-hari, seperti berdiskusi, berdebat secara sehat, atau mengambil

keputusan bersama. Dalam proses tersebut, setiap partisipan secara implisit mengajukan klaim validitas atas apa yang ia katakan: apakah pernyataannya benar, apakah sesuai dengan norma, dan apakah ia tulus. Ketika klaim-klaim ini dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, komunikasi berpotensi menghasilkan kesepahaman yang stabil.

Pada aspek sosiologi komunikasi kekinian, konsep tindakan komunikatif membantu menjelaskan mengapa banyak konflik sosial sulit diselesaikan di era digital. Media sosial, misalnya, sering kali mendorong komunikasi yang cepat, emosional, dan reaktif. Algoritma platform digital lebih mengutamakan keterlibatan (engagement) daripada kualitas dialog. Akibatnya, tindakan komunikatif tergeser oleh tindakan strategis yang berorientasi pada popularitas, pengaruh, dan monetisasi perhatian. Fenomena clickbait, ujaran kebencian, dan polarisasi politik merupakan contoh nyata dari dominasi rasionalitas instrumental dalam komunikasi digital.

Meski demikian, Habermas tidak menutup kemungkinan adanya potensi emansipatoris dalam komunikasi modern. Ia tetap percaya bahwa rasionalitas dialogis dapat bertahan selama terdapat ruang-ruang diskursus yang memungkinkan argumen rasional berkembang tanpa paksaan. Dalam masyarakat demokratis, ruang-ruang tersebut dapat berupa forum publik, pendidikan, diskusi warga, maupun platform digital yang dikelola secara etis. Habermas menekankan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada sejauh mana tindakan komunikatif dapat dipertahankan dalam kehidupan publik.

Dengan kata lain, tindakan komunikatif tidak hanya relevan sebagai konsep teoretis, tetapi juga sebagai alat kritik sosial. Ia membantu kita membedakan antara komunikasi yang membangun pemahaman dan komunikasi yang sekadar mengejar kepentingan. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, disisi yang lain kemampuan untuk membangun dialog rasional menjadi semakin penting. Tanpa rasionalitas komunikatif, komunikasi publik berisiko berubah menjadi arena konflik simbolik yang tidak produktif.

Bagi kajian sosiologi komunikasi, pemikiran Habermas memberikan perspektif normatif yang kuat untuk menilai kualitas interaksi sosial. Ia mengingatkan bahwa komunikasi yang sehat bukan ditentukan oleh seberapa keras suara disampaikan, melainkan oleh sejauh mana dialog memungkinkan tercapainya pemahaman bersama. Pada aspek inilah, tindakan komunikatif dapat dipahami sebagai fondasi etis bagi kehidupan sosial dan demokrasi di era kontemporer.

C. Bahasa, Klaim Validitas, dan Etika Komunikasi Publik

Dalam pemikiran Jürgen Habermas, bahasa menempati posisi yang sangat sentral dalam kehidupan sosial. Bahasa tidak hanya dipahami sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi sebagai medium utama manusia untuk membangun hubungan sosial, menyelesaikan perbedaan, dan menciptakan kesepahaman. Melalui bahasa, manusia tidak sekadar berbicara, tetapi juga mengajukan alasan, menyatakan sikap, dan mengakui keberadaan orang lain sebagai mitra dialog. Karena itu, kualitas kehidupan publik sangat ditentukan oleh bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari.

Habermas menekankan bahwa setiap tindakan komunikasi secara implisit selalu membawa apa yang ia sebut sebagai klaim validitas (*validity claims*). Artinya, setiap kali seseorang berbicara, ia sebenarnya sedang mengajukan klaim tertentu yang dapat diterima atau dipertanyakan oleh orang lain. Habermas menjelaskan bahwa "Dalam mengajukan suatu klaim validitas, seorang penutur mengklaim bahwa ujarannya adalah sah, yakni layak untuk diakui." (Habermas, 1984). Klaim validitas inilah yang menjadi dasar etika komunikasi dalam masyarakat demokratis.

Habermas membagi klaim validitas ke dalam tiga jenis utama. Pertama, klaim kebenaran (*truth*), yaitu apakah pernyataan yang disampaikan sesuai dengan fakta atau realitas. Kedua, klaim ketepatan normatif (*rightness*), yaitu apakah pernyataan tersebut sesuai dengan norma, nilai, dan aturan sosial yang berlaku. Ketiga, klaim kejujuran atau ketulusan

(*truthfulness*), yaitu apakah pembicara sungguh-sungguh jujur dan tidak bermaksud menipu. Ketiga klaim ini selalu hadir, baik disadari maupun tidak, dalam setiap percakapan manusia.

Dalam komunikasi yang sehat, ketiga klaim validitas ini terbuka untuk diuji melalui dialog. Jika seseorang menyampaikan informasi, orang lain berhak mempertanyakan kebenarannya. Jika seseorang menyampaikan pendapat normatif, orang lain dapat mendiskusikan apakah pendapat tersebut adil dan pantas. Jika seseorang dicurigai tidak jujur, kepercayaan publik pun dapat runtuh. Di sinilah etika komunikasi publik bekerja, yakni pada kesediaan semua pihak untuk mempertanggungjawabkan klaim-klaim yang mereka ajukan melalui bahasa.

Konsep ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan fenomena komunikasi publik di Indonesia saat ini, terutama di ruang digital. Media sosial seperti Facebook, X (Twitter), Instagram, dan TikTok telah menjadi ruang publik baru tempat warga menyampaikan pendapat, berdiskusi, bahkan berkonflik. Namun, tidak semua komunikasi di ruang ini memenuhi prinsip klaim validitas. Penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi menunjukkan lemahnya klaim kebenaran dalam komunikasi publik digital. Banyak informasi dibagikan tanpa verifikasi fakta, bahkan sengaja dipelintir untuk kepentingan tertentu.

Pada aspek politik elektoral Indonesia, masalah klaim validitas ini tampak sangat jelas. Pada masa pemilu, ruang publik digital sering dipenuhi oleh narasi yang bersifat manipulatif, provokatif, dan emosional. Bahasa digunakan bukan untuk membangun dialog rasional, melainkan untuk menyerang lawan politik dan memperkuat identitas kelompok. Fenomena buzzer politik menunjukkan bagaimana komunikasi strategis mendominasi ruang publik. Dalam situasi ini, klaim kejujuran sering kali diabaikan, sementara klaim normatif dimanipulasi untuk membenarkan kepentingan kelompok tertentu.

Habermas menyebut kondisi semacam ini sebagai distorsi komunikasi. Distorsi terjadi ketika komunikasi tidak lagi diarahkan pada pencapaian pemahaman bersama, tetapi pada keberhasilan strategis. Bahasa kehilangan fungsi dialogisnya dan berubah menjadi alat kekuasaan. Pada aspek Indonesia, distorsi komunikasi ini dapat dilihat dari meningkatnya polarisasi politik, ujaran kebencian, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan media.

Etika komunikasi publik, dalam perspektif Habermas, menuntut adanya ruang diskursus yang bebas dari paksaan dan dominasi. Setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, didengar, dan mengajukan argumen. Habermas menegaskan bahwa "Hanya norma-norma yang memperoleh persetujuan dari semua pihak yang terdampak, dalam kapasitas mereka sebagai peserta suatu diskursus praktis, yang dapat mengklaim keabsahan." (Habermas, 1990, p. 66). Prinsip ini menegaskan bahwa legitimasi sosial hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang inklusif dan rasional.

Bagi generasi muda, pemikiran ini sangat relevan dalam membangun literasi digital. Literasi digital tidak hanya soal kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan menilai kualitas komunikasi. Mahasiswa perlu dilatih untuk bertanya: apakah informasi ini benar, apakah bahasa yang digunakan adil dan tidak merendahkan pihak lain, serta apakah pesan ini disampaikan dengan jujur. Dengan kata lain, klaim validitas Habermas dapat dijadikan alat praktis untuk menyaring informasi di ruang publik digital.

Dalam kehidupan sehari-hari, etika komunikasi publik juga dapat diterapkan dalam diskusi kelas, organisasi mahasiswa, dan forum warga. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi perbedaan tersebut seharusnya dikelola melalui dialog rasional, bukan melalui serangan personal atau manipulasi emosi. Di sinilah tindakan komunikatif menemukan maknanya sebagai praktik sosial yang konkret, bukan sekadar teori abstrak.

Melalui konsep bahasa, klaim validitas, dan etika komunikasi publik, Habermas memberikan kerangka normatif untuk memperbaiki kualitas komunikasi sosial. Dalam masyarakat digital seperti Indonesia saat ini, tantangan utama bukan kekurangan informasi, melainkan kelebihan informasi yang tidak selalu berkualitas. Oleh karena itu, pemikiran Habermas tetap relevan sebagai panduan etis dan kritis untuk membangun ruang publik yang lebih sehat, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

D. Ruang Publik dan Pembentukan Opini di Masyarakat Jaringan

Konsep ruang publik (public sphere) merupakan salah satu gagasan paling terkenal dari Jürgen Habermas dan menjadi fondasi penting dalam kajian sosiologi komunikasi. Ruang publik, menurut Habermas, adalah arena sosial tempat warga negara berkumpul, berdiskusi, dan membentuk opini bersama mengenai isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Dalam ruang ini, komunikasi idealnya berlangsung secara rasional, terbuka, dan setara, tanpa tekanan kekuasaan maupun kepentingan ekonomi. Melalui diskursus publik inilah legitimasi demokrasi dibangun.

Habermas awalnya menggambarkan ruang publik Pada aspek masyarakat Eropa abad ke-18, seperti salon, kafe, dan media cetak, yang memungkinkan warga berdiskusi secara kritis tentang kebijakan negara. Ia menegaskan bahwa ruang publik berfungsi sebagai "Suatu ranah kehidupan sosial di mana sesuatu yang mendekati opini publik dapat dibentuk." (Habermas, 1989). Opini publik yang terbentuk melalui diskursus rasional inilah yang kemudian menjadi pengimbang kekuasaan negara.

Namun, struktur ruang publik terus mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi komunikasi. Dalam masyarakat kontemporer, ruang publik tidak lagi terbatas pada ruang fisik atau media cetak, tetapi berkembang menjadi ruang digital yang bersifat jaringan (*networked society*). Internet dan

media sosial telah menciptakan ruang publik baru yang jauh lebih luas, cepat, dan terbuka. Setiap individu kini memiliki peluang untuk menjadi produsen informasi, bukan sekadar konsumen. Pada aspek ini, pembentukan opini publik berlangsung melalui interaksi kompleks antarindividu, media, algoritma, dan kekuasaan ekonomi-politik.

Di Indonesia, media sosial telah menjadi arena utama pembentukan opini publik. Isu-isu politik, sosial, dan budaya dengan cepat menjadi perbincangan nasional melalui tagar, unggahan viral, dan video pendek. Fenomena ini menunjukkan sisi positif dari ruang publik digital, yaitu meningkatnya partisipasi warga. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke media arus utama kini dapat menyuarakan pendapatnya secara langsung. Dalam banyak kasus, media sosial berhasil mendorong akuntabilitas publik, misalnya dalam pengungkapan kasus ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, Habermas juga mengingatkan bahwa ruang publik modern rentan mengalami distorsi. Dalam masyarakat jaringan, pembentukan opini publik tidak selalu didorong oleh argumentasi rasional, tetapi sering kali oleh logika popularitas, emosi, dan algoritma. Platform digital cenderung mempromosikan konten yang menarik perhatian, bukan yang paling rasional. Akibatnya, opini publik dapat terbentuk melalui informasi yang tidak lengkap, menyesatkan, atau bahkan sengaja dimanipulasi.

Fenomena ini tampak jelas dalam politik elektoral Indonesia. Pada masa pemilu, ruang publik digital dipenuhi oleh kampanye daring, buzzer politik, dan perang narasi antarpendukung kandidat. Diskursus publik sering kali bergeser dari perdebatan program dan gagasan menjadi serangan personal dan politik identitas. Dalam situasi seperti ini, ruang publik kehilangan fungsi deliberatifnya dan berubah menjadi arena konflik simbolik. Habermas menyebut kondisi ini sebagai pelemahan rasionalitas publik akibat dominasi kepentingan strategis (Habermas, 2006).

Dalam masyarakat jaringan, peran media juga mengalami transformasi. Media arus utama tidak lagi menjadi satu-satunya penentu agenda publik. Influencer, kreator konten, dan akun anonim memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Di Indonesia, figur-figur ini sering kali menjadi rujukan utama bagi generasi muda dalam memahami isu sosial dan politik. Namun, tidak semua aktor di ruang publik digital memiliki komitmen terhadap etika komunikasi. Banyak di antaranya lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi dan popularitas.

Habermas menyebut bahwa ruang publik ideal mensyaratkan adanya akses yang setara, kebebasan berekspresi, dan rasionalitas diskursus. Dalam praktiknya, ruang publik digital sering kali tidak sepenuhnya memenuhi syarat ini. Algoritma platform menciptakan *echo chamber*, yaitu kondisi di mana individu hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangannya. Akibatnya, dialog lintas pandangan melemah dan polarisasi sosial semakin menguat. Opini publik yang terbentuk pun cenderung terfragmentasi, bukan kolektif.

Meski demikian, Habermas tidak menolak sepenuhnya transformasi ruang publik. Ia mengakui bahwa demokrasi modern harus beradaptasi dengan perubahan struktur komunikasi. Tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga kualitas diskursus publik di tengah arus informasi yang masif. Pada aspek Indonesia, hal ini menuntut penguatan literasi media, etika komunikasi, dan pendidikan kewarganegaraan digital. Mahasiswa dan generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen rasionalitas publik di ruang digital.

Pembentukan opini publik yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar kebebasan berbicara. Ia membutuhkan kemampuan warga untuk menilai argumen, memverifikasi informasi, dan menghargai perbedaan. Dalam perspektif Habermas, opini publik yang sahih lahir dari proses komunikasi yang inklusif dan argumentatif, bukan dari tekanan massa atau manipulasi emosi. Oleh karena itu, ruang publik digital perlu

dipahami bukan hanya sebagai ruang ekspresi, tetapi juga sebagai ruang tanggung jawab sosial.

Bagi sosiologi komunikasi, konsep ruang publik Habermas tetap relevan sebagai alat analisis kritis. Ia membantu menjelaskan bagaimana opini publik dibentuk, siapa yang memiliki kekuasaan dalam proses tersebut, dan bagaimana komunikasi dapat memperkuat atau justru melemahkan demokrasi. Dalam masyarakat jaringan seperti Indonesia saat ini, masa depan demokrasi sangat bergantung pada kualitas ruang publik digital dan kemampuan warga untuk mempertahankan rasionalitas dialogis di tengah kompleksitas komunikasi modern.

E. Distorsi Komunikasi: Disinformasi, Polarisasi, dan Kolonialisasi Ruang Publik

Dalam teori Jürgen Habermas, komunikasi ideal seharusnya mengarah pada tercapainya pemahaman bersama melalui dialog rasional. Namun, dalam praktik kehidupan sosial modern, komunikasi sering kali mengalami apa yang disebut sebagai distorsi komunikasi. Distorsi komunikasi terjadi ketika proses komunikasi tidak lagi diarahkan pada pencarian kebenaran dan kesepahaman, melainkan didominasi oleh kepentingan strategis, kekuasaan, dan manipulasi. Dalam masyarakat jaringan dan ruang publik digital, distorsi komunikasi menjadi fenomena yang semakin nyata dan kompleks.

Salah satu bentuk distorsi komunikasi yang paling menonjol saat ini adalah disinformasi. Disinformasi merujuk pada penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam perspektif Habermas, disinformasi merusak klaim kebenaran (*truth*) dalam komunikasi. Ketika informasi yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan secara faktual, diskursus publik kehilangan dasar rasionalnya. Akibatnya, warga kesulitan membedakan antara fakta dan opini, antara kebenaran dan propaganda.

Di Indonesia, disinformasi banyak ditemukan di media sosial, terutama terkait isu politik, kesehatan, dan identitas sosial. Pada masa pemilu, misalnya, berbagai hoaks dan narasi manipulatif menyebar luas untuk menjatuhkan lawan politik atau membangun citra tertentu. Informasi semacam ini sering kali dikemas secara emosional agar mudah viral. Dalam kondisi demikian, komunikasi publik tidak lagi berfungsi sebagai sarana pencerahan, tetapi justru menjadi sumber kebingungan dan konflik sosial.

Bentuk distorsi komunikasi lainnya adalah polarisasi. Polarisasi terjadi ketika ruang publik terbelah ke dalam kelompok-kelompok yang saling berlawanan dan sulit berdialog. Media sosial, dengan sistem algoritmanya, cenderung memperkuat polarisasi melalui *echo chamber*, yaitu situasi di mana individu hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangan dan identitas kelompoknya. Akibatnya, perbedaan pendapat tidak lagi dipahami sebagai peluang dialog, melainkan sebagai ancaman.

Pada aspek Indonesia, polarisasi politik tampak jelas dalam beberapa pemilu terakhir. Identitas agama, etnis, dan ideologi sering digunakan sebagai alat mobilisasi politik. Bahasa komunikasi publik menjadi semakin keras dan penuh stigma. Lawan politik tidak lagi diperlakukan sebagai mitra dialog, tetapi sebagai musuh yang harus disingkirkan secara simbolik. Dalam perspektif Habermas, kondisi ini menunjukkan runtuhnya rasionalitas komunikatif dan melemahnya etika diskursus publik.

Habermas menegaskan bahwa komunikasi yang terdistorsi akan melemahkan integrasi sosial. Ketika warga tidak lagi saling mempercayai dan tidak bersedia mendengarkan argumen pihak lain, solidaritas sosial pun terkikis. Masyarakat menjadi terfragmentasi, sementara ruang publik kehilangan fungsinya sebagai arena pembentukan opini bersama. Dalam jangka panjang, polarisasi yang berlarut-larut dapat mengancam stabilitas demokrasi.

Selain disinformasi dan polarisasi, Habermas juga memperkenalkan konsep kolonialisasi ruang publik sebagai bentuk distorsi komunikasi yang bersifat struktural. Kolonialisasi ruang publik terjadi ketika logika sistem, terutama kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik, mendominasi ruang komunikasi publik. Dalam kondisi ini, komunikasi tidak lagi diarahkan pada kepentingan bersama, tetapi pada keuntungan, popularitas, dan kontrol opini.

Dalam masyarakat digital, kolonialisasi ruang publik dapat dilihat dari kuatnya pengaruh industri media, platform digital, dan kepentingan ekonomi dalam mengatur arus informasi. Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna demi keuntungan iklan. Akibatnya, konten yang bersifat sensasional, provokatif, dan emosional lebih diprioritaskan dibandingkan diskusi yang rasional dan mendalam. Ruang publik digital pun berubah menjadi pasar perhatian (*attention economy*).

Fenomena buzzer politik di Indonesia merupakan contoh konkret kolonialisasi ruang publik. Akun-akun berbayar digunakan untuk membentuk opini publik, menyerang pihak tertentu, atau menggambarkan realitas politik secara sepihak. Praktik ini menunjukkan bagaimana komunikasi publik dikendalikan oleh kepentingan strategis, bukan oleh diskursus warga yang bebas dan setara. Dalam situasi seperti ini, suara warga biasa sering kali tenggelam oleh narasi yang diproduksi secara sistematis dan masif.

Habermas menyebut bahwa kolonialisasi dunia kehidupan oleh sistem akan menyebabkan krisis legitimasi. Ketika warga merasa bahwa opini publik dimanipulasi dan tidak lagi mencerminkan kehendak bersama, kepercayaan terhadap institusi demokrasi pun menurun. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya apatisme politik, sinisme terhadap media, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap aktor-aktor politik.

Meski demikian, Habermas tidak bersikap fatalistik. Ia tetap percaya bahwa distorsi komunikasi dapat dikritisi dan dilawan melalui penguatan rasionalitas komunikatif.

Pendidikan, literasi media, dan etika komunikasi publik menjadi kunci untuk memulihkan fungsi ruang publik. Bagi generasi muda, kesadaran kritis terhadap disinformasi, polarisasi, dan kolonialisasi ruang publik merupakan langkah awal untuk membangun komunikasi sosial yang lebih sehat.

Dalam kajian sosiologi komunikasi, distorsi komunikasi tidak hanya dipahami sebagai masalah teknis media, tetapi sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan relasi kekuasaan. Pemikiran Habermas membantu kita memahami bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas komunikasi publik. Tanpa komunikasi yang rasional, jujur, dan inklusif, ruang publik akan terus dikuasai oleh kepentingan sempit dan kehilangan fungsinya sebagai arena deliberasi warga.

Dengan demikian tantangan utama komunikasi publik di era digital bukan sekadar kemajuan teknologi, melainkan bagaimana teknologi tersebut digunakan. Distorsi komunikasi harus dipahami sebagai masalah sosial yang menuntut solusi kolektif. Pemikiran Habermas tetap relevan sebagai landasan normatif untuk mengkritisi realitas komunikasi publik dan merumuskan arah perbaikan ruang publik di masyarakat jaringan.

F. Relevansi Teori Habermas bagi Sosiologi Komunikasi Kontemporer

Di tengah perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi, pemikiran Jürgen Habermas tetap memiliki relevansi yang kuat bagi kajian sosiologi komunikasi kontemporer. Meskipun teori tindakan komunikatif dan ruang publik dikembangkan Pada aspek masyarakat modern sebelum era media sosial, kerangka normatif yang ditawarkan Habermas justru semakin penting untuk memahami tantangan komunikasi di era digital. Ketika komunikasi menjadi semakin cepat, masif, dan terfragmentasi, pertanyaan mendasar Habermas tentang kualitas dialog, rasionalitas publik, dan legitimasi sosial menjadi semakin aktual.

Salah satu kontribusi utama Habermas bagi sosiologi komunikasi adalah penekanannya pada komunikasi sebagai fondasi integrasi sosial. Dalam masyarakat kontemporer, termasuk Indonesia, kohesi sosial tidak lagi hanya dibangun melalui institusi formal, tetapi juga melalui interaksi simbolik di ruang digital. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga, mulai dari diskusi politik, advokasi sosial, hingga ekspresi identitas. Pada aspek ini, teori tindakan komunikatif membantu kita membedakan antara komunikasi yang memperkuat solidaritas sosial dan komunikasi yang justru memperdalam konflik.

Habermas mengajarkan bahwa komunikasi yang sehat mensyaratkan orientasi pada pemahaman bersama, bukan semata-mata pada kemenangan argumen atau popularitas. Prinsip ini sangat relevan untuk membaca fenomena komunikasi publik di Indonesia, di mana perdebatan di ruang digital sering kali bersifat emosional dan konfrontatif. Ketika diskusi publik didominasi oleh ujaran kebencian, hoaks, dan polarisasi identitas, teori Habermas berfungsi sebagai alat kritik normatif untuk menunjukkan bahwa yang bermasalah bukan sekadar isi pesan, tetapi orientasi komunikasinya.

Dalam kajian sosiologi komunikasi, pemikiran Habermas juga relevan untuk memahami relasi antara komunikasi dan kekuasaan. Ia menunjukkan bahwa bahasa dapat menjadi sarana emansipasi, tetapi juga alat dominasi. Dalam masyarakat jaringan, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara, tetapi juga oleh korporasi media, platform digital, dan aktor-aktor politik yang mampu mengendalikan arus informasi. Fenomena buzzer politik, manipulasi algoritma, dan komodifikasi perhatian publik menunjukkan bagaimana ruang komunikasi dikolonisasi oleh kepentingan sistem. Analisis Habermas membantu pelajar dan peneliti melihat bahwa persoalan komunikasi publik tidak pernah netral, melainkan selalu terkait dengan struktur kekuasaan.

Relevansi lain dari teori Habermas terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman demokrasi kontemporer. Demokrasi, dalam pandangan Habermas, tidak cukup dipahami sebagai mekanisme pemilu lima tahunan, tetapi sebagai proses diskursif yang berkelanjutan. Opini publik yang terbentuk melalui komunikasi rasional menjadi sumber utama legitimasi politik. Pada aspek Indonesia, di mana partisipasi politik digital semakin meningkat, teori ini membantu menjelaskan mengapa demokrasi bisa mengalami krisis meskipun partisipasi terlihat tinggi. Ketika partisipasi tidak disertai dengan kualitas diskursus yang baik, demokrasi justru rentan terhadap manipulasi.

Bagi pembelajar sosiologi dan ilmu komunikasi, teori Habermas juga memiliki nilai pedagogis yang kuat. Konsep-konsep seperti tindakan komunikatif, klaim validitas, dan ruang publik dapat digunakan sebagai alat analisis praktis untuk membaca realitas sehari-hari. Generasi muda dapat belajar menilai apakah sebuah diskusi publik memenuhi prinsip dialog rasional, apakah sebuah berita layak dipercaya, dan apakah sebuah perdebatan politik bersifat deliberatif atau manipulatif. Dengan demikian, teori Habermas tidak berhenti pada tataran abstrak, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Pada aspek pendidikan dan literasi digital, pemikiran Habermas memberikan landasan etis yang penting. Literasi digital sering kali dipahami secara teknis, seperti kemampuan menggunakan media sosial atau aplikasi digital. Namun, Habermas mengingatkan bahwa literasi yang lebih penting adalah kemampuan berkomunikasi secara rasional dan bertanggung jawab. Pembelajar dan generasi muda perlu dilatih untuk menghargai argumen, bersikap terbuka terhadap kritik, dan menolak komunikasi yang bersifat manipulatif. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan dan penguatan demokrasi.

Meski demikian, teori Habermas juga tidak lepas dari kritik. Beberapa sarjana menilai bahwa gagasan ruang publik yang rasional dan bebas dari dominasi terlalu idealis dan sulit

diwujudkan dalam realitas masyarakat yang kompleks dan timpang. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya dapat memengaruhi kemampuan individu untuk berpartisipasi secara setara dalam diskursus publik. Namun, justru di sinilah nilai normatif teori Habermas terletak, yakni sebagai cita-cita kritis yang dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki praktik komunikasi yang ada.

Dalam masyarakat kontemporer yang ditandai oleh banjir informasi dan krisis kepercayaan, teori Habermas menawarkan kompas normatif bagi sosiologi komunikasi. Ia mengingatkan bahwa masa depan demokrasi dan integrasi sosial sangat bergantung pada kualitas komunikasi publik. Tanpa komitmen terhadap rasionalitas dialogis, ruang publik berisiko terus terdistorsi oleh kepentingan sempit dan kehilangan fungsinya sebagai arena pembentukan kehendak bersama.

Sebagai penutup, dapat kita tegaskan bahwa pemikiran Jürgen Habermas tetap relevan dan bahkan semakin penting dalam memahami dinamika komunikasi di era digital. Bagi sosiologi komunikasi kontemporer, teori Habermas bukan hanya warisan klasik, tetapi juga sumber inspirasi kritis untuk merumuskan praktik komunikasi publik yang lebih adil, demokratis, dan manusiawi.

G. Profil Intelektual dan Kontribusinya

Jürgen Habermas lahir pada 18 Juni 1929 di Düsseldorf, Jerman. Masa kecil dan remajanya berlangsung Pada aspek traumatik Jerman pasca-Nazisme dan Perang Dunia II. Pengalaman historis ini sangat menentukan arah pemikirannya, khususnya keprihatinannya terhadap runtuhnya rasionalitas publik, manipulasi propaganda, dan kegagalan komunikasi demokratis. Dari aspek inilah Habermas mengembangkan komitmen intelektual jangka panjang untuk merekonstruksi dasar normatif masyarakat demokratis modern.

Habermas menempuh pendidikan filsafat, sejarah, dan sosiologi di universitas-universitas Jerman, dan kemudian berafiliasi dengan Frankfurt School sebagai bagian dari generasi kedua Teori Kritis. Berbeda dari pendahulunya seperti Adorno dan Horkheimer yang cenderung pesimistis terhadap rasionalitas modern, Habermas mengambil posisi yang lebih konstruktif: ia berupaya menyelamatkan potensi emansipatoris rasionalitas melalui komunikasi, bukan menolaknya secara total.

Habermas menempati posisi unik dalam teori sosial modern sebagai pemikir yang menggabungkan: teori kritis, filsafat bahasa, sosiologi, dan teori demokrasi. Ia menolak reduksi masyarakat pada logika ekonomi atau kekuasaan semata, dan menegaskan bahwa komunikasi merupakan dimensi otonom kehidupan sosial. Dengan demikian, Habermas menggeser fokus teori kritis dari dominasi ekonomi dan ideologi menuju distorsi komunikasi dan legitimasi normatif.

Kontribusi Habermas terhadap sosiologi komunikasi tidak dapat dipisahkan dari karya-karya monumentalnya, antara lain: *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1962/1989). Karya ini memperkenalkan konsep ruang publik sebagai arena komunikasi rasional tempat opini publik terbentuk. Buku ini menjadi fondasi utama studi komunikasi politik, media, dan demokrasi deliberatif. *The Theory of Communicative Action* (Vol. 1–2, 1981/1984–1987). Magnum opus Habermas yang merumuskan: konsep tindakan komunikatif, rasionalitas komunikatif, dikotomi dunia-kehidupan (lifeworld) dan sistem. Karya ini menjadi pilar teoretis sosiologi komunikasi modern. *Between Facts and Norms* (1992/1996), Mengembangkan teori demokrasi deliberatif dan etika diskursus, mengaitkan komunikasi dengan hukum dan legitimasi politik. Karya-karya lain seperti *Knowledge and Human Interests*, *Moral Consciousness and Communicative Action*, dan esai-esai publik tentang demokrasi, Eropa, dan modernitas.

Di era media sosial dan algoritma, Habermas menyediakan standar kritis untuk menilai apakah komunikasi publik masih memungkinkan diskursus rasional atau telah direduksi menjadi komunikasi strategis.

Jürgen Habermas memberikan kontribusi mendasar bagi sosiologi komunikasi dengan menempatkan komunikasi sebagai fondasi normatif masyarakat demokratis. Melalui teori tindakan komunikatif, ruang publik, dan etika diskursus, ia menunjukkan bahwa legitimasi sosial dan politik bergantung pada kualitas komunikasi, bukan sekadar kekuasaan atau efisiensi. Dengan demikian, Habermas menjadikan sosiologi komunikasi bukan hanya disiplin analitis, tetapi juga proyek kritis dan emansipatoris.

DAFTAR PUSTAKA

Castells, M. (2011). *The rise of the network society*. John wiley & sons.

Habermas, J. (1985). *The theory of communicative action: Volume 1: Reason and the rationalization of society* (Vol. 1). Beacon press.

Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). MIT Press. (Original work published 1962)

Habermas, J. (1990). Moral consciousness and communicative action (C. Lenhardt & S. W. Nicholsen, Trans.). MIT Press.

Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy (W. Rehg, Trans.). MIT Press.

Habermas, J. (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? Communication Theory, 16(4), 411–426. (https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x)

Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8th ed.). McGraw-Hill.

BAB 8

MANUEL CASTELLS: MASYARAKAT JARINGAN DAN KEKUASAAN INFORMASI

Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells

Manuel Castells menempati posisi sentral dalam sosiologi komunikasi kontemporer sebagai teoritikus yang menjelaskan transformasi struktur sosial akibat revolusi teknologi informasi. Jika Habermas berfokus pada dimensi normatif komunikasi dan Bourdieu pada dominasi simbolik dalam arena sosial, Castells menggeser perhatian pada arsitektur material dan jaringan komunikasi global yang membentuk relasi kekuasaan baru. Kontribusinya terletak pada analisis bagaimana jaringan informasi menjadi bentuk dominan organisasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya di era globalisasi digital (Castells, 1996; 2009).

Perspektif Castells, komunikasi tidak lagi dapat dipahami terutama melalui institusi terpusat (negara, media massa klasik), melainkan melalui jaringan terdesentralisasi yang melintasi batas negara dan menghubungkan aktor secara simultan dalam ruang dan waktu. Konsep inti Castells adalah masyarakat jaringan (*network society*), yakni bentuk masyarakat di mana struktur sosial utama disusun melalui jaringan yang diproduksi oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Jaringan ini bersifat: fleksibel, adaptif, global, dan real-time.

Pada masyarakat jaringan, arus informasi (*flows*)—bukan institusi atau wilayah—menjadi elemen struktural utama. Castells menyebutnya sebagai *space of flows*, yang menggantikan *space of places* sebagai basis dominan organisasi sosial (Castells, 1996). Komunikasi tidak lagi terikat pada ruang geografis tertentu, melainkan pada logika konektivitas jaringan.

Implikasinya, kekuasaan tidak semata-mata berada pada aktor yang menguasai wilayah, tetapi pada mereka yang mengendalikan posisi strategis dalam jaringan informasi. Castells mendefinisikan kekuasaan sebagai kapasitas aktor untuk memengaruhi keputusan dan perilaku aktor lain secara asimetris, dan dalam masyarakat jaringan, kekuasaan terutama bekerja melalui pengendalian arus informasi (Castells, 2009).

Dia membedakan beberapa bentuk kekuasaan jaringan: Networking power – kekuasaan untuk memasukkan atau mengecualikan aktor dari jaringan. Network power – kekuasaan yang muncul dari standar dan protokol jaringan. Networked power – kekuasaan aktor dominan di dalam jaringan. Network-making power – kekuasaan untuk membentuk dan memprogram jaringan itu sendiri (Castells, 2009). Dari keempatnya, *network-making power* adalah yang paling strategis, karena menentukan logika operasional jaringan dan tujuan yang dilayaninya.

Masyarakat jaringan, komunikasi menjadi arena utama produksi makna dan legitimasi kekuasaan. Castells menekankan pergeseran dari media massa tradisional ke mass self-communication, yaitu komunikasi yang: diproduksi oleh individu

atau kelompok, didistribusikan secara global melalui internet, dan dipilih sendiri oleh audiens (Castells, 2009).

Fenomena ini membuka peluang emansipatoris—kelompok sosial dapat membangun narasi tandingan—namun juga membuka ruang baru bagi kontrol algoritmik, disinformasi, dan manipulasi emosi. Dengan demikian, komunikasi jaringan bersifat ambivalen: memberdayakan sekaligus mendominasi.

Castells menaruh perhatian besar pada hubungan antara komunikasi, identitas, dan kekuasaan politik. Dalam trilogi *The Information Age*, ia menunjukkan bahwa identitas kolektif—baik identitas perlawanan maupun legitimasi—dibangun melalui komunikasi jaringan (Castells, 1997).

Gerakan sosial kontemporer (misalnya Arab Spring, Occupy, Indignados) dipahami sebagai gerakan jaringan yang mengandalkan komunikasi horizontal, simbol digital, dan emosi kolektif. Namun, Castells juga menegaskan bahwa negara dan korporasi dengan cepat belajar memasukkan logika jaringan ke dalam mekanisme kekuasaan mereka, sehingga konflik politik berpindah ke ranah perang informasi dan narasi. Bagi sosiologi komunikasi, kontribusi Castells sangat signifikan: Menjelaskan pergeseran kekuasaan ke ranah jaringan informasi, Memahami komunikasi sebagai struktur material sekaligus simbolik, Membaca politik sebagai perang narasi dalam jaringan, Menyediakan kerangka untuk menganalisis media digital, algoritma, dan platform.

Manuel Castells menunjukkan bahwa dalam masyarakat kontemporer, kekuasaan tidak lagi terutama beroperasi melalui institusi terpusat, tetapi melalui jaringan informasi global. Komunikasi menjadi medan strategis utama di mana makna, identitas, dan legitimasi diproduksi dan dipertarungkan. Dengan konsep masyarakat jaringan, Castells memberikan fondasi teoretis yang sangat penting bagi sosiologi komunikasi di era digital, sekaligus membuka ruang kritik terhadap bentuk-bentuk kekuasaan baru yang bekerja melalui konektivitas, algoritma, dan arus informasi.

A. Logika Jaringan dalam Masyarakat Modern

Konsep logika jaringan (*network logic*) merupakan inti analisis Manuel Castells tentang transformasi masyarakat modern. Logika ini merujuk pada prinsip pengorganisasian sosial yang menggantikan struktur hierarkis dan teritorial dengan jaringan yang fleksibel, terdesentralisasi, dan berbasis arus informasi. Dalam masyarakat industri, kekuasaan dan koordinasi sosial terutama diatur melalui institusi terpusat—negara, birokrasi, dan organisasi hierarkis. Sebaliknya, dalam masyarakat modern berbasis informasi, jaringan menjadi bentuk dominan struktur sosial (Castells, 1996).

Logika jaringan tidak sekadar cara baru menghubungkan aktor, tetapi cara baru mengatur kekuasaan, produksi, dan komunikasi. Ia menentukan siapa yang terhubung, siapa yang terputus, dan bagaimana keputusan dibuat dalam sistem sosial yang kompleks. Pernyataan bahwa logika jaringan bukan sekadar cara baru menghubungkan aktor, melainkan cara baru mengatur kekuasaan, produksi, dan komunikasi, menandai pergeseran struktural paling mendasar dalam masyarakat modern. Dalam kerangka Manuel Castells, jaringan bukan hanya infrastruktur teknis, tetapi prinsip pengorganisasian sosial dominan yang membentuk relasi kekuasaan secara sistemik (Castells, 1996). Artinya, jaringan tidak netral: ia menyusun ulang siapa yang memiliki kapasitas bertindak, siapa yang terpinggirkan, dan bagaimana keputusan kolektif dihasilkan.

Pertama, dalam hal kekuasaan, logika jaringan menggeser pusat dominasi dari otoritas terpusat menuju posisi strategis dalam arus informasi. Kekuasaan tidak lagi terutama dimiliki oleh mereka yang menguasai wilayah atau institusi formal, melainkan oleh aktor yang mampu memprogram jaringan (menentukan tujuan, aturan, dan standar operasional) serta menghubungkan atau mengecualikan aktor lain dari jaringan tersebut. Castells menyebut mekanisme ini sebagai *network-making power*—bentuk kekuasaan tertinggi dalam masyarakat jaringan (Castells, 2009).

Dengan demikian, siapa yang "terhubung" dan siapa yang "terputus" bukanlah kondisi teknis semata, melainkan hasil keputusan politik, ekonomi, dan algoritmik.

Kedua, dalam ranah produksi, logika jaringan mengubah cara nilai ekonomi diciptakan dan didistribusikan. Produksi tidak lagi sepenuhnya terorganisasi melalui pabrik, perusahaan hierarkis, atau negara, tetapi melalui jaringan global fleksibel yang menghubungkan modal, tenaga kerja, pengetahuan, dan teknologi secara real time.

Keputusan produksi—apa yang diproduksi, di mana, dan oleh siapa—ditentukan oleh logika konektivitas jaringan, bukan oleh kebutuhan lokal semata. Aktor atau wilayah yang tidak terhubung ke jaringan utama produksi global mengalami bentuk baru ketertinggalan struktural, yang oleh Castells dipahami sebagai eksklusi melalui diskonektivitas, bukan melalui larangan eksplisit.

Ketiga, dalam bidang komunikasi, logika jaringan merekonfigurasi produksi makna dan opini publik. Komunikasi tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh media massa terpusat, tetapi oleh arus komunikasi jaringan yang terdistribusi, cepat, dan sering kali dimediasi algoritma. Namun, keterbukaan ini bersifat paradoksal. Di satu sisi, jaringan memungkinkan *mass self-communication*, di mana individu dan kelompok dapat memproduksi dan menyebarkan pesan secara global. Di sisi lain, struktur jaringan tetap hierarkis secara fungsional, karena simpul tertentu—platform digital, mesin pencari, influencer, dan sistem algoritmik—memiliki kapasitas jauh lebih besar untuk mengarahkan visibilitas dan atensi (Castells, 2009).

Logika jaringan menentukan bagaimana keputusan dibuat dalam sistem sosial yang kompleks menggarisbawahi transformasi mekanisme pengambilan keputusan itu sendiri. Keputusan tidak selalu dibuat melalui proses deliberatif formal atau rantai komando birokratis, melainkan melalui koordinasi simultan dalam jaringan—sering kali tanpa pusat tunggal yang jelas. Hal ini menciptakan efisiensi dan kecepatan, tetapi juga

menurunkan transparansi dan akuntabilitas, karena tanggung jawab tersebar di berbagai simpul jaringan yang sulit dilacak.

Dimensi normatif yang problematis. Logika jaringan menciptakan ketimpangan struktural baru: aktor yang memiliki kemampuan teknis, modal informasi, dan posisi strategis dalam jaringan memperoleh kekuasaan yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis. Mereka yang terputus dari jaringan—baik karena kemiskinan digital, marginalisasi geografis, atau sensor politik—tidak hanya kehilangan akses informasi, tetapi juga kehilangan kapasitas untuk memengaruhi keputusan yang berdampak pada hidup mereka.

Perspektif sosiologi komunikasi, alenia ini menegaskan bahwa jaringan harus dipahami sebagai struktur kekuasaan komunikatif, bukan sekadar medium interaksi. Pertanyaan kunci bukan lagi hanya *siapa berbicara* atau *apa yang dikatakan*, tetapi: siapa yang terhubung ke jaringan utama, siapa yang dikendalikan oleh logika algoritmik dan siapa yang secara sistemik dikecualikan dari arus komunikasi dan pengambilan keputusan.

Logika jaringan membentuk medan baru dominasi dan resistensi. Ia membuka peluang emansipasi melalui konektivitas, tetapi sekaligus menciptakan bentuk kekuasaan baru yang bekerja melalui arsitektur jaringan itu sendiri. Memahami masyarakat modern berarti memahami bagaimana jaringan mengatur akses, visibilitas, dan keputusan—sering kali tanpa paksaan langsung, namun dengan konsekuensi sosial yang sangat nyata.

Castells mengidentifikasi beberapa karakteristik kunci logika jaringan:

1. Fleksibilitas

   Jaringan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan tanpa harus membongkar keseluruhan struktur. Ini menjadikan jaringan unggul dalam menghadapi dinamika global yang cepat.

2. Skalabilitas
   Jaringan dapat diperluas atau dipersempit tanpa kehilangan fungsi dasarnya, memungkinkan integrasi aktor lokal dan global secara simultan.
3. Desentralisasi fungsional
   Tidak ada pusat tunggal yang mengontrol seluruh jaringan. Kekuasaan tersebar pada simpul-simpul strategis (*nodes*) yang memiliki posisi penting dalam arus informasi.
4. Ketergantungan pada arus (*flows*)
   Dalam logika jaringan, yang utama bukan lokasi geografis, tetapi arus informasi, modal, simbol, dan komunikasi yang bergerak secara real time (Castells, 1996).

Karakteristik ini menjelaskan mengapa jaringan menjadi struktur dominan dalam ekonomi global, media digital, dan politik kontemporer.

Karakteristik logika jaringan menjelaskan mengapa jaringan menjadi struktur dominan dalam ekonomi global, media digital, dan politik kontemporer menggarisbawahi bahwa dominasi jaringan bukan sekadar akibat kemajuan teknologi, melainkan hasil dari kesesuaian struktural antara logika jaringan dan kebutuhan sistem sosial modern. Fleksibilitas, skalabilitas, desentralisasi fungsional, serta ketergantungan pada arus (*flows*) menjadikan jaringan bentuk organisasi yang paling adaptif dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian global (Castells, 1996).

Ekonomi global, jaringan memungkinkan kapitalisme beroperasi secara transnasional dan real-time. Perusahaan, pasar keuangan, dan rantai pasok tidak lagi bergantung pada struktur hierarkis yang kaku, tetapi pada jaringan produksi dan distribusi yang dapat dengan cepat direkonfigurasi. Keputusan investasi, relokasi produksi, dan alokasi tenaga kerja ditentukan oleh posisi dalam jaringan global, bukan oleh batas negara. Aktor ekonomi yang terhubung ke simpul strategis jaringan memperoleh keunggulan struktural, sementara yang tidak terhubung mengalami bentuk baru eksklusi ekonomi. Dengan

demikian, jaringan menjadi infrastruktur dasar kapitalisme global berbasis informasi.

Pada media digital, karakteristik jaringan menjelaskan pergeseran dari komunikasi massa terpusat menuju komunikasi jaringan yang terdistribusi. Media digital beroperasi berdasarkan logika konektivitas, viralitas, dan algoritma yang memprioritaskan arus informasi daripada kontrol editorial terpusat. Jaringan memungkinkan produksi dan sirkulasi pesan secara horizontal, namun pada saat yang sama menciptakan hierarki visibilitas baru melalui platform dan sistem rekomendasi. Dominasi jaringan di ranah media bukan hanya soal teknologi internet, tetapi soal kemampuan jaringan mengelola atensi dalam skala masif dan cepat, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh struktur media lama.

Politik kontemporer, jaringan menjadi struktur dominan karena mampu mengorganisasi mobilisasi, opini, dan konflik secara simultan di berbagai level. Gerakan sosial, kampanye politik, dan bahkan operasi kekuasaan negara semakin bergantung pada komunikasi jaringan yang fleksibel dan berbasis emosi serta simbol. Jaringan memungkinkan koordinasi tanpa kepemimpinan terpusat, mempercepat penyebaran narasi, dan menantang institusi politik formal. Namun, Castells menegaskan bahwa negara dan aktor dominan tidak melemah, melainkan beradaptasi dengan logika jaringan, mengintegrasikannya ke dalam strategi kekuasaan melalui pengawasan digital, propaganda daring, dan perang informasi (Castells, 2009).

Dominasi jaringan bersifat lintas bidang dan lintas skala. Karakteristik yang sama—fleksibilitas, kecepatan, dan kemampuan menghubungkan berbagai simpul—menjadikan jaringan struktur yang efektif untuk mengelola ekonomi global, media digital, dan politik. Dengan kata lain, jaringan menjadi struktur dominan bukan karena ia paling demokratis, tetapi karena ia paling fungsional bagi sistem yang beroperasi dalam kondisi globalisasi dan percepatan waktu sosial.

Namun, dominasi jaringan juga membawa konsekuensi kritis. Ketika jaringan menjadi struktur utama, ketimpangan sosial direkonfigurasi dalam bentuk ketimpangan konektivitas dan posisi jaringan. Siapa yang terhubung, di simpul mana ia berada, dan seberapa besar kontrolnya atas arus informasi menjadi penentu kekuasaan baru. Dengan demikian, dominasi jaringan menciptakan struktur kekuasaan yang tidak selalu terlihat sebagai hierarki, tetapi bekerja melalui arsitektur konektivitas itu sendiri.

Perspektif sosiologi komunikasi, menegaskan bahwa jaringan harus dipahami sebagai struktur material–komunikatif yang membentuk produksi makna, distribusi kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan. Media digital dan politik jaringan tidak dapat dianalisis hanya dari konten atau aktor, tetapi dari logika struktural jaringan yang mengatur visibilitas, akses, dan pengaruh. Di sinilah kontribusi utama Castells: menunjukkan bahwa untuk memahami masyarakat modern, kita harus memahami mengapa jaringan menjadi bentuk organisasi sosial yang paling menentukan zaman ini.

Salah satu kontribusi teoretis terpenting Castells adalah konsep *space of flows*, yaitu ruang sosial yang dibentuk oleh aliran informasi dan komunikasi, bukan oleh kedekatan fisik. Dalam masyarakat jaringan, keputusan ekonomi, politik, dan budaya diambil dalam ruang arus yang melampaui batas negara dan lokalitas.

Konsep ini menandai pergeseran mendasar dalam sosiologi komunikasi: komunikasi tidak lagi dipahami sebagai interaksi dalam ruang sosial yang tetap, tetapi sebagai proses simultan lintas ruang dan waktu. Logika jaringan, dengan demikian, mengubah fondasi pengalaman sosial modern—dari "di mana kita berada" menjadi "dalam jaringan apa kita terhubung".

Pernyataan bahwa konsep masyarakat jaringan menandai pergeseran mendasar dalam sosiologi komunikasi menegaskan perubahan ontologis dalam cara komunikasi dipahami. Dalam paradigma klasik, komunikasi dianalisis sebagai interaksi yang

terjadi dalam ruang sosial yang relatif stabil—ruang tatap muka, institusi, komunitas teritorial, atau media nasional. Ruang dan waktu dipahami sebagai kerangka eksternal yang membatasi dan mengatur komunikasi. Castells menunjukkan bahwa kerangka ini tidak lagi memadai untuk menjelaskan dinamika komunikasi modern (Castells, 1996).

Pada masyarakat jaringan, komunikasi beroperasi sebagai proses simultan lintas ruang dan waktu. Teknologi digital memungkinkan interaksi terjadi secara real-time antara aktor yang tersebar secara geografis, melampaui batas negara, zona waktu, dan institusi. Komunikasi tidak lagi mengikuti urutan linear atau logika kedekatan fisik, tetapi bergerak dalam arus (*flows*) yang sinkron dan berlapis. Dengan demikian, ruang sosial komunikasi bukan lagi ruang tempat (*space of places*), melainkan ruang arus (*space of flows*)—konsep kunci Castells yang mengubah fondasi analisis sosiologis.

Implikasi dari pergeseran ini sangat signifikan. Ketika komunikasi tidak lagi terikat pada lokasi tetap, pengalaman sosial individu pun direstrukturisasi. Identitas, relasi sosial, dan partisipasi politik semakin ditentukan oleh posisi dalam jaringan, bukan oleh keanggotaan lokal atau kedekatan fisik. Pertanyaan sosial yang sebelumnya mendasar—"di mana kita berada?"—kehilangan daya jelaskan, dan digantikan oleh pertanyaan baru: "dalam jaringan apa kita terhubung, dan di simpul mana kita berada?". Dengan kata lain, keberadaan sosial menjadi relasional dan konektif, bukan teritorial.

Perubahan ini juga menggeser fokus sosiologi komunikasi dari interaksi antarindividu menuju arsitektur jaringan komunikasi. Analisis tidak lagi cukup berhenti pada aktor dan pesan, tetapi harus menelusuri: bagaimana jaringan dibangun dan diprogram, simpul mana yang memiliki visibilitas dan pengaruh, arus informasi mana yang dipercepat atau diperlambat, dan siapa yang dikecualikan dari konektivitas.

Logika jaringan memperkenalkan dimensi struktural baru dalam komunikasi: kekuasaan bekerja melalui konektivitas, kecepatan, dan posisi dalam arus informasi, bukan semata melalui otoritas formal atau kontrol terpusat.

Lebih jauh, pergeseran dari "di mana kita berada" ke "dalam jaringan apa kita terhubung" juga mengubah pengalaman waktu sosial. Waktu tidak lagi dipahami sebagai urutan kronologis yang seragam, melainkan sebagai waktu jaringan—terfragmentasi, dipercepat, dan bersifat simultan. Komunikasi berlangsung dalam kondisi *timeless time*, di mana peristiwa global, lokal, masa lalu, dan masa kini hadir bersamaan dalam satu ruang komunikasi. Hal ini berdampak pada persepsi urgensi, perhatian, dan emosi kolektif dalam masyarakat modern.

Namun, perubahan ini tidak bersifat netral atau merata. Logika jaringan menciptakan ketimpangan konektivitas: mereka yang berada di simpul strategis jaringan menikmati akses informasi, pengaruh, dan mobilitas simbolik yang tinggi, sementara mereka yang terputus atau berada di pinggiran jaringan mengalami eksklusi sosial baru. Eksklusi ini sering kali tidak tampak sebagai penindasan langsung, melainkan sebagai ketidakhadiran dalam arus komunikasi yang menentukan keputusan dan makna sosial.

Perspektif sosiologi komunikasi, alenia ini menegaskan bahwa komunikasi modern harus dipahami sebagai fenomena struktural lintas ruang dan waktu yang membentuk ulang relasi kekuasaan, identitas, dan partisipasi sosial. Logika jaringan tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi mengubah kondisi eksistensial pengalaman sosial itu sendiri. Oleh karena itu, analisis komunikasi kontemporer tidak dapat dilepaskan dari studi tentang jaringan, arus informasi, dan posisi aktor di dalamnya.

Pergeseran ini menandai transformasi fundamental: masyarakat modern tidak lagi terutama ditentukan oleh tempat, tetapi oleh konektivitas. Siapa kita, apa yang kita ketahui, dan sejauh mana kita dapat memengaruhi dunia sosial semakin

ditentukan oleh jaringan komunikasi yang kita masuki—sebuah kondisi yang menempatkan komunikasi sebagai struktur dasar kehidupan sosial modern.

Di masyarakat jaringan, kekuasaan tidak terutama terletak pada otoritas formal, tetapi pada posisi dalam jaringan. Castells menegaskan bahwa kekuasaan modern adalah kekuasaan untuk: memprogram jaringan (menentukan tujuan dan logika operasional), menghubungkan atau mengecualikan aktor dari jaringan, mengontrol arus informasi yang menentukan makna dan keputusan (Castells, 2009).

Logika jaringan menghasilkan bentuk kekuasaan baru yang bersifat struktural dan komunikatif, bukan koersif. Mereka yang berada di luar jaringan utama mengalami bentuk baru eksklusi sosial—bukan melalui larangan langsung, tetapi melalui ketakterhubungan (*disconnectivity*).

Bidang komunikasi, logika jaringan menjelaskan pergeseran dari media massa terpusat menuju komunikasi jaringan yang terdistribusi. Castells menyebut fenomena ini sebagai *mass self-communication*, yakni komunikasi yang: diproduksi secara individual atau kolektif, disebarkan melalui jaringan digital global, dan dikonsumsi secara selektif oleh audiens (Castells, 2009).

Namun, logika jaringan tidak otomatis demokratis. Struktur jaringan tetap memiliki ketimpangan internal, di mana simpul tertentu (platform besar, algoritma, influencer) memiliki daya kendali yang jauh lebih besar terhadap arus komunikasi. Dengan demikian, logika jaringan menghasilkan paradoks komunikasi modern: keterbukaan teknis berdampingan dengan konsentrasi kekuasaan. Logika jaringan juga memengaruhi pembentukan identitas. Identitas kolektif tidak lagi terutama dibangun melalui institusi tradisional, tetapi melalui komunikasi jaringan yang bersifat horizontal dan simbolik. Castells menunjukkan bahwa gerakan sosial kontemporer memanfaatkan logika jaringan untuk membangun solidaritas dan perlawanan.

Identitas dalam jaringan juga bersifat rapuh dan terfragmentasi, karena bergantung pada visibilitas dan dinamika arus komunikasi. Pada aspek ini, logika jaringan membentuk medan baru bagi politik identitas dan konflik simbolik.

Meskipun berpengaruh, konsep logika jaringan menuai kritik: Tekno-determinisme: kecenderungan menganggap teknologi sebagai faktor utama perubahan sosial. Kurangnya dimensi normatif: tidak menyediakan kriteria etis tentang bagaimana jaringan seharusnya diatur. Minim analisis kelas: ketimpangan ekonomi global kurang dieksplorasi secara mendalam. Namun, kritik ini tidak menghapus nilai analitis logika jaringan sebagai kerangka struktural untuk memahami masyarakat modern.

Logika jaringan dalam masyarakat modern menandai pergeseran fundamental cara masyarakat diorganisasikan dan dikomunikasikan. Jaringan menjadi struktur dominan yang mengatur arus informasi, kekuasaan, dan makna. Pada aspek sosiologi komunikasi, logika jaringan memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap media digital, kekuasaan algoritmik, dan politik informasi. Castells, melalui konsep ini, menyediakan fondasi teoretis yang tak terhindarkan bagi pemahaman masyarakat modern berbasis komunikasi.

B. Media Digital dan Transformasi Komunikasi

Perspektif Manuel Castells, media digital bukan sekadar medium komunikasi baru, melainkan infrastruktur sosial yang mereorganisasi cara masyarakat berkomunikasi, berkuasa, dan membentuk makna. Media digital—internet, media sosial, platform algoritmik—menjadi tulang punggung masyarakat jaringan (*network society*), di mana komunikasi berlangsung secara real-time, lintas batas, dan terdesentralisasi (Castells, 1996; 2009).

Transformasi ini bersifat struktural, bukan sekadar teknologis. Media digital mengubah logika produksi, distribusi, dan konsumsi komunikasi, sekaligus menggeser relasi antara

komunikator, audiens, dan institusi media. Pernyataan bahwa transformasi komunikasi akibat media digital bersifat struktural, bukan sekadar teknologis menegaskan bahwa perubahan yang terjadi tidak dapat direduksi pada inovasi perangkat, platform, atau aplikasi semata. Media digital tidak hanya memperkenalkan alat baru, tetapi mengubah logika dasar bagaimana komunikasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, serta bagaimana relasi kuasa di antara komunikator, audiens, dan institusi media disusun ulang (Castells, 2009).

Pertama, dari sisi produksi komunikasi, media digital mengakhiri monopoli institusi media tradisional atas produksi pesan publik. Dalam ekosistem digital, individu dan kelompok non-institusional dapat memproduksi konten yang berpotensi menjangkau audiens global—fenomena yang oleh Castells disebut *mass self-communication*. Namun, pergeseran ini tidak berarti produksi komunikasi menjadi sepenuhnya egaliter. Produksi konten kini tunduk pada logika platform dan algoritma, yang menentukan visibilitas, jangkauan, dan relevansi pesan. Dengan demikian, kekuasaan berpindah dari redaksi media ke arsitektur teknologis dan ekonomi platform digital.

Kedua, dalam aspek distribusi, media digital menggantikan logika distribusi linier (one-to-many) dengan logika jaringan (many-to-many). Distribusi pesan tidak lagi dikendalikan oleh jadwal siaran atau gatekeeper tunggal, melainkan oleh mekanisme berbagi, rekomendasi algoritmik, dan dinamika viralitas. Ini menciptakan percepatan arus komunikasi sekaligus fragmentasi ruang publik. Distribusi menjadi lebih cepat dan luas, tetapi juga lebih tidak terkontrol, terpolarisasi, dan rentan terhadap disinformasi. Dengan kata lain, efisiensi distribusi meningkat, sementara kualitas deliberatif komunikasi publik justru terancam.

Ketiga, dalam hal konsumsi komunikasi, media digital menggeser audiens dari posisi penerima pasif menjadi aktor aktif yang memilih, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang

pesan. Konsumsi komunikasi menjadi bersifat personal, berbasis preferensi, dan terkurasi algoritma. Namun, personalisasi ini menciptakan paradoks: kebebasan memilih berjalan seiring dengan penyempitan horizon informasi melalui *filter bubbles* dan *echo chambers*. Audiens tampak berdaulat, tetapi sebenarnya berada dalam relasi ketergantungan struktural pada sistem rekomendasi platform.

Transformasi struktural ini juga menggeser relasi antara komunikator, audiens, dan institusi media. Batas-batas yang sebelumnya jelas menjadi kabur: komunikator sekaligus audiens, audiens sekaligus distributor, dan institusi media bersaing dengan individu, influencer, serta aktor non-jurnalistik. Namun, kaburnya batas ini tidak menghapus kekuasaan institusional; ia justru mengonfigurasikan ulang kekuasaan. Institusi media kehilangan kontrol penuh atas agenda, tetapi platform digital dan aktor dengan modal konektivitas tinggi memperoleh posisi dominan dalam jaringan komunikasi.

Perspektif sosiologi komunikasi, transformasi ini menunjukkan bahwa media digital harus dipahami sebagai struktur sosial baru, bukan sekadar medium teknis. Media digital membentuk: pola visibilitas dan invisibilitas, hierarki atensi, logika legitimasi wacana serta mekanisme inklusi dan eksklusi komunikatif. Perubahan relasi komunikasi tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan implikasi kekuasaan.

Lebih jauh, transformasi struktural ini berdampak pada ruang publik dan demokrasi. Media digital membuka peluang partisipasi luas, tetapi sekaligus memperkuat komunikasi strategis berbasis emosi, citra, dan manipulasi data. Istilah Habermas, ruang publik digital sering kali lebih didominasi oleh tindakan strategis daripada tindakan komunikatif. Dalam istilah Bourdieu, media digital menciptakan arena simbolik baru dengan modal dan hierarki yang berbeda, tetapi tetap timpang.

Media digital tidak sekadar mempercepat komunikasi, tetapi mengubah struktur sosial komunikasi itu sendiri. Produksi, distribusi, dan konsumsi komunikasi kini diatur oleh logika jaringan dan platform, yang menggeser pusat kekuasaan,

membentuk ulang relasi sosial, dan menciptakan tantangan baru bagi legitimasi, etika, dan demokrasi komunikasi. Memahami media digital berarti memahami bagaimana struktur komunikasi modern direorganisasi secara mendasar di era jaringan.

Salah satu kontribusi konseptual terpenting Castells adalah konsep *mass self-communication*. Berbeda dari media massa klasik yang terpusat dan hierarkis, komunikasi digital memungkinkan individu dan kelompok: memproduksi pesan secara mandiri, mendistribusikannya secara global, dan menentukan sendiri audiensnya (Castells, 2009).

Transformasi ini menggeser posisi kekuasaan simbolik dalam komunikasi. Individu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada institusi media arus utama untuk menyuarakan gagasan. Namun, kebebasan ini bersifat ambivalen: meskipun produksi pesan menjadi lebih demokratis, distribusi dan visibilitas tetap dikendalikan oleh logika platform dan algoritma.

Media digital mengaburkan batas antara produsen dan konsumen pesan. Audiens tidak lagi pasif, melainkan aktif sebagai *prosumer*—memproduksi, mengomentari, dan menyebarkan konten. Transformasi ini menantang model komunikasi linear dan memperkenalkan komunikasi jaringan yang bersifat interaktif dan simultan. Namun, interaktivitas ini tidak selalu menghasilkan dialog rasional. Banyak interaksi digital bersifat fragmentaris, emosional, dan reaktif. Dalam istilah Habermas, komunikasi digital sering kali lebih dekat pada tindakan strategis daripada tindakan komunikatif, karena orientasinya pada atensi, viralitas, dan afeksi, bukan pemahaman bersama.

Pada masyarakat jaringan, kekuasaan komunikasi semakin dimediasi oleh algoritma. Platform digital menentukan apa yang terlihat, siapa yang didengar, dan isu apa yang menjadi agenda publik. Castells menegaskan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui pengendalian arus informasi dan simbol, bukan hanya melalui sensor langsung (Castells, 2009).

Media digital tidak menghapus hierarki, tetapi mengonfigurasinya ulang. Aktor dengan posisi strategis—platform besar, influencer, atau institusi dengan sumber daya data—memiliki kapasitas lebih besar untuk membentuk makna publik. Ini menciptakan ketimpangan visibilitas yang menjadi bentuk baru dominasi simbolik.

Media digital memperluas ruang publik dengan membuka akses partisipasi yang lebih luas. Namun, ruang publik digital juga mengalami fragmentasi dan polarisasi. Alih-alih satu ruang diskursus bersama, muncul banyak *publics* dan *counterpublics* yang sering kali terisolasi dalam *echo chambers*.

Kerangka teori Castells, ruang publik digital adalah arena pertarungan narasi. Opini publik dibentuk melalui konflik simbolik yang cepat, emosional, dan sering kali terputus dari proses deliberatif yang mendalam. Transformasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang legitimasi komunikasi Castells menaruh perhatian khusus pada peran media digital dalam gerakan sosial kontemporer. Dalam *Networks of Outrage and Hope* (2012), ia menunjukkan bahwa media digital memungkinkan mobilisasi horizontal, pembentukan identitas kolektif, dan penyebaran emosi politik secara cepat.

Keberhasilan mobilisasi digital tidak selalu berujung pada perubahan struktural. Media digital sangat efektif untuk mengganggu (*disrupt*), tetapi kurang efektif untuk menginstitusionalisasi perubahan. Hal ini menunjukkan batas emansipatoris media digital dalam jangka panjang.

Identitas dalam jaringan bersifat rapuh dan terfragmentasi menegaskan bahwa identitas di era masyarakat jaringan tidak lagi ditopang oleh struktur sosial yang relatif stabil—seperti kelas, komunitas lokal, atau institusi—melainkan oleh arus komunikasi yang berubah cepat, tidak pasti, dan kompetitif. Dalam kerangka Manuel Castells, identitas jaringan dibentuk dan dipelihara melalui visibilitas dalam ruang arus (*space of flows*), bukan melalui keterikatan jangka panjang pada ruang sosial tertentu (Castells, 1997; 2009). Akibatnya, identitas

menjadi sangat bergantung pada keberlanjutan atensi, konektivitas, dan pengakuan simbolik dalam jaringan.

Kerentanan identitas ini bersumber dari fakta bahwa visibilitas jaringan bersifat kontingen. Identitas hanya "ada" sejauh ia terlihat, dibagikan, direspons, dan diakui dalam arus komunikasi. Ketika arus itu bergeser—karena perubahan algoritma, tren, atau perhatian publik—identitas dapat dengan cepat kehilangan relevansi. Tidak seperti identitas institusional yang relatif stabil, identitas jaringan harus terus-menerus direproduksi melalui performa komunikatif. Di sini tampak irisan kuat dengan Goffman: identitas digital menyerupai pertunjukan tanpa jeda back stage, yang selalu rentan gagal ketika kesan tidak lagi dikelola secara efektif.

Fragmentasi identitas juga merupakan konsekuensi langsung dari logika jaringan yang bersifat multi-arena. Individu dan kelompok hadir secara simultan dalam berbagai jaringan dengan audiens, norma, dan ekspektasi yang berbeda. Hal ini menciptakan identitas yang terbelah dan kontekstual, bukan identitas tunggal yang koheren. Dalam satu jaringan, subjek dapat tampil sebagai aktivis; di jaringan lain, sebagai profesional; di jaringan lain lagi, sebagai figur populer atau simbol perlawanan. Fragmentasi ini bukan anomali psikologis, melainkan efek struktural dari arsitektur komunikasi jaringan.

Logika jaringan membentuk medan baru bagi politik identitas. Politik identitas tidak lagi hanya beroperasi melalui organisasi formal atau wacana ideologis terpusat, tetapi melalui narasi, simbol, dan afeksi yang bergerak cepat dalam jaringan komunikasi. Identitas kolektif dibangun melalui hashtag, visual, meme, dan cerita personal yang mampu mengaktivasi emosi bersama. Castells menyebut ini sebagai politik berbasis komunikasi jaringan, di mana emosi dan makna simbolik menjadi sumber mobilisasi utama (Castells, 2012).

Namun, medan politik identitas dalam jaringan juga merupakan arena konflik simbolik yang intens. Karena identitas bergantung pada visibilitas, jaringan mendorong kompetisi makna: siapa yang berhak mendefinisikan identitas tertentu,

simbol mana yang dianggap autentik, dan narasi siapa yang lebih sah. Dalam perspektif Bourdieu, konflik ini dapat dibaca sebagai perebutan modal simbolik dalam arena baru, di mana legitimasi tidak ditentukan oleh institusi formal, tetapi oleh distribusi atensi dan pengakuan dalam jaringan. Kekuasaan simbolik tidak hilang; ia berubah bentuk menjadi kekuasaan atas arus komunikasi.

Rapuhnya identitas jaringan juga menjelaskan mengapa konflik simbolik cenderung terpolarisasi dan berulang. Ketika identitas tidak memiliki dasar struktural yang kokoh, ia mudah terancam oleh narasi tandingan. Ancaman ini sering direspons bukan melalui dialog rasional, tetapi melalui eskalasi simbolik—penegasan identitas yang semakin eksklusif, emosional, dan defensif. Dalam kondisi ini, politik identitas cenderung bergerak menjauh dari deliberasi dan mendekati logika antagonistik, di mana pengakuan diri dibangun melalui penolakan terhadap yang lain.

Perspektif sosiologi komunikasi, alenia ini menegaskan bahwa identitas jaringan adalah produk relasional dari arus komunikasi, bukan ekspresi esensial subjek. Ia dibentuk oleh struktur visibilitas, algoritma, dan dinamika perhatian, sehingga selalu berada dalam kondisi tidak stabil dan dipertaruhkan. Logika jaringan, dengan demikian, tidak hanya membuka ruang baru bagi ekspresi identitas, tetapi juga mengintensifkan konflik simbolik karena identitas menjadi semakin bergantung pada pengakuan yang terbatas dan kompet

Transformasi komunikasi oleh media digital membawa implikasi penting: Komunikasi harus dipahami sebagai proses jaringan, bukan sekadar pertukaran pesan. Kekuasaan komunikasi bersifat struktural dan algoritmik, bukan hanya ideologis. Demokratisasi komunikasi bersifat parsial dan kontradiktif. Analisis komunikasi perlu menggabungkan dimensi teknologi, simbolik, dan politik.

Media digital tidak sekadar mempercepat komunikasi, tetapi mengubah struktur sosial komunikasi itu sendiri. Produksi, distribusi, dan konsumsi komunikasi kini diatur oleh

logika jaringan dan platform, yang menggeser pusat kekuasaan, membentuk ulang relasi sosial, dan menciptakan tantangan baru bagi legitimasi, etika, dan demokrasi komunikasi. Memahami media digital berarti memahami bagaimana struktur komunikasi modern direorganisasi secara mendasar di era jaringan.

Media digital telah mentransformasi komunikasi secara mendasar: dari yang terpusat menjadi jaringan, dari yang linear menjadi simultan, dari yang institusional menjadi terfragmentasi. Dalam perspektif Castells, transformasi ini membuka peluang baru bagi ekspresi dan perlawanan, sekaligus menciptakan bentuk kekuasaan baru yang bekerja melalui konektivitas, algoritma, dan visibilitas. Oleh karena itu, media digital harus dipahami bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai struktur sosial yang menentukan arah kekuasaan dan makna dalam masyarakat modern.

C. Kekuasaan dalam Arus Informasi Global

Analisis Manuel Castells, globalisasi kontemporer ditandai oleh pergeseran mendasar dalam basis kekuasaan: kekuasaan tidak lagi terutama berakar pada kontrol teritorial atau institusional, melainkan pada penguasaan arus informasi global (*flows of information*) (Castells, 1996; 2009). Arus ini mencakup informasi ekonomi, politik, simbolik, dan kultural yang bergerak secara real-time melalui jaringan digital lintas negara.

Kekuasaan tidak lagi bersifat statis dan terlokalisasi, tetapi bersifat relasional dan dinamis, tergantung pada posisi aktor dalam jaringan global komunikasi. Siapa yang mampu mengendalikan, memprogram, atau memodulasi arus informasi memiliki keunggulan struktural dalam membentuk keputusan, opini publik, dan legitimasi sosial.

Kekuasaan tidak lagi bersifat statis dan terlokalisasi, melainkan relasional dan dinamis menandai pergeseran ontologis dalam pemahaman kekuasaan di era masyarakat jaringan. Dalam kerangka Castells, kekuasaan tidak dapat lagi

dipahami sebagai sesuatu yang "dimiliki" secara tetap oleh aktor tertentu—seperti negara, kelas, atau institusi—melainkan sebagai kapasitas yang terus-menerus diproduksi dan dipertahankan melalui relasi dalam jaringan komunikasi global (Castells, 2009). Kekuasaan bersifat relasional karena hanya bermakna dalam hubungan antar-aktor, dan bersifat dinamis karena posisi dalam jaringan selalu dapat berubah seiring perubahan arus informasi.

Posisi aktor dalam jaringan global komunikasi menjadi variabel kunci. Aktor yang berada di simpul strategis—misalnya platform digital, institusi media global, negara dengan infrastruktur informasi kuat, atau elite jaringan transnasional—memiliki kemampuan lebih besar untuk memengaruhi arus informasi. Namun, keunggulan ini tidak dijamin secara permanen,Pergeseran konseptual sangat mendasar dalam memahami kekuasaan di era masyarakat jaringan. Kekuasaan tidak lagi dapat dipahami sebagai entitas statis dan terlokalisasi—misalnya semata-mata melekat pada negara, institusi, atau elite tertentu—melainkan sebagai relasi dinamis yang terus-menerus diproduksi dan dinegosiasikan dalam jaringan global komunikasi. Dalam kerangka Castells, kekuasaan bukan "sesuatu yang dimiliki", melainkan kapasitas untuk memengaruhi proses sosial melalui posisi strategis dalam jaringan (Castells, 2009).

Sifat relasional kekuasaan berarti bahwa kekuasaan hanya bermakna dalam hubungannya dengan aktor lain. Aktor menjadi berkuasa bukan karena status formal semata, tetapi karena relasinya dengan simpul-simpul lain dalam jaringan komunikasi. Negara, korporasi, media, dan individu hanya efektif sejauh mereka terhubung dan diakui dalam jaringan yang relevan. Ketika koneksi melemah atau terputus, kapasitas kekuasaan pun ikut berkurang. Dengan demikian, kekuasaan selalu bergantung pada kontinuitas konektivitas, bukan pada otoritas yang mapan.

Sifat dinamis kekuasaan menunjukkan bahwa posisi aktor dalam jaringan tidak pernah sepenuhnya stabil. Jaringan komunikasi global bersifat fleksibel dan adaptif; simpul-simpul dapat naik atau turun pengaruhnya seiring perubahan teknologi, algoritma, krisis politik, atau dinamika perhatian publik. Kekuasaan, karenanya, harus dipelihara dan direproduksi secara terus-menerus melalui pengelolaan arus informasi. Ini menjelaskan mengapa aktor-aktor berkuasa di era jaringan sangat bergantung pada strategi komunikasi, manajemen narasi, dan kontrol visibilitas.

Aktor yang mampu mengendalikan, memprogram, atau memodulasi arus informasi memiliki keunggulan struktural mengacu langsung pada konsep *network-making power* Castells—bentuk kekuasaan paling strategis dalam masyarakat jaringan. Mengendalikan arus informasi tidak selalu berarti sensor langsung atau larangan eksplisit. Lebih sering, kekuasaan bekerja melalui: penentuan standar dan protokol komunikasi, pengaturan algoritmik visibilitas, pembingkaian narasi dominan, serta prioritisasi isu dan aktor tertentu. Kekuasaan modern bekerja melalui pengaturan kondisi kemungkinan komunikasi, bukan melalui perintah terbuka.

Keunggulan struktural ini berdampak langsung pada pembentukan keputusan. Dalam sistem sosial yang kompleks dan cepat, keputusan sering kali dibuat berdasarkan informasi yang tersedia, terlihat, dan dianggap relevan. Aktor yang mengendalikan arus informasi memiliki kapasitas untuk mendefinisikan masalah, membatasi opsi kebijakan, dan menentukan apa yang dipersepsikan sebagai "rasional" atau "mendesak". Dengan demikian, kekuasaan informasi bersifat agenda-setting sekaligus decision-shaping, bahkan sebelum proses formal pengambilan keputusan berlangsung.

Hal opini publik, arus informasi global menjadi medan utama pembentukan persepsi dan emosi kolektif. Aktor yang mampu memodulasi arus komunikasi—melalui media global, platform digital, atau jaringan influencer—dapat membentuk apa yang dianggap sebagai pendapat umum, konsensus, atau

bahkan kepanikan moral. Opini publik tidak lagi dibentuk terutama melalui persuasi tatap muka atau debat institusional, tetapi melalui dinamika viralitas, resonansi emosional, dan pengulangan narasi dalam jaringan. Kekuasaan atas opini publik, karenanya, adalah kekuasaan atas ritme dan arah arus informasi.

Keunggulan struktural dalam jaringan komunikasi juga menentukan legitimasi sosial. Di era masyarakat jaringan, legitimasi tidak hanya berasal dari legalitas formal atau kinerja material, tetapi dari penerimaan simbolik yang dibentuk dalam ruang komunikasi global. Aktor yang mampu mempertahankan citra, narasi, dan pengakuan dalam jaringan memperoleh legitimasi yang bersifat transnasional dan sering kali melampaui kontrol institusi lokal. Sebaliknya, aktor yang terpinggirkan dari arus informasi mengalami delegitimasi simbolik, meskipun secara formal masih memiliki otoritas.

Analisis ini juga mengungkap sisi problematis dari kekuasaan jaringan. Karena kekuasaan bekerja melalui arus yang kompleks dan terdistribusi, akuntabilitas menjadi kabur. Sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab atas distorsi informasi, manipulasi opini, atau eksklusi komunikatif. Kekuasaan tampak "mengalir" tanpa subjek tunggal, sehingga kritik politik dan regulasi demokratis menghadapi tantangan serius.

Perspektif sosiologi komunikasi, alenia ini menegaskan bahwa memahami kekuasaan kontemporer menuntut pergeseran fokus dari aktor dan institusi ke arsitektur jaringan dan arus komunikasi. Pertanyaan kunci bukan lagi hanya *siapa berkuasa*, tetapi; di jaringan mana kekuasaan beroperasi, bagaimana arus informasi diprogram, dan siapa yang secara struktural diuntungkan atau dirugikan oleh konfigurasi jaringan tersebut.

Tesis utama Castells: kekuasaan di era global adalah kekuasaan atas komunikasi, dan komunikasi adalah medan strategis di mana keputusan, opini publik, dan legitimasi sosial diproduksi secara dinamis. Memahami masyarakat modern

berarti memahami bagaimana jaringan komunikasi global menjadi sumber dominasi sekaligus potensi perlawanan sosial.

Castells menegaskan bahwa dalam masyarakat jaringan, arus (*flows*) menggantikan institusi sebagai unit analisis utama kekuasaan. Negara, korporasi, media, dan aktor politik hanya efektif sejauh mereka terintegrasi dalam arus informasi yang relevan. Kekuasaan tidak lagi berada pada "pusat", tetapi pada simpul strategis (*nodes*) yang menghubungkan berbagai jaringan global. Arus informasi berfungsi sebagai; mekanisme koordinasi global, alat pembentukan makna dan agenda, instrumen seleksi sosial (siapa terlihat, siapa tidak).

Aktor yang gagal masuk atau dipertahankan dalam arus informasi global mengalami bentuk baru eksklusi, yang oleh Castells dipahami sebagai kekuasaan melalui diskonektivitas, bukan melalui represi langsung. Aktor yang gagal masuk atau dipertahankan dalam arus informasi global mengalami bentuk baru eksklusi menandai perubahan penting dalam cara kekuasaan bekerja di era masyarakat jaringan. Dalam kerangka Manuel Castells, eksklusi sosial tidak lagi terutama berlangsung melalui represi langsung, larangan formal, atau kekerasan koersif, melainkan melalui diskonektivitas (*disconnectivity*)—yakni kondisi ketika individu, kelompok, atau wilayah terputus dari jaringan komunikasi dan informasi yang menentukan pengambilan keputusan dan produksi makna (Castells, 1996; 2009).

Konsep kekuasaan melalui diskonektivitas menunjukkan bahwa kekuasaan modern semakin bersifat negatif dan pasif: bukan dengan melarang berbicara, tetapi dengan tidak menghubungkan; bukan dengan membungkam secara eksplisit, tetapi dengan membiarkan aktor tidak hadir dalam arus komunikasi yang relevan. Aktor yang terdiskoneksi tidak selalu disensor atau ditekan, tetapi tidak masuk hitungan dalam proses sosial yang penting. Inilah bentuk eksklusi yang lebih halus, namun justru lebih efektif, karena tidak mudah dikenali sebagai ketidakadilan.

Masyarakat jaringan, kehadiran dalam arus informasi merupakan prasyarat utama partisipasi sosial, ekonomi, dan politik. Aktor yang gagal mempertahankan konektivitas—karena keterbatasan infrastruktur digital, literasi media, bahasa global, posisi algoritmik, atau modal simbolik—kehilangan kapasitas untuk: menyuarakan kepentingannya, memengaruhi agenda publik, membentuk identitas kolektif serta mengakses sumber daya dan peluang. Eksklusi ini tidak bersifat biner (ada/tidak ada), melainkan bertingkat dan relasional, tergantung pada posisi aktor dalam jaringan dan intensitas konektivitasnya.

Keunikan diskonektivitas sebagai mekanisme kekuasaan terletak pada ketiadaan aktor penindas yang jelas. Tidak ada larangan resmi, tidak ada aparat yang menindak, dan tidak ada kebijakan yang secara eksplisit mendiskriminasi. Kekuasaan bekerja melalui arsitektur jaringan itu sendiri—melalui standar teknis, logika algoritmik, dan dinamika atensi. Karena itu, aktor yang terdiskoneksi sering kali menyalahkan dirinya sendiri ("kurang kompeten", "kurang relevan"), bukan struktur sosial yang mengatur konektivitas. Inilah ciri khas dominasi jaringan: eksklusi yang dinaturalisasi.

Perspektif sosiologi komunikasi, diskonektivitas juga berarti invisibilitas simbolik. Aktor yang tidak terhubung ke arus informasi global tidak hanya kehilangan akses komunikasi, tetapi juga kehilangan keberadaan simbolik dalam ruang publik. Isu, pengalaman, dan perspektif mereka tidak menjadi bagian dari narasi dominan, sehingga tidak masuk dalam proses pembentukan opini publik dan legitimasi sosial. Pada aspek ini, eksklusi adalah ketiadaan representasi, bukan pelarangan representasi.

Lebih jauh, kekuasaan melalui diskonektivitas memiliki implikasi serius bagi demokrasi dan keadilan sosial. Jika partisipasi politik dan pengakuan sosial semakin bergantung pada konektivitas jaringan, maka ketimpangan digital dan struktural akan langsung bertransformasi menjadi ketimpangan demokratis. Kelompok yang terdiskoneksi tidak hanya miskin

secara ekonomi, tetapi juga miskin secara komunikatif dan politis. Demokrasi prosedural mungkin tetap berjalan, tetapi tanpa partisipasi substantif dari mereka yang berada di luar arus informasi.

Dialog dengan teori kritis lain, konsep diskonektivitas Castells dapat dipahami sebagai padanan struktural dari kekerasan simbolik Bourdieu dan kolonisasi dunia-kehidupan Habermas. Namun, Castells menambahkan dimensi baru: arsitektur jaringan global sebagai sumber utama eksklusi. Kekuasaan tidak lagi hanya bekerja melalui bahasa, norma, atau sistem, tetapi melalui konektivitas teknologis dan posisi jaringan.

Eksklusi sosial di era global tidak selalu tampak sebagai penindasan, tetapi sebagai ketiadaan hubungan. Kekuasaan melalui diskonektivitas adalah kekuasaan yang tidak berbicara, tidak melarang, dan tidak menghukum—tetapi justru karena itu, sangat sulit dilawan. Memahami masyarakat jaringan berarti memahami bahwa siapa yang tidak terhubung adalah siapa yang tidak berdaya, meskipun tidak pernah secara resmi disingkirkan.

Castells membedakan beberapa bentuk kekuasaan jaringan yang relevan untuk memahami arus informasi global:

1. Networking power
   Kekuasaan untuk memasukkan atau mengecualikan aktor dari jaringan informasi global (misalnya sensor negara, blokade platform).
2. Network power
   Kekuasaan yang berasal dari standar teknis, protokol, dan bahasa dominan jaringan (misalnya dominasi platform Barat, bahasa Inggris sebagai lingua franca digital). Networked power

Kekuasaan aktor dominan di dalam jaringan (korporasi teknologi, negara besar, elite media global). Network-making power. Kekuasaan paling strategis: kemampuan untuk memprogram jaringan dan menentukan tujuan arus informasi (Castells, 2009). Pada arus informasi global, *network-making*

power menjadi bentuk dominasi paling menentukan karena ia mengatur apa yang mengalir, seberapa cepat, dan dengan makna apa.

Arus informasi global saat ini sangat dimediasi oleh platform digital transnasional (Google, Meta, X, TikTok, dll.). Platform ini tidak hanya menyalurkan informasi, tetapi mengatur visibilitas, atensi, dan sirkulasi makna melalui algoritma. Dengan demikian, kekuasaan platform bersifat: tidak terpilih secara demokratis, lintas batas negara, sulit diawasi oleh regulasi nasional.

Perspektif sosiologi komunikasi, platform digital bertindak sebagai aktor geopolitik simbolik, yang mampu memengaruhi opini publik global, dinamika pemilu, konflik internasional, dan politik identitas lintas negara. Kekuasaan mereka terletak pada kontrol arus komunikasi, bukan pada kepemilikan pesan tertentu.

Pada politik global, arus informasi menjadi medan utama konflik dan kompetisi kekuasaan. Perang tidak lagi hanya bersifat militer atau ekonomi, tetapi juga perang informasi dan narasi. Negara dan aktor non-negara bersaing untuk: membingkai peristiwa global, mendefinisikan musuh dan sekutu, membentuk persepsi legitimasi internasional.

Castells menunjukkan bahwa kekuasaan politik modern sangat bergantung pada kemampuan menguasai komunikasi jaringan, karena legitimasi politik di era global ditentukan oleh opini publik yang terbentuk dalam arus informasi global (Castells, 2009). Meskipun arus informasi global sering dipresentasikan sebagai terbuka dan inklusif, pada kenyataannya ia menghasilkan ketimpangan struktural baru. Akses terhadap infrastruktur digital, literasi media, bahasa global, dan posisi jaringan menentukan sejauh mana individu, kelompok, atau negara dapat: menyuarakan kepentingannya, memengaruhi agenda global, mempertahankan identitasnya.

Kelompok yang berada di pinggiran jaringan global mengalami invisibilitas struktural: mereka tidak dibungkam secara langsung, tetapi tidak pernah masuk ke arus informasi

yang menentukan makna global. Analisis kekuasaan dalam arus informasi global membawa implikasi penting: Komunikasi harus dipahami sebagai struktur material–simbolik global, Kekuasaan tidak selalu koersif, tetapi bekerja melalui arus dan visibilitas, Studi komunikasi perlu mengintegrasikan analisis jaringan, teknologi, dan politik global.

Pada masyarakat jaringan, kekuasaan dalam arus informasi global menjadi bentuk dominasi paling menentukan zaman ini. Ia tidak memaksa, tetapi mengalir; tidak melarang, tetapi menyaring; tidak menghukum, tetapi mengecualikan. Manuel Castells menunjukkan bahwa memahami kekuasaan modern berarti memahami siapa yang mengendalikan arus informasi, bagaimana arus itu diprogram, dan siapa yang dibiarkan berada di luar aliran tersebut. Pada aspek ini, sosiologi komunikasi ditantang untuk membaca komunikasi bukan hanya sebagai pesan, tetapi sebagai arsitektur kekuasaan global.

D. Castells dan Sosiologi Komunikasi Digital

Manuel Castells merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sosiologi komunikasi digital karena ia berhasil menjelaskan transformasi komunikasi bukan sekadar sebagai perubahan medium, melainkan sebagai perubahan struktur sosial secara menyeluruh. Berbeda dari pendekatan media studies yang berfokus pada konten atau efek media, Castells memposisikan komunikasi digital sebagai arsitektur sosial baru yang membentuk relasi kekuasaan, identitas, ekonomi, dan politik di tingkat global (Castells, 1996; 2009).

Pada sosiologi komunikasi, Castells berperan sebagai penghubung antara: teori globalisasi, sosiologi teknologi, teori kekuasaan, dan studi komunikasi digital. Dia menunjukkan bahwa komunikasi digital bukan lapisan tambahan dalam masyarakat modern, melainkan fondasi utama masyarakat jaringan (*network society*).

Kontribusi utama Castells adalah menggeser pemahaman komunikasi digital dari alat komunikasi menjadi struktur sosial yang menentukan pola interaksi dan kekuasaan. Dalam

masyarakat jaringan, komunikasi digital: mengorganisasi arus informasi global, membentuk ruang publik terfragmentasi, dan menghubungkan aktor lintas ruang dan waktu secara simultan.

Komunikasi tidak lagi dipahami sebagai interaksi dalam ruang sosial yang stabil, tetapi sebagai proses berbasis arus (*flows*) yang beroperasi dalam *space of flows*, bukan *space of places*. Dengan demikian, sosiologi komunikasi digital harus menganalisis jaringan, simpul, arus, dan konektivitas, bukan hanya pesan dan audiens.

Dalam *Communication Power* (2009), Castells memperkenalkan konsep mass self-communication, yakni bentuk komunikasi digital yang: diproduksi secara mandiri oleh individu atau kelompok, didistribusikan melalui jaringan global, dikonsumsi secara selektif oleh audiens.

Konsep ini sangat penting bagi sosiologi komunikasi digital karena menunjukkan pergeseran relasi komunikator–audiens–media. Produksi makna tidak lagi dimonopoli oleh media massa, tetapi juga tidak sepenuhnya egaliter. Kekuasaan berpindah ke platform, algoritma, dan aktor dengan modal konektivitas tinggi.

Komunikasi digital bersifat ambivalen: emansipatoris, karena membuka ruang ekspresi dan mobilisasi; dominan, karena dikendalikan oleh logika platform dan ekonomi perhatian.

Sosiologi komunikasi digital, Castells menempatkan kekuasaan komunikasi sebagai pusat analisis. Kekuasaan di era digital adalah kekuasaan untuk: mengendalikan arus informasi, membingkai makna dan mengatur visibilitas dalam jaringan (Castells, 2009). Ia membedakan beberapa bentuk kekuasaan jaringan: *networking power* (siapa yang masuk/keluar jaringan), *network power* (standar dan protokol), *networked power* (aktor dominan), *network-making power* (pemrogram jaringan). Bagi sosiologi komunikasi digital, pembagian ini menjelaskan mengapa platform digital menjadi aktor politik utama, meskipun tidak memiliki mandat demokratis.

Castels juga memperluas sosiologi komunikasi digital dengan memasukkan dimensi identitas dan emosi. Dalam *Networks of Outrage and Hope* (2012), ia menunjukkan bahwa komunikasi digital memungkinkan pembentukan: identitas perlawanan, solidaritas emosional, dan mobilisasi politik horizontal. Namun, identitas dalam jaringan bersifat rapuh, terfragmentasi, dan bergantung pada visibilitas. Politik komunikasi digital bukan sekadar politik ide, tetapi politik emosi dan simbol, di mana narasi, citra, dan afeksi memainkan peran sentral. Perspektif Castells, ruang publik digital tidak bersifat tunggal dan deliberatif seperti dalam model Habermas, melainkan: terfragmentasi, berbasis jaringan, dan sarat konflik simbolik.

Ruang publik digital adalah arena pertarungan narasi, bukan ruang konsensus rasional. Namun, justru dalam fragmentasi inilah potensi politik baru muncul—meski selalu dibayangi oleh manipulasi, disinformasi, dan perang informasi. Sosiologi komunikasi digital, Manuel Castells memberikan kontribusi fundamental dengan menunjukkan bahwa komunikasi digital adalah struktur kekuasaan utama masyarakat kontemporer. Ia menggeser fokus kajian komunikasi dari pesan dan media ke jaringan, arus, dan konektivitas. Melalui konsep masyarakat jaringan, mass self-communication, dan kekuasaan komunikasi, Castells menjadikan komunikasi digital sebagai medan strategis dominasi, resistensi, dan transformasi sosial.

E. Profil Intelektual dan Kontribusinya

Manuel Castells Oliván lahir pada 9 Februari 1942 di Hellín, Spanyol, Pada aspek politik otoritarian di bawah rezim Francisco Franco. Masa mudanya ditandai oleh pengalaman hidup dalam represi politik, sensor, dan kontrol ideologis, yang membentuk sensitivitas kritisnya terhadap kekuasaan, informasi, dan komunikasi. Pengalaman ini menjadi fondasi biografis yang penting bagi orientasi intelektual Castells di kemudian hari.

Pada usia muda, Castells terlibat dalam aktivitas oposisi terhadap rezim Franco, yang memaksanya meninggalkan Spanyol dan menetap di Prancis. Di Paris, ia melanjutkan pendidikan tinggi dan berinteraksi dengan tradisi sosiologi Prancis yang kuat, termasuk pemikiran Alain Touraine dan strukturalisme. Perpaduan antara pengalaman politik represif dan lingkungan intelektual kritis ini membentuk Castells sebagai sosiolog yang peka terhadap relasi antara struktur sosial, kekuasaan, dan komunikasi.

Castells menempuh pendidikan sosiologi di Université de Paris (Sorbonne), tempat ia memperoleh gelar doktor pada usia yang relatif muda. Ia kemudian berkarier sebagai akademisi di berbagai universitas terkemuka, termasuk Université de Paris, University of California, Berkeley, dan University of Southern California. Mobilitas akademik lintas negara ini memperkuat perspektif global Castells dalam membaca transformasi sosial.

Secara intelektual, Castells tidak terikat pada satu mazhab teori tertentu. Ia menggabungkan: sosiologi kritis, teori urban, ekonomi politik global, dan studi teknologi informasi. Pendekatan multidisipliner inilah yang memungkinkan Castells merumuskan teori besar tentang masyarakat jaringan.

Kontribusi Castells terhadap sosiologi komunikasi terutama terartikulasikan dalam karya-karya monumentalnya, khususnya trilogi *The Information Age*: *The Rise of the Network Society* (1996). Menguraikan transformasi struktur sosial global menuju masyarakat jaringan, dengan komunikasi dan arus informasi sebagai elemen kunci. *The Power of Identity* (1997), Menganalisis bagaimana identitas kolektif dibentuk dan dipertarungkan melalui komunikasi dalam masyarakat jaringan. *End of Millennium* (2000), Membahas krisis global, transformasi negara, dan konflik sosial Pada aspek kapitalisme informasional.

Karya lanjutan yang sangat penting bagi sosiologi komunikasi meliputi: *Communication Power* (2009), *Networks of Outrage and Hope* (2012). Lewat karya-karya ini, Castells secara eksplisit menempatkan komunikasi sebagai sumber utama kekuasaan dan legitimasi sosial. Konsep sentral Castells adalah

masyarakat jaringan (*network society*), yaitu bentuk masyarakat di mana struktur sosial utama diorganisasikan melalui jaringan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam masyarakat ini: arus informasi (*flows*) menggantikan lokasi geografis sebagai basis kekuasaan, *space of flows* menggantikan *space of places*, waktu sosial menjadi simultan dan terfragmentasi (*timeless time*).

Bagi Castells, komunikasi bukan sekadar proses simbolik, tetapi struktur material yang mengorganisasi kehidupan sosial. Kontribusi Manuel Castells terhadap pengembangan sosiologi komunikasi bersifat mendasar dan berskala global.

DAFTAR PUSTAKA

Castells, M. (1996). *The rise of the network society*. Blackwell.

Castells, M. (1997). *The power of identity*. Blackwell.

Castells, M. (2000). *End of millennium*. Blackwell.

Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.

Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity Press.

Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.

Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text, 25/26*, 56–80.

Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8th ed.). McGraw-Hill.

Van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press.

BAB 9

SHOSHANA ZUBOFF: KOMUNIKASI, DATA, DAN KAPITALISME PENGAWASAN

Dr. Silahuddin Genda, S.IP. M.Si



Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Shoshana_Zuboff

Shoshana Zuboff menempati posisi kunci dalam sosiologi komunikasi digital kritis karena ia berhasil merumuskan satu kerangka konseptual komprehensif untuk memahami transformasi komunikasi menjadi sumber ekstraksi ekonomi dan kontrol sosial. Berbeda dari Castells yang menekankan jaringan dan arus informasi, Zuboff memusatkan analisis pada bagaimana komunikasi dan perilaku manusia dikonversi menjadi data, komoditas, dan instrumen prediksi dalam rezim ekonomi baru yang ia sebut kapitalisme pengawasan (*surveillance capitalism*) (Zuboff, 2019).

Kontribusi Zuboff bersifat diagnostik dan normatif: ia tidak hanya menjelaskan bagaimana sistem bekerja, tetapi juga mengungkap implikasi etis, politik, dan epistemologis dari dominasi data dalam kehidupan sosial modern. Pada satu sisi,

Zuboff melakukan diagnosis struktural terhadap cara kerja kapitalisme pengawasan; pada sisi lain, ia secara eksplisit mengajukan kritik normatif terhadap konsekuensi sistem tersebut bagi otonomi manusia, demokrasi, dan pengetahuan sosial. Kombinasi ini menjadikan pemikirannya tidak sekadar deskriptif, tetapi intervensi teoretis dan politis.

Secara diagnostik, Zuboff memetakan secara rinci mekanisme internal kapitalisme pengawasan: bagaimana pengalaman komunikasi sehari-hari diekstraksi menjadi data perilaku, bagaimana data tersebut diproses menjadi prediksi, dan bagaimana prediksi dijual dalam pasar masa depan perilaku. Diagnosis ini bersifat struktural karena ia tidak berhenti pada praktik individual atau kegagalan etika perusahaan tertentu, tetapi menunjukkan adanya rezim ekonomi baru dengan logika akumulasi yang sistemik dan berjangka panjang. Pada aspek sosiologi komunikasi, diagnosis ini menggeser fokus dari konten dan efek komunikasi ke arsitektur ekonomi-politik komunikasi itu sendiri.

Keunikan Zuboff justru terletak pada dimensi normatif yang menyertainya. Ia tidak menganggap dominasi data sebagai keniscayaan teknologi, melainkan sebagai penyimpangan historis dari prinsip-prinsip dasar modernitas—kebebasan individu, otonomi rasional, dan hak atas masa depan. Dengan demikian, kritik Zuboff bukan nostalgia prateknologi, tetapi kritik imanen: ia menilai kapitalisme pengawasan berdasarkan janji-janji normatif modernitas itu sendiri, yang kini dikhianati oleh praktik ekstraksi data tanpa persetujuan bermakna.

Dimensi etis dari kritik Zuboff tampak dalam penolakannya terhadap normalisasi pengawasan. Ia menunjukkan bahwa ketika komunikasi direduksi menjadi data perilaku, relasi sosial kehilangan dimensi moralnya. Subjek komunikasi tidak lagi diperlakukan sebagai agen otonom, melainkan sebagai objek pengamatan dan manipulasi. Etika komunikasi—yang dalam tradisi Habermas bertumpu pada simetri, pengakuan, dan dialog—digantikan oleh relasi observasi sepihak yang tidak memberi ruang

bagi persetujuan reflektif. Dengan kata lain, dominasi data menghasilkan ketimpangan etis struktural.

Secara politis, Zuboff memperlihatkan bahwa kapitalisme pengawasan mengancam fondasi demokrasi liberal. Kekuasaan tidak lagi bekerja terutama melalui ideologi atau hukum, tetapi melalui pengondisian perilaku pra-sadar. Opini publik, preferensi politik, dan tindakan sosial dibentuk sebelum subjek sempat merefleksikannya. Pada aspek ini, proses demokratis—yang mensyaratkan warga sebagai subjek rasional yang mampu mempertimbangkan argumen—terdegradasi menjadi manajemen populasi berbasis data. Kritik ini menempatkan Zuboff sejajar dengan teori kekuasaan, tetapi dengan fokus khas pada kontrol prediktif.

Sementara itu, implikasi epistemologis dari dominasi data menjadi salah satu kontribusi paling radikal Zuboff bagi sosiologi komunikasi. Ia menunjukkan bahwa kapitalisme pengawasan menciptakan monopoli pengetahuan tentang perilaku manusia, di mana pengetahuan diproduksi secara tertutup, opak, dan asimetris. Pengetahuan tidak lagi dihasilkan melalui komunikasi intersubjektif atau diskursus publik, melainkan melalui pemodelan statistik yang tidak dapat diakses atau diperdebatkan oleh subjek yang dimodelkan. Ini berarti krisis epistemik: pengetahuan tentang masyarakat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri.

Pada perspektif ini, dominasi data bukan sekadar persoalan privasi, tetapi persoalan siapa yang berhak mengetahui dan menafsirkan kehidupan sosial. Zuboff memperlihatkan bahwa komunikasi kehilangan fungsi epistemologisnya sebagai sarana pemahaman bersama, dan digantikan oleh epistemologi mesin yang tidak memerlukan pengakuan atau pemaknaan bersama. Bagi sosiologi komunikasi, ini merupakan tantangan fundamental terhadap asumsi bahwa komunikasi adalah basis produksi pengetahuan sosial.

Kerangka pikir Zuboff, komunikasi digital tidak lagi dipahami terutama sebagai pertukaran makna antar-subjek, melainkan sebagai sumber bahan mentah perilaku (*behavioral raw material*). Setiap tindakan komunikatif—klik, pencarian, unggahan,

lokasi, jeda perhatian—direkam, dianalisis, dan diekstraksi sebagai data.

Terjadi pergeseran dari pengetahuan intersubjektif ke pengetahuan prediktif. Dalam tradisi sosiologi komunikasi klasik, pengetahuan tentang masyarakat dihasilkan melalui dialog, interpretasi, dan pemahaman bersama. Dalam kerangka Zuboff, pengetahuan diproduksi melalui pemodelan algoritmik yang tidak membutuhkan pemahaman makna, melainkan hanya membutuhkan volume data dan kapasitas komputasi. Pengetahuan tentang manusia tidak lagi lahir dari komunikasi dengan manusia, tetapi dari observasi sepihak terhadap perilaku manusia.

Kondisi ini menciptakan asimetri epistemik yang ekstrem. Subjek komunikasi menjadi objek pengetahuan, sementara proses produksi pengetahuan berlangsung secara tertutup, opak, dan tidak dapat dipersoalkan secara diskursif. Berbeda dengan komunikasi dialogis—di mana klaim dapat diuji, ditolak, atau direvisi—pengetahuan datafikatif bersifat non-diskursif dan non-negosiatif. Dalam perspektif sosiologi komunikasi, ini berarti runtuhnya prasyarat komunikasi etis, yakni simetri pengetahuan dan kemungkinan saling mempertanyakan klaim.

Logika ekonomi-politik di balik ekstraksi komunikasi. Ketika setiap tindakan komunikatif direkam dan dianalisis, komunikasi menjadi ladang eksploitasi ekonomi. Data perilaku tidak dikumpulkan untuk meningkatkan kualitas komunikasi atau pemahaman sosial, melainkan untuk menghasilkan surplus prediksi yang dapat dijual di pasar masa depan perilaku. Dengan demikian, komunikasi beralih fungsi dari medium relasi sosial menjadi infrastruktur akumulasi kapital. Implikasi politis dari proses ini sangat signifikan. Ketika komunikasi diperlakukan sebagai bahan mentah perilaku, subjek kehilangan kontrol atas: bagaimana tindakannya dimaknai, bagaimana preferensinya dibentuk, dan bagaimana masa depannya diprediksi.

Zuboff menyebut kondisi ini sebagai ancaman terhadap "hak atas masa depan" (*the right to the future tense*), yakni kapasitas manusia untuk bertindak secara otonom dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Komunikasi tidak lagi menjadi ruang kebebasan

dan refleksi, tetapi sarana pengondisian perilaku pra-sadar melalui rekomendasi, notifikasi, dan desain antarmuka.

Kapitalisme pengawasan tidak sekadar mengawasi komunikasi, tetapi mengubah komunikasi itu sendiri menjadi sumber daya ekonomi dan alat kontrol sosial. Komunikasi kehilangan statusnya sebagai praktik sosial otonom dan berubah menjadi input sistem prediksi dan modifikasi perilaku. Inilah kontribusi paling radikal Zuboff bagi sosiologi komunikasi—ia memaksa kita untuk mempertanyakan kembali apakah komunikasi digital hari ini masih dapat dipahami sebagai komunikasi dalam pengertian sosiologis klasik, atau telah bertransformasi menjadi mekanisme ekstraksi yang mendahului makna dan subjek.

Perubahan ini menandai pergeseran mendasar: dari komunikasi sebagai relasi sosial, menjadi komunikasi sebagai sumber ekstraksi ekonomi. Data yang dihasilkan bukan sekadar "jejak digital", tetapi bahan baku untuk produksi pengetahuan tentang perilaku manusia, yang kemudian dimonetisasi dalam bentuk prediksi dan intervensi.

Zuboff mendefinisikan kapitalisme pengawasan sebagai rezim ekonomi yang berorientasi pada: Ekstraksi data perilaku secara masif, Produksi prediksi perilaku melalui algoritma dan AI, Penjualan prediksi tersebut di pasar perilaku masa depan (*behavioral futures markets*). Pada sistem ini, nilai ekonomi tidak lagi berasal dari produksi barang atau jasa semata, tetapi dari kemampuan memprediksi dan memodifikasi perilaku manusia. Komunikasi—yang sebelumnya menjadi fondasi demokrasi dan otonomi—berubah menjadi input sistem pengawasan.

Salah satu konsep paling penting dalam analisis Zuboff adalah kekuasaan instrumentarian (*instrumentarian power*), yakni bentuk kekuasaan yang tidak bekerja melalui ideologi, kekerasan, atau hukum secara langsung, tetapi melalui arsitektur digital yang mengarahkan perilaku secara halus dan otomatis. Pada aspek komunikasi: pengguna tidak diperintah atau dipaksa, tetapi dibentuk melalui desain pilihan, notifikasi, rekomendasi, dan penguatan perilaku. Kontrol sosial tidak lagi bersifat represif, tetapi

pre-emptive dan prediktif. Sistem berupaya mencegah deviasi sebelum terjadi, bukan menghukum setelahnya.

Zuboff juga mengajukan kritik epistemologis yang tajam: kapitalisme pengawasan menciptakan monopoli pengetahuan tentang manusia. Perusahaan platform mengetahui lebih banyak tentang individu daripada individu itu sendiri, sementara proses pengumpulan dan analisis data berlangsung secara: opak, asimetris, dan tidak dapat dinegosiasikan.

Pada sosiologi komunikasi, kondisi ini berarti hilangnya simetri pengetahuan yang menjadi prasyarat komunikasi etis dan demokratis. Relasi komunikatif berubah menjadi relasi observasi sepihak, di mana pengguna menjadi objek pengetahuan, bukan subjek dialog. Implikasi terdalam kapitalisme pengawasan terletak pada erosi otonomi komunikatif. Ketika komunikasi dimediasi oleh sistem yang dirancang untuk memaksimalkan prediktabilitas dan keterlibatan, maka: pilihan komunikatif tidak lagi sepenuhnya bebas, preferensi dibentuk secara sistematis, dan identitas dikondisikan oleh logika data. Istilah Zuboff, ini merupakan ancaman terhadap "hak atas masa depan" (*the right to the future tense*), yakni kapasitas manusia untuk bertindak secara tidak terduga dan otonom.

Komunikasi digital telah bertransformasi jadi infrastruktur utama kapitalisme pengawasan. Data menggantikan dialog, prediksi menggantikan pemahaman, dan kontrol halus menggantikan paksaan terbuka. Bagi sosiologi komunikasi, pemikiran Zuboff sangat krusial karena ia mengingatkan bahwa masa depan komunikasi adalah medan politik dan etis, bukan sekadar persoalan teknologi. Memahami komunikasi hari ini berarti memahami siapa yang menguasai data, bagaimana perilaku dimodelkan, dan sejauh mana otonomi manusia masih mungkin dipertahankan.

A. Dari Komunikasi ke Data Perilaku

Pergeseran paradigmatik paling radikal dalam sejarah sosiologi komunikasi. Jika dalam tradisi klasik—dari Mead hingga Habermas—komunikasi dipahami sebagai proses

pertukaran makna antar-subjek, maka dalam rezim kapitalisme pengawasan komunikasi direkonseptualisasi sebagai sumber data perilaku. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan fungsi, tetapi perubahan ontologis atas apa yang dianggap sebagai "komunikasi" itu sendiri (Zuboff, 2019).

Kerangka baru ini, komunikasi tidak lagi dinilai dari makna yang diproduksi, melainkan dari nilai prediktif yang dapat diekstraksi. Makna menjadi sekunder; yang utama adalah perilaku terukur. Zuboff menunjukkan bahwa setiap tindakan komunikatif di ruang digital—klik, pencarian, unggahan, scroll, jeda perhatian, lokasi—mengalami proses datafikasi. Tindakan tersebut direkam sebagai: jejak digital, sinyal perilaku, dan unit data yang dapat dikombinasikan secara masif.

Setiap tindakan komunikatif di ruang digital mengalami proses datafikasi menandai perubahan radikal dalam status ontologis tindakan komunikasi itu sendiri. Dalam kerangka Zuboff, tindakan seperti klik, pencarian, unggahan, *scroll*, jeda perhatian, hingga lokasi tidak lagi dipahami sebagai praktik bermakna yang terikat pada aspek sosial dan niat subjek, melainkan sebagai peristiwa teknis yang dapat dipecah, diukur, dan dikalkulasi. Datafikasi di sini berarti proses sistematis yang mengonversi pengalaman hidup dan komunikasi manusia menjadi format data yang dapat diproses secara komputasional (Zuboff, 2019).

Pembagian Zuboff atas hasil datafikasi menjadi jejak digital, sinyal perilaku, dan unit data yang dapat dikombinasikan menunjukkan bahwa yang direkam bukan hanya *apa* yang dilakukan individu, tetapi *bagaimana*, *kapan*, *seberapa lama*, dan *dalam pola apa* tindakan itu terjadi. Jejak digital merekam keberadaan tindakan (bahwa sesuatu terjadi), sinyal perilaku mengekstraksi pola dan kecenderungan (apa yang mungkin terjadi berikutnya), sementara unit data memungkinkan penggabungan lintas aspek—media sosial, belanja daring, lokasi fisik—ke dalam profil perilaku terpadu. Dengan demikian, tindakan komunikasi kehilangan sifatnya

sebagai peristiwa diskret dan menjadi bagian dari rantai kalkulasi perilaku yang berkelanjutan.

Pergeseran epistemologis yang sangat signifikan. Pada tradisi sosiologi komunikasi klasik, pemahaman atas tindakan komunikatif menuntut interpretasi makna subjektif (*verstehen*), konteks sosial, dan relasi intersubjektif. Dalam logika datafikasi, makna subjektif tersebut dianggap tidak relevan. Sistem tidak perlu tahu *mengapa* seseorang melakukan sesuatu; cukup mengetahui *pola statistiknya*. Pengetahuan sosial bergeser dari pemahaman makna ke prediksi probabilistik, dari interpretasi ke korelasi. Inilah yang oleh Zuboff disebut sebagai pengetahuan tanpa subjek—pengetahuan tentang manusia yang dihasilkan tanpa dialog dengan manusia itu sendiri.

Proses datafikasi ini menghasilkan asimetri struktural dalam relasi komunikasi. Subjek komunikasi menjadi objek pengamatan permanen, sementara sistem yang mengamati bersifat: tidak terlihat, tidak dapat dipertanyakan secara dialogis, dan tidak tunduk pada mekanisme legitimasi komunikatif. Pada kondisi ini, komunikasi tidak lagi berlangsung dalam relasi timbal balik, melainkan dalam relasi observasional sepihak. Hal ini menandai runtuhnya prasyarat etika komunikasi sebagaimana dirumuskan Habermas—yakni kesetaraan partisipan dan keterbukaan klaim terhadap kritik.

Sudut pandang ekonomi politik, alenia ini juga menegaskan bahwa datafikasi tindakan komunikatif merupakan tahap awal ekstraksi nilai. Jejak digital dan sinyal perilaku bukan tujuan akhir, melainkan bahan mentah untuk produksi nilai ekonomi melalui pemodelan prediktif. Ketika unit-unit data dikombinasikan secara masif, yang dihasilkan bukan sekadar informasi deskriptif, tetapi kapasitas untuk memprediksi dan memodifikasi perilaku masa depan. Dengan kata lain, datafikasi mengubah komunikasi dari aktivitas sosial menjadi input sistem produksi kapitalisme pengawasan.

Implikasi sosiologisnya sangat mendalam. Pertama, tindakan komunikasi kehilangan otonominya: ia tidak lagi berdiri sebagai praktik sosial dengan tujuan internal

(pemahaman, ekspresi, pengakuan), tetapi direduksi menjadi sarana bagi tujuan eksternal sistem. Kedua, subjek komunikasi mengalami reduksi eksistensial: ia dipahami bukan sebagai agen reflektif, melainkan sebagai kumpulan sinyal yang dapat dioptimalkan. Ketiga, ruang komunikasi berubah dari arena makna menjadi infrastruktur pengukuran dan kontrol.

Logika kekuasaan baru yang bekerja sebelum makna diproduksi dan sebelum komunikasi terjadi sebagai komunikasi. Zuboff menunjukkan bahwa dalam kapitalisme pengawasan, komunikasi tidak lagi "dipelintir" setelah terjadi, melainkan sejak awal telah dirancang untuk ditambang sebagai data. Inilah perbedaan kualitatif antara distorsi komunikasi klasik dan kondisi kontemporer: komunikasi direduksi menjadi data sebelum ia sempat menjadi relasi sosial bermakna.

Aspek sosiologi komunikasi, analisis ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan paling mendasar: apakah komunikasi digital hari ini masih dapat disebut komunikasi dalam pengertian sosiologis, ataukah ia telah bertransformasi menjadi mekanisme ekstraksi perilaku yang mendahului makna, dialog, dan subjek? .Tindakan komunikatif dipisahkan dari aspek sosial dan niat subjeknya. Yang penting bukan *mengapa* seseorang berkomunikasi, tetapi *bagaimana pola perilakunya dapat dimodelkan*. Dengan demikian, komunikasi direduksi menjadi rangkaian variabel kuantitatif.

Secara epistemologis, pergeseran dari komunikasi ke data perilaku berarti peralihan dari pemahaman (understanding) ke prediksi (prediction). Dalam sosiologi komunikasi klasik, pengetahuan sosial dihasilkan melalui: interpretasi makna, dialog, dan refleksi intersubjektif. Dalam kapitalisme pengawasan, pengetahuan dihasilkan melalui: korelasi statistik, pembelajaran mesin, dan pemodelan probabilistik. Pengetahuan tentang manusia tidak lagi membutuhkan pemahaman makna subjektif, melainkan hanya membutuhkan volume data dan daya komputasi. Ini menciptakan apa yang disebut Zuboff sebagai epistemologi tanpa subjek.

Pergeseran ini juga bersifat ekonomi-politik. Ketika komunikasi menjadi data perilaku, ia berubah menjadi bahan mentah akumulasi kapital. Data yang dihasilkan dari komunikasi tidak digunakan terutama untuk meningkatkan kualitas relasi sosial, tetapi untuk: menghasilkan prediksi perilaku, memengaruhi keputusan masa depan, dan menjual kepastian probabilistik di pasar.

Transformasi komunikasi digital tidak dapat dipahami sebagai fenomena kultural atau teknologis semata, melainkan sebagai pergeseran ekonomi-politik yang fundamental. Ketika komunikasi direduksi menjadi data perilaku, ia kehilangan statusnya sebagai praktik sosial yang berorientasi pada pemahaman, solidaritas, atau pengakuan, dan berubah menjadi bahan mentah bagi proses akumulasi kapital.

Pada kerangka Zuboff, inilah inti kapitalisme pengawasan: pengalaman manusia dikomodifikasi sebelum sempat dipahami sebagai pengalaman sosial (Zuboff, 2019).

Secara ekonomi-politik, perubahan ini menandai rezim akumulasi baru. Jika kapitalisme industri mengekstraksi nilai dari tenaga kerja, dan kapitalisme finansial dari spekulasi moneter, maka kapitalisme pengawasan mengekstraksi nilai dari komunikasi dan perilaku sehari-hari. Setiap tindakan komunikatif—yang sebelumnya berada di luar logika pasar—kini dimasukkan ke dalam siklus produksi nilai. Komunikasi menjadi sumber daya ekonomi primer, bukan lagi aktivitas sosial yang otonom.

Poin bahwa data komunikasi tidak digunakan untuk meningkatkan kualitas relasi sosial mengungkap perbedaan tajam antara retorika teknologi dan fungsi strukturalnya. Platform sering mengklaim bahwa data digunakan untuk "menghubungkan orang", "meningkatkan pengalaman pengguna", atau "membangun komunitas". Namun, analisis Zuboff menunjukkan bahwa fungsi utama data adalah: menghasilkan prediksi perilaku, memengaruhi keputusan masa depan, menjual kepastian probabilistik di pasar. Dengan kata lain, tujuan sistem bukan relasi, melainkan prediktabilitas.

Produksi prediksi perilaku merupakan inti ekonomi kapitalisme pengawasan. Data komunikasi diolah menjadi model probabilistik yang menjawab pertanyaan: *apa yang kemungkinan besar akan dilakukan individu selanjutnya?* Prediksi ini tidak netral, karena semakin akurat prediksi, semakin tinggi nilai ekonominya. Pengetahuan sosial bergeser dari pemahaman makna ke kepastian statistik, dari interpretasi ke probabilitas terkomodifikasi.

Langkah berikutnya—memengaruhi keputusan masa depan—menunjukkan bahwa kapitalisme pengawasan tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi bergerak menuju intervensi perilaku. Prediksi digunakan untuk: mengarahkan pilihan konsumsi, membentuk preferensi politik, mengatur atensi dan emosi, serta menstabilkan perilaku yang menguntungkan sistem.

Komunikasi tidak lagi hanya dimanfaatkan secara retrospektif (untuk mengetahui apa yang telah terjadi), tetapi secara prospektif untuk mengendalikan apa yang akan terjadi. Inilah yang oleh Zuboff disebut sebagai peralihan dari *surveillance* ke *behavioral modification*.

Puncak dari logika ekonomi-politik ini adalah penjualan kepastian probabilistik di pasar—yang oleh Zuboff dinamakan behavioral futures markets. Yang diperjualbelikan bukan lagi barang, jasa, atau bahkan data mentah, tetapi jaminan statistik tentang perilaku manusia di masa depan. Dalam pasar ini, pengiklan, aktor politik, dan institusi kekuasaan membeli kemungkinan tindakan, bukan hanya peluang komunikasi. Komunikasi manusia dengan demikian menjadi objek spekulasi kapitalistik.

Dari perspektif sosiologi komunikasi, kondisi ini memiliki implikasi yang sangat serius. Pertama, komunikasi kehilangan fungsi sosial intrinsiknya dan direduksi menjadi fungsi ekonomi ekstrinsik. Kedua, subjek komunikasi kehilangan kedaulatan atas makna tindakannya sendiri, karena makna digantikan oleh nilai prediktif. Ketiga, relasi sosial tidak lagi diatur oleh norma,

kepercayaan, dan pengakuan, melainkan oleh logika pasar yang bekerja melalui data.

Secara politis, pergeseran ini menciptakan ketimpangan kekuasaan yang ekstrem. Aktor yang menguasai infrastruktur data dan pasar prediksi memperoleh kapasitas untuk: memengaruhi keputusan individu tanpa dialog, membentuk opini publik sebelum refleksi rasional, dan menggeser demokrasi dari arena deliberasi ke arena manajemen perilaku. Istilah Habermas, ini bukan sekadar kolonisasi dunia-kehidupan, tetapi pencabutan komunikasi dari dunia-kehidupan sebelum ia berfungsi sebagai komunikasi. Dalam istilah Bourdieu, dominasi simbolik kini diperkuat oleh dominasi prediktif berbasis data. Dalam istilah Castells, arus informasi telah sepenuhnya dikomodifikasi.

Tesis kunci Zuboff: kapitalisme pengawasan mengubah komunikasi dari ruang makna menjadi mesin akumulasi kapital dan kontrol sosial. Komunikasi tidak lagi bernilai karena apa yang dipahami bersama, tetapi karena sejauh mana ia dapat diprediksi, dimonetisasi, dan dikendalikan. Inilah transformasi ekonomi-politik paling mendalam dalam sejarah komunikasi modern—dan tantangan terbesar bagi sosiologi komunikasi kritis hari ini.

Zuboff menyebut pasar ini sebagai behavioral futures markets, di mana yang diperjualbelikan bukan barang atau jasa, melainkan kemungkinan tindakan manusia. Dengan demikian, komunikasi menjadi infrastruktur ekonomi, bukan lagi sekadar praktik sosial. Transformasi komunikasi menjadi data perilaku menghasilkan asimetri struktural yang ekstrem. Platform digital mengetahui: kebiasaan, preferensi, dan kecenderungan individu. Sementara individu: tidak mengetahui bagaimana data mereka dianalisis, tidak dapat mengakses model prediktif tentang dirinya, dan tidak memiliki kuasa untuk menegosiasikan penggunaan data tersebut.

Perspektif sosiologi komunikasi, ini berarti hilangnya simetri komunikatif yang menjadi prasyarat komunikasi etis. Relasi dialogis digantikan oleh relasi observasional sepihak. Hal

paling krusial, data perilaku tidak berhenti pada pengawasan. Ia digunakan untuk intervensi perilaku pra-sadar melalui: rekomendasi, notifikasi, desain antarmuka, dan penguatan kebiasaan. Zuboff menyebut bentuk dominasi ini sebagai kekuasaan instrumentarian: kekuasaan yang tidak memerintah atau melarang, tetapi mengondisikan kemungkinan tindakan. Pada aspek ini, komunikasi tidak lagi menjadi ruang kebebasan, tetapi mekanisme pengendalian halus.

Ketika komunikasi direduksi menjadi data perilaku, identitas sosial pun mengalami transformasi. Identitas tidak lagi dibentuk terutama melalui pengakuan simbolik, tetapi melalui profil data yang dikonstruksi oleh sistem. Subjek diperlakukan sebagai: kumpulan preferensi, pola konsumsi, dan probabilitas tindakan. Hal ini menghasilkan subjektivitas yang tereduksi, di mana manusia dipahami sebagai objek prediksi, bukan agen reflektif.

Zuboff melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa komunikasi bahkan tidak sempat berfungsi sebagai komunikasi, karena telah lebih dulu ditambang sebagai data. Distorsi tidak terjadi pada diskursus, tetapi sebelum diskursus muncul. Saat ini sedang disaksikan transformasi historis fungsi komunikasi. Komunikasi tidak lagi terutama menjadi sarana pemahaman, legitimasi, atau solidaritas, melainkan infrastruktur ekstraksi dan kontrol. Bagi sosiologi komunikasi, ini adalah tantangan epistemologis dan normatif yang mendasar: bagaimana mempertahankan komunikasi sebagai praktik sosial bermakna di tengah reduksinya menjadi data perilaku?

B. Logika Kapitalisme Pengawasan

Shoshana Zuboff merumuskan kapitalisme pengawasan (*surveillance capitalism*) sebagai rezim akumulasi ekonomi yang secara sistematis mengekstraksi pengalaman manusia untuk diubah menjadi data perilaku, prediksi, dan instrumen kontrol. Berbeda dari kapitalisme industri yang bertumpu pada eksploitasi tenaga kerja, atau kapitalisme finansial yang

bertumpu pada spekulasi nilai moneter, kapitalisme pengawasan menjadikan perilaku manusia—termasuk komunikasi—sebagai sumber utama surplus nilai (Zuboff, 2019).

Logika dasar rezim ini bukan produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sosial, melainkan produksi kepastian perilaku. Nilai ekonomi dihasilkan dari kemampuan sistem untuk mengetahui, memprediksi, dan akhirnya memodifikasi tindakan manusia di masa depan.

Inti terdalam dari logika kapitalisme pengawasan, yakni pergeseran tujuan ekonomi dari pemenuhan kebutuhan sosial menuju produksi kepastian perilaku. Dalam rezim ini, nilai ekonomi tidak lagi terutama dihasilkan melalui penciptaan barang atau jasa yang menjawab kebutuhan manusia, melainkan melalui reduksi ketidakpastian tindakan manusia. Ketidakpastian—yang dalam masyarakat modern sebelumnya dianggap sebagai ruang kebebasan, kreativitas, dan agensi—justru diposisikan sebagai masalah ekonomi yang harus diatasi (Zuboff, 2019).

Kapitalisme klasik, ketidakpastian perilaku konsumen dikelola melalui riset pasar, iklan, dan persaingan produk. Namun, dalam kapitalisme pengawasan, ketidakpastian itu ditambang, dimodelkan, dan dihilangkan secara sistemik. Produksi "kepastian perilaku" berarti menciptakan kondisi di mana sistem dapat: mengetahui kecenderungan tindakan individu (melalui pengumpulan data masif), memprediksi tindakan tersebut secara probabilistik (melalui algoritma dan AI), memodifikasi tindakan agar selaras dengan kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Produksi nilai tidak lagi berhenti pada prediksi, tetapi mencapai tahap intervensi langsung terhadap masa depan tindakan manusia.

Secara ekonomi-politik, logika ini menandai pergeseran fungsi pasar. Pasar tidak lagi terutama menjadi arena pertukaran barang dan jasa, melainkan menjadi pasar masa depan perilaku (*behavioral futures markets*), tempat kepastian statistik tentang tindakan manusia diperjualbelikan. Yang dijual bukan "apa yang telah terjadi", tetapi apa yang sangat mungkin akan

terjadi—dan lebih jauh lagi, apa yang dapat dibuat terjadi. Ini menjadikan perilaku manusia sebagai komoditas spekulatif, setara dengan derivatif finansial dalam kapitalisme finansial.

Analisis ini juga mengungkap perubahan ontologis terhadap subjek manusia. Dalam logika produksi kepastian perilaku, manusia tidak lagi dipahami sebagai agen reflektif yang mampu bertindak di luar prediksi, melainkan sebagai entitas probabilistik—kumpulan kecenderungan yang dapat dihitung, dioptimalkan, dan diarahkan. Subjektivitas direduksi menjadi model perilaku, dan kebebasan bertindak diredefinisikan sebagai variasi yang masih dapat ditoleransi oleh sistem prediktif. Inilah yang oleh Zuboff dipandang sebagai ancaman terhadap *the right to the future tense*—hak manusia untuk memiliki masa depan yang tidak sepenuhnya dapat diketahui dan dikendalikan.

Dari sudut pandang sosiologi komunikasi, pergeseran ini sangat problematis. Komunikasi secara historis berfungsi sebagai: sarana pemahaman bersama (Habermas), arena pembentukan identitas dan pengakuan (Mead, Goffman), medan produksi makna dan legitimasi (Bourdieu).

Namun, ketika komunikasi direduksi menjadi input sistem prediksi, makna kehilangan relevansinya. Yang penting bukan apa yang dikatakan atau dimaksud, tetapi bagaimana sinyal komunikasi dapat digunakan untuk memperkirakan dan memengaruhi tindakan selanjutnya. Komunikasi berhenti menjadi relasi sosial dan berubah menjadi mekanisme sensorik sistem ekonomi.

Lebih jauh, produksi kepastian perilaku mengubah relasi kekuasaan secara fundamental. Kekuasaan tidak lagi bekerja terutama melalui larangan, ideologi, atau kekerasan, tetapi melalui pengondisian lingkungan pilihan (*choice architecture*). Individu tidak dipaksa untuk bertindak dengan cara tertentu, tetapi diarahkan sedemikian rupa sehingga tindakan tertentu menjadi yang paling mungkin, paling mudah, dan paling "rasional". Kekuasaan bekerja secara pra-sadar dan pra-diskursif, sehingga sulit dikenali dan dilawan secara politis.

Aspek demokrasi, logika ini membawa konsekuensi serius. Demokrasi deliberatif mengandaikan warga sebagai subjek yang mampu merefleksikan argumen, menimbang pilihan, dan mengambil keputusan secara sadar. Produksi kepastian perilaku justru melemahkan kapasitas reflektif ini, karena preferensi dibentuk sebelum refleksi terjadi. Dengan demikian, legitimasi politik bergeser dari persetujuan rasional menuju kepatuhan yang dihasilkan oleh desain sistem.

Kapitalisme pengawasan bukan sekadar fase lanjutan kapitalisme digital, melainkan transformasi mendasar tujuan ekonomi itu sendiri. Produksi kepastian perilaku menggantikan produksi kesejahteraan sosial; prediksi menggantikan pemahaman; dan kontrol probabilistik menggantikan kebebasan yang tidak terduga. Bagi sosiologi komunikasi, ini merupakan peringatan konseptual yang sangat kuat: ketika masa depan manusia menjadi objek produksi ekonomi, komunikasi kehilangan perannya sebagai ruang kebebasan dan berubah menjadi instrumen dominasi yang paling halus dan paling efektif.

Logika kapitalisme pengawasan dimulai dari ekstraksi sepihak data perilaku. Aktivitas komunikasi digital—klik, pencarian, unggahan, jeda perhatian, lokasi—diposisikan sebagai bahan mentah gratis yang dapat diambil tanpa persetujuan bermakna. Zuboff menyebut proses ini sebagai dispossession by surveillance, yakni perampasan hak atas pengalaman pribadi melalui mekanisme teknologi yang dinormalisasi (Zuboff, 2019).

Berbeda dari surveilans negara klasik yang bersifat represif dan terlihat, surveilans kapitalistik bersifat: opak, otomatis, terintegrasi dalam kenyamanan platform. Pengguna tidak dipaksa, tetapi dibujuk untuk menyerahkan data sebagai syarat partisipasi sosial. Langkah berikutnya adalah transformasi data menjadi produk prediksi. Data perilaku tidak dikumpulkan untuk pemahaman sosial atau peningkatan kualitas komunikasi, melainkan untuk membangun model

probabilistik tentang apa yang kemungkinan besar akan dilakukan individu atau kelompok.

Pada logika ini, pengetahuan sosial tidak lagi bersifat interpretatif atau dialogis, melainkan statistik dan korelasional. Sistem tidak perlu mengetahui makna subjektif tindakan; cukup mengenali pola dan kecenderungan. Inilah yang oleh Zuboff disebut sebagai epistemologi tanpa subjek, di mana pengetahuan tentang manusia diproduksi tanpa keterlibatan manusia sebagai subjek reflektif. Puncak logika kapitalisme pengawasan adalah pasar masa depan perilaku (*behavioral futures markets*). Di pasar ini, yang diperjualbelikan bukan data mentah, tetapi kepastian probabilistik tentang perilaku masa depan—siapa yang akan membeli, memilih, bergerak, atau bereaksi dengan cara tertentu.

Aktor yang membeli prediksi ini—pengiklan, korporasi, aktor politik—tidak hanya ingin mengetahui masa depan, tetapi mengamankannya. Oleh karena itu, kapitalisme pengawasan tidak berhenti pada prediksi, melainkan berkembang menjadi intervensi perilaku. Zuboff menyebut bentuk dominasi khas kapitalisme pengawasan sebagai kekuasaan instrumentarian (*instrumentarian power*). Kekuasaan ini tidak bekerja melalui ideologi, hukum, atau paksaan fisik, melainkan melalui arsitektur sistem digital yang mengondisikan pilihan dan kebiasaan.

Intervensi dilakukan melalui: rekomendasi algoritmik, desain antarmuka, notifikasi, penguatan kebiasaan (*behavioral nudging*). Kekuasaan bekerja pra-sadar dan pra-diskursif. Subjek tidak diperintah, tetapi diarahkan. Tidak ada larangan, tetapi ada pengaturan kemungkinan tindakan.

Secara etis, logika kapitalisme pengawasan merusak prinsip dasar komunikasi: persetujuan sadar, pengakuan subjek sebagai agen otonom, simetri relasi komunikasi.

Secara politis, kapitalisme pengawasan mengancam fondasi demokrasi deliberatif. Ketika preferensi dan opini dibentuk melalui intervensi perilaku sebelum refleksi rasional, maka warga tidak lagi bertindak sebagai subjek diskursus,

melainkan sebagai objek manajemen populasi. Demokrasi bergeser dari arena deliberasi ke arena rekayasa perilaku berbasis data.

Logika kapitalisme pengawasan menunjukkan bahwa komunikasi digital telah berubah fungsi secara radikal: dari praktik sosial bermakna menjadi sumber daya ekonomi dan alat kontrol prediktif. Dalam rezim ini, masa depan manusia menjadi objek komodifikasi, dan kebebasan bertindak digantikan oleh kepastian statistik. Bagi sosiologi komunikasi, kritik Zuboff merupakan peringatan mendasar: tanpa regulasi etis dan politik yang kuat, komunikasi akan kehilangan perannya sebagai fondasi otonomi, demokrasi, dan kehidupan sosial yang bermakna.

C. Kekuasaan dalam Arus Informasi Global

Aspek globalisasi digital, kekuasaan tidak lagi terutama terletak pada kontrol teritorial, kepemilikan alat produksi, atau monopoli institusi politik, melainkan pada kemampuan menguasai arus informasi global. Manuel Castells menunjukkan bahwa masyarakat kontemporer diorganisasikan oleh arus (*flows*)—informasi, simbol, kapital, dan komunikasi—yang bergerak lintas ruang dan waktu secara real time (Castells, 1996; 2009). Dalam kondisi ini, kekuasaan menjadi relasional dan dinamis, bergantung pada posisi aktor dalam jaringan informasi global, bukan pada otoritas yang bersifat statis.

Arus informasi global dengan demikian bukan sekadar medium netral pertukaran pesan, melainkan struktur sosial yang menentukan siapa yang dapat berbicara, didengar, dan diakui dalam skala global. Kekuasaan bekerja melalui konektivitas, visibilitas, dan kapasitas pemrograman arus komunikasi. Castells menegaskan bahwa dalam masyarakat jaringan, arus informasi menggantikan institusi sebagai locus utama kekuasaan. Negara, korporasi, media, dan organisasi internasional hanya efektif sejauh mereka mampu: terhubung ke jaringan global yang relevan, mempertahankan posisi strategis

dalam arus komunikasi, dan memengaruhi arah serta makna arus tersebut.

Kekuasaan dalam arus informasi bersifat struktural, karena ia tertanam dalam arsitektur jaringan—protokol teknis, platform digital, standar komunikasi, dan algoritma. Aktor yang menguasai simpul strategis (*nodes*) memiliki keunggulan untuk: menentukan agenda global, membingkai realitas sosial, serta mendefinisikan apa yang dianggap penting, relevan, atau sah.

Mengikuti Castells, kekuasaan dalam arus informasi global dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk utama: Networking power, Kekuasaan untuk memasukkan atau mengecualikan aktor dari jaringan informasi global (misalnya melalui sensor, pemblokiran platform, atau kontrol akses). Network power Kekuasaan yang berasal dari standar teknis dan bahasa dominan jaringan (misalnya dominasi platform global dan bahasa tertentu). Networked power, Kekuasaan aktor dominan di dalam jaringan, seperti negara besar, korporasi teknologi, dan media transnasional. Network-making power, Bentuk kekuasaan paling strategis: kemampuan untuk memprogram jaringan, menentukan tujuan, logika operasional, dan arah arus informasi (Castells, 2009).

Keempat bentuk ini menunjukkan bahwa kekuasaan global tidak lagi bekerja terutama melalui perintah hierarkis, melainkan melalui pengaturan kondisi kemungkinan komunikasi.

Praktik kontemporer, arus informasi global sangat dimediasi oleh platform digital transnasional (Google, Meta, X, TikTok, dsb.). Platform ini tidak hanya menyalurkan informasi, tetapi mengatur visibilitas, atensi, dan sirkulasi makna melalui algoritma. Dengan demikian, platform berfungsi sebagai aktor kekuasaan global non-negara, yang pengaruhnya sering kali melampaui batas regulasi nasional.

Kekuasaan platform bersifat: opak (tidak transparan), asimetris (pengguna tidak memiliki akses setara), dan prediktif (berbasis data dan pemodelan perilaku). Pada aspek ini, arus informasi global menjadi arena dominasi algoritmik, di mana

keputusan sistem teknis memiliki dampak politik dan sosial yang luas tanpa mekanisme akuntabilitas demokratis yang memadai.

Kekuasaan dalam arus informasi global sangat menentukan pembentukan opini publik lintas negara. Dalam dunia yang saling terhubung, legitimasi politik, reputasi negara, dan citra aktor global dibentuk melalui: narasi media internasional, viralitas digital, dan resonansi emosional dalam jaringan.

Opini publik global tidak lagi terbentuk terutama melalui diskursus deliberatif (Habermas), tetapi melalui perang narasi dan framing simbolik. Aktor yang mampu menguasai arus informasi dapat membentuk persepsi tentang krisis, konflik, atau legitimasi sebelum proses refleksi rasional berlangsung. Dengan demikian, kekuasaan komunikasi menjadi kekuasaan atas makna global.

Penting dicatat bahwa arus informasi global juga menghasilkan bentuk eksklusi baru. Mengikuti Castells, aktor yang gagal masuk atau dipertahankan dalam jaringan informasi mengalami diskonektivitas—bukan karena represi langsung, tetapi karena ketiadaan koneksi yang relevan. Eksklusi ini bersifat struktural dan sering kali tidak terlihat, namun berdampak langsung pada: ketidakmampuan memengaruhi agenda global, invisibilitas simbolik, dan marginalisasi politik.

Diskonektivitas menunjukkan bahwa kekuasaan global bekerja bukan hanya melalui dominasi, tetapi juga melalui ketiadaan relasi. Kekuasaan dalam arus informasi global menandai transformasi historis cara kekuasaan bekerja dalam masyarakat modern. Ia tidak lagi memerintah dari pusat, tetapi mengalir melalui jaringan; tidak memaksa secara terbuka, tetapi membentuk kemungkinan makna dan tindakan. Dalam kondisi ini, komunikasi bukan sekadar medium sosial, melainkan medan strategis dominasi dan resistensi global. Memahami arus informasi berarti memahami struktur kekuasaan dunia kontemporer.

D. Algoritma, Prediksi, dan Kontrol Sosial

Pada masyarakat digital kontemporer, algoritma tidak dapat lagi dipahami sebagai instrumen teknis netral untuk pengolahan data, melainkan sebagai infrastruktur sosial yang mengatur visibilitas, peluang, dan tindakan manusia. Algoritma berfungsi sebagai seperangkat aturan otomatis yang menentukan apa yang dilihat, diprioritaskan, disembunyikan, atau dikesampingkan dalam arus komunikasi digital. Dengan demikian, algoritma memiliki kapasitas regulatif yang secara fungsional menyerupai hukum sosial, namun bekerja tanpa deliberasi publik dan tanpa legitimasi demokratis (Zuboff, 2019; Van Dijck et al., 2018).

Perspektif sosiologi komunikasi, algoritma merupakan aktor non-manusia yang secara sistemik memediasi relasi sosial. Ia tidak hanya mengatur distribusi pesan, tetapi juga membentuk kondisi kemungkinan komunikasi itu sendiri. Fungsi utama algoritma dalam kapitalisme pengawasan adalah produksi prediksi perilaku. Dengan memanfaatkan data masif dari tindakan komunikatif—klik, pencarian, unggahan, jeda perhatian—algoritma membangun model probabilistik tentang apa yang kemungkinan besar akan dilakukan individu atau kelompok di masa depan. Prediksi ini tidak berorientasi pada pemahaman makna, tetapi pada kepastian statistik.

Kerangka berfikir Zuboff, prediksi perilaku merupakan komoditas inti kapitalisme pengawasan. Nilai ekonomi tidak dihasilkan dari komunikasi sebagai relasi sosial, tetapi dari akurasi prediksi dan kapasitas untuk mengamankannya di pasar masa depan perilaku (*behavioral futures markets*). Dengan demikian, algoritma berfungsi sebagai mesin epistemik yang menggantikan dialog dan interpretasi dengan korelasi dan kalkulasi.Yang membedakan rezim ini dari bentuk pengawasan sebelumnya adalah bahwa prediksi tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi diarahkan pada kontrol sosial pra-sadar. Algoritma digunakan untuk: mengarahkan pilihan konsumsi, memodulasi preferensi politik, mengatur atensi dan emosi, serta menstabilkan pola perilaku yang menguntungkan sistem.

Zuboff menyebut bentuk dominasi ini sebagai kekuasaan instrumentarian (*instrumentarian power*), yakni kekuasaan yang tidak memerintah atau melarang secara eksplisit, tetapi mengondisikan lingkungan tindakan sedemikian rupa sehingga perilaku tertentu menjadi paling mungkin terjadi. Kontrol sosial tidak lagi bersifat represif, tetapi preventif dan prediktif.

Sosiologi klasik, kontrol sosial umumnya dipahami melalui: norma dan sanksi (Durkheim), disiplin institusional (Foucault), atau legitimasi simbolik (Weber, Bourdieu). Pada masyarakat algoritmik, kontrol sosial bekerja melalui arsitektur pilihan (*choice architecture*) dan desain sistem. Individu tidak dipaksa untuk patuh, tetapi diarahkan secara halus melalui rekomendasi, notifikasi, dan penguatan kebiasaan. Kontrol menjadi tidak terlihat, terotomatisasi, dan terinternalisasi, sehingga sulit dikenali sebagai bentuk dominasi. Pada aspek ini, kebebasan tidak dihapus, tetapi direkayasa. Subjek tetap "memilih", namun pilihan tersebut telah dipersempit dan diprioritaskan oleh sistem algoritmik.

Implikasi algoritma prediktif terhadap komunikasi sangat mendalam. Komunikasi tidak lagi berfungsi sebagai: sarana pemahaman bersama (Habermas), arena pembentukan identitas intersubjektif (Mead, Goffman), atau medan pertarungan simbolik (Bourdieu), melainkan sebagai sumber sinyal untuk sistem prediksi dan kontrol. Subjektivitas manusia direduksi menjadi profil perilaku—sekumpulan kecenderungan yang dapat diukur dan dimodifikasi. Identitas tidak lagi terutama dibentuk melalui pengakuan simbolik, tetapi melalui kalkulasi algoritmik tentang apa yang "relevan", "menarik", dan "menguntungkan".

Kontrol sosial algoritmik juga menghasilkan ketimpangan struktural baru. Algoritma cenderung: mereproduksi bias data historis, memperkuat ketidaksetaraan kelas, ras, dan gender, serta menciptakan eksklusi melalui invisibilitas (*algorithmic marginalization*). Karena proses algoritmik bersifat opak, ketidakadilan ini sulit dipersoalkan secara publik. Individu tidak mengetahui mengapa mereka: tidak terlihat, tidak

direkomendasikan, atau tidak mendapatkan peluang tertentu. Algoritma memperkenalkan kontrol sosial tanpa pertanggungjawaban.

Perspektif normatif, algoritma prediktif menimbulkan krisis serius bagi demokrasi dan komunikasi publik. Demokrasi mengandaikan warga sebagai subjek reflektif yang mampu menimbang argumen dan membuat keputusan sadar. Kontrol sosial algoritmik justru mendahului refleksi, membentuk preferensi sebelum diskursus terjadi. Istilah Habermas, ini bukan sekadar distorsi diskursus, tetapi penyusutan ruang diskursif itu sendiri. Dalam istilah Zuboff, ini merupakan ancaman terhadap hak atas masa depan, yakni kapasitas manusia untuk bertindak secara tidak terduga dan otonom.

Algoritma bukan sekadar alat bantu komunikasi, melainkan mekanisme utama kontrol sosial kontemporer. Prediksi menggantikan pemahaman, pengondisian menggantikan persuasi, dan kepastian probabilistik menggantikan kebebasan yang tak terduga. Bagi sosiologi komunikasi, analisis ini menuntut pergeseran fokus dari pesan dan media menuju arsitektur algoritmik yang membentuk tindakan, identitas, dan masa depan sosial manusia.

E. Tantangan Etis Sosiologi Komunikasi di Era Digital

Era digital menandai pergeseran radikal medan etika komunikasi. Jika dalam sosiologi komunikasi klasik persoalan etika terutama berkisar pada kebenaran pesan, tanggung jawab komunikator, dan dampak sosial media, maka Pada aspek digital persoalan etika bergeser ke arsitektur sistem komunikasi itu sendiri. Tantangan etis tidak lagi hanya terletak pada *apa yang dikomunikasikan*, tetapi pada bagaimana komunikasi dirancang, dimediasi, diekstraksi, dan dikendalikan oleh sistem teknologi.

Etika komunikasi tidak dapat lagi dipahami sebagai etika individual atau profesional semata, melainkan sebagai etika struktural yang menyangkut relasi antara manusia, data, algoritma, dan kekuasaan. Salah satu tantangan etis paling mendasar adalah erosi otonomi komunikatif. Dalam kerangka

Habermas, komunikasi etis mengandaikan subjek yang: sadar, reflektif, dan mampu memberikan persetujuan bermakna.

Namun, dalam kapitalisme pengawasan (Zuboff), komunikasi digital sering kali berlangsung dalam kondisi: pengumpulan data tanpa persetujuan substantif, pemodelan perilaku pra-sadar, dan intervensi algoritmik yang tidak transparan. Etika komunikasi dihadapkan pada paradoks: komunikasi berlangsung tanpa subjek yang sepenuhnya berdaulat. Subjek komunikasi direduksi menjadi objek pengamatan dan prediksi. Ini menantang asumsi normatif dasar sosiologi komunikasi bahwa komunikasi adalah praktik relasional antar-agen yang setara.

Era digital memperdalam asimetri kekuasaan komunikatif. Platform digital, negara, dan korporasi teknologi memiliki: akses data masif, kapasitas analitik tinggi, dan kekuasaan algoritmik. Sementara pengguna tidak memiliki: akses setara terhadap pengetahuan tentang dirinya sendiri, kontrol atas bagaimana komunikasinya dimanfaatkan, atau mekanisme negosiasi yang adil. Perspektif Bourdieu, ini adalah bentuk kekerasan simbolik baru—bukan melalui bahasa, tetapi melalui arsitektur data dan algoritma. Tantangan etisnya adalah bahwa dominasi ini: tidak tampak sebagai paksaan, dinormalisasi sebagai kenyamanan, dan

Etika komunikasi juga menghadapi krisis transparansi dan akuntabilitas. Proses komunikasi digital dimediasi oleh algoritma yang: opak, dilindungi oleh rahasia dagang, dan tidak dapat diaudit secara publik. Akibatnya, keputusan yang berdampak besar pada: visibilitas, reputasi, peluang ekonomi, dan partisipasi politik, diambil tanpa pertanggungjawaban komunikatif. Dalam kerangka etika diskursus Habermas, kondisi ini melanggar prinsip dasar bahwa klaim yang memengaruhi kehidupan sosial harus dapat dipersoalkan secara rasional di ruang publik.

Sosiologi komunikasi sejak awal memiliki keterikatan normatif dengan demokrasi dan ruang publik. Tantangan etis era digital terletak pada fakta bahwa ruang publik kini:

terfragmentasi, dikomodifikasi, dan diprioritaskan oleh logika keterlibatan (engagement), bukan deliberasi. Algoritma memperkuat: polarisasi, emosi, dan komunikasi strategis, sementara komunikasi deliberatif semakin terpinggirkan. Etika komunikasi dihadapkan pada pertanyaan krusial: bagaimana mungkin demokrasi deliberatif dipertahankan ketika komunikasi publik diatur oleh logika pasar dan prediksi perilaku?

Tantangan etis lain adalah normalisasi pengawasan. Pada aspek digital, privasi tidak lagi sekadar hak individual, tetapi kondisi etis komunikasi. Tanpa privasi, tidak ada; ruang refleksi, *back stage* (Goffman) atau otonomi identitas.

Ketika setiap tindakan komunikatif direkam dan dianalisis, komunikasi kehilangan dimensi eksperimental dan bebas risiko. Etika komunikasi dihadapkan pada kondisi di mana pengawasan menjadi prasyarat partisipasi sosial, bukan pengecualian.

Salah satu kontribusi penting sosiologi komunikasi kontemporer adalah pergeseran dari: etika pesan (truth, accuracy, harm), menuju etika sistem komunikasi.

Pertanyaan etis utama kini mencakup: siapa yang merancang sistem komunikasi, nilai apa yang diintegrasikan ke dalam algoritma, dan kepentingan siapa yang dilayani oleh arsitektur platform. Tantangan etis bukan lagi "apakah pesan ini etis", tetapi "apakah sistem komunikasi ini memungkinkan komunikasi yang etis".

Aspek ini, sosiologi komunikasi menghadapi tanggung jawab normatif ganda: Diagnostik – membongkar relasi kekuasaan yang tersembunyi dalam komunikasi digital. Normatif – merumuskan prinsip-prinsip komunikasi yang adil, transparan, dan berorientasi pada otonomi manusia. Sosiologi komunikasi tidak cukup bersikap netral atau deskriptif, karena komunikasi digital secara langsung membentuk masa depan subjektivitas, demokrasi, dan kehidupan sosial.

Persoalan etika hari ini bukan tambahan periferal dalam studi komunikasi, melainkan inti persoalan teoretis dan politisnya. Ketika komunikasi berubah menjadi infrastruktur pengawasan, prediksi, dan kontrol, maka etika komunikasi menjadi medan perjuangan utama untuk mempertahankan otonomi manusia dan legitimasi sosial.

Bagi sosiologi komunikasi, tantangan etis era digital adalah pertanyaan tentang apakah komunikasi masih dapat berfungsi sebagai praktik pembebasan, atau telah sepenuhnya direduksi menjadi mekanisme kekuasaan yang sunyi namun total. Menjawab pertanyaan ini bukan hanya tugas akademik, tetapi tanggung jawab intelektual dan moral.

F. Profil Intelektual dan Kontribusinya

Shoshana Zuboff lahir pada 18 November 1951 di Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai ilmuwan sosial, pemikir kritis, dan intelektual publik yang karyanya berada di persimpangan antara sosiologi, psikologi sosial, ekonomi politik, dan studi teknologi. Zuboff menempuh pendidikan di Harvard University, tempat ia kemudian berkarier sebagai profesor di Harvard Business School—sebuah posisi yang unik karena ia membawa kritik sosial radikal ke dalam institusi yang biasanya berorientasi pada manajemen dan kapitalisme korporat.

Pengalaman akademiknya di lingkungan bisnis justru memperkuat perspektif kritisnya. Zuboff menyaksikan dari dekat bagaimana teknologi informasi diadopsi oleh korporasi bukan hanya untuk efisiensi, tetapi untuk rekayasa perilaku, kontrol organisasi, dan akumulasi kekuasaan. Dari sinilah lahir proyek intelektual jangka panjangnya: memahami hubungan antara teknologi, pengetahuan, kekuasaan, dan subjektivitas manusia.

Zuboff menempati posisi penting dalam ilmu sosial kritis kontemporer karena ia: tidak terjebak pada determinisme teknologi, tidak pula membatasi analisis pada level budaya atau simbolik semata, tetapi mengembangkan analisis struktural

tentang bagaimana teknologi membentuk rezim ekonomi dan kekuasaan baru.

Secara teoretis, Zuboff dapat ditempatkan dalam tradisi: teori kritis (Habermas), ekonomi politik komunikasi, dan sosiologi pengetahuan, namun dengan fokus khas pada data, pengawasan, dan kapitalisme digital.

Karya karya utamanya; *In the Age of the Smart Machine* (1988). Karya awal ini menganalisis bagaimana teknologi informasi mengubah kerja, otoritas, dan pengetahuan dalam organisasi. Zuboff memperkenalkan gagasan bahwa teknologi dapat: *automate* (menggantikan kerja), atau *informate* (menghasilkan pengetahuan baru). Buku ini menjadi rujukan klasik dalam studi organisasi dan teknologi. Buku *The Support Economy* (2002, bersama James Maxmin), lewat karyanya ini , Zuboff mengkritik kegagalan kapitalisme industri dalam memahami kebutuhan subjektif individu modern. Ia mulai mengembangkan gagasan bahwa ekonomi masa depan akan bergantung pada pengetahuan tentang individu, sebuah ide yang kelak menjadi dasar analisis kapitalisme pengawasan.

The Age of Surveillance Capitalism (2019), ini adalah karya paling berpengaruh dan menentukan posisi Zuboff secara global. Dalam buku ini, ia memperkenalkan dan mengelaborasi konsep kapitalisme pengawasan (*surveillance capitalism*), yang ia definisikan sebagai: rezim ekonomi yang mengekstraksi pengalaman manusia untuk dijadikan data perilaku, diproses menjadi prediksi, dan dijual demi keuntungan dan kontrol. Buku ini menjadi rujukan utama dalam: sosiologi komunikasi digital, studi platform, etika data, dan kritik terhadap Big Tech.

Shoshana Zuboff memberi sumbangan fundamental bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan menunjukkan bahwa komunikasi, data, dan kekuasaan kini terjalin dalam satu rezim ekonomi-politik baru. Ia memaksa ilmu sosial untuk memperluas horizon analisisnya: dari makna ke prediksi, dari komunikasi ke kontrol, dari teknologi ke kekuasaan. Pada aspek ini, Zuboff bukan hanya analis teknologi, tetapi arsitek kritik sosial abad ke-21.

DAFTAR PUSTAKA

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.

Castells, M. (1996). *The rise of the network society*. Blackwell.

Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.

Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.

Habermas, J. (1987). *The theory of communicative action, Vol. 2: Lifeworld and system: A critique of functionalist reason*. Beacon Press.

Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere*. MIT Press.

Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8th ed.). McGraw-Hill.

Van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press.

Zuboff, S. (1988). *In the age of the smart machine: The future of work and power*. Basic Books.

Zuboff, S. (2002). *The support economy* (with J. Maxmin). Viking.

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

PENUTUP

Dari Solidaritas Sosial hingga Masyarakat Digital

Sejak awal kemunculannya, sosiologi komunikasi berkembang seiring dengan transformasi bentuk masyarakat. Dari masyarakat berbasis solidaritas mekanik hingga masyarakat digital berbasis jaringan dan data, komunikasi selalu menjadi mekanisme sosial utama yang memungkinkan kohesi, legitimasi, dan koordinasi sosial. Oleh karena itu, masa depan sosiologi komunikasi tidak dapat dilepaskan dari perubahan historis cara masyarakat mengorganisasikan komunikasi itu sendiri (Durkheim, 1912; Castells, 2009).

Pada lintasan ini, sosiologi komunikasi tidak sekadar menganalisis media atau pesan, melainkan memahami komunikasi sebagai fondasi ontologis kehidupan sosial—tempat identitas, kekuasaan, dan makna diproduksi dan dipertarungkan.

Ontologis di sini berarti bahwa komunikasi tidak diposisikan sebagai fenomena turunan—bukan sekadar alat, medium, atau variabel penjelas—melainkan sebagai kondisi kemungkinan (*condition of possibility*) bagi eksistensi sosial itu sendiri. Masyarakat tidak terlebih dahulu "ada" lalu berkomunikasi, tetapi ada sejauh dan selama komunikasi berlangsung.

Perperspektif ini, sosiologi komunikasi melampaui pendekatan instrumental yang melihat komunikasi sebagai saluran transmisi pesan atau efek media. Komunikasi dipahami sebagai proses konstitutif yang membentuk realitas sosial: melalui komunikasi, identitas dikenali, relasi kekuasaan dilegitimasi, dan makna sosial distabilkan maupun digugat. Tanpa komunikasi, kategori seperti "masyarakat", "otoritas", atau "norma" kehilangan basis ontologisnya.

Gagasan ini berakar kuat pada lintasan pemikiran klasik dan kontemporer. Mead menunjukkan bahwa *self* hanya muncul melalui interaksi simbolik; individu menjadi subjek sosial karena mampu berkomunikasi dan mengambil perspektif orang lain (Mead, 1934). Durkheim menegaskan bahwa solidaritas sosial

bergantung pada simbol dan ritual komunikatif yang memproduksi kesadaran kolektif (Durkheim, 1912). Habermas kemudian meradikalkan tesis ini dengan menyatakan bahwa integrasi sosial modern bergantung pada tindakan komunikatif, bukan semata sistem ekonomi dan politik (Habermas, 1984).

Memahami komunikasi sebagai fondasi ontologis, alenia ini juga menegaskan bahwa identitas tidak bersifat esensial, melainkan diproduksi secara komunikatif. Identitas personal dan kolektif bukan "isi batin" yang stabil, tetapi hasil dari pengakuan, penolakan, dan negosiasi makna dalam interaksi sosial. Identitas ada sejauh ia dikomunikasikan dan diakui. Ketika pola komunikasi berubah—misalnya dalam masyarakat digital—bentuk identitas pun ikut berubah: menjadi lebih cair, terfragmentasi, dan bergantung pada visibilitas.

Lebih jauh, komunikasi sebagai fondasi ontologis juga berarti bahwa kekuasaan bekerja terutama melalui komunikasi, bukan semata melalui paksaan material. Kekuasaan harus diproduksi, dijustifikasi, dan dipertahankan melalui bahasa, simbol, narasi, dan representasi. Di sinilah komunikasi menjadi arena pertarungan sosial: siapa yang berhak mendefinisikan realitas, suara siapa yang diakui, dan makna mana yang dilegitimasi. Perspektif Bourdieu memperlihatkan bahwa pertarungan ini selalu timpang karena distribusi modal simbolik yang tidak setara (Bourdieu, 1991).

Aspek kontemporer, terutama masyarakat digital, tesis ontologis ini memperoleh dimensi baru. Ketika komunikasi dimediasi oleh platform, algoritma, dan logika data, maka fondasi ontologis masyarakat ikut direstrukturisasi secara teknologis. Seperti ditunjukkan Castells, kehidupan sosial kini berlangsung dalam arus komunikasi jaringan global (Castells, 2009). Lebih radikal lagi, Zuboff menunjukkan bahwa komunikasi bahkan direduksi menjadi data perilaku sebelum sempat berfungsi sebagai komunikasi bermakna (Zuboff, 2019). Ini berarti bahwa basis ontologis kehidupan sosial sedang bergeser—dari komunikasi sebagai pemahaman bersama menuju komunikasi sebagai sumber prediksi dan kontrol.

Secara metodologis, pemahaman ini menuntut sosiologi komunikasi untuk tidak berhenti pada analisis isi pesan atau efek media, tetapi meneliti bagaimana struktur komunikasi itu sendiri membentuk realitas sosial. Pertanyaan kunci bukan lagi "apa pesan media", tetapi: bagaimana komunikasi dimungkinkan, siapa yang diikutsertakan atau dikecualikan, dan bagaimana makna distabilkan atau dipertarungkan melalui sistem komunikasi.

Posisi epistemologis yang tegas: sosiologi komunikasi adalah sosiologi tentang bagaimana masyarakat ada. Ia menempatkan komunikasi di pusat ontologi sosial—sebagai medan di mana identitas dibentuk, kekuasaan dijalankan, dan makna diproduksi sekaligus dipersoalkan. Dalam dunia yang semakin dimediasi, diprediksi, dan dikendalikan oleh sistem komunikasi digital, posisi ini menjadikan sosiologi komunikasi bukan hanya relevan, tetapi krusial bagi pemahaman masa depan kehidupan sosial.

Pemikiran klasik seperti Ibnu Khaldun dan Durkheim menempatkan komunikasi—melalui narasi, ritual, dan simbol—sebagai dasar solidaritas sosial. *'Ashabiyyah* (Ibnu Khaldun) dan kesadaran kolektif (Durkheim) menunjukkan bahwa masyarakat bertahan bukan karena paksaan material, melainkan karena pengakuan simbolik dan komunikasi legitimatif (Ibn Khaldun, 1967; Durkheim, 1912).

Perkembangan modernitas, sebagaimana dianalisis Weber, membawa rasionalisasi komunikasi: bahasa kekuasaan, hukum, dan birokrasi menggantikan legitimasi tradisional. Namun, Weber juga menegaskan bahwa rasionalitas komunikasi tetap bergantung pada pengakuan makna oleh aktor sosial, bukan semata efisiensi teknis (Weber, 1978). Ini menandai awal problematika komunikasi modern: ketegangan antara makna dan sistem.

Arah penting sosiologi komunikasi masa depan terletak pada integrasi mikro–makro. Mead dan Goffman menunjukkan bahwa struktur sosial hanya hidup sejauh direproduksi dalam interaksi simbolik sehari-hari (Mead, 1934; Goffman, 1959). Identitas, peran, dan norma bukan entitas statis, melainkan hasil praktik komunikatif yang berulang.

Implikasinya, perubahan sosial tidak hanya terjadi melalui revolusi struktural besar, tetapi juga melalui pergeseran makna dalam komunikasi mikro. Di era digital, ketika interaksi mikro berlangsung secara masif melalui platform, tesis ini menjadi semakin relevan. Arah masa depan sosiologi komunikasi juga ditentukan oleh kemampuannya membaca kekuasaan. Bourdieu menunjukkan bahwa komunikasi tidak pernah netral; ia selalu terstruktur oleh distribusi modal simbolik yang timpang (Bourdieu, 1991). Tidak semua suara memiliki peluang yang sama untuk didengar, bahkan dalam ruang publik yang tampak terbuka.

Merujuk pada Pierre Bourdieu, pernyataan ini mengoreksi secara tegas asumsi normatif yang kerap hadir dalam studi komunikasi—bahwa komunikasi, terutama di ruang publik modern, bersifat setara, terbuka, dan demokratis. Bourdieu justru menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung dalam struktur sosial yang timpang, di mana distribusi modal simbolik menentukan siapa yang dapat berbicara, siapa yang didengar, dan siapa yang diabaikan (Bourdieu, 1991).

Konsep modal simbolik menjadi kunci untuk memahami mengapa komunikasi tidak pernah netral. Modal simbolik mencakup pengakuan sosial, kredibilitas, otoritas moral, dan legitimasi budaya yang dilekatkan pada aktor tertentu. Dalam praktik komunikasi, modal ini beroperasi sebagai pra-kondisi pengakuan: ujaran tidak dinilai semata berdasarkan isinya, tetapi berdasarkan siapa yang mengucapkannya dan dari posisi sosial apa. Dengan demikian, komunikasi selalu mengandung hierarki tersembunyi yang mengatur nilai ujaran sebelum makna dipertukarkan secara eksplisit.

Ketimpangan komunikasi tidak selalu hadir sebagai pembungkaman langsung, melainkan sebagai mekanisme seleksi simbolik yang halus. Banyak suara tidak dibungkam secara formal, tetapi tidak dianggap relevan, tidak kredibel, atau tidak layak diperhatikan. Inilah yang dimaksud Bourdieu sebagai bentuk kekerasan simbolik: dominasi yang diterima sebagai wajar karena tertanam dalam kategori persepsi dan penilaian sosial. Pada aspek ini, ruang publik yang "tampak terbuka" sering kali

menyembunyikan ketertutupan struktural yang bekerja melalui bahasa, gaya bicara, dan standar rasionalitas yang dilegitimasi.

Implikasi penting dari analisis ini adalah bahwa kesetaraan formal dalam komunikasi tidak identik dengan kesetaraan substantif. Akses untuk berbicara tidak menjamin akses untuk diakui. Bahkan dalam ruang publik modern—media massa, forum akademik, media sosial—ketimpangan modal simbolik tetap menentukan visibilitas dan daya pengaruh. Aktor dengan pendidikan tinggi, status profesional, atau afiliasi institusional kuat lebih mudah mendapatkan perhatian, sementara kelompok marginal harus bekerja jauh lebih keras untuk sekadar dianggap sah. Dengan demikian, komunikasi publik berfungsi sebagai mekanisme reproduksi ketimpangan sosial, bukan sekadar arena pertukaran gagasan.

Kerangka masa depan sosiologi komunikasi, alenia ini mengandung tuntutan metodologis dan normatif yang kuat. Secara metodologis, sosiologi komunikasi tidak cukup menganalisis arus pesan atau teknologi komunikasi, tetapi harus menelusuri struktur sosial yang membingkai komunikasi: siapa yang memiliki modal simbolik, bagaimana modal itu didistribusikan, dan bagaimana ia dikonversi menjadi kekuasaan komunikatif. Secara normatif, analisis Bourdieu menantang pendekatan idealis yang menganggap keterbukaan ruang publik sebagai bukti demokratisasi komunikasi.

Lebih jauh, relevansi pemikiran Bourdieu justru semakin meningkat di era digital. Media sosial sering dipersepsikan sebagai ruang egaliter yang memberi semua orang kesempatan berbicara. Namun, jika dibaca melalui lensa Bourdieu, platform digital justru memperlihatkan reproduksi dan bahkan intensifikasi modal simbolik: jumlah pengikut, verifikasi akun, algoritma visibilitas, dan reputasi digital berfungsi sebagai bentuk modal simbolik baru. Ketimpangan komunikasi tidak menghilang, tetapi bertransformasi secara teknologis.

Arah masa depan sosiologi komunikasi harus bersifat kritis terhadap ilusi netralitas dan keterbukaan komunikasi. Mengikuti Bourdieu, sosiologi komunikasi dituntut untuk membongkar bagaimana komunikasi berfungsi sebagai arena pertarungan

simbolik, di mana makna, legitimasi, dan kekuasaan diproduksi secara tidak setara. Tanpa perspektif ini, sosiologi komunikasi berisiko terjebak dalam deskripsi teknis atau optimisme normatif yang gagal membaca realitas ketimpangan sosial.

Membaca masa depan komunikasi berarti membaca masa depan kekuasaan simbolik. Sosiologi komunikasi yang relevan adalah sosiologi yang mampu menjelaskan bukan hanya bagaimana orang berkomunikasi, tetapi mengapa sebagian suara selalu terdengar lebih keras daripada yang lain, bahkan ketika semua tampak bebas berbicara.

Sebaliknya, Habermas menawarkan horizon normatif: komunikasi rasional dan etis sebagai dasar legitimasi demokratis (Habermas, 1984). Ketegangan antara Bourdieu dan Habermas justru menjadi motor teoretis bagi sosiologi komunikasi kontemporer: masa depan disiplin ini tidak dapat memilih antara deskripsi kritis atau ideal normatif, tetapi harus menggabungkan pembongkaran kekuasaan dengan pembelaan etika komunikasi publik.

Bagi Manuel Castells, sosiologi komunikasi memasuki fase baru: komunikasi tidak lagi terikat pada ruang sosial yang stabil, tetapi bergerak dalam arus global jaringan informasi (*space of flows*) (Castells, 1996). Kekuasaan menjadi relasional, bergantung pada konektivitas dan posisi dalam jaringan.

Lewat masyarakat jaringan, pertanyaan sosiologis bergeser dari: *apa yang dikomunikasikan*, menjadi: *siapa yang terhubung*, *siapa yang terlihat*, *siapa yang terdiskoneksi*. Arah masa depan sosiologi komunikasi dengan demikian menuntut analisis arsitektur jaringan, platform, dan algoritma, bukan hanya konten komunikasi.

Pergeseran paradigmatik paling menentukan dalam sosiologi komunikasi kontemporer. Dalam masyarakat jaringan (*network society*), fokus analisis tidak lagi memadai jika berhenti pada pertanyaan klasik tentang isi pesan, makna wacana, atau efek komunikasi, melainkan harus bergeser ke kondisi struktural yang memungkinkan atau membatasi komunikasi itu sendiri. Dengan kata lain, persoalan sosiologis utama bukan lagi *apa yang dikomunikasikan*, tetapi siapa yang terhubung, siapa yang

memperoleh visibilitas, dan siapa yang secara sistemik terdiskoneksi (Castells, 1996; 2009).

Pergeseran ini menandai perubahan ontologis dalam pemahaman komunikasi. Dalam masyarakat jaringan, komunikasi tidak berlangsung dalam ruang sosial yang netral dan stabil, melainkan dalam arsitektur jaringan yang secara aktif mengatur aliran informasi. Konektivitas menjadi sumber daya sosial utama. Aktor yang terhubung ke simpul strategis jaringan—platform besar, media dominan, akun berotoritas, atau infrastruktur digital—memiliki kapasitas komunikasi yang tidak sebanding dengan aktor yang berada di pinggiran jaringan. Dengan demikian, komunikasi tidak lagi sekadar relasi antar-subjek, tetapi relasi yang dimediasi oleh struktur teknologis yang timpang.

Pertanyaan "siapa yang terlihat" menjadi krusial karena visibilitas dalam masyarakat jaringan tidak bersifat alamiah atau meritokratis, melainkan dihasilkan melalui mekanisme platform dan algoritma. Algoritma menentukan apa yang muncul di linimasa, apa yang direkomendasikan, dan apa yang tenggelam. Pada aspek ini, visibilitas adalah bentuk kekuasaan simbolik baru, yang tidak sepenuhnya dapat dinegosiasikan secara diskursif. Aktor mungkin bebas berbicara, tetapi tidak bebas untuk terlihat. Ini mempertegas tesis Bourdieu bahwa akses berbicara tidak identik dengan akses untuk diakui—hanya saja kini dimediasi secara teknologis.

Lebih jauh, konsep diskonektivitas menunjukkan bentuk eksklusi sosial baru. Dalam masyarakat jaringan, kekuasaan tidak selalu bekerja melalui represi atau sensor eksplisit, tetapi melalui ketiadaan koneksi yang relevan. Aktor yang terdiskoneksi—baik karena keterbatasan infrastruktur, literasi digital, bahasa global, atau posisi algoritmik—tidak dibungkam, tetapi tidak masuk dalam arus komunikasi yang menentukan agenda dan makna sosial. Eksklusi ini bersifat struktural dan sering kali tidak disadari sebagai bentuk ketidakadilan, sehingga sulit dipolitisasi.

Implikasi teoretis dari pergeseran ini sangat besar bagi arah masa depan sosiologi komunikasi. Analisis yang hanya berfokus pada konten, wacana, atau pesan berisiko mengabaikan sumber

kekuasaan yang paling menentukan, yakni arsitektur komunikasi itu sendiri. Oleh karena itu, sosiologi komunikasi dituntut untuk mengembangkan analisis tentang: arsitektur jaringan (siapa mengontrol simpul dan arus), platform digital sebagai aktor sosial-ekonomi, algoritma sebagai mekanisme seleksi, prioritisasi, dan kontrol. Pendekatan ini menggeser sosiologi komunikasi dari sekadar *sosiologi pesan* menjadi sosiologi infrastruktur komunikasi.

Komunikasi tidak lagi dapat dipahami sebagai praktik yang sepenuhnya berada di tangan aktor manusia. Ia adalah praktik sosio-teknis, di mana keputusan teknologis—desain platform, logika algoritma, model bisnis—memiliki dampak langsung pada struktur peluang komunikasi. Ini menantang asumsi klasik tentang otonomi subjek komunikatif dan memaksa sosiologi komunikasi untuk berdialog dengan ilmu data, studi platform, dan ekonomi politik digital.

Masa depan sosiologi komunikasi bergantung pada kemampuannya membaca kekuasaan yang bekerja melalui konektivitas, visibilitas, dan pengaturan arus informasi. Pertanyaan sosiologis paling mendasar bukan lagi "apa yang dikatakan masyarakat", tetapi "siapa yang diberi kesempatan untuk hadir dalam komunikasi sosial yang bermakna". Dalam masyarakat jaringan, komunikasi adalah medan perjuangan struktural—dan sosiologi komunikasi yang relevan adalah sosiologi yang mampu membongkar arsitektur kekuasaan di balik aliran komunikasi digital.

Pergeseran paling radikal ditunjukkan oleh Shoshana Zuboff, yang memperlihatkan bahwa komunikasi digital kini direduksi menjadi data perilaku dan dijadikan bahan mentah akumulasi kapital dalam kapitalisme pengawasan (Zuboff, 2019). Komunikasi tidak lagi berfungsi utama sebagai pertukaran makna, tetapi sebagai input sistem prediksi dan kontrol perilaku.

Zuboff menunjukkan sebuah ruptur historis: komunikasi tidak lagi terutama dipahami sebagai praktik sosial bermakna, melainkan direduksi menjadi data perilaku yang siap diekstraksi, dianalisis, dan dimonetisasi dalam rezim kapitalisme pengawasan (Zuboff, 2019). Reduksi komunikasi menjadi data perilaku berarti

terjadinya perubahan ontologis terhadap status tindakan komunikatif. Dalam tradisi sosiologi komunikasi—mulai dari Mead hingga Habermas—komunikasi selalu diasumsikan melibatkan subjek yang bermakna, niat, dan relasi intersubjektif. Zuboff memperlihatkan bahwa dalam kapitalisme pengawasan, dimensi ini menjadi tidak relevan bagi sistem. Yang diperhitungkan bukan makna ujaran atau tujuan komunikasi, melainkan pola perilaku yang dapat diukur, dikorelasikan, dan diprediksi. Dengan demikian, komunikasi kehilangan karakter dialogisnya dan berubah menjadi sinyal mentah bagi mesin ekonomi-politik data.

Analisis Zuboff juga tajam karena ia menunjukkan bahwa data perilaku tersebut tidak sekadar dikumpulkan, tetapi dijadikan bahan mentah akumulasi kapital. Komunikasi—yang sebelumnya berada di luar relasi produksi langsung—kini dimasukkan ke dalam siklus ekonomi sebagai sumber nilai primer. Setiap klik, pencarian, jeda perhatian, atau interaksi simbolik menjadi input bagi produksi surplus prediksi. Pada aspek ini, komunikasi tidak lagi melayani kebutuhan sosial seperti pemahaman, solidaritas, atau deliberasi, tetapi melayani logika pasar prediktif yang bertujuan mengurangi ketidakpastian perilaku manusia.

Keunggulan analitis Zuboff terletak pada penunjukan bahwa kapitalisme pengawasan berbeda secara kualitatif dari kapitalisme media sebelumnya. Jika dalam industri budaya ala Adorno–Horkheimer komunikasi dimanipulasi melalui konten dan ideologi, maka dalam kapitalisme pengawasan komunikasi ditambang sebelum menjadi konten. Distorsi tidak terjadi pada pesan, tetapi pada kondisi ontologis komunikasi itu sendiri. Komunikasi direbut dari subjek sebelum ia berfungsi sebagai relasi sosial, dan dialihkan menjadi objek kalkulasi sistem.

Secara politik, reduksi komunikasi menjadi data perilaku membawa implikasi yang sangat serius. Ketika komunikasi dijadikan bahan mentah kapital, subjek kehilangan kedaulatan atas tindakannya sendiri. Data perilaku digunakan tidak hanya untuk memahami masa lalu, tetapi untuk mengintervensi dan membentuk masa depan tindakan. Inilah inti kapitalisme pengawasan: produksi kepastian perilaku demi keuntungan ekonomi dan stabilitas sistem.

Dalam kondisi ini, kebebasan komunikatif tidak dihapus secara represif, tetapi dilampaui secara struktural oleh mekanisme prediksi dan pengondisian pra-sadar.

Sudut pandang sosiologi komunikasi, analisis Zuboff memaksa pergeseran agenda riset dan teori. Pertanyaan kunci tidak lagi cukup berhenti pada *bagaimana pesan dimaknai* atau *bagaimana media memengaruhi publik*, melainkan harus diarahkan pada bagaimana komunikasi itu sendiri direkonseptualisasi sebagai sumber daya ekonomi dan instrumen kekuasaan. Ini menempatkan Zuboff sebagai pemikir yang mendorong sosiologi komunikasi keluar dari zona aman analisis simbolik menuju kritik ekonomi-politik atas infrastruktur komunikasi digital.

Kontribusi Zuboff bukan sekadar tambahan perspektif, melainkan perubahan paradigma. Ia menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak lagi dapat diasumsikan sebagai praktik sosial yang otonom, melainkan sebagai lokasi utama ekstraksi nilai dan kontrol sosial. Pada aspek ini, masa depan sosiologi komunikasi akan sangat ditentukan oleh kemampuannya merespons tantangan yang diajukan Zuboff: bagaimana mempertahankan komunikasi sebagai ruang makna, otonomi, dan kehidupan sosial yang bermartabat di tengah reduksinya menjadi data perilaku kapitalistik.

Kondisi ini menandai krisis ontologis komunikasi: komunikasi dikomodifikasi sebelum sempat berfungsi sebagai komunikasi. Dalam istilah Habermas, ini melampaui kolonisasi dunia-kehidupan; dalam istilah sosiologi komunikasi, ini adalah transformasi komunikasi menjadi infrastruktur kekuasaan prediktif.

Berdasarkan lintasan dari solidaritas sosial hingga masyarakat digital, arah masa depan sosiologi komunikasi menghadapi beberapa agenda utama: Pertama, Pergeseran dari etika pesan ke etika sistem komunikasi Fokus analisis harus mencakup algoritma, platform, dan ekonomi data (Zuboff, 2019; Van Dijck et al., 2018).

Kedua, Integrasi mikro–makro–teknologis Interaksi simbolik harus dianalisis bersama struktur jaringan global (Castells, 2009).

Ketiga, Pemulihan dimensi normatif komunikasi Tanpa horizon etis, kritik komunikasi akan jatuh pada sinisme struktural (Habermas, 1984). Keempat, Kontekstualisasi Global South. Teori komunikasi digital harus membaca ketimpangan global, kolonialisme data, dan aspek non-Barat (Couldry & Mejias, 2019). Arah masa depan sosiologi komunikasi menegaskan satu tesis utama: masa depan masyarakat adalah masa depan komunikasi.

Dari solidaritas sosial hingga masyarakat digital, komunikasi selalu menjadi medan tempat makna, kekuasaan, dan legitimasi diproduksi. Tantangan terbesar sosiologi komunikasi ke depan bukan hanya memahami teknologi baru, tetapi mempertahankan komunikasi sebagai praktik sosial yang bermakna, etis, dan membebaskan di tengah arus data, algoritma, dan kontrol prediktif.

Komunikasi bukan sekadar variabel sosial, melainkan arena konstitutif tempat masyarakat membentuk dirinya sendiri. Dalam setiap fase sejarah sosial, perubahan bentuk kekuasaan dan solidaritas selalu disertai oleh perubahan modus komunikasi yang dominan. Pada masyarakat awal dan tradisional, sebagaimana ditunjukkan oleh Ibnu Khaldun dan Durkheim, komunikasi bekerja melalui narasi bersama, simbol kehormatan, dan ritual kolektif yang memproduksi solidaritas sosial dan legitimasi kekuasaan. Pada aspek ini, komunikasi adalah sarana pembentukan *we-feeling*—kohesi yang memungkinkan keteraturan sosial. Kekuasaan bertahan sejauh ia dikomunikasikan sebagai sah dan bermakna, bukan semata karena kekuatan koersif (Ibn Khaldun, 1967; Durkheim, 1912).

Memasuki modernitas, komunikasi menjadi semakin rasional, terlembaga, dan terpolitisasi. Weber, Mead, dan Goffman menunjukkan bahwa legitimasi tidak lagi bersandar pada tradisi semata, tetapi pada makna yang diproduksi dan dikelola dalam interaksi simbolik dan institusi modern. Kekuasaan modern menuntut bahasa legitimasi, pengelolaan kesan, dan rasionalisasi komunikasi. Dengan demikian, komunikasi menjadi medan utama di mana kekuasaan harus dipertanggungjawabkan secara simbolik,

bukan hanya ditegakkan secara material (Weber, 1978; Mead, 1934; Goffman, 1959).

Pada masyarakat kontemporer, sebagaimana dianalisis Bourdieu, Habermas, dan Castells, medan komunikasi semakin kompleks dan konflikual. Komunikasi menjadi arena pertarungan simbolik yang timpang (Bourdieu), sekaligus prasyarat normatif legitimasi demokratis (Habermas), dan akhirnya terstruktur oleh jaringan global informasi (Castells). Pada tahap ini, komunikasi tidak hanya memproduksi makna, tetapi juga menentukan siapa yang dapat hadir, didengar, dan diakui dalam kehidupan sosial. Kekuasaan bekerja melalui visibilitas, konektivitas, dan kontrol arus informasi.

Tantangan terbesar sosiologi komunikasi ke depan tidak berhenti pada pemahaman teknologi baru. Inilah titik kritik terpentingnya. Analisis teknologi—platform, AI, big data—meskipun penting, tidak cukup jika tidak disertai pertahanan normatif terhadap hakikat komunikasi itu sendiri. Di sinilah relevansi pemikiran Shoshana Zuboff menjadi krusial. Ketika komunikasi direduksi menjadi data perilaku dan dijadikan bahan mentah kontrol prediktif, komunikasi kehilangan fungsi ontologisnya sebagai praktik sosial bermakna (Zuboff, 2019).

Arus data, algoritma, dan kontrol prediktif menciptakan situasi paradoksal: komunikasi semakin intensif secara teknis, tetapi semakin terdegradasi secara sosial. Individu terus berkomunikasi, tetapi; tanpa otonomi penuh atas makna tindakannya, tanpa simetri relasional, tanpa ruang reflektif yang aman dari pengawasan.

Komunikasi berisiko berubah dari ruang kebebasan dan pemahaman menjadi infrastruktur pengendalian perilaku pra-sadar. Kekuasaan tidak lagi terutama membentuk makna melalui diskursus, tetapi mengondisikan kemungkinan makna sebelum diskursus terjadi. Ini menandai pergeseran dari kekuasaan simbolik ke kekuasaan prediktif.

Sosiologi komunikasi masa depan harus berfungsi sebagai ilmu kritis-reflektif yang: membongkar relasi kekuasaan tersembunyi dalam arsitektur komunikasi digital, sekaligus

mempertahankan komunikasi sebagai fondasi kehidupan sosial yang bermartabat. Jika komunikasi kehilangan sifatnya sebagai praktik sosial yang bermakna, maka masyarakat kehilangan dasar ontologisnya sebagai masyarakat. Masa depan sosiologi komunikasi, oleh karena itu, bukan hanya tentang memahami dunia yang dimediasi teknologi, tetapi tentang mempertahankan kemungkinan kehidupan sosial yang bebas, reflektif, dan sah secara normatif di tengah rezim data dan prediksi.

Menggabungkan warisan klasik dan kritik kontemporer, sosiologi komunikasi memiliki peran strategis sebagai ilmu reflektif tentang kehidupan sosial yang semakin dimediasi, diukur, dan diprediksi.

DAFTAR PUSTAKA

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.

Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.

Durkheim, E. (1912). *The elementary forms of the religious life*. Free Press.

Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Anchor Books.

Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action, Vol. 1*. Beacon Press.

Ibn Khaldun. (1967). *The Muqaddimah* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press.

Mead, G. H. (1934). *Mind, self, and society*. University of Chicago Press.

Weber, M. (1978). *Economy and society*. University of California Press.

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs.

TENTANG PENULIS



Dr. Muhammad Yahya, M.Si

Dosen Tetap Yayasan Fisip Unismuh Makassar. Lahir di Kahu Bone, 5 Oktober 1965. Tamat SMAN 1 Sinjai 1984. S1 Ilmu Politik Fisip Unhas 1984. S2 Komunikasi Massa Unhas 2000 serta S3 Sosiologi Poltik UNM 2016. Awal meniti karier jadi dosen di Fisip Universitas Sawerigading Makassar 2007. Pernah jadi Dekan Fisip Universitas Sawerigading. Sejak 2019 pindah di Unismuh Makassar. Saat ini selaku anggota Senat Fisip Unismuh Makassar. Sebelum jadi dosen berkarier selaku wartawan di Harian Pedoman Rakyat Makassar. Aktif pada organisasi profesi dan kemasyarakatan. Ketua Biro Kominfo PGRI Sulsel serta Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Provinsi Sulsel



Dr. Ahdan Sinilele, S.Ag, S.Sos, M.Si

Dosen Dipekerjakan LLDIKTI IX di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra, Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI. Lahir di Tompe, 05-11-1966. Alumni S1 Syari;ah dan Peradilan IAIN Alauddin Makassar 1992. S1 Sosiologi Universitas Sawerigading 1996. S2 Sosiologi Unhas 2003. S3 Ilmu Sosial/ Sosiologi Universitas Airlangga 2012. Saat ini diberi amanah jadi Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi UMI. Sebelumnya pernah jadi Dekan Fisip Universitas Sawerigading Makassar. Mengampu mata kuliah, Sosiologi Komunikasi, Metode Penelitian Sosial, Komunikasi Pariwisata, Etika dan Filsafat Komunikasi, Etika Komunikasi.



Dr Asni Djamereng, M.Si

Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (FDK-UINAM). Lahir di Soppeng, tamat SMAN 200 Soppeng 1983. S1 Komunikasi Unhas 1991, S2 Ilmu Komunikasi PPs-Unhas 2003. Doktor ilmu manajemen PPs-UMI Makassar 2019. Ketua Prodi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (FDK-UINAM) periode 2019-2023. Dia juga aktif menulis artikel ilmiah pada jurnal bereputasi. Selain itu juga akti kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.



Dr Maemunah, S.Ag, M.Pd

Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Sosiologi FKIP Unismuh Makassar. Lahir di Takalar, 19 Februari 1969. S1 Bahasa dan Sastra Arab IAIN Alauddin Ujung Pandang 1994. S2 Pendidikan Sosiologi Pasasarjana UNM 2004. S3 Sosiologi Pascasarjana UNM 2018. Sebelum jadi dosen mengajar di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Salaka Takalar. Dosen di Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO Muhammadiyah Makassar. STIKES Amanah Makassar. Poltekkes Muhammadiyah Makassar. Aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga menulis artikel jurnal ilmiah pada jurnal ilmiah bereputasi.



Dr. I Ketut Yakobus, S.Th. M.Si

Lahir di Desa Kilo Trans Poso Pesisir Utara Poso, 12 Januari 1974, anak ke delapan dari sembilan bersaudara. S1 Sekolah Tinggi Theologia Gereja Kristen Sulawesi Tengah Tentena 1998. S2 Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, minat bakat Manajemen Sumberdaya, PPs Universitas Sam Ratulangi Manado, 2011. Alumni S3 Universitas Negeri Makassar, Prodi Studi Sosiologi 2019. Dia aktif penelitian dan

menulis artikel terpublikasi pada jurnal Nasional maupun International dan juga menulis buku. Buku pertama "Hibridisasi Wacana: Strategi Penyelesaian Konflik", ISBN:978-623-7729-45-7. Book Chapter: Teori Dasar Pengambilan Keputusan; Pengantar Manajemen (Optimalisasi Kinerja Organisasi), 2023. Buku Referensi: Budaya Sintuwu Maroso dan Rekonsiliasi Konflik Poso; Feniks Muda Sejahtera, 2023. Email: ketut.yakobus@gmail.com.



Dr Sudirman, S.Pd. M.Si

Dosen Tetap Yayasan FKIP Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI). Lahir di Cennoe Soppeng 31 Desember 1970. Menjalani masa kecil di Soppeng, tamat SDN 83 Cennoe, Soppeng (1984). SMP Muhammadiyah Belo Soppeng (1989). SMAN. 2 Soppeng (1990) S1. PMP PIPS FKIP UVRI (1994). S2. SosiologiUnhas (2001). S3 Sosiologi UNM (2015). Menulis disertasi, berjudul, Perilaku Politik Elit (Study Fenomenologi Elit Adat pada Pilkada Kabupaten Soppeng). Sebelumnya, telah menulis beberapa buku di antaranya; Membaca Perubahan Sosial dan Peradaban 2021. Budaya Politik Politik Budaya 2024. Oemar Bakri 2025. Sosiologi Masyarakat Desa 2025. Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota 2025.



Dr. Ahmad Al Yakin, S.Ag, M.Pd

Dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), FKIP Universitas Al Asyariah Mandar. Lahir di Polewali, 1 Maret 1976. Sarjana IAIN Alauddin Makassar (Hukum Syariah), Magister Pendidikan IPS di Universitas Negeri Makassar. Doktor Sosiologi PPs UNM. Saat ini, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNASMAN. Pengalaman kepemimpinan Kaprodi PPKn, Wakil Dekan FKIP, Direktur LPPM, Kepala Biro Akademik dan Sistem Informasi. Bidang keahlian dan risetnya mencakup pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, Komukasi Politik, sosiologi pendidikan, digital citizenship, serta integrasi kecerdasan buatan

dalam pembelajaran. Aktif publikasi ilmiah nasional dan internasional terindeks serta terlibat berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan organisasi profesi akademik.



Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si

Dosen Tetap Yayasan FISIP Universitas Sawerigading (Unsa) Makassar. Saat ini menjabat Wakil Rektor III Unsa Makassar. Lahir di Maros 15 April 1983. Alumni S1. Sosiologi, Universitas Sawerigading Makassar (2007). S2. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin (2010). S3. Sosiologi, Universitas Negeri Makassar (2017). Dosen Prodi Sosiologi Fisipol Universitas Sawerigading Makassar (2012- sekarang. Staf Ahli Perwakilan Kementerian Pertahanan Prov. Sulsel (2017-2019). Tim Ahli Penyusun Draft Ranperda Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda Prov. Sulsel (2019-2021). Dekan Fisipol Universitas Sawerigading (2020-2024). Narasumber Radio Republik Indonesia (RRI) (2021-sekarang). Asesor Internal BKD Universitas Sawerigading Makassar, Universitas Kristen Tentena Palu, Universitas Teknologi Sulawesi.



Dr. Silahuddin Genda, S.IP. M.Si

Dosen Tetap Yayasan Universitas Fajar Makassar**.** Seorang jurnalis senior dan akademisi bidang Ilmu Komunikasi dikenal aktif dalam dunia media dan pendidikan. Dia berkiprah di lingkungan PT Media Fajar Group, sekaligus berkontribusi penguatan literasi komunikasi melalui aktivitas akademik dan pengajaran. Dia fokus pada pengembangan kajian komunikasi, media, dan dinamika informasi publik. Dia merupakan Doktor Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Memperkuat kapasitas keilmuan dan perannya dalam membangun tradisi riset serta pengabdian kepada masyarakat. Lewat pengalaman panjang di jurnalistik, dia juga aktif dalam berbagai forum profesional dan diskusi publik.